SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
b. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juncto Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan peraturan bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2018.

Pasal 3

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 Mei 2017

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 30 Mei 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2018 merupakan pelaksanaan 5 (lima) tahun ke-3 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan pelaksanaan tahun ke-3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Bagi Perangkat Daerah, RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018.

Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD Tahun 2018 merujuk pada dokumen–dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 terutama dilihat dari keterkaitan kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2018. Penetapan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2018 berorientasi pada arah pembangunan yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan yaitu penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses *bottom-up* dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mengingat:

1. secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Bupati untuk disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintah di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
4. secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD berisi rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa rencana kerja, program dan kegiatan dalam RKPD harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran. Meskipun demikian, ketentuan dalam peraturan perundangan di atas tetap memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada daerah untuk menciptakan kemandirian dalam rangka membangun daerahnya dengan berpijak pada prinsip-prinsip partisipasi masyarakat, pemerataan

yang berkeadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.

Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Kebumen sebagai modal pelaksanaan pembangunan daerah, menuntut dilakukannya proses penyatuan persepsi dan aspirasi dalam penentuan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah, yang berorientasi terhadap upaya optimalisasi pemenuhan kebutuhan riil masyarakat. Melalui hal tersebut, diharapkan dapat teridentifikasi isu-isu strategis, permasalahan mendasar, prioritas program dan kegiatan, serta fokus pembangunan yang perlu dilakukan secara bertahap dalam upaya pencapaian visi dan misi daerah.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat Spesifik (*Specific*), Terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Achievable*), memperhatikan ketersediaan sumber daya (*Resources Availability*), dan dapat dilaksanakan tepat waktu (*Time*). Di samping itu, nilai keberkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral dan komprehensif. RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2018 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasannya. Sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, RKPD diharapkan dapat memberikan arah yang tepat, akurat dan benar-benar menopang kebutuhan pembangunan di tengah terbatasnya kemampuan anggaran Daerah.

B. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2018 dilakukan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

C. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antar dokumen perencanaan digambarkan dalam Gambar 1.1 di bawah ini:

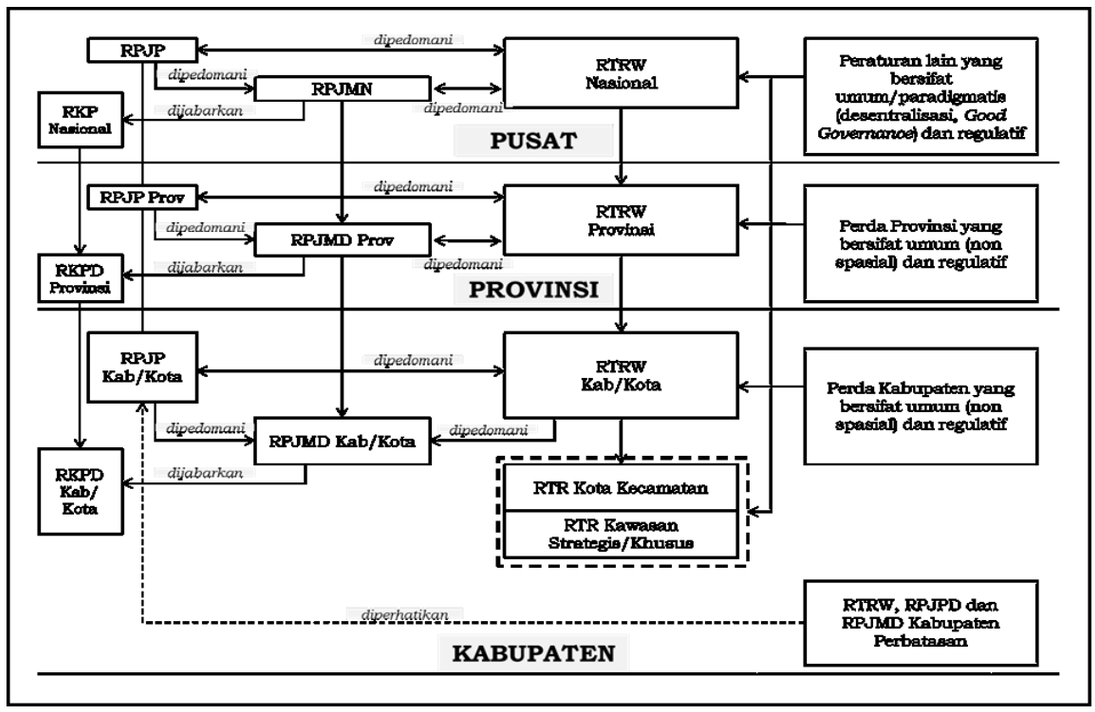

Gambar 1.1
Hubungan Antardokumen Perencanaan
Setiap Jenjang dan Tingkatan Pemerintahan

Sumber : Anonim

Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2018 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2018 tersebut dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RKPD Tahun 2018 merupakan penjabaran visi dan misi RPJMD Tahun 2016-2021 serta berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025.
2. RKPD Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.
3. RKPD Tahun 2018 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2011-2031.
4. RKPD Tahun 2018 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2018. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja PD.

5. RKPD Tahun 2018 menjadi pedoman/dasar Penyusunan KU APBD dan PPAS yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2018.

D. Sistematika Dokumen

Dokumen RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2018 disusun dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang meliputi:

Bab I. Pendahuluan

Memuat gambaran umum penyusunan RKPD. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab di antaranya:

A. Latar Belakang
   Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra PD, Renja PD serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD.
B. Dasar Hukum Penyusunan
   Memberikan uraian ringkas tentang peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait penyusunan RKPD.
C. Hubungan Antar Dokumen
   Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan.
D. Sistematika Dokumen RKPD
   Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.
E. Maksud dan Tujuan
   Berisi uraian ringkas tentang maksud, tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD.

Bab II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

A. Gambaran Umum Kondisi Daerah
   Bagian ini menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
B. Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah
   Menguraikan rumusan umum permasalahan pembangunan daerah yaitu isu strategis permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas, fungsi Perangkat Daerah.

Bab III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan perekonomian daerah sesuai visi dan misi Bupati tahun 2016-2021.

B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Mengemukakan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan untuk mencapai visi dan misi RPJMD Tahun 2016-2021, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah, regional dan nasional, serta rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan.

Bab V. Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan untuk mencapai visi dan misi RPJMD tahun 2016-2021.

Bab VI. Penutup
Memuat kaidah pelaksanaan dan penegasan dalam menerapkan RKPD serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan pelaku pembangunan lainnya.

E. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPD Tahun 2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan pelaksanaan dan penjabaran dari visi dan misi RPJMD Tahun 2016-2021 serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan RKPD tahun 2018 antara lain:

1. memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2018;
2. memberikan kerangka operasional dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2018;
3. menciptakan sinergi program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar kewenangan urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan;
4. mewujudkan efisiensi dan efektivitas sumber daya nasional dan daerah dalam rangka optimalisasi hasil pembangunan daerah;

5. menjadi acuan Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2018; dan
6. menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

A. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Sejarah Kabupaten Kebumen berawal dari kedatangan bangsawan ulama dari Kerajaan Mataram bernama Kyai Pangeran Bumidirjo di Panjer pada tahun 1670. Berdasarkan bukti-bukti sejarah Kebumen berasal dari kata Bumi, nama sebutan bagi Kyai Pangeran Bumidirjo, mendapat awalan ke dan akhiran an yang menyatakan tempat. Sampai akhirnya ditetapkan Surat Keputusan Gubernur Jendral De Jonge Nomor 3 tertanggal 31 Desember 1935 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1936 dan sampai saat ini tidak berubah.

Secara umum, Kabupaten Kebumen merupakan daerah yang terus berkembang dan sangat dinamis, dengan dinamika pembangunan yang terjadi di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya, yang mendorong perkembangan pada setiap sektor kehidupan masyarakatnya. Gambaran umum kondisi Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

1. Aspek Geografis

a. Letak, Batas dan Luas Wilayah

Kabupaten Kebumen merupakan Daerah yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas wilayah antara lain:

1) Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
2) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Banyumas;
3) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo; dan
4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Purworejo.

Kabupaten Kebumen dalam konteks regional memiliki posisi yang strategis karena merupakan simpul penghubung antara Jawa Timur dan Jawa Barat dan memanjang di pulau Jawa bagian selatan, sehingga Kabupaten Kebumen menjadi penghubung kota-kota besar yang menjadi kawasan pusat pertumbuhan baik tingkat regional maupun Nasional.

Secara astronomis, Kabupaten Kebumen terletak pada 7°27'-7°50’ Lintang Selatan dan 109°22'-109°50' Bujur Timur. Bagian selatan Kabupaten Kebumen merupakan dataran rendah, sedang pada bagian utara berupa pegunungan, yang merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Serayu.Di selatan daerah Gombong, terdapat rangkaian pegunungan kapur, yang membujur hingga pantai selatan. Daerah ini terdapat sejumlah gua dengan stalagtit dan stalagmit.

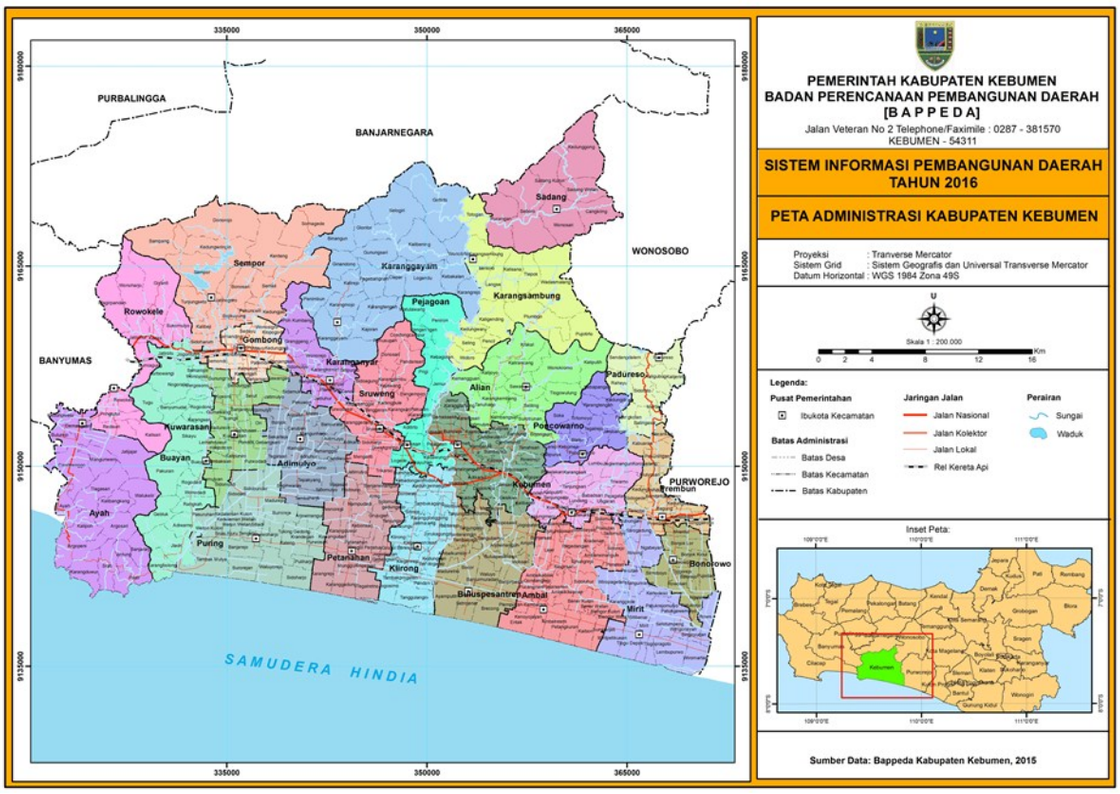

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kabupaten Kebumen

Sumber: Bap3da, 2017

Secara administratif Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 kecamatan, yang mencakup sejumlah 449 desa dan 11 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Kebumen sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 kilometer persegi (lihat gambar 2,1). Kondisi wilayah Kebupaten Kebumen sebagian besar adalah dataran rendah dan sebagian lainnya berupa perbukitan dan wilayah pantai.

b. Topografi

Dilihat dari kondisi/kawasan, Kabupaten Kebumen secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) klaster wilayah, yaitu wilayah pegunungan yang terletak di bagian utara wilayah, wilayah dataran rendah yang terletak di bagian tengah, serta wilayah pantai yang terletak di bagian selatan. Ketinggiannya berkisar antara 0-997,5 meter di atas permukaan laut. Kemiringan tanahnya dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) tingkatan, seperti terlihat dalam gambar berikut:

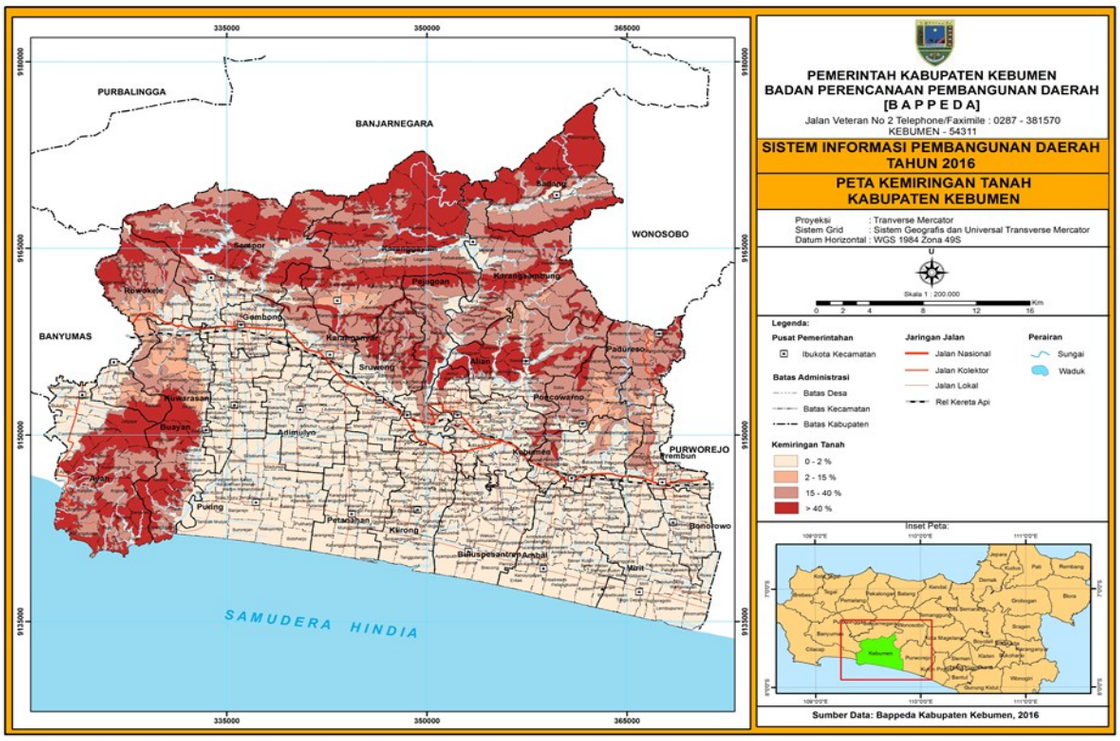

Gambar 2.2
Topografi Kabupaten Kebumen

Sumber: Bap3da, 2017

c. Hidrogeologi

Kabupaten Kebumen di bagian selatan, sebagian besar tersusun oleh dataran rendah dan karst mempunyai potensi sumber daya air tanah dengan produktivitas tinggi-sedang. Namun pada sebagian wilayah di bagian utara yang berupa rangkaian pegunungan-perbukitan dengan litologi batuan bersifat tufaan yang potensi sumber daya air tanahnya secara umum rendah. Pada daerah karst ketersediaan air, baik air tanah maupun air permukaan pada umumnya cukup baik (sedang), namun jumlah total kandungannya, posisi reservoir serta kualitas air belum teridentifikasi dengan jelas. Di samping itu pada musim kemarau jumlah airnya sangat terbatas. Sedang untuk daerah-daerah yang rawan kekeringan seperti daerah sekitar bumi perkemahan Desa Widoro Kecamatan Karangsambung serta daerah Kecamatan Padureso, pada musim penghujan keberadaan airnya cukup baik, namun pada musim kemarau sangat kekurangan air.

d. Klimatologi

Kabupaten Kebumen memiliki dua musim yaitu penghujan dan kemarau. Musim hujan terjadi bulan Desember-Maret, sedangkan musim kemarau pada bulan April-Juli. Curah hujan rata-rata sepanjang Tahun 2015 sebesar 3.229 milimeter pertahun, hari hujan tahunan sebesar 140 hari, temperatur udara berada pada kisaran 17-35^{0}C. Kelembaban udara rata-rata 79,5% dan kecepatan angin rata-rata 3,13 knot.

e. Penggunaan Lahan

Kabupaten Kebumen bercorak agraris dengan penggunaan lahan yang dominan sebagai lahan persawahan, baik sebagai sawah irigasi teknis maupun tadah hujan. Dari luas wilayah Kabupaten Kebumen, pada tahun 2015 tercatat 39.748 hektar atau sekitar 31,03% adalah lahan sawah dan 88.363,50 hektar atau 68,97% adalah lahan kering. Menurut sistem irigasinya, sebagian besar lahan sawah beririgasi teknis (50,34%) dan hampir seluruhnya dapat ditanami dua kali dalam setahun, beririgasi setengah teknis (9,23%), beririgasi sederhana (5,77%), beririgasi desa (2,65%) dan sebagian berupa sawah tadah hujan dan pasang surut (32,02%).

Penggunaan lahan kering di Kabupaten Kebumen mencapai 88.363,50 hektar, sebagian untuk pertanian seluas 42.799,50 hektar dan bukan lahan pertanian mencapai 45.564,00 hektar. Lahan untuk pertanian kering tersebut sebagian besar untuk tegalan/kebun mencapai 27.629,00 hektar. Sedangkan lahan kering bukan untuk pertanian sebagian besar untuk rumah/bangunan dan lahan sekitarnya seluas 26.021,00 hektar dan berupa hutan negara seluas 16.861,00 hektar.

f. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan dokumen RTRW Tahun 2011-2031, pengembangan Kabupaten Kebumen telah direncanakan untuk menjadi beberapa struktur ruang wilayah. Rencana struktur ruang tersebut meliputi sistem pusat kegiatan, jaringan prasarana wilayah kabupaten. Sistem pusat kegiatan meliputi sistem perkotaan dan sistem perdesaan.

Sistem perkotaan dibagi menjadi beberapa pusat, yaitu: (i) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Perkotaan Kebumen, (ii) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Perkotaan Gombong, Karanganyar, dan Prembun, dan (iii) Pusat Pengembangan Kawasan (PPK), yang meliputi Perkotaan Ayah, Puring, Petanahan, Sruweng, Ambal, Kutowinangun, Karangsambung, Padureso, Rowokele, Buayan, Klirong, Buluspesantren, Mirit, Bonorowo, Pejagoan, Alian, Poncowarno, Adimulyo, Kuwarasan, Sempor, Karanggayam, dan Sadang.

Sistem perdesaan dibagi menjadi Pusat Pelayanan Antar Desa, Pusat Pelayanan Setiap Desa, dan Pusat Pelayanan pada Setiap Dusun atau Kelompok Permukiman. Sistem perdesaan dikembangkan dengan membentuk Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). PPL yang direncanakan dikembangkan meliputi Desa Giyanti, Purbowangi, Tanggulangin, Rantewringin, Buluspesantren, Tlogopragoto, Bonorowo, Peniron, Jatimulyo, Poncowarno, Adimulyo, Kalipurwo, Jatinegara, Pagebangan, dan Desa Sadangkulon.

Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten Kebumen dibagi menjadi sistem prasarana utama dan prasarana lainnya. Sistem Jaringan Prasarana wilayah Kabupaten dibentuk oleh sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sistem prasarana utama berupa sistem jaringan transportasi yang meliputi jaringan transportasi darat dan jaringan perkeretaapian. Jaringan transportasi darat meliputi jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan, dan jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan.

Jaringan jalan dibagi menjadi jaringan jalan bebas hambatan, jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan jaringan jalan kabupaten. Jaringan jalan bebas hambatan meliputi jalan Ciamis-Cilacap-Yogyakarta. Jaringan jalan nasional meliputi ruas Jaringan Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah yang berupa jalan arteri primer sebagai jalan strategis nasional; ruas jalan perbatasan Jawa Barat-Cilacap-Kebumen-Perbatasan Yogyakarta; ruas jalan batas Banyumas Tengah-Kebumen dengan panjang ruas kurang lebih 23,895 km; ruas jalan lingkar selatan Kebumen dengan panjang ruas kurang lebih 9,108 km; ruas jalan batas Kota Kebumen-Prembun dengan panjang ruas kurang lebih 12,682 km; ruas jalan menuju Purworejo dengan panjang ruas kurang lebih 4,224 km; dan ruas jalan Prembun-Kutoarjo dengan panjang ruas kurang lebih 12,696 km.

Jaringan jalan provinsi meliputi: Kebumen-Karangsambung-Banjarnegara; Prembun-Wadaslintang-Wonosobo; Gombong-Sempor-Banjarnegara. Sedangkan jaringan jalan kabupaten merupakan jalan penghubung antar ibu kota kecamatan, meliputi: ruas jalan Kebumen-Petanahan; ruas jalan Prembun-Kebumen-Gombong; ruas jalan Kebumen-Wonosobo melalui Prembun-Padureso; ruas jalan Kebumen-Banjarnegara melalui Gombong-Sempor; ruas jalan Kebumen-Karangsambung-Sadang dan Karangsambung-Girikerto sebagai akses ke Banjarnegara dan Wonosobo; ruas jalan Karang-anyar-Karanggayam-Pagebangan; ruas jalan Gunungsari-Selogiri-Banjarnegara; dan ruas jalan Prembun-Bonorowo-Mirit.

Rencana jaringan perkeretaapian meliputi: jalur Solo-Bandung/Jakarta; dan jalur Solo-Yogyakarta-Kutoarjo-Kroya melalui Kecamatan Prembun, Kutowinangun, Kebumen, Pejagoan, Sruweng, Karanganyar, Gombong, dan Rowokele. Pengembangan jaringan perkeretaapian ini akan memperlancar mobilitas penduduk serta distribusi barang dan jasa dari dan ke Kabupaten Kebumen.

Selain sistem prasarana utama juga akan dikembangkan sistem prasarana lainnya. Sistem prasarana lainnya meliputi:

1) Rencana sistem jaringan prasarana energi, pembangunan ini mencakup prasarana jaringan energi bahan bakar minyak dan gas; pembangkit listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik;

2) Rencana sistem jaringan telekomunikasi, pembangunan ini mencakup jaringan telekomunikasi tetap berupa jaringan kabel telepon dan nirkabel dan jaringan telekomunikasi bergerak berupa satelit;
3) Rencana sistem jaringan prasarana sumber daya air, pembangunan ini mencakup wilayah sungai lintas kabupaten; wilayah sungai kabupaten; jaringan irigasi; cekungan air tanah; jaringan air baku untuk air bersih; dan sistem pengendali banjir;
4) Rencana sistem jaringan prasarana lingkungan, pembangunan ini mencakup sistem drainase serta jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
5) Rencana sistem pengelolaan lingkungan, pembangunan ini mencakup pembangunan sistem jaringan persampahan; sistem jaringan prasarana sanitasi; sistem pengelolaan limbah; dan sistem penanganan limbah di perkotaan dan di wilayah pengembangan industri.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Kebumen terdiri dari rencana kawasan lindung dan rencana kawasan budidaya. Rencana pengembangan kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung; kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; kawasan suaka alam dan cagar budaya; kawasan lindung geologi; kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung lainnya.

Kawasan hutan lindung meliputi wilayah Kecamatan Karangsambung, Karanggayam, Sempor, Rowokele, Pejagoan, Sruweng, Buayan, dan Ayah. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi kawasan resapan air dan kawasan lindung di luar kawasan hutan lindung yang mempunyai kriteria fisiografi seperti hutan lindung, kecamatan yang termasuk dalam kategori ini adalah Sadang, Rowokele, Sempor, Karangsambung, Padureso, Rowokele, Buayan, Ayah, dan Poncowarno, sedangkan wilayah di luar kawasan hutan lindung antara lain Kecamatan Alian, Ayah, Buayan, Gombong, Karanganyar, Karangsambung, Karanggayam, Kebumen, Padureso, Pejagoan, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, dan Sruweng.

Kawasan perlindungan setempat meliputi Kawasan Sekitar Mata Air yaitu di Kecamatan Ayah, Rowokele, dan Buayan. Kawasan Sempadan Sungai meliputi sempadan dengan luas 2.506 hektar beserta anak sungainya meliputi Sungai Luk Ulo, Sungai Ijo, Sungai Telomoyo, dan Sungai Mawar. Kawasan sempadan pantai meliputi sempadan dengan jarak 100 meter dari titik tertinggi yatu membentang dari Pantai Ayah di Kecamatan Ayah ke arah timur Kecamatan Mirit berbatasan dengan Kabupaten Purworejo. Kawasan sempadan danau atau waduk berupa kawasan sabuk hijau sepanjang perairan dengan jarak 50-100 meter dari titik pasang tertinggi seluas kurang lebih 245 hektar yang berada di Waduk Wadaslintang Kecamatan Padureso dan Waduk Sempor Kecamatan Sempor. RTH perkotaan meliputi ibukota kecamatan

dan kawasan perkotaan dengan luas kurang lebih 4.478 hektar atau sekitar 46,53 persen dari luas permukiman yang meliputi: RTH publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai dan pantai dengan proporsi paling sedikit 20 persen dan RTH privat yaitu kebun atau halaman rumah atau gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan dengan proporsi 10 persen.

Kawasan suaka alam dan cagar budaya terdiri atas kawasan pantai berhutan bakau dan kawasan cagar budaya. Kawasan pantai berhutan bakau berada di sebagian kawasan pesisir Kecamatan Ayah dan direncanakan pengembangannya di muara Sungai Wawar di Kecamatan Mirit dan muara Sungai Luk Ulo di Kecamatan Klirong. Kawasan cagar budaya meliputi:

1) Benteng Van Der Wijck di Kelurahan Gombong
2) Benteng Jepang di Desa Argopeni Kecamatan Ayah
3) Masjid Soko Tunggal di Desa Sedayu Kecamatan Sempor
4) Candi Lingga dan Yoni di Desa Sumberadi di Kecamatan Kebumen
5) Goa Menganti di Desa Karangduwur Kecamatan Ayah
6) Situs Makam Mbah Lancing di Desa Tlogodepok Kecamatan Mirit
7) Situs Makam Mbah Somalangu di Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen
8) Situs Makam Mbah Untung Suropati di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam
9) Situs Makam Mbah Agung di Desa Kajoran Kecamatan Karanggayam
10) Situs Makam Mbah Pako di Desa Wonotirto Kecamatan Karanggayam
11) Situs Makam Mbah Pagerjawa di Desa Kalibening Kecamatan Karanggayam
12) Pesanggrahan Bulupitu di Desa Tunjungseto Kecamatan Kutowinangun
13) Pesanggrahan Pandan Kuning di Desa Karanggadung Kecamatan Petanahan
14) Pesanggrahan Karangbolong di Desa Karangbolong Kecamatan Buayan.

Kawasan lindung geologi Kabupaten Kebumen meliputi: kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung; Kawasan Bentang Alam Karst; dan Kawasan imbuhan air tanah. Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung seluas kurang lebih 18.340 ha (delapan belas ribu tiga ratus empat puluh hektar), meliputi: (i) Kecamatan Karangsambung; (ii) Kecamatan Karanggayam; (iii) Kecamatan Sadang; (iv) Kecamatan Pejagoan; dan (v) Kecamatan Alian.

Kawasan Bentang Alam Karst meliputi wilayah Kecamatan Ayah, Rowokele dan Buayan seluas kurang lebih 4.894 ha (empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat hektar). Sedangkan Kawasan Imbuhan Air Tanah meliputi Cekungan Air Tanah Kebumen-Purworejo dengan luas kurang lebih 1.127 km² (seribu seratus dua puluh tujuh kilometer persegi), Cekungan Air Tanah Banyumudal dan Cekungan Air Tanah Kroya.

Selain itu, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 ditetapkan kawasan strategis wilayah Kabupaten sebagai upaya untuk mendukung kesejahteraan wilayah serta keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan dalam penataan ruang. Kawasan strategis adalah bagian wilayah Kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau kelestarian lingkungan. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis Nasional di wilayah Kabupaten Kebumen meliputi:

1) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan keamanan. Kawasan ini meliputi:
   a) Markas Komando Distrik Militer 0709 Kebumen;
   b) Komando Rayon Militer;
   c) Polisi Resor;
   d) Polisi Sektor;
   e) Sekolah Calon Tamtama;
   f) Detasemen Kesehatan TNI;
   g) Daerah latihan TNI;
   h) Daerah latihan dan uji coba TNI;
   i) Lapangan uji coba senjata; dan
   j) Pos TNI Angkatan Laut.
2) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan ini meliputi:
   a) Kawasan Geologi Karangsambung; dan
   b) Kawasan DAS Serayu-Bogowonto
3) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Kawasan ini meliputi Jaringan Jalan Lintas Selatan sebagai Jalan Strategis Nasional.

Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Kawasan strategis Provinsi di wilayah Kabupaten Kebumen meliputi:

1) Kawasan Perkotaan Gombong-Karanganyar-Kebumen dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
2) Kawasan Bentang Alam Karst dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
3) Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.

Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan Strategis Kabupaten, meliputi:

1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Kawasan ini meliputi:
   a) Kawasan ekonomi cepat tumbuh Prembun-Kutowinangun-Kebumen-Sruweng-Karanganyar-Gombong;
   b) Kawasan pesisir Ayah;
   c) Kawasan Petanahan;
   d) Kawasan Strategis Lahan Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Puring, Buayan, Sadang, Ayah, Karangsambung, Prembun, Padureso, Petanahan, Rowokele, Sempor, dan Karanggayam;
   e) Kawasan perbatasan Rowokele dan Mirit;
   f) Kawasan industri genteng Pejagoan; dan
   g) Kawasan pelestarian sarang burung walet di Kecamatan Ayah dan Buayan.
2) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya. Kawasan ini meliputi:
   a) Benteng Van Der Wijck di Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong;
   b) Benteng Jepang di Desa Argopeni Kecamatan Ayah;
   c) Masjid Soko Tunggal di Desa Sedayu Kecamatan Sempor; dan
   d) Candi Lingga dan Yoni di Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen.
3) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan ini meliputi:
   a) Hutan bakau di sekitar muara Sungai Ijo dan muara Sungai Telomoyo; dan
   b) Kawasan hutan lindung di sekitar Waduk Sempor dan Waduk Wadaslintang.

4) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi, meliputi:
   a) Kawasan Waduk Sempor; dan
   b) Kawasan Waduk Wadaslintang.

g. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu daerah rawan bencana di Provinsi Jawa Tengah, yaitu rawan longsor, rawan banjir, rawan kekeringan atau rawan air bersih dan rawan tsunami. Ada satu kecamatan yaitu Kecamatan Ayah yang merupakan daerah rawan 4 jenis bencana tersebut. Daerah rawan bencana tanah longsor terdiri dari 116 desa di 16 kecamatan, rawan bencana banjir 108 desa di 15 kecamatan, serta daerah rawan kekeringan atau rawan air bersih di 83 desa di 16 kecamatan. Sedangkan daerah yang berpotensi tsunami ada di 52 desa di 12 kecamatan.

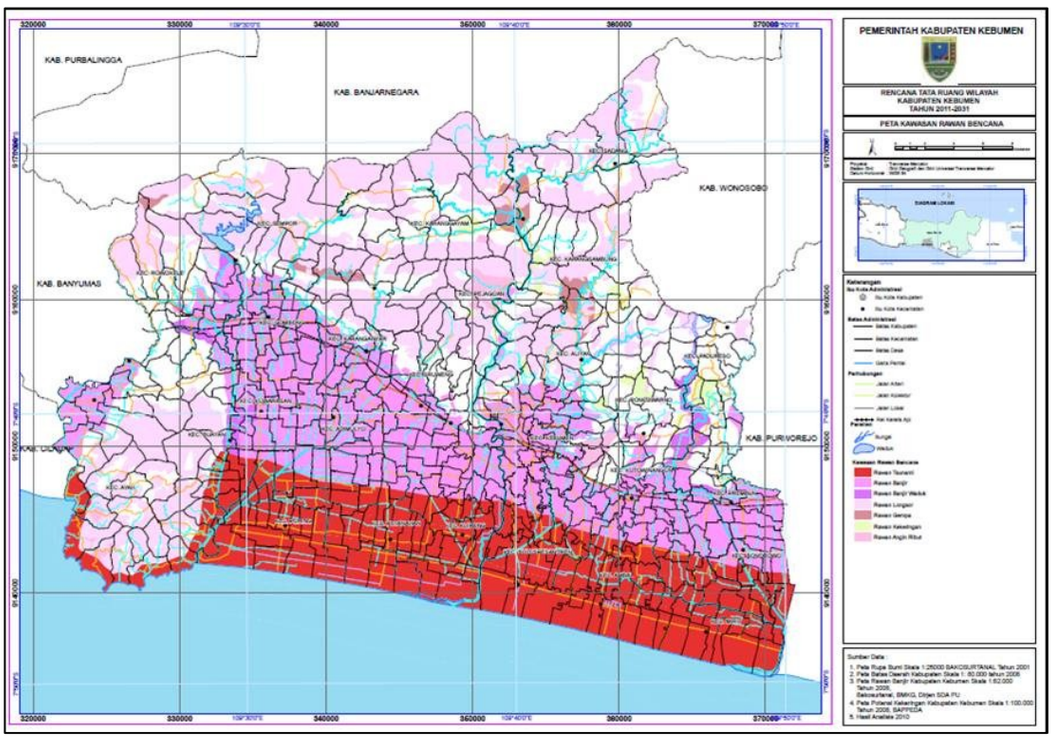

Gambar 2.3
Peta Kawasan Bencana Kabupaten Kebumen
Sumber: RTRW Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031

2. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2016 tercatat sebanyak 1.188.622 jiwa, tumbuh sebesar 0,54% dari tahun sebelumnya. Jumlah rumah tangga sebanyak 322.695 rumah tangga, sehingga rata-rata jumlah jiwa per rumah tangga sebesar 4 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Kebumen sebesar 928 jiwa/km², dengan Kecamatan Kebumen merupakan daerah terpadat penduduknya dengan kepadatan 2.896 jiwa/km² dan Kecamatan Sadang merupakan daerah terjarang penduduknya dengan kepadatan 338 jiwa/km².

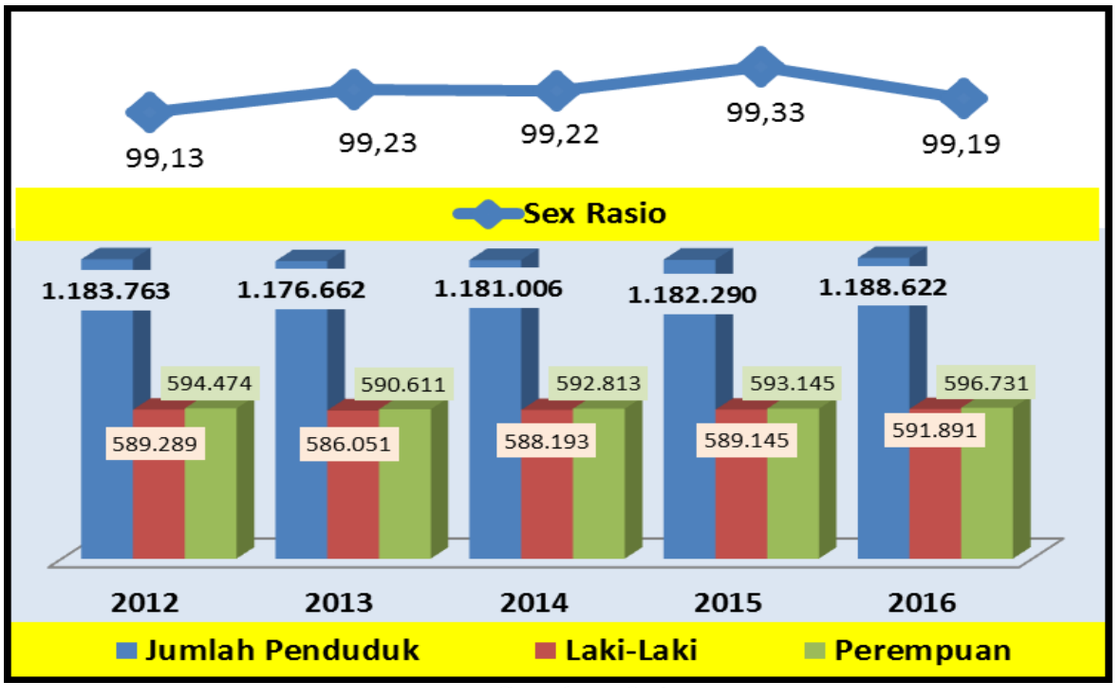

Gambar 2.4
Pertumbuhan dan Sex Rasio Penduduk Kabupaten Kebumen
Tahun 2012-2016
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 (data diolah)

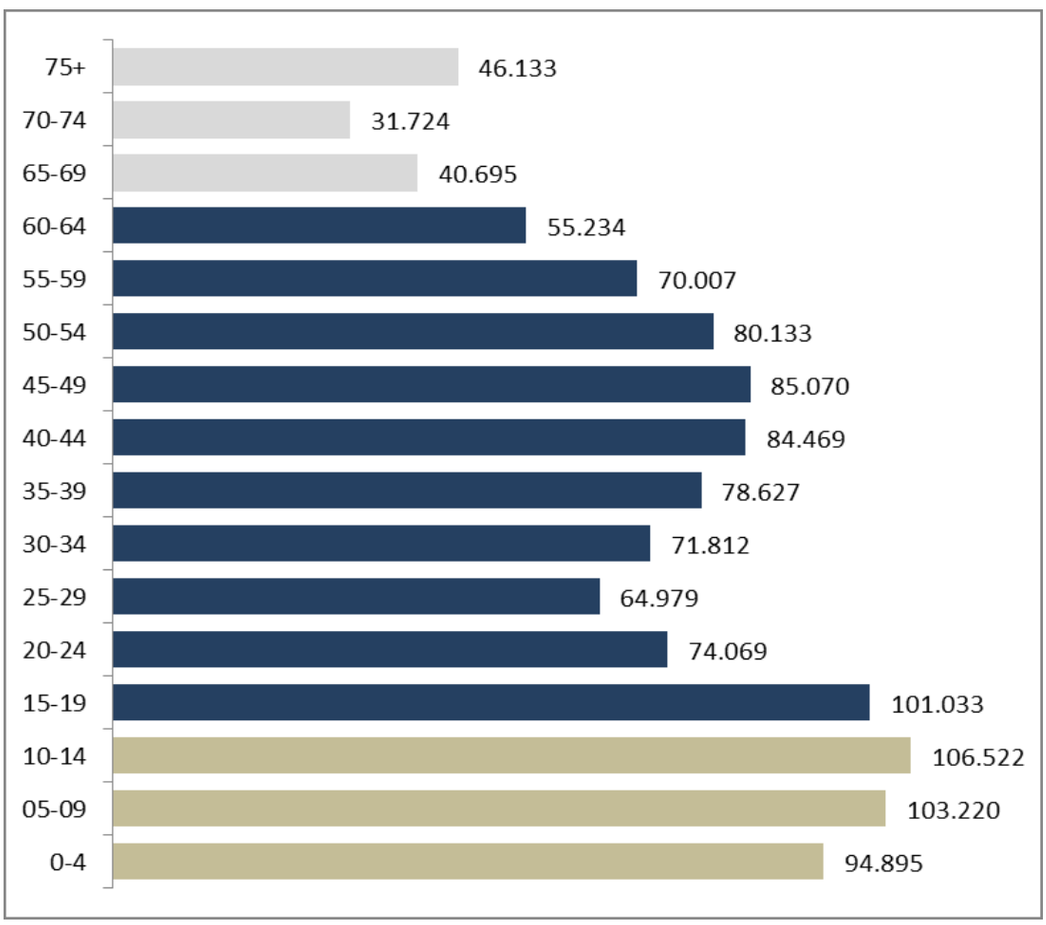

Gambar 2.5
Piramida Penduduk Kabupaten Kebumen
Tahun 2016
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017 (data diolah)

Dilihat dari jenis kelamin, pada tahun 2016 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 591.891 jiwa dan perempuan sebanyak 596.731 jiwa, sehingga angka *sex ratio* sebesar 99,19 artinya komposisi penduduk laki-laki 0,99 persen lebih sedikit dibanding penduduk perempuan. Kecenderungan *sex ratio* di bawah 100 (seratus) dimungkinkan dengan banyaknya penduduk yang merantau ke luar daerah demi mencari atau mendapatkan lapangan pekerjaan khususnya sektor industri dan perdagangan/jasa di kota-kota besar, yang didominasi dari kalangan laki-laki.

Sedangkan apabila dilihat dari keadaan penduduk 15 tahun ke atas, menunjukkan komposisi demografi penduduk di kabupaten Kebumen pada tahun 2016 didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan jumlah sebesar 765.433 jiwa dan jumlah penduduk tidak produktif (0-14 dan di atas 64 tahun) sebesar 423.819 jiwa. Angka beban ketergantungan pada tahun 2016 tercatat Rasio ketergantungan sebesar 55,28. Artinya bahwa dari setiap 100 orang penduduk berusia kerja (produktif) harus menanggung 55-56 orang yang belum produktif (muda), atau dianggap tidak produktif lagi (tua). Angka rasio ketergantungan ini harus bisa ditekan serendah mungkin. Semakin kecil angka rasio ketergantungan akan menunjukan semakin baik komposisi penduduk suatu daerah, artinya bahwa penduduk di daerah tersebut semakin produktif.

Tabel 2.1
Penduduk Kabupaten Kebumen Menurut Kecamatan
Tahun 2016

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
Karanggayam	24.756	24.162	48.918
Ayah	28.004	27.757	55.761
Buayan	27.219	27.469	54.688
Puring	26.834	26.439	53.273
Petanahan	26.867	26.462	53.329
Klirong	27.433	27.275	54.708
Buluspesantren	26.436	26.316	52.752
Ambal	27.862	27.453	55.315
Mirit	22.390	22.236	44.626
Bonorowo	9.385	9.490	18.875
Prembun	13.056	13.537	26.593
Padureso	6.633	6.821	13.454
Kutowinangun	20.839	21.755	42.594
Alian	27.227	27.365	54.592
Poncowarno	7.329	7.733	15.062
Kebumen	60.663	61.083	121.746
Pejagoan	24.320	24.171	48.491
Sruweng	26.678	27.304	53.982
Adimulyo	16.816	17.646	34.462

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
Kuwarasan	22.097	22.369	44.466
Rowokele	21.140	21.604	42.744
Sempor	29.506	30.330	59.836
Gombong	23.361	24.466	47.827
Karanganyar	16.860	17.476	34.336
Sadang	9.345	8.993	18.338
Karangsambung	18.835	19.019	37.854
Total	591.891	596.731	1.188.622

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Subbab ini memberikan gambaran dan hasil analisis kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen yang mencakup aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, aspek kesejahteraan sosial, aspek seni budaya dan olahraga.

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1) Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian secara umum di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan kondisi perekonomian tahun 2014. Pada skala regional (Jawa Tengah), pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,28 persen pada tahun 2014 menjadi 5,44 persen pada tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi tertinggi yang terjadi pada tahun 2015 adalah Kategori Jasa Perusahaan sebesar 9,72 persen. Kemudian Kategori Informasi dan Komunikasi dengan pertumbuhan sebesar 9,53 persen dan Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,10 persen. Kategori pertanian pada skala regional pada tahun 2015 mengalami peningkatan pertumbuhan dari -0,95 persen pada tahun 2014 menjadi 5,60 persen pada tahun 2015. Angka tersebut menunjukkan perubahan yang signifikan.

Sejalan dengan perkonomian yang terjadi secara umum di wilayah Provinsi Jawa Tengah, perekonomian Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Kebumen tahun 2015 mencapai 6,29 persen, sedangkan tahun 2014 sebesar 5,80 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,44 persen. Sedangkan seluruh kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2014 mencatat pertumbuhan yang positif kecuali Pengadaan Listrik dan Gas yang mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 3,47 persen.

Melihat trend capaian pertumbuhan ekonomi selama tahun 2013-2015 yang terus meningkat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen pada tahun 2016, diperkirakan dapat tumbuh pada kisaran angka 6,5 – 7,0 persen. Angka ini sudah melebihi target pertumbuhan ekonomi yang dipasang pada RPJMD Tahun 2016-2021 sebesar 5,86 persen.

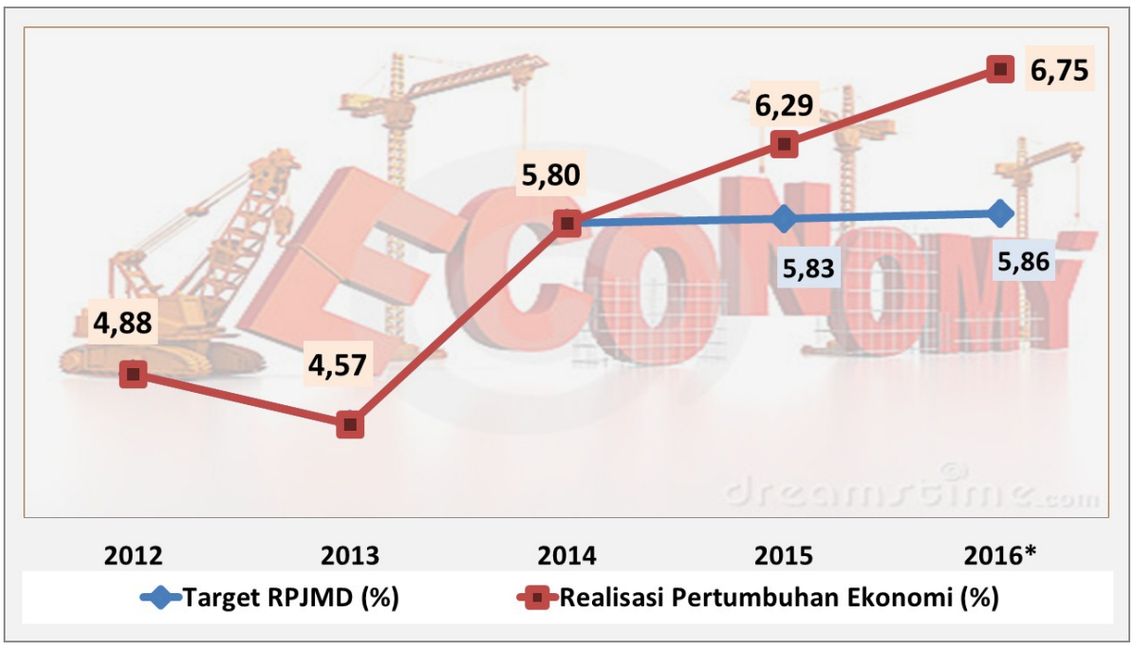

Gambar 2.6
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen
Tahun 2012-2016 dan Pencapaian Target RPJMD (%)
Sumber : BPS, 2017 (data diolah)
*Keterangan : *) Angka sementara*

Tabel 2.2
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

INDIKATOR	2012	2013	2014	2015*	2016**
- PDRB ADHB (Rp. Juta)	15.123.969,0	16.536.357,8	18.672.657,8	20.986.079,5	22.790.531,1
- PDRB Perkapita (Rp)	12.904.014,0	14.053.618,0	15.810.807,0	15.865.000,0	17.367.400,0
- PDRB ADHK 2010 (Rp. Juta)	13.707.057,2	14.344.827,4	15.176.441,6	16.118.153,2	16.846.820,5
- LPE ADHK 2010 (%)	4,88	4,65	5,80	6,29	6,75
- LPE ADHK 2010 Provinsi Jawa Tengah (%)	5,34	5,14	5,42	5,44	5,46

Sumber: BPS dan PDRB Kabupaten Kebumen, 2017
*Keterangan : *) Angka sementara **) Angka proyeksi*

Kategori-kategori lapangan usaha yang mencatat pertumbuhan yang positif, di antaranya kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,14 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,73 persen, Jasa Perusahaan mencatat sebesar 8,62 persen, Jasa Pendidikan sebesar 8,24 persen, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,25 persen, kategori Real Estat 6,84 persen, kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 6,81, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,45 persen, kategori Konstruksi sebesar 5,34 persen, kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,16

persen, kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 4,70 persen, kategori Industri Pengolahan sebesar 3,93 persen, kategori Jasa Lainnya sebesar 3,01 persen, kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 2,33 persen, kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 2,12 persen.

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan Rill PDRB Kabupaten Kebumen
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (persen)

Lapangan Usaha		2011	2012	2013	2014	2015*
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,79	7,60	-4,78	3,36	9,14
B	Pertambangan dan Penggalian	6,89	5,47	5,95	5,65	2,12
C	Industri Pengolahan	4,47	-2,06	11,89	9,37	3,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,91	10,40	12,46	2,09	-3,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-2,30	-6,17	-4,55	3,54	2,33
F	Konstruksi	1,91	8,72	6,06	4,91	5,34
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,61	1,35	6,10	3,23	5,45
H	Transportasi dan Pergudangan	4,95	2,81	11,37	9,80	5,16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,75	3,18	5,80	4,40	7,25
J	Informasi dan Komunikasi	7,32	11,65	8,89	17,7	9,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,41	2,28	4,50	0,63	6,81
L	Real Estat	4,67	2,11	6,81	5,54	6,84
M,N	Jasa Perusahaan	9,49	7,90	18,66	7,39	8,62
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,55	0,06	3,01	0,21	4,70
P	Jasa Pendidikan	24,72	24,29	11,98	10,37	8,24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,56	10,69	9,51	9,49	8,73
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,13	-0,86	10,03	9,29	3,01
Produk Domestik Regional Bruto		6,15	4,88	4,57	5,80	6,29

Sumber : PDRB Kabupaten Kebumen Tahun 2015
*Keterangan : *) Angka sementara*

Perekonomian Kabupaten Kebumen pada periode 2012-2015 dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi, pada tingkat regional kawasan, berada pada posisi di atas rata-rata. Pada tahun 2015, apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen lebih tinggi dengan perbandingan angka 6,29% berbanding 5,44%. Sedangkan bila dibandingkan dengan 5 (lima) kabupaten tetangga, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen berada pada posisi kedua setelah Kabupaten Cilacap yang menjadi wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 6,46%.

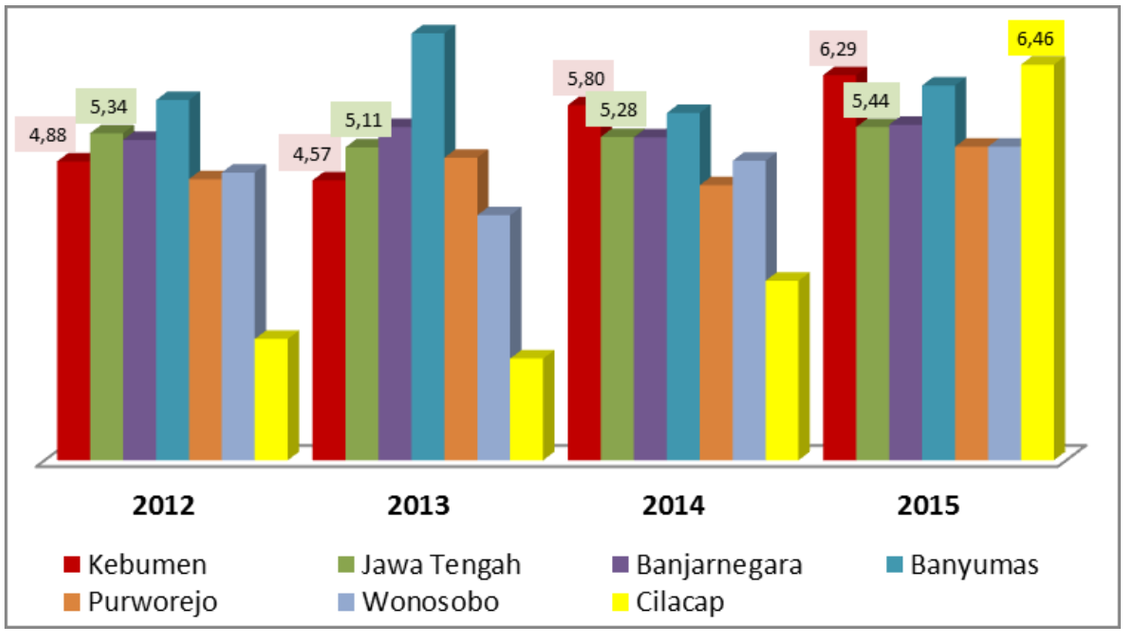

Gambar 2.7
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen,
Provinsi Jawa Tengah dan 5 Kabupaten Tetangga
Tahun 2012-2015 (Persen)

Sumber: BPS, data diolah

Struktur perekonomian masyarakat Kabupaten Kebumen selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 masih ditopang dari kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan sumbangan pada tahun 2015 sebesar 43,48 persen. Kemudian kategori Industri Pengolahan sebesar 18,59 persen, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor sebesar 13,93 persen, kategori Jasa Pendidikan sebesar 9,10 persen, kategori Konstruksi sebesar 6,67 persen, kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 5,18 persen. Sementara peranan kategori lainnya di bawah 5 persen.

Tabel 2.4
Peranan PDRB Kabupaten Kebumen
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (persen)

Lapangan Usaha		2011	2012	2013	2014	2015*
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	28,68	31,99	32,69	36,95	43,48
B	Pertambangan dan Penggalian	4,87	4,69	4,69	5,02	5,18
C	Industri Pengolahan	18,53	17,44	18,33	19,13	18,59
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,06	0,05	0,05	0,05
F	Konstruksi	6,71	6,81	6,84	6,80	6,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,07	15,19	15,28	14,28	13,93
H	Transportasi dan Pergudangan	3,55	3,33	3,45	3,57	3,47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,00	1,92	1,97	1,94	1,91

Lapangan Usaha		2011	2012	2013	2014	2015*
J	Informasi dan Komunikasi	1,72	1,70	1,65	1,63	1,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,03	3,06	3,05	2,85	2,85
L	Real Estat	1,41	1,31	1,29	1,25	1,23
M,N	Jasa Perusahaan	0,25	0,26	0,30	0,29	0,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,69	3,77	3,67	3,43	3,37
P	Jasa Pendidikan	6,07	8,12	8,91	9,23	9,10
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,92	1,01	1,03	1,05	1,07
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,36	2,14	2,20	2,26	2,15
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Kebumen, PDRB Kabupaten Kebumen Tahun 2015
*Keterangan : *) Angka Sementara*

Peranan sektor-sektor dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kebumen, terlihat pada tahun 2015 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih memberikan kontribusi yang paling besar (28,52%), diikuti sektor industri pengolahan (18,59%), dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (13,93%). Ada 4 sektor yang kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kebumen meningkat dan yang paling tinggi adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang sebesar 1,37%. Industri pengolahan kontribusinya turun pada tahun 2014 sebagai dampak meredupnya industri batu akik.

Dalam beberapa analisis, kegiatan ekonomi sering dikelompokkan berdasarkan output maupun input dari asal terjadinya proses produksi yang meliputi 3 kelompok sektor, yaitu :

a) Sektor primer, yang mencakup sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian. Kelompok sektor ini inputnya dari alam.
b) Sektor Sekunder, mencakup sektor Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi. Input sektor ini berasal dari sektor primer.
c) Sektor Tersier, mencakup sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya. Umumnya sektor ini inputnya berasal dari sektor sekunder dan outputnya berupa service (jasa).

Berdasarkan harga berlaku sektor tersier masih sebagai penopang paling besar pembentukan PDRB Kabupaten Kebumen tahun 2015 yaitu sebesar 40,95 persen, diikuti oleh sektor primer 33,70 persen, dan sektor sekunder paling rendah kontribusinya yaitu hanya sebesar 25,36 persen. Peranan sektor tersier terus menunjukkan penurunan sejak tahun 2014, pada tahun 2015 turun sebesar 0,83 persen, demikian juga untuk sektor sekunder yang turun pada tahun 2015 sebesar 0,67 persen. Sebaliknya sektor primer menunjukkan peningkatan peranan yang cukup signifikan sebesar 1,53 persen. Hal ini menunjukkan adanya perhatian yang sungguh-sungguh pemerintah daerah terhadap sektor primer.

2) Pengeluaran Per Kapita

Rata-rata pengeluaran penduduk per kapita sebulan dapat dijadikan sebagai cermin tingkat pendapatan per kapita sebulan rata-rata pendapatan penduduk yang dimaksud adalah rata-rata pendapatan perkapita sebulan yang diasumsikan sama dengan rata-rata pengeluaran rumah tangga sebulan. Penggunaan data pengeluaran sebagai pendekatan pendapatan disebabkan sulitnya memperoleh data pendapatan penduduk/rumahtangga. Hasil Suseda 2016 memperlihatkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk perkapita sebulan di Kabupaten Kebumen adalah 658.203,98 rupiah atau naik sebesar 35,37 persen dibandingkan kondisi tahun 2014 yang sebesar 486.232 rupiah. Kenaikan pendapatan perkapita ini dimungkinkan karena kenaikan harga berbagai jenis kebutuhan pokok penduduk selama dua tahun terakhir. Kondisi tersebut juga terjadi baik pada daerah perkotaan maupun daerah perdesaan.

Tabel 2.5
Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan/Pola Konsumsi Menurut Daerah
Tahun 2014 dan 2016 Kabupaten Kebumen

Daerah	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita sebulan/ % Pola konsumsi	2014	2016
Perkotaan+ Perdesaan	Rata-rata Pengeluaran perkapita sebulan (Rp)	486.232,00	658.203,98
	% Makanan	60,30	57,52
	% Non Makanan	39,70	42,48
Perkotaan	Rata-rata Pengeluaran perkapita sebulan (Rp)	537.764,66	701.765,96
	% Makanan	56,33	55,24
	% Non Makanan	43,67	44,76
Perdesaan	Rata-rata Pengeluaran perkapita sebulan (Rp)	460.279,44	633.524,33
	% Makanan	62,63	58,95
	% Non Makanan	37,37	41,05

Sumber : BPS, diolah dari Suseda Tahun 2014 dan 2016

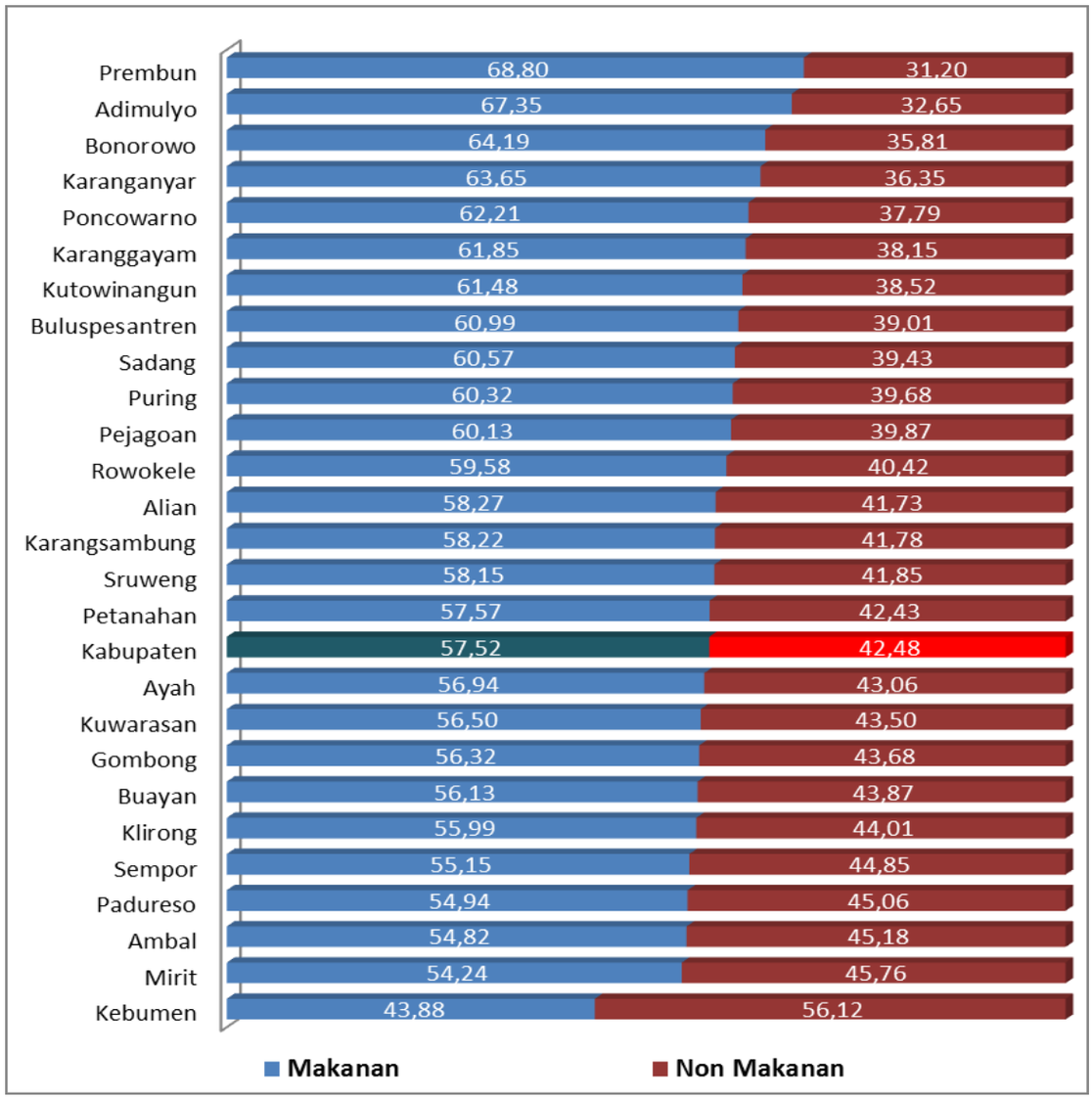

Gambar 2.8
Distribusi Persentase Pengeluaran Penduduk menurut Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Kebumen Tahun 2016

Sumber : BPS, Studi Ketimpangan Pendapatan Tahun 2016

Dari gambar di atas terlihat bahwa pada tahun 2016, 57,52 persen (Rp.378.591,98) pengeluaran penduduk di Kabupaten Kebumen digunakan untuk kebutuhan makanan, sedangkan sisanya sebesar 42,48 persen (Rp.279.611,99) digunakan untuk kebutuhan non makanan. Secara relatif terjadi penurunan kebutuhan makanan sebesar 2,78 persen dibandingkan kondisi pada tahun 2014, namun secara nominal terjadi peningkatan sebesar 29,47 persen dibandingkan kondisi pada tahun 2014. Sedangkan, untuk kebutuhan non makanan meningkat secara relatif sebesar 2,78 persen dan secara nominal sebesar 44,84 persen. Secara agregat hal ini mengindikasikan secara perlahan terjadi pergeseran pola pengeluaran dari konsumsi makanan ke konsumsi non makanan.

Kebutuhan makanan merupakan kebutuhan pokok/primer yang mutlak harus terpenuhi, sehingga kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan ini akan lebih besar mengingat rata-rata pendapatan penduduk Kebumen masih tergolong rendah. Sebenarnya, kebutuhan makanan pada tingkat pendapatan berapapun secara kuantitas cenderung tetap sehingga semakin tinggi pendapatan seseorang, pengeluaran untuk non makanan semakin besar. Oleh karena itu, persentase pengeluaran makanan dan non makanan dapat digunakan sebagai salah satu indikator kesejahteraan penduduk. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat distribusi pengeluaran menurut kelompok pendapatan. Bagi penduduk yang mempunyai pendapatan tinggi umumnya persentase pengeluaran untuk kebutuhan makanan semakin rendah dan sebaliknya kebutuhan untuk non makanan semakin tinggi. Menurunnya persentase pengeluaran makanan mengindikasikan bergesernya prioritas pengeluaran penduduk dari makanan ke non makanan. Kondisi ini dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan wilayah kecamatan, ada dua belas kecamatan dengan rata-rata pendapatan perkapita diatas rata-rata Kabupaten. Angka tertinggi ada pada Kecamatan Ayah sebesar Rp.900.129.11, diikuti Kecamatan Gombong sebesar Rp.872.933,08, dan Kecamatan Kebumen sebesar Rp.865.529,64. Tingginya rata-rata pengeluaran perkapita Kecamatan Ayah berhubungan dengan tingginya harga-harga kebutuhan pokok. Sedangkan untuk kecamatan Gombong dan Kebumen tingginya rata-rata pengeluaran perkapita disebabkan tingginya konsumsi makanan dan minuman jadi. Kecamatan Buayan menjadi kecamatan dengan rata-rata pengeluaran perkapita terendah di Kabupaten Kebumen. Secara keseluruhan ada empat belas kecamatan yang rata-rata pengeluaran perkapita tahun 2016 di bawah rata-rata kabupaten yaitu kecamatan Buayan, Karanggayam, Kutowinangun, Prembun, Poncowarno, Puring, Sruweng, Ambal, Bonorowo, Pejagoan, Karangsambung, Kuwarasan, Rowokele dan Alian. Sedangkan, dua belas kecamatan yang rata-rata pengeluaran perkapitanya di atas kabupaten meliputi kecamatan Ayah, Gombong, Kebumen, Mirit, Padureso, Adimulyo, Petanahan, Sempor, Klirong, Buluspesantren, Sadang dan Karanganyar.

3) PDRB Per Kapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan besaran PDRB perkapita atau pendapatan perkapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

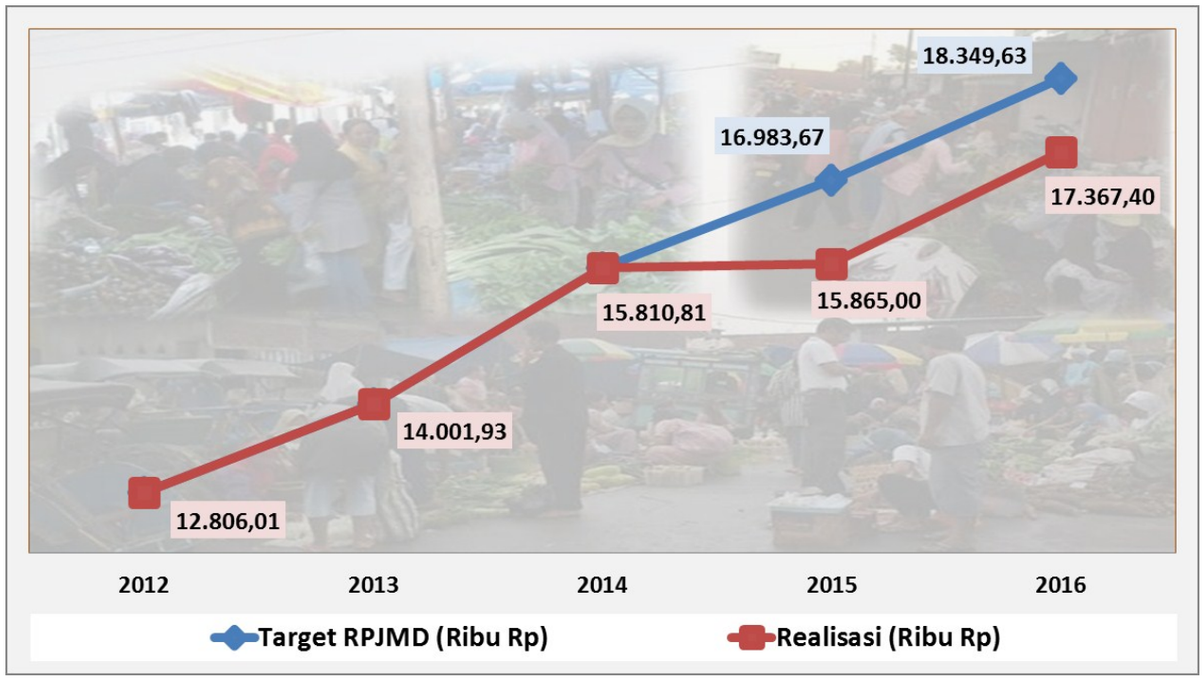

Gambar 2.9
Perkembangan PDRB PerKapita Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016 (Ribu Rp)

Sumber : BPS, 2017
Keterangan : Realisasi 2016 adalah data sementara

Pada tahun 2015, PDRB per kapita Kabupaten Kebumen mencapai Rp.15,865 juta dengan pertumbuhan sebesar 12,96 persen. Pertumbuhan tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 yang tumbuh sebesar 8,82 persen. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Kebumen selama tahun 2012-2016 terus mengalami peningkatan dari Rp.12,806 juta tahun 2012 menjadi Rp.17,367 juta pada tahun 2016, atau meningkat sebesar 35,62 persen.

Tabel 2.6
PDRB Per Kapita Kabupaten Kebumen
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Juta Rp)

Lapangan Usaha		2011	2012	2013	2014	2015*
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,38	3,76	3,82	4,31	5,05
B	Pertambangan dan Penggalian	0,57	0,61	0,66	0,8	0,92
C	Industri Pengolahan	2,19	2,25	2,57	3,04	3,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	0,79	0,88	0,96	1,08	1,18
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,9	1,96	2,15	2,27	2,47
H	Transportasi dan Pergudangan	0,42	0,43	0,48	0,57	0,61
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,24	0,25	0,28	0,31	0,34
J	Informasi dan Komunikasi	0,2	0,22	0,23	0,26	0,28
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,36	0,4	0,43	0,45	0,51
L	Real Estat	0,17	0,17	0,18	0,2	0,22
M,N	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,44	0,49	0,52	0,54	0,6

Lapangan Usaha		2011	2012	2013	2014	2015*
P	Jasa Pendidikan	0,72	1,05	1,25	1,46	1,61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,11	0,13	0,14	0,17	0,19
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,28	0,28	0,31	0,36	0,38

Sumber: BPS, 2017
*Keterangan: *) Angka Sementara*

PDRB Perkapita Kabupaten Kebumen Menurut Lapangan Usaha tahun 2011-2015 tertinggi selalu dicapai oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan yang terendah tiap tahunnya yaitu kategori Pengadaan Listrik dan Gas, dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu sebesar 0,01 selalu sama setiap tahunnya.

4) Ketimpangan Antar Wilayah

a) Indeks Gini

Upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak dapat diukur hanya dari aspek pertumbuhan ekonomi semata tetapi seberapa jauh geliat perekonomian dapat dinikmati oleh masyarakat. Oleh karena itu aspek pemerataan dan pola konsumsi masyarakat merupakan persoalan yang perlu dicermati. Asumsi bahwa laju pertumbuhan ekonomi akan mampu meningkatkan pendapatan rata-rata masyarakat terkadang masih memiliki suatu peluang untuk memunculkan suatu masalah ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan yang tinggi yang tidak diikuti oleh pemerataan menjadi bukti bahwa pertumbuhan ekonominya tidak berkualitas.

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

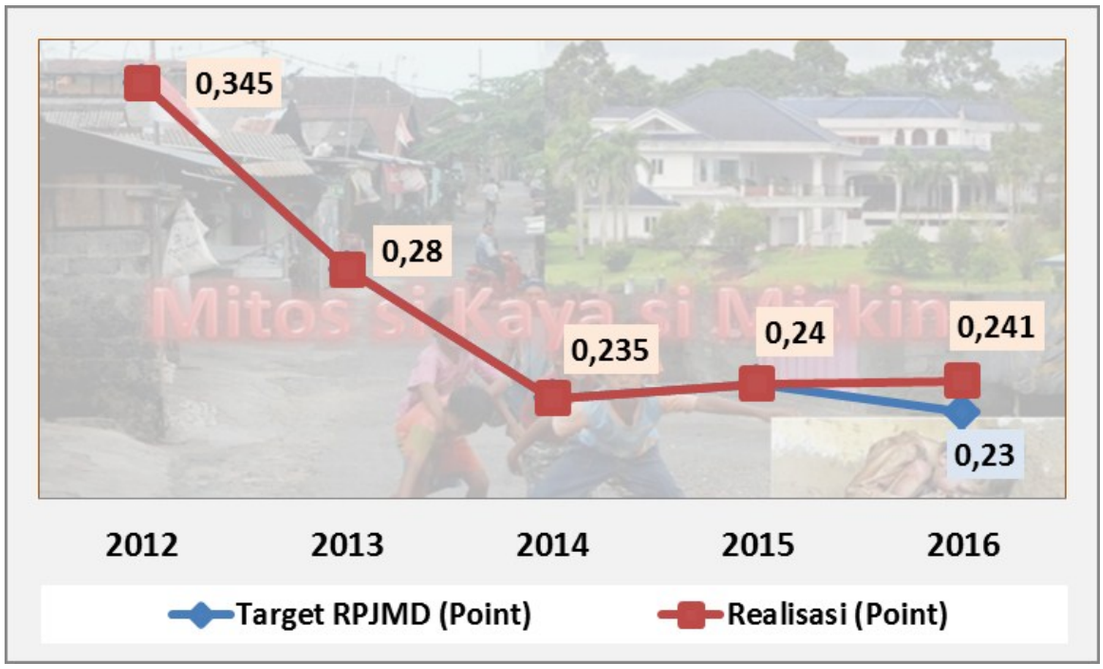

Gambar 2.10
Indeks Gini Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016
Sumber: BPS, Buku Studi Ketimpangan Pendapatan, 2017

Dari pengukuran disparitas (ketimpangan) pendapatan penduduk dengan menerapkan indeks Gini (Gini ratio) yang dikembangkan Corrado Gini, masyarakat Kabupaten Kebumen relatif memiliki ketimpangan yang rendah ini ditunjukan pada kurun waktu 2014-2016 Indeks gini cenderung bergerak pada kisaran 0,24 yaitu dari 0,2352 pada tahun 2014 menjadi 0,2412 pada tahun 2016 (nilai gini antara 0,20-0,35 menunjukan tingkat pemerataan pendapatan dinyatakan tidak timpang/pemerataan pendapatannya relatif sama (Todaro P. Michael,1994). Namun demikian, pencapaian angka Indeks Gini pada tahun 2016 ternyata belum atau tidak memenuhi target dalam RPJMD sebesar 0,23.

Angka indeks Gini selama periode 2012-2016, cenderung menurun dan masih dalam rentang tidak timpang. Namun demikian, selama 3 (tiga) tahun terakhir, angkanya meningkat tipis. Hal ini menunjukkan ada potensi ketimpangan di masa depan jika kondisi ini tidak mendapat perhatian.

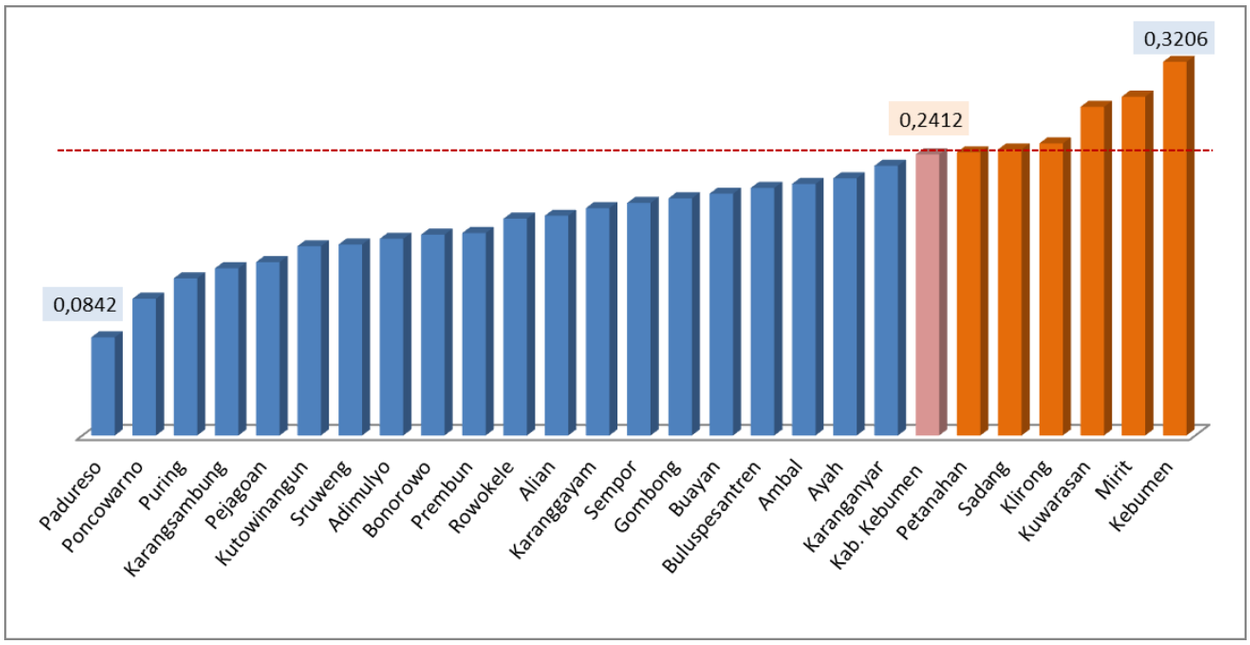

Gambar 2.11
Indeks Gini Kabupaten Kebumen Tahun 2016
Menurut Kecamatan

Sumber : Buku Studi Ketimpangan Pendapatan, BPS, 2017

Tabel 2.7
Pemerataan Pendapatan Penduduk Kabupaten Kebumen
Menurut Nilai Gini Ratio dan Kriteria Bank Dunia Tahun 2016

No	Kecamatan	Penduduk	Penduduk/ Kapita	GINI RASIO	Kriteria Bank Dunia		
					40% I	40% II	20% III
1	Padureso	13.377	742.934,96	0,0842	34,05	41,22	24,74
2	Poncowarno	14.989	545.371,84	0,1173	31,74	42,40	25,86
3	Puring	53.219	551.699,77	0,1348	30,88	41,42	27,69
4	Karangsambung	37.642	616.866,19	0,1434	29,97	42,76	27,27
5	Pejagoan	49.561	604.272,31	0,1488	31,19	39,37	29,43
6	Kutowinangun	42.370	521.964,25	0,1624	24,18	39,11	30,55
7	Sruweng	53.675	551.855,16	0,1639	30,03	39,93	30,04
8	Adimulyo	34.399	714.695,77	0,1688	29,51	39,95	30,53
9	Bonorowo	19.270	602.479,24	0,1723	25,15	44,09	30,75
10	Prembun	26.471	528.903,73	0,1737	30,03	37,45	32,52
11	Rowokele	42.503	625.774,51	0,1860	29,00	34,84	36,16
12	Alian	54.293	651.088,33	0,1885	28,22	40,07	31,71
13	Karanggayam	48.617	521.114,78	0,1951	27,62	40,30	32,09
14	Sempor	59.423	693.967,88	0,1995	28,20	38,49	33,31
15	Gombong	47.550	872.933,08	0,2034	27,71	38,72	33,57
16	Buayan	54.562	491.742,93	0,2075	27,85	38,31	33,85
17	Buluspesantren	53.012	681.824,08	0,2124	25,53	43,07	31,4
18	Ambal	55.008	559.093,02	0,2158	27,19	38,96	33,85
19	Ayah	55.349	900.129,11	0,2207	26,62	39,10	34,28
20	Karanganyar	34.250	659.548,45	0,2314	25,70	39,41	34,89
	Kab. Kebumen	**1.189.096**	**658.203,98**	**0,2412**	**25,78**	**38,19**	**36,03**
21	Petanahan	53.872	703.916,88	0,2430	26,60	36,05	37,34
22	Sadang	18.201	679.314,37	0,2455	25,62	37,46	36,92
23	Klirong	54.736	681.933,00	0,2506	25,66	37,82	36,52
24	Kuwarasan	45.194	621.543,83	0,2820	23,94	36,98	39,08
25	Mirit	44.516	752.089,20	0,2907	22,70	36,91	40,39

No	Kecamatan	Penduduk	Penduduk/ Kapita	GINI RASIO	Kriteria Bank Dunia		
					40% I	40% II	20% III
26	Kebumen	123.037	865.529,64	0,3206	21,30	34,04	44,66

Sumber : Buku Studi Ketimpangan Pendapatan, BPS, 2017

Pada gambar dan tabel di atas terlihat bahwa tiga kecamatan dengan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan perkapita paling tinggi adalah Kecamatan Kebumen (0,3206), Kecamatan Mirit (0,2907), Kecamatan Kuwarasan (0,2820). Sedangkan tiga kecamatan dengan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan rendah adalah Kecamatan Padureso (0,0842), Kecamatan Poncowarno (0,1173), dan Kecamatan Puring (0,1348), dua merupakan kecamatan dengan tipologi wilayah daerah pegunungan (wilayah utara Kabupaten Kebumen) dan satu kecamatan dengan tipologi wilayah pesisir.

Pengolahan dengan menggunakan kriteria Bank Dunia memberikan hasil, seluruh kecamatan di Kabupaten Kebumen masuk kategori ketimpangan rendah karena 40% kelompok penduduk berpendapatan rendah menerima lebih dari 17 persen. Berdasarkan kategori Bank Dunia Kecamatan Padureso paling merata karena 40% kelompok penduduk berpendapatan rendah menerima bagian pendapatan sebesar 34,05%, disusul Kecamatan Poncowarno (31,74%), dan Kecamatan Pejagoan (31,19%). Kecamatan dengan kategori ketimpangan rendah tetapi dengan nilai paling rendah adalah Kecamatan Kebumen (21,30%).

Menurut kecamatan, terlihat bahwa berdasarkan angka gini ratio maupun kriteria Bank Dunia seluruh kecamatan di Kabupaten Kebumen masuk kategori ketimpangan rendah dengan gini ratio berkisar antara 0 sampai dengan 0,35 dan penduduk kelompok rendah menerima lebih dari 17 persen dari total pendapatan.

b) Indeks Williamson

Indeks Williamson adalah pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk mengurkur tingkat ketimpangan antar wilayah. Perhitungan Indeks Williamson didasarkan pada data PDRB perkapita masing-masing daerah dan jumlah penduduknya. Hasil pengukuran dari nilai Indeks Williamson dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu (i) Nilai IW < 0,35 berarti tingkat ketimpangan rendah; (ii) 0,35 $\leq$ Nilai IW $\leq$ 0,5 berarti tingkat ketimpangan sedang; dan (iii) Nilai IW > 0,5 berarti tingkat ketimpangan tinggi.

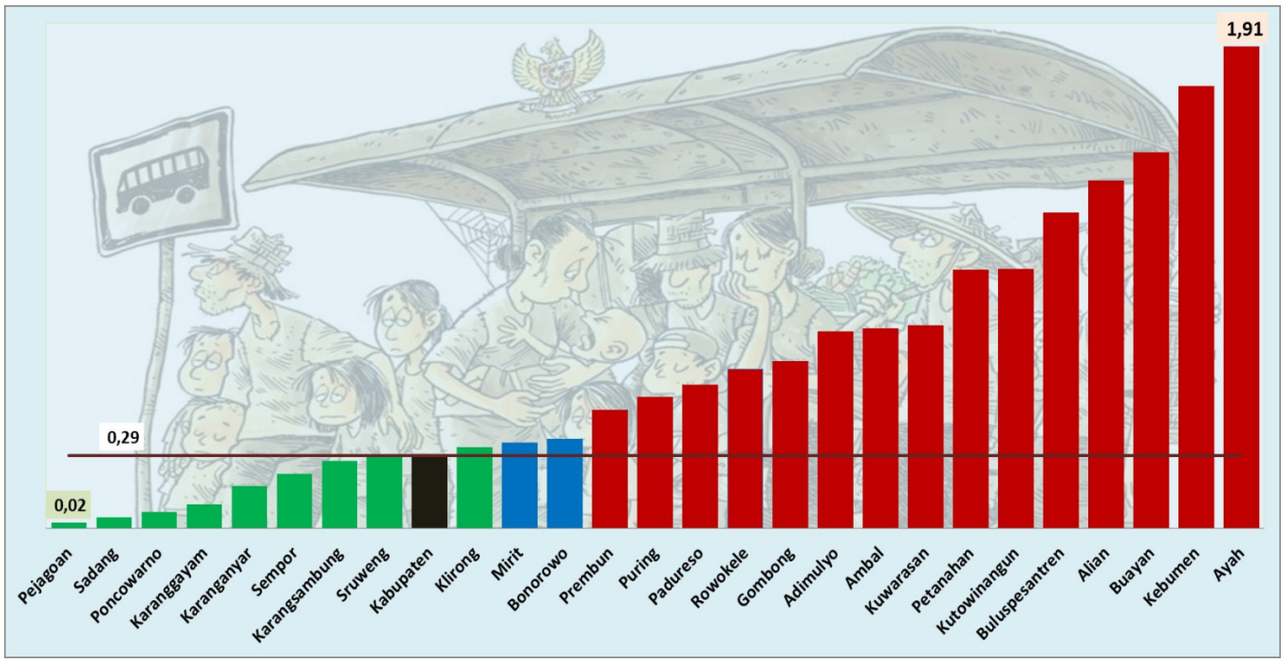

Gambar 2.12
Indeks Williamson Kabupaten Kebumen
Menurut Kecamatan Tahun 2016

Sumber : Bap3da, 2017 (data diolah)

Dari data pada tabel indeks Williamson menunjukkan secara keseluruhan tidak antarwilayah dalam hal ini kecamatan tidak terlalu timpang di Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 Indeks Williamson Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 adalah 0,29 yang berarti masih pada skala yang tidak terlalu timpang yaitu masih di bawah indeks 0,35. Indeks Williamson melihat ketimpangan antarwilayah berdasarkan ukuran pendapatan perkapita di masing-masing wilayah kecamatan dibandingkan wilayah keseluruhan se-kabupaten. Sehingga, jika dilihat dari setiap kecamatan, masih terlihat terjadinya ketimpangan antarwilayah kecamatan di Kabupaten Kebumen dimana 13 dari 26 kecamatan masih memiliki indeks sebesar 0,35 atau lebih. Ketimpangan terbesar terjadi pada Kecamatan Ayah dengan indeks 1,91 karena pendapatan perkapita ayah yang jauh lebih besar yaitu sekitar Rp.28 juta pertahun dibandingkan pendapatan perkapita Kabupaten Kebumen yang hanya sekitar Rp.17 juta pertahun. Sedangkan, ketimpangan terkecil terjadi pada Kecamatan Pejagoan dengan indeks 0,02 karena pendapatan perkapita pejagoan mendekati pendapatan per kapita Kabupaten Kebumen secara agregat. Ketimpangan antarkecamatan ini terjadi karena perbedaan basis sektor ekonomi di tiap kecamatan sesuai dengan potensinya serta besarnya jumlah penduduk di setiap kecamatan yang menyebabkan perbedaan pendapatan perkapitanya.

c) Sactter plot hubungan kemiskinan dan produktivitas wilayah

Dalam rangka mengetahui hubungan antara kemiskinan dan produktifitas wilayah, kami mencoba membuat semacam diagram hubungan korelasi dari 2 variabel tersebut, dengan hasil scatter plot seperti di atas. Dari sebaran yang ada nampak bahwa secara umum hubungan ke dua hal tersebut adalah positif.

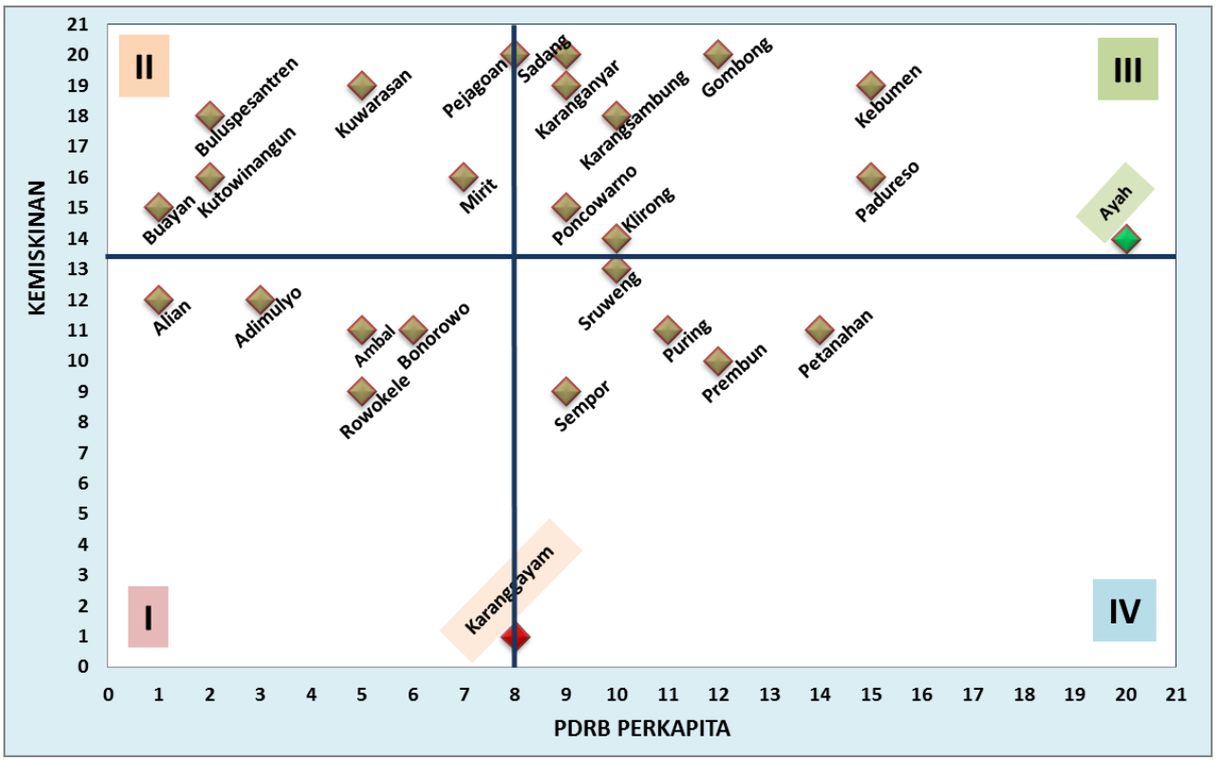

Gambar 2.13
Scatterplot Hubungan Kemiskinan dan Produktivitas Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016

Sumber : BPS, 2017 (data diolah)

Berdasarkan scatter plot kemiskinan dan PDRB perkapita didapatkan 4 kuadran dengan pembagian (i) Kuadran I (kemiskinan tinggi, produktifitas rendah) antara lain meliputi Kecamatan Alian, Adimulyo, Ambal, Bonorowo, dan Rowokele; (ii) Kuadran II (kemiskinan rendah, produktifitas rendah) antara lain meliputi Kecamatan Buayan, Buluspesantren, Kutowinangun, Kuwarasan, Pejagoan dan Mirit; Kuadran III (kemiskinan rendah, produktivitas tinggi) antara lain meliputi Kecamatan Sadang, Karanganyar, Poncowarno, Karangsambung, Klirong, Gombong, Kebumen, Padureso dan Ayah; dan Kuadran IV (kemiskinan tinggi, produktifitas tinggi), meliputi Kecamatan Karangggayam, Sempor, Sruweng, Puring, Prembun dan Petanahan.

Selanjutnya, diagram scatter plot di atas juga menunjukkan 2 (dua) titik wilayah yang tampak ekstrim yaitu Kecamatan Karanggayam dan Kecamatan Ayah. Kecamatan Karanggayam memiliki angka tingkat kemiskinan yang relatif jauh di atas wilayah lain, namun PDRB perkapitanya juga berada di atas rata-rata. Sedangkan Kecamatan Ayah memiliki produktivitas (PDRB perkapita) paling tinggi dibanding wilayah lain, namun tingkat kemiskinannya relatif masih cukup tinggi karena hanya berada sedikit di atas rata-rata kemiskinan Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diambil hipotesis sementara bahwa kedua wilayah kecamatan tersebut memiliki permasalahan spesifik yang perlu ditangani secara khusus. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah:

- Penyebab terjadinya lag kemiskinan yang relatif tinggi di Kecamatan Karanggayam; dan
- Penyebab terjadi masih relatif tingginya angka kemiskinan di Kecamatan Ayah, padahal wilayah tersebut tingkat produktifitasnya relatif tinggi.

5) Inflasi

Laju inflasi selama kurun waktu 2012-2016 menunjukkan angka yang berfluktuasi. Selama tahun 2012 terjadi inflasi sebesar 4,64 persen. Kondisi perekonomian yang relatif stabil ditunjukkan dengan tidak adanya gejolak perubahan harga yang berarti, walaupun kenaikan harga terjadi pada semua kelompok pengeluaran. Inflasi tertnggi terjadi pada kelompok Perumahan, Air, Gas, Listrik dan Bahan Bakar Rumahtangga yakni sebesar 7,35 persen. Sementara itu inflasi terendah terjadi pada kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga yakni sebesar 0,08 persen.

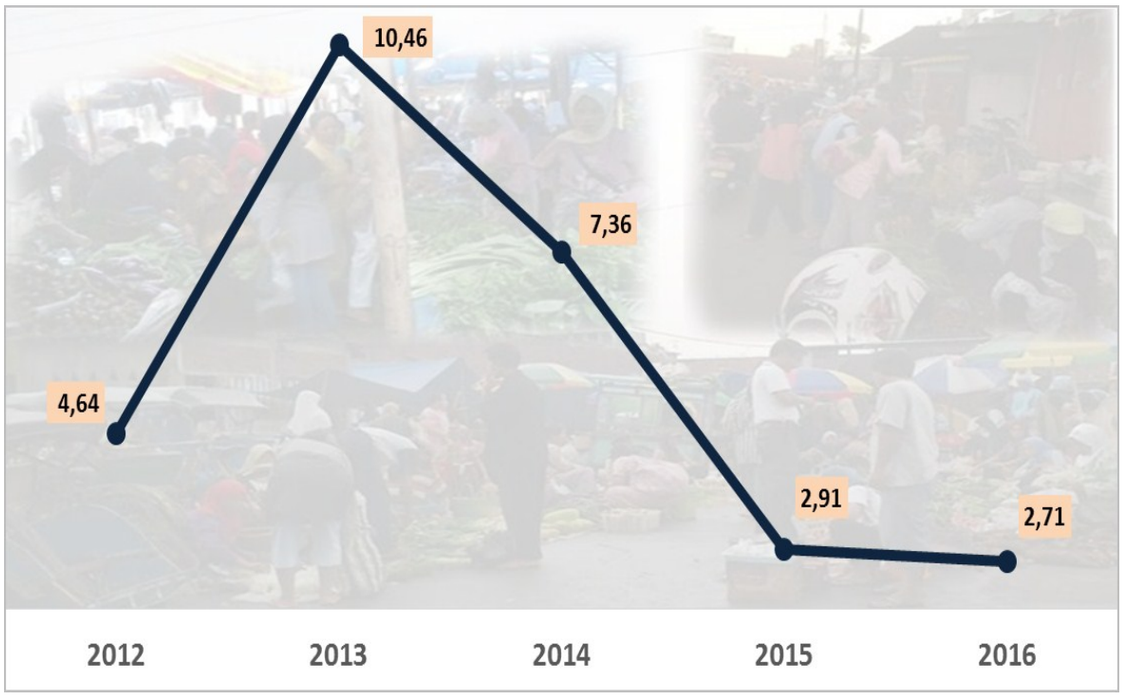

Gambar 2.14
Laju Inflasi Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016
Sumber : Buku IHK dan Inflasi Kabupaten Kebumen, BPS, Tahun 2016

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terutama jenis Premium pada bulan Juni 2013 berdampak spiral pada kenaikan harga-harga barang dan jasa, memicu inflasi tahun 2013 mencapai 2 (dua) digit, yaitu sebesar 10,46 persen. Inflasi tersebut merupakan inflasi tertinggi selama kurun waktu 2012-2016. Kenaikan harga BBM yang terjadi menjelang Ramadhan, Lebaran, dan pergantian tahun ajaran sekolah tersebut menyebabkan kenaikan harga yang tinggi pada beberapa komoditi. Semua kelompok pengeluaran selama tahun 2013 mengalami kenaikan harga, terutama kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga yang mengalami inflasi sebesar 22,93 persen. Adapun inflasi terendah dialami oleh kelompok kesehatan yang mengalami inflasi sebesar 3,58 persen.

Tabel 2.8
Inflasi Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016
Menurut Kelompok Pengeluaran (Persen)

No.	Kelompok Pengeluaran	2012	2013	2014	2015	2016*
1.	Bahan Makanan	3,95	7,23	10,07	5,83	2,61
2.	Makanan jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	4,57	10,63	6,42	4,42	3,82
3.	Perumahan, Air, gas, Listrik dan Bahan Bakar	7,35	3,92	8,36	1,93	1,36
4.	Sandang	4,9	22,62	4,41	4,3	4,77
5.	Kesehatan	2,19	3,58	4,59	1,9	6,66
6.	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	0,08	22,93	0,96	2,7	5,70
7.	Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	3,89	21,17	10,57	-2,4	-2,08

No.	Kelompok Pengeluaran	2012	2013	2014	2015	2016*
	Umum	4,64	10,46	7,36	2,91	2,71

Sumber: Buku IHK dan Inflasi Kabupaten Kebumen Tahun 2016

Pada bulan November 2014, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga BBM. Kenaikan harga BBM ini juga mengakibatkan kenaikan harga-harga barang dan jasa lainnya dan hal ini memicu inflasi tahun 2014 hingga mencapai 7,36 persen. Semua kelompok pengeluaran selama tahun 2014 mengalami kenaikan harga, terutama pada kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan yang mengalami inflasi sebesar 10,57 persen dan kelompok bahan makanan yang mengalami inflasi sebesar 10,07 persen. Sementara itu, inflasi terendah dialami oleh kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga yang mengalami inflasi sebesar 0,96 persen. Selama tahun 2015, laju inflasi sebesar 2,91 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada tahun 2014. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan yakni sebesar 5,83 persen sementara deflasi terjadi pada kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 2,40 persen.

Inflasi yang cukup rendah dipertahankan pada tahun 2016, yakni sebesar 2,71 persen. Inflasi tertinggi selama tahun 2016 terjadi pada bulan Juli yakni sebesar 0,89 persen sementara deflasi tertinggi terjadi pada bulan April yakni 0,22 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi selama tahun 2016 yaitu kelompok bahan makanan sebesar 2,61 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 3,82 persen; kelompok perumahan, air, gas, listrik dan bahan bakar rumahtangga sebesar 1,36 persen; kelompok sandang sebesar 4,77 persen; kelompok kesehatan sebesar 6,66 persen; dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 5,70 persen. Sementara kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 2,08 persen.

Dengan penurunan angka inflasi Kebumen pada tahun 2016, diharapkan Pemerintah Kabupaten Kebumen senantiasa membuat kebijakan yang dapat mempertahankan angka inflasi tersebut diantaranya melakukan pemantauan dan monitoring secara berkala terhadap ketersediaan dan kelancaran arus/distribusi barang-barang dan jasa, terutama barang-barang dan jasa yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Kebumen. Hal ini penting mengingat banyak barang dan jasa yang tidak diproduksi di tingkat lokal dan sangat mengandalkan pasokan dari luar daerah. Untuk hal ini perlu dijajaki kerja sama antardaerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tidak bisa diproduksi di Kabupaten Kebumen.

Untuk barang dan jasa yang rentan bergejolak misalnya komoditas bumbu-bumbuan, sayur-sayuran dan komoditas dengan Nilai Konsumsi yang besar semisal beras perlu diwaspadai dengan memperkuat ketahanan pangan daerah. Strategi penguatan ketahanan pangan misalnya dengan mendorong pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan-lahan yang belum dipakai.

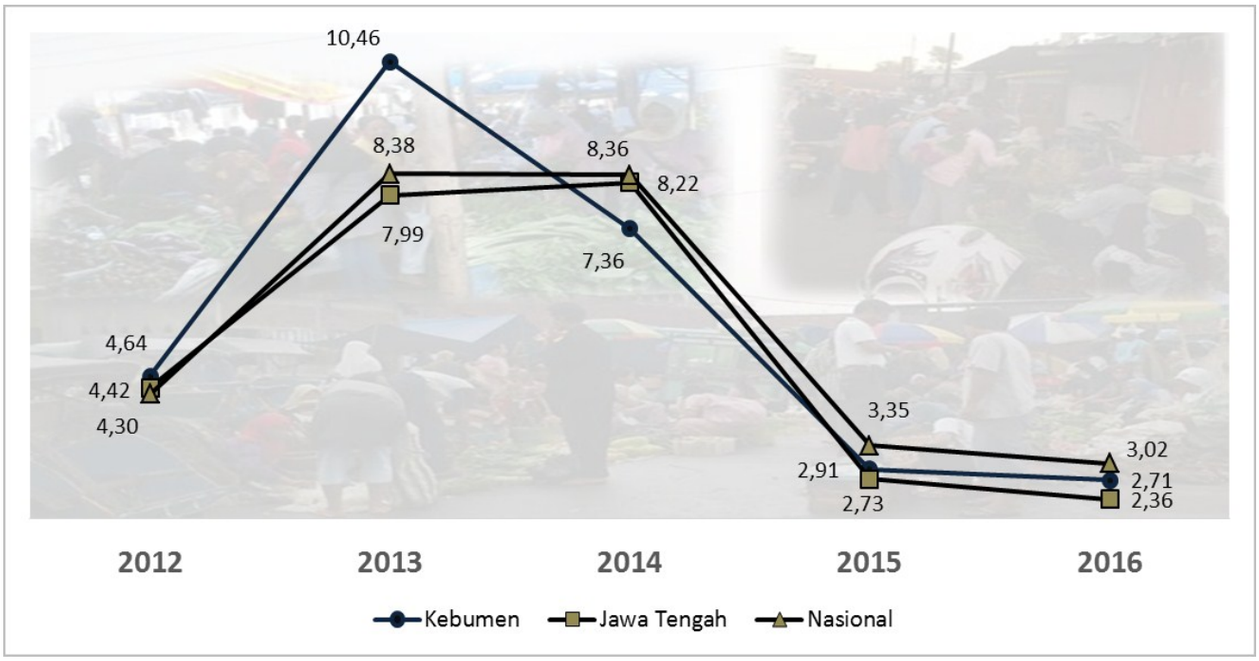

Gambar 2.15
Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2016

Sumber : BPS, Buku IHK dan Inflasi Kabupaten Kebumen Tahun 2016

Selama tahun 2016, perkembangan inflasi Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional secara umum menunjukkan pola yang hampir sama. Inflasi yang relatif tinggi di Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional terjadi pada bulan Juli 2016 dan bulan November 2016. Inflasi yang tinggi pada bulan Juli ini berkaitan dengan perubahan pola konsumsi masyarakat pada bulan Juli yang bertepatan dengan bulan ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri yang cenderung mengalami kenaikan dalam mengkonsumsi barang dan jasa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, sehingga menyebabkan harga-harga pada bulan Juli 2016 menjadi naik, terutama untuk kelompok bahan makanan, kelompok sandang, dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Kecenderungan serupa juga terjadi pada bulan Januari dan Desember 2016.

Inflasi tertinggi selama tahun 2016 di Kabupaten Kebumen terjadi pada bulan Juli 2016 yakni sebesar 0,89 persen, demikian halnya dengan kota Cilacap juga terjadi pada bulan Juli 2016 sebesar 1,07 persen. Sementara itu rata-rata inflasi di provinsi Jawa Tengah dan inflasi Nasional di bulan yang sama masing-masing sebesar 1 persen dan 0,69persen.

Inflasi yang cukup tinggi pada bulan November 2016 baik di Kebumen, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah maupun di tingkat Nasional disebabkan oleh kenaikan indeks harga pada sub kelompok bumbu-bumbuan dan komoditas yang memberikan andil tertinggi adalah cabe rawit.

Penurunan indeks harga atau deflasi di Kebumen, Jawa Tengah, dan Nasional terjadi sebanyak tiga kali sepanjang tahun 2016 yakni di bulan Februari, April, dan Agustus. Deflasi tertinggi terjadi pada bulan April 2016, dimana di Kebumen terjadi deflasi sebesar 0,22 persen, rata-rata Jawa Tengah deflasi 0,46 persen, dan rata-rata Nasional deflasi 0,45 persen.

Inflasi tahun kalender yang tertinggi sepanjang tahun 2016 adalah rata-rata Nasional yakni sebesar 3,02 persen diikuti Kebumen sebesar 2,71 persen dan terendah adalah rata-rata inflasi di Jawa Tengah sebesar 2,36 persen. Jika dibandingkan dengan tingkat inflasi 2015 kesemuanya mengalami penurunan. Inflasi tahun kalender 2015 Kebumen adalah 2,91 persen, Jawa Tengah sebesar 2,73 persen, dan inflasi Nasional sebesar 3,35 persen.

6) Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hal ini menunjukkan makna kemiskinan yang sangat luas dan multidimensi dan bersifat kualitatif sehingga sangat sulit mengukurnya secara kuantitatif.

Data kemiskinan dibedakan menjadi Data Kemiskinan Makro dan Data Kemiskinan Mikro. Data kemiskinan makro adalah data kemiskinan yang dihasilkan dengan menggunakan GK. Data ini hanya dapat digunakan untuk melihat perkembangan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu beserta karakteristiknya dan belum dapat menjawab siapa dan dimana penduduk miskin tersebut berada. Sedangkan data kemiskinan mikro adalah data kemiskinan yang digunakan untuk implementasi program-program anti kemiskinan yang sifatnya target sasaran (raskin/rastra, BLT, KIS, KIP dan lain-lain). Data kemiskinan mikro berupa data rumahtangga sasaran dan sudah bisa menggambarkan siapa dan dimana keberadaan si miskin (PPLS 2008, PPLS 2011, PBDT 2015).

Angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS merupakan data kemiskinan makro yang di dalamnya terdapat beberapa indikator antara lain:

a) Garis Kemiskinan (GK)

GK merupakan nilai pengeluaran minimal perkapita per bulan untuk makanan dan non makanan sehingga seseorang tidak dikatakan sebagai penduduk miskin. GK merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari.

GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

b) Jumlah Penduduk Miskin

Merupakan jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

c) Persentase Penduduk Miskin (Head Count Index-P0)

Merupakan persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan.

d) Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1)

Merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap GK. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari GK.

e) Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2)

Memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada tahun 2011 dari 1,16 juta penduduk Kebumen, sekitar 279.400 orang diantaranya dikategorikan sebagai penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin ini menurun sekitar 16.600 orang di tahun 2012 menjadi 262.800 orang. Kemudian di tahun 2013, angka ini turun lagi sekitar 11.700 orang menjadi 251.100 ribu orang. Tren penurunan ini masih terjadi di tahun 2014 dan 2015, di mana di tahun 2014 turun sekitar 8.800 orang atau menjadi sekitar 242.300 orang dan di tahun 2015 turun sekitar 400 orang menjadi 241.900 orang. Penurunan jumlah penduduk miskin selama periode 2011-2015 menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam upaya menanggulangi kemiskinan di wilayah Kebumen.

Tabel 2.9
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Kebumen, 5 Kabupaten Tetangga
dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015

Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Cilacap	282,00	265,70	255,70	239,80	243,50
Banyumas	328,50	309,80	296,50	283,50	285,90
Banjarnegara	177,30	167,00	166,80	159,50	165,40
Kebumen	279,40	262,80	251,10	242,30	241,90
Purworejo	121,90	114,80	109,00	102,10	101,30
Wonosobo	183,00	172,40	170,10	165,80	166,40
Jawa Tengah	5.310,00	4.950,00	4.810,00	4.560,00	4.510,00

Sumber : Badan Pusat Statistik,2017

Pada tahun 2015, hanya Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo yang mengalami penurunan jumlah penduduk miskin. Sedangkan empat kabupaten lain di sekitar Kebumen yakni Cilacap, Banyumas, Banjarnegara dan Wonosobo, jumlah penduduk miskinnya justru bertambah.

Di tingkat Provinsi Jawa Tengah, selama periode 2011-2015 jumlah penduduk miskin turun dari 5,31 juta orang di tahun 2011 menjadi 4,51 juta orang di tahun 2015 atau turun sekitar 800.000 orang. Pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kebumen turun sekitar 37.500 orang dari 279.400 orang di tahun 2011 menjadi 241.900 orang di tahun 2015.

Tabel 2.10
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Kebumen, 5 Kabupaten Tetangga
dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015

Kabupaten	Persentase Penduduk Miskin (%)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Cilacap	17,15	15,92	15,24	14,21	14,39
Banyumas	21,11	19,44	18,44	17,45	17,52
Banjarnegara	20,38	18,87	18,71	17,77	18,37
Kebumen	24,06	22,40	21,32	20,50	20,44
Purworejo	17,51	16,32	15,44	14,41	14,27
Wonosobo	24,21	22,50	22,08	21,42	21,45
Jawa Tengah	16,20	14,98	14,44	13,58	13,32

Sumber : Badan Pusat Statistik,2017

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kebumen selama periode 2011-2015 terus menurun. Pada tahun 2011, sekitar 24,06 persen penduduk di Kabupaten Kebumen masuk sebagai kategori penduduk miskin. Angka ini menurun menjadi sekitar 22,40 persen di tahun 2012 dan terus turun di tahun 2013 menjadi 21,32 persen. Pada tahun 2014 turun sebesar 0,82 poin menjadi 20,50 persen dan hanya turun sedikit di tahun 2015 menjadi 20,44 persen. Untuk wilayah Jawa Tengah, persentase penduduk miskin turun dari 16,20 persen di tahun 2011 menjadi 13,32 persen di tahun 2015.

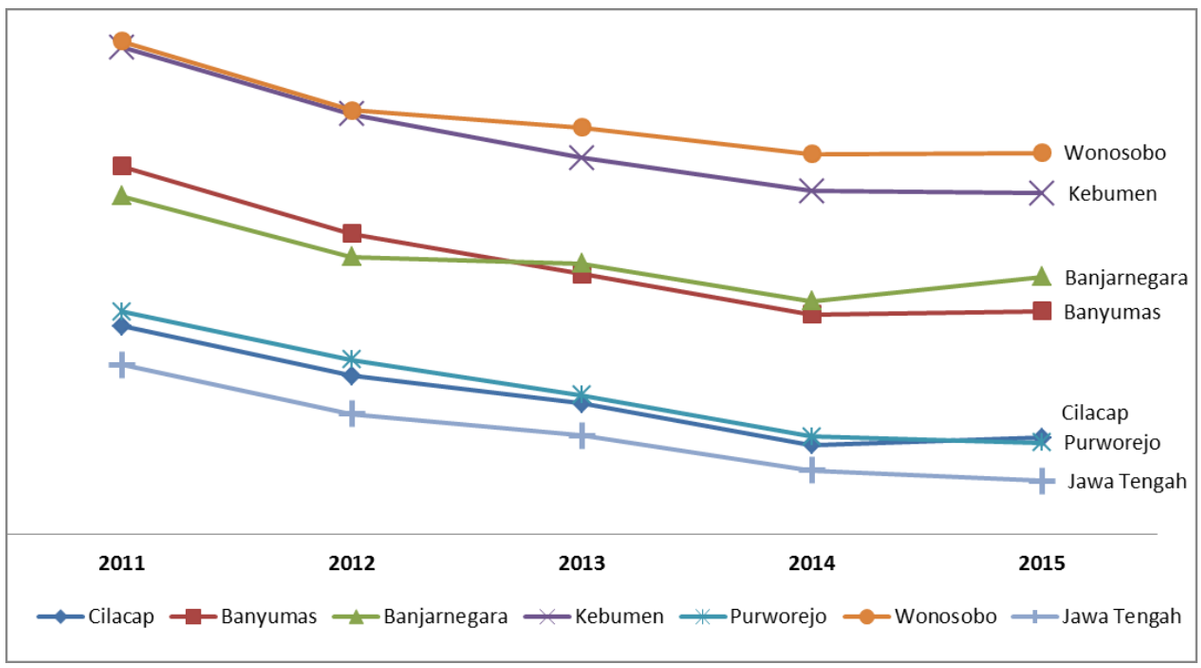

Gambar 2.16
Tren Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten Kebumen,
5 Kabupaten Tetangga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Tabel 2.11
Perkembangan Perubahan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Kebumen, 5 Kabupaten Tetangga
dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015

Kabupaten	Besaran Perubahan Persentase Penduduk Miskin				
	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2011-2015
Cilacap	1,23	0,68	1,03	(0,18)	2,76
Banyumas	1,67	1,00	0,99	(0,07)	3,59
Banjarnegara	1,51	0,16	0,94	(0,60)	2,01
Kebumen	1,66	1,08	0,82	0,06	3,62
Purworejo	1,19	0,88	1,03	0,14	3,24
Wonosobo	1,71	0,42	0,66	(0,03)	2,76
Jawa Tengah	1,25	0,54	0,86	0,26	2,88

Sumber : Badan Pusat Statistik,2017

Perubahan persentase penduduk miskin Kabupaten Kebumen jika dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitar Kebumen, maka besarnya penurunan angka persentase kemiskinan Kabupaten Kebumen dari tahun ke tahun selama periode 2011-2015, menunjukan progres yang cukup baik. Diawali pada periode 2011-2012, persentase kemiskinan Kabupaten Kebumen turun sebesar 1,66 poin atau tertinggi kedua setelah Kabupaten Banyumas (1,67 poin). Kemudian di periode 2012-2013 mengalami penurunan tertinggi diantara kabupaten lain di sekitar Kebumen, yakni turun sebesar 1,08 poin. Periode 2013-2014, persentase penduduk miskin turun sekitar 0,82 poin dan di periode 2014-2015, hanya turun sekitar 0,06 poin. Namun pada periode 2014-2015 tersebut, hanya Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo yang mengalami penurunan persentase penduduk miskin, sedangkan empat kabupaten lain yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kebumen, justru persentase penduduk miskinnya meningkat.

Tabel 2.12
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Kebumen, 5 Kabupaten Tetangga
dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015

No.	Kabupaten	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Cilacap	2,59	2,22	2,06	2,37	2,71
2.	Banyumas	3,69	3,42	3,24	2,48	2,91
3.	Banjarnegara	3,15	3,39	2,91	2,88	3,51
4.	**Kebumen**	**3,94**	**3,35**	**3,57**	**2,78**	**4,08**
5.	Purworejo	2,82	2,78	1,98	1,85	2,43
6.	Wonosobo	4,52	3,91	4,26	3,91	4,74
7.	Jateng	2,58	2,39	2,37	2,09	2,44

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk Kabupaten Kebumen cenderung fluktuatif selama periode 2011-2015. Pada tahun 2011 indeks P1 sebesar 3,94, turun menjadi 3,35 di tahun 2012 dan meningkat kembali di tahun 2013 menjadi 3,57. Pada tahun 2014 indeks tersebut turun kembali menjadi sebesar 2,78, namun pada tahun 2015 naik kembali menjadi 4,08 atau naik sebesar 1,3 poin dibandingkan tahun 2014. pada periode 2011-2014 tren indeks P1 Kabupaten Kebumen sesungguhnya menunjukkan arah yang positif, yakni cenderung menurun dari 3,94 di tahun 2011 menjadi 2,78 di tahun 2014 atau turun sebanyak 1,16 poin. Hal tersebut mengindikasikan

bahwa rata-rata pengeluaran per kapita penduduk miskin di Kabupaten Kebumen sudah semakin mendekati garis kemiskinan. Namun di tahun 2015 indeks tersebut meningkat tajam ke titik 4,08 yang menunjukkan melebarnya kembali jarak antara rata-rata pengeluaran perkapita per bulan penduduk miskin di Kabupaten Kebumen terhadap garis kemiskinan. Tren tersebut juga dialami oleh beberapa kabupaten lain di sekitar Kebumen, termasuk untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah. Indeks P1 Jawa Tengah menurun selama periode 2011-2014 dari 2,58 menjadi 2,09, namun di tahun 2015 naik kembali menjadi 2,44.

Tabel 2.13
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Kebumen, 5 Kabupaten Tetangga
dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015

No.	Kabupaten	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Cilacap	0,60	0,50	0,45	0,61	0,76
2.	Banyumas	0,99	0,91	0,83	0,56	0,71
3.	Banjarnegara	0,74	0,94	0,77	0,73	0,93
4.	**Kebumen**	**0,96**	**0,75**	**0,91**	**0,61**	**1,19**
5.	Purworejo	0,74	0,65	0,43	0,42	0,63
6.	Wonosobo	1,25	1,04	1,25	1,09	1,60
7.	Jateng	0,66	0,57	0,59	0,51	0,65

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Perkembangan nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) selama periode 2011-2015 di Kabupaten Kebumen juga masih fluktuatif. Tahun 2011 nilai indeks P2 Kabupaten Kebumen sebesar 0,96 turun menjadi 0,75 di tahun 2012 dan naik kembali menjadi 0,91 di tahun 2013. Tahun 2014 turun cukup banyak ke titik 0,61 namun di tahun 2015 naik cukup tinggi ke titik 1,19. Di tahun 2015 hanya ada 1 kabupaten selain Kebumen yang nilai indeks P2-nya di atas 1 yakni Kabupaten Wonosobo. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian karena dengan masih tingginya indeks P2 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran konsumsi antar penduduk miskin masih terjadi kesenjangan.

Selama periode 2011-2014 indeks P2 untuk Jawa Tengah juga menurun dari 0,66 di tahun 2011 menjadi 0,51 di tahun 2014. Namun di tahun 2015, indeks ini naik kembali ke posisi titik 0,65. Perkembangan nilai indeks P2 untuk Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan beberapa kabupaten lain di sekitar Kebumen.

Tabel 2.14
Perkembangan Garis Kemiskinan
Kabupaten Kebumen, 5 Kabupaten Tetangga
dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015

No.	Kabupaten	Garis Kemiskinan (rupiah/perkapita/bulan)				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Cilacap	224.530	240.025	256.615	265.714	273.828
2.	Banyumas	249.807	271.800	295.742	309.106	320.585
3.	Banjarnegara	192.303	205.369	221.056	229.718	236.399
4.	**Kebumen**	**234.005**	**250.413**	**267.763**	**277.280**	**292.177**
5.	Purworejo	235.459	254.314	273.481	284.409	294.158
6.	Wonosobo	226.827	242.047	258.522	267.548	275.180
7.	Jateng	209.611	233.769	261.881	281.570	297.851

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Garis kemiskinan untuk Kabupaten Kebumen terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 GK Kabupaten Kebumen pada kisaran 234 ribu rupiah/kapita/bulan, meningkat menjadi 250 ribu rupiah/kapita/bulan pada tahun 2012 dan pada tahu 2013 hampir 268 ribu rupiah/kapita/bulan. Angka tersebut terus naik di tahun 2014 menjadi sekitar 277 ribu rupiah/kapita/bulan dan di tahun 2015 menyentuh angka 292 ribu rupiah/kapita/bulan. Perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan beberapa kabupaten lain di sekitarnya pada periode 2011-2015.

Selama periode 2011-2015, nilai GK terendah selalu di Kabupaten Banjarnegara dengan sekitar dan yang tertinggi di Kabupaten Banyumas. Jika dibandingkan dengan kondisi di Jawa Tengah, maka lonjakan kenaikan GK di Kabupaten Kebumen sedikit lebih kecil dibandingkan lonjakan kenaikan GK di wilayah Jawa Tengah. Selama periode 2011-2015, GK Kebumen naik dari 234 ribu/kapita/bulan menjadi 292 ribu/kapita/bulan (atau naik sekitar 58 ribu/kapita/bulan dengan kenaikan rata-rata per tahun sekitar 14.500 /kapita/bulan). Sedangkan untuk wilayah Jawa Tengah, dari 209 ribu/kapita/bulan di tahun 2011, naik menjadi 297 ribu/kapita/bulan (naik sekitar 88 ribu/kapita/bulan dengan

kenaikan rata-rata per tahun sekitar 22.000/kapita/bulan). Kenaikan garis kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari kenaikan harga-harga kebutuhan hidup, terutama kebutuhan pokok. Mengendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat menjadi hal yang memungkinkan untuk mengurangi naiknya garis kemiskinan.

Perkembangan indikator kemiskinan makro Kabupaten Kebumen selama periode 2011-2015 cenderung menunjukkan tren yang positif, dimana jumlah dan persentase penduduk miskin selalu berkurang untuk setiap tahun. Pada periode tersebut, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 37.500 orang dan persentase penduduk miskin menurun sebanyak 3,62 poin (tertinggi di antara kabupaten-kabupaten sekitar Kebumen). Progres yang cukup baik tersebut merupakan realisasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam upaya mengatasi/menanggulangi kemiskinan di wilayah Kebumen. Hal tersebut selaras dengan predikat Kabupaten Kebumen sebagai "Kabupaten dengan penanggulangan kemiskinan terbaik kedua se-Jawa Tengah tahun 2015".

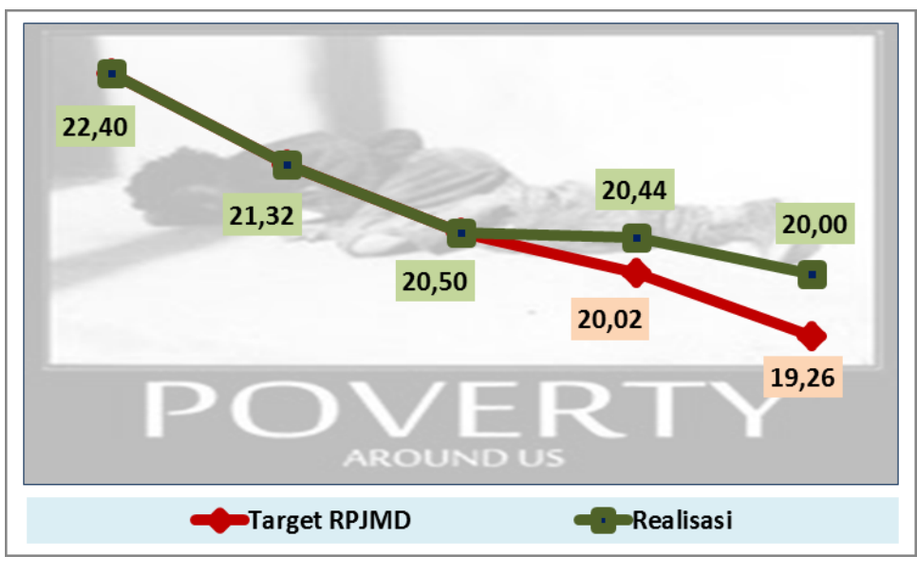

Gambar 2.17
Perbandingan Perkembangan Target dan Realisasi
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kebumen
Tahun 2012-2016 (Persen)

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Meskipun tingkat kemiskinan Kabupaten Kebumen tahun 2012-2016 terus menurun, namun angka pada tahun 2015 dan 2016 belum memenuhi target dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Angka kemiskinan tahun 2015 sebagai baseline data kemiskinan dalam RPJMD dipasang pada angka 20,02%, namun realisasinya masih berada pada angka 20,44%. Sedangkan target capaian angka kemiskinan pada tahun 2016 sebesar 19,26%, menurut perkiraan data dari BPS masih berada pada kisaran angka 20%. Berdasarkan metodologi penghitungan penduduk miskin, untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dapat ditempuh dengan cara mengendalikan kenaikan garis kemiskinan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

a) Mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat baik makanan maupun non makanan.
b) Dengan melakukan perbaikan infrastruktur jalan dan sarana transportasi sehingga memudahkan akses masyarakat untuk memasarkan produk hasil pertanian dan akses untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
c) Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengkonsumsi makanan dengan tingkat kalori yang tinggi dan menekan/mengurangi konsumsi yang sifatnya non kalori (rokok dan sejenisnya) dengan mengalihkan untuk konsumsi makanan berkalori tinggi.
d) Mengawal program-program pemerintah pusat terkait penanggulangan kemiskinan seperti raskin/rastra, KIS, KIP PKH dan lain-lain, serta memastikan program tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah dan meninggalkan kebiasaan “bagito/bagidil”.
e) Penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sesuai dengan aturan, dengan harapan para pekerja dapat menerima upah minimal sesuai dengan UMK yang telah ditetapkan, sehingga daya beli masyarakat meningkat.
f) Meningkatkan kesadaran kepada masyarakat melalui berbagai sosialisasi terkait hidup layak yakni hidup yang lebih bermartabat.
g) Meningkatkan pendidikan masyarakat sehingga dalam jangka panjang dapat mengikis “budaya miskin” yang sudah terlanjur diwariskan melalui kehidupan sehari-hari di masyarakat.

7) Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas yang tertangani menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Dari sisi kenyamanan masyarakat, semakin sedikit/rendah kriminalitas yang terjadi, semakin nyaman masyarakat dalam melakukan setiap aktivitasnya, sehingga upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat semakin optimal.

Kasus kriminalitas yang ditangani di Kabupaten Kebumen selama 2012-2016 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan berkurangnya kasus pelanggaran hukum yang terjadi, yang mengindikasikan kesejahteraan masyarakat semakin baik.

Tabel 2.15
Jumlah Penanganan Tindak Kriminalitas
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

NO.	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016*
1.	Kasus Narkoba	8	10	6	0	12
2.	Kasus Pembunuhan	0	1	2	2	1
3.	Kasus Seksual	17	21	1	0	11
4.	Kasus Penganiayaan	31	8	2	17	5
5.	Kasus Pencurian	85	96	39	82	47
6.	Kasus Penipuan	16	12	9	6	9
7.	Kasus Pemalsuan Uang	4	4	0	1	0
Total Kasus		161	152	59	108	85
Jumlah penduduk		1.183.763	1.176.662	1.181.006	1.184.938	1.188.622
Rasio angka kriminalitas yang tertangani		1,36	1,29	0,50	0,50	

Sumber : Polres Kebumen (Profil Daerah), 2017
*Keterangan : *) Angka per Juni 2016*

8) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur 3 (tiga) dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan kualitas hidup penduduk. Pada bulan September 2015 di-launching metode baru perhitungan IPM yang mencakup Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH); pendidikan yang semula diukur dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH); serta dimensi pengeluaran diukur dengan pengeluaran per kapita.

Perubahan pengukuran IPM dari metode lama ke metode baru pada dasarnya terletak pada dimensi pendidikan yaitu Angka Melek Huruf (AMH) berubah menjadi angka Harapan Lama Sekolah (HLS) untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas, kemudian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 15 tahun ke atas berubah menjadi 25 tahun ke atas. Kemudian pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli yang diukur dengan menggunakan 96 komoditas (66 komoditas makanan dan 30 komoditas non makanan).

Dengan metode perhitungan baru, IPM Kabupaten Kebumen periode tahun 2012-2016, mengalami peningkatan dari 64,47 tahun 2012 menjadi 65,67 pada tahun 2014, 66,48 tahun 2015 dan diperkirakan meningkat menjadi 67,29 pada tahun 2016. Perkembangan IPM Kabupaten Kebumen tahun 2012-2016, dapat dilihat dalam berikut.

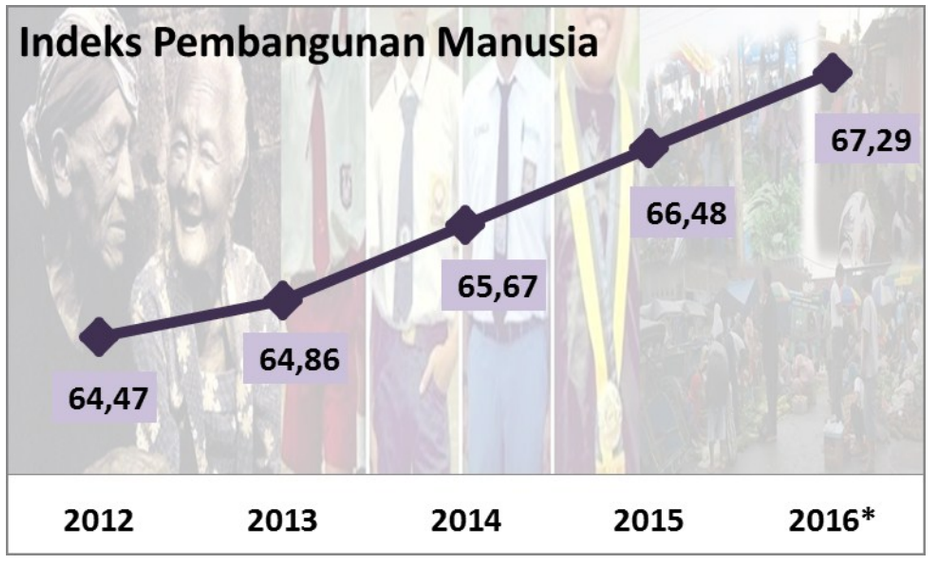

Gambar 2.18
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

Sumber: BPS, 2017
*Keterangan: *) Angka Perkiraan*

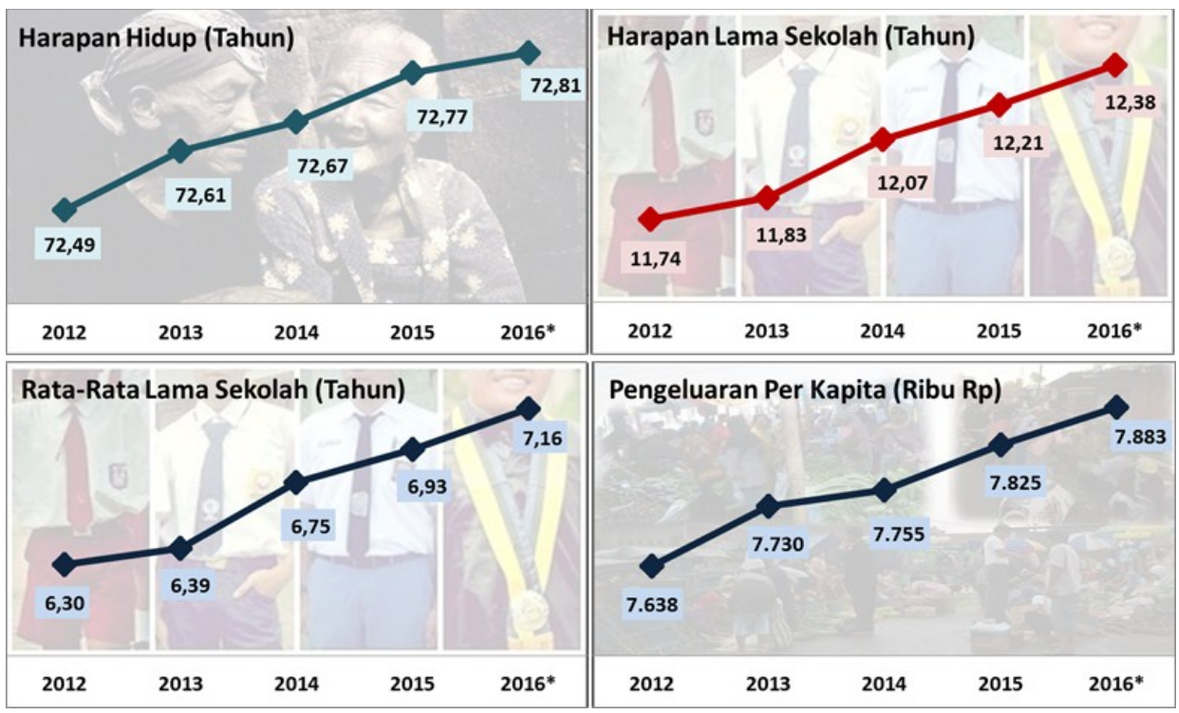

Gambar 2.19
Perkembangan Variabel Pembentuk IPM
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

Sumber: BPS, 2017
*Keterangan: *) Angka Perkiraan*

AHH adalah angka yang menunjukkan perkiraan usia seseorang yang dihitung sejak dilahirkan dan merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk umumnya dan kesehatan pada khususnya. Kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Kebumen secara umum semakin membaik berdasarkan rata harapan hidup yang semakin panjang. AHH naik dari 72,49 pada tahun 2012 menjadi 72,67 pada tahun 2014, dan diperkirakan meningkat menjadi 72,81 tahun pada 2016. Angka ini menunjukkan secara rata-rata penduduk yang dilahirkan di Kabupaten Kebumen dapat bertahan hidup hingga usia 72-73 tahun.

Kenaikan AHH ini menunjukkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kebumen yang dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, pelayanan kesehatan, serta genetika/keturunan. Upaya-upaya yang diperlukan dan terus dilakukan untuk meningkatkan AHH di antaranya pemugaran RTLH dan peningkatan sanitasi (pemenuhan kebutuhan air bersih, jamban sehat bagi keluarga), perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), peningkatan keterampilan tenaga kesehatan, dan pendampingan kesehatan ibu dan anak.

Sedangkan HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perkembangan HLS di Kabupaten Kebumen cenderung meningkat dari sebesar 11,74 pada tahun 2012 menjadi 12,07 pada tahun 2014, dan diperkirakan mencapai 12,38 pada tahun 2016.

RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS di Kabupaten Kebumen selama periode 2012-2014 meningkat dari 6,30 tahun menjadi 6,75 tahun dan diperkirakan tahun 2016 meningkat menjadi 7,16 tahun. Selaras dengan kebijakan nasional pembangunan pendidikan dalam rangka mendukung wajib belajar 12 tahun, maka peningkatan angka HLS dan RLS perlu diupayakan melalui peningkatan aksesibilitas dan pemerataan penyelenggaraan pendidikan meliputi pembangunan/rehabilitasi gedung dan ruang kelas baru, dukungan pendampingan BOSDA pendidikan menengah dan khusus, pemberian beasiswa miskin, bantuan operasional penyelenggaraan Paket A, B dan C serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Sementara itu, pengeluaran per kapita di Kabupaten Kebumen meningkat dari Rp.7.638 ribu pada tahun 2012 menjadi Rp.7.755 ribu pada tahun 2014, dan diperkirakan mencapai Rp.7.883 ribu pada tahun 2016. Meskipun pengeluaran per kapita (disesuaikan) di Kabupaten Kebumen meningkat, namun perlu adanya upaya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dengan memperketat belanja barang dan jasa, penghematan penggunaan BBM dan listrik, diversifikasi pangan, serta adanya pelayanan dan kemudahan dalam berinvestasi.

Selama periode 2011-2015 Angka IPM Kabupaten Kebumen berada di bawah angka IPM Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2011, angka IPM Jawa tengah sebesar 66,64, sedangkan Kabupaten Kebumen sebesar 64,05. Pada tahun 2015, angka IPM Jawa Tengah sebesar 69,49, sementara Kabupaten Kebumen masih berada di bawahnya dengan angka 66,48.

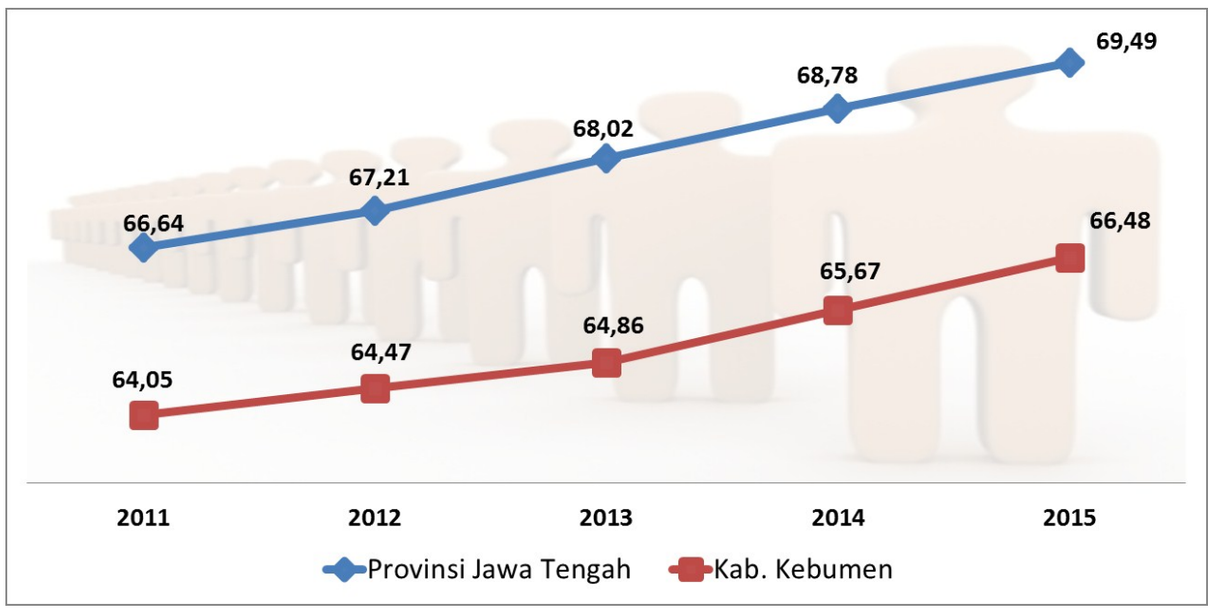

Gambar 2.20
Perbandingan IPM Kabupaten Kebumen dan Jawa Tengah
Tahun 2011-2015

Sumber: BPS, 2017

b. Fokus Kesejahteraan Sosial

1) Pendidikan

Kondisi pendidikan masyarakat Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari berbagai indikator, di antaranya Angka Partisipasi Sekolah, Angka Kelulusan, dan Angka Melanjutkan.

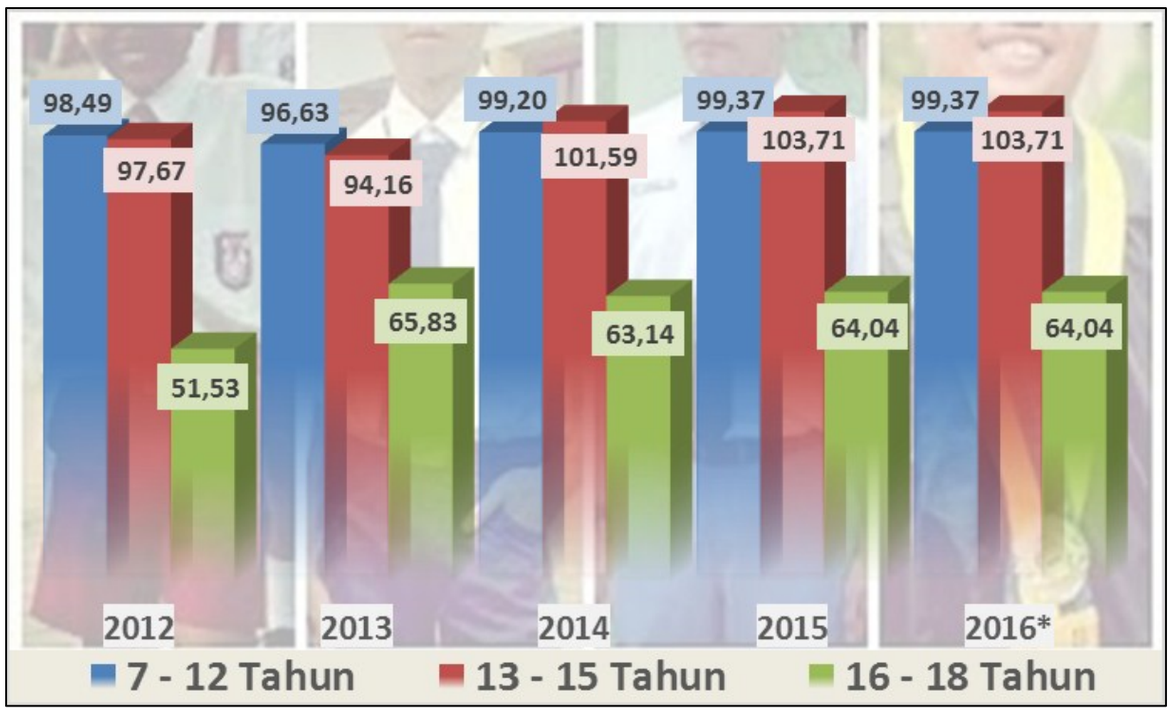

Gambar 2.21
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

Sumber: Dinas Pendidikan, 2017
*Keterangan : *) Angka sementara*

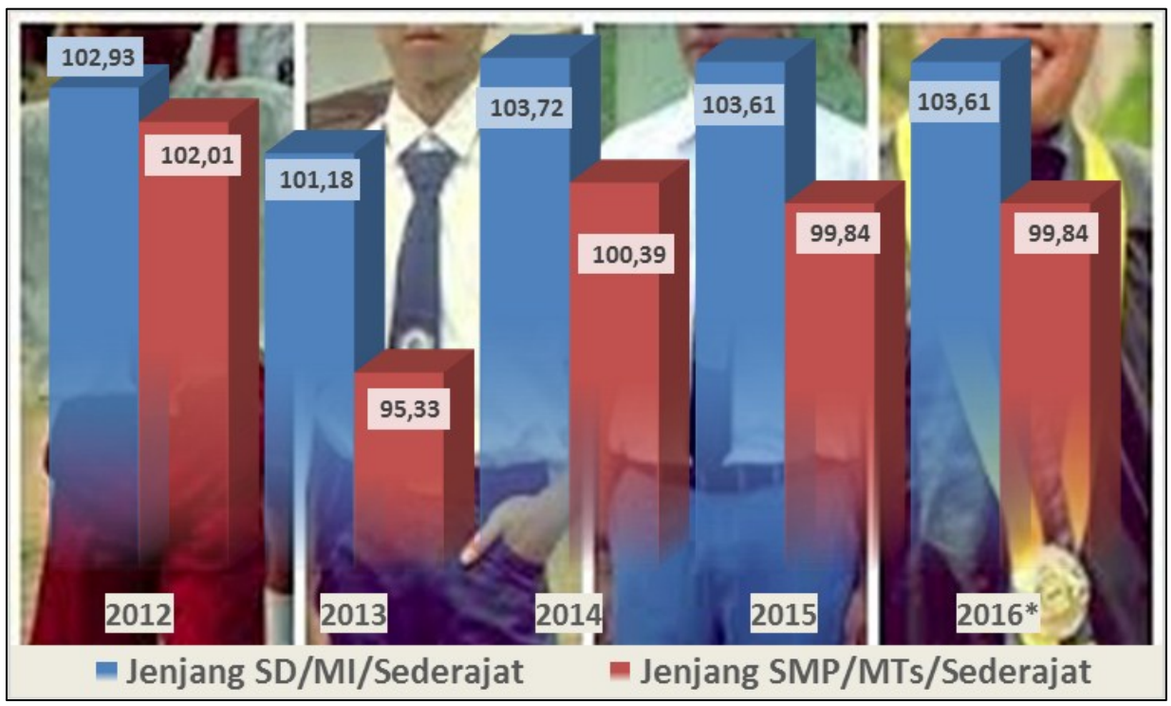

Gambar 2.22
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

Sumber: Dinas Pendidikan, 2017
*Keterangan : *) Angka Sementara*

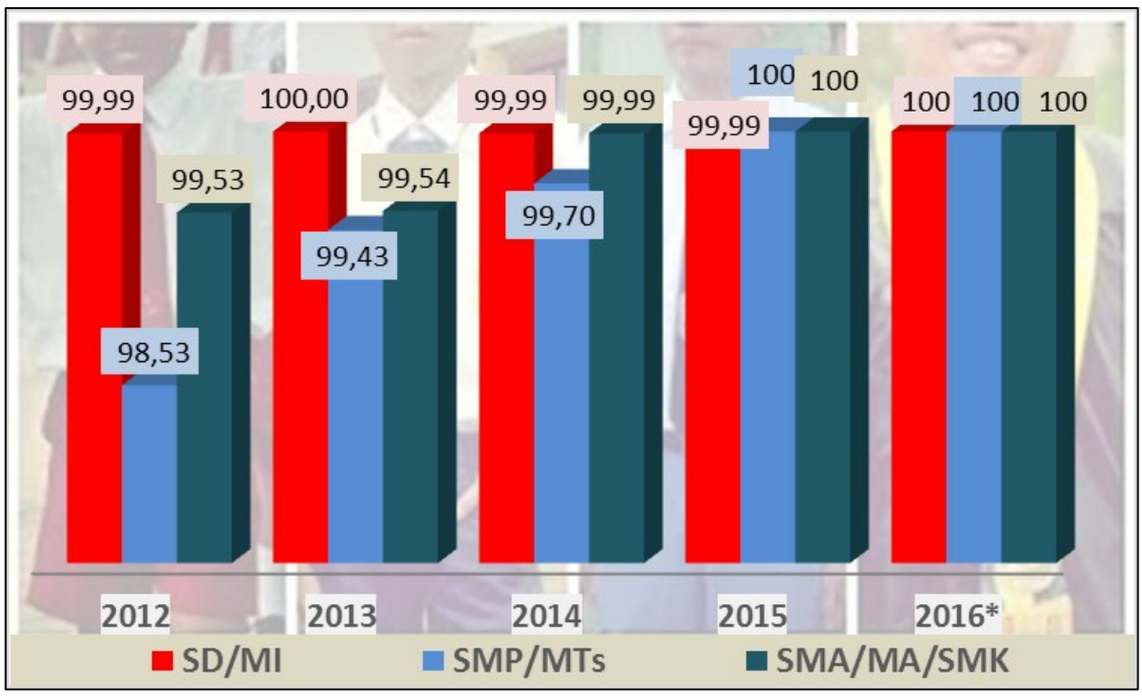

Gambar 2.23
Perkembangan Angka Kelulusan
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

Sumber: Dinas Pendidikan, 2017
*Keterangan : *) Angka Sementara*

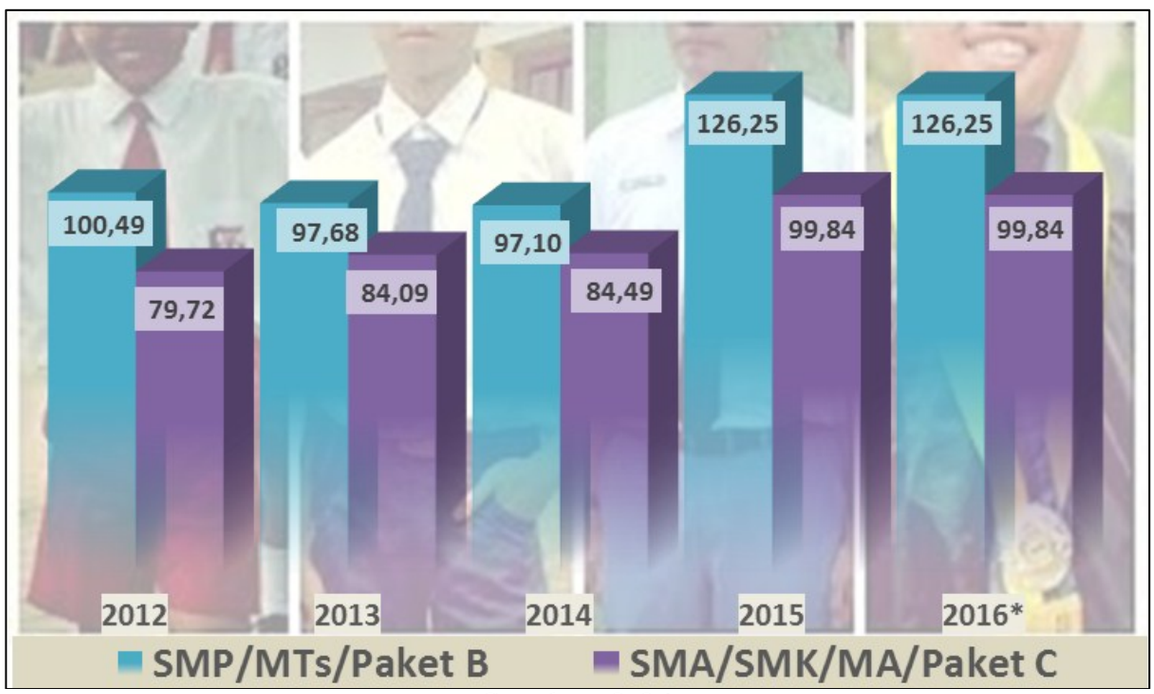

Gambar 2.24
Perkembangan Angka Melanjutkan
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

Sumber: Dinas Pendidikan, 2017
*Keterangan : *) Angka Sementara*

Dari gambar-gambar, secara umum kondisi profil pendidikan di Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2016 cukup baik. Hal ini terlihat dari APS, angka kelulusan dan angka melanjutkan yang meningkat dibanding kondisi tahun 2012. Namun demikian, APK angkanya pada tahun 2016 cenderung menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Kebumen.

2) Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu aspek pembangunan yang sangat vital. Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajad kesehatan yang lebih baik. Maka dari itu pemerintah juga mentargetkan pembangunan kesehatan untuk masyarakat yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemajuan dan kemampuan hidup sehat, agar derajat kesehatan optimal, dan tidak mudah terkena penyakit sehingga usia harapan hidup dapat panjang. Amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan dan UUD 1945 Pasal 28 huruf h ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Tabel 2.16
Capaian Indikator Pembangunan Kesehatan
Kabupaten Kebumen Tahun 2014-2016

No	Uraian	TAHUN		
		2014	2015	2016
1	Jumlah Balita	88.760 anak	88.200 anak	87.636 anak
	- Gizi kurang	257=0,29%	271=0,31%	268 = 0,31%
	- Gizi buruk	10=0,01%	9=0,01%	8 = 0,01%
2	Jumlah Ibu hamil KEK	1,1%	1,02%	0,63%
3	Angka Kematian Ibu (AKI)	12 Kss	14 Kss	16 Kss
		58,37/100.000 KH	68,48/100.000 KH	80, /100.000 KH
4	Angka Kematian Bayi (AKB)	208 Kss	201 Kss	179 Kss
		10,12/1.000 KH	9,83/1.000 KH	8,95/1.000 KH
5	Usia Harapan Hidup	70,45	70,45	72,81
6	Angka Kesakitan Penyakit DBD	14,4/100.000	18,22/100.000	40,6/100.000
7	Cakupan Ibu hamil K1	102%	103%	100%
8	Cakupan Ibu Hamil K4	98,15%	98, 4 %	94,19%
9	Cakupan persalinan Oleh Nakes	98,15%	98,00%	99,70%
10	Imunisasi Anak Sekolah	DT=99,46%	DT=99,65%	DT=99,50%
		TD=99,67%	TD=99,69%	TD=99,54%
		Campak=99,42%	Campak=99,48%	Campak=99,51 %

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

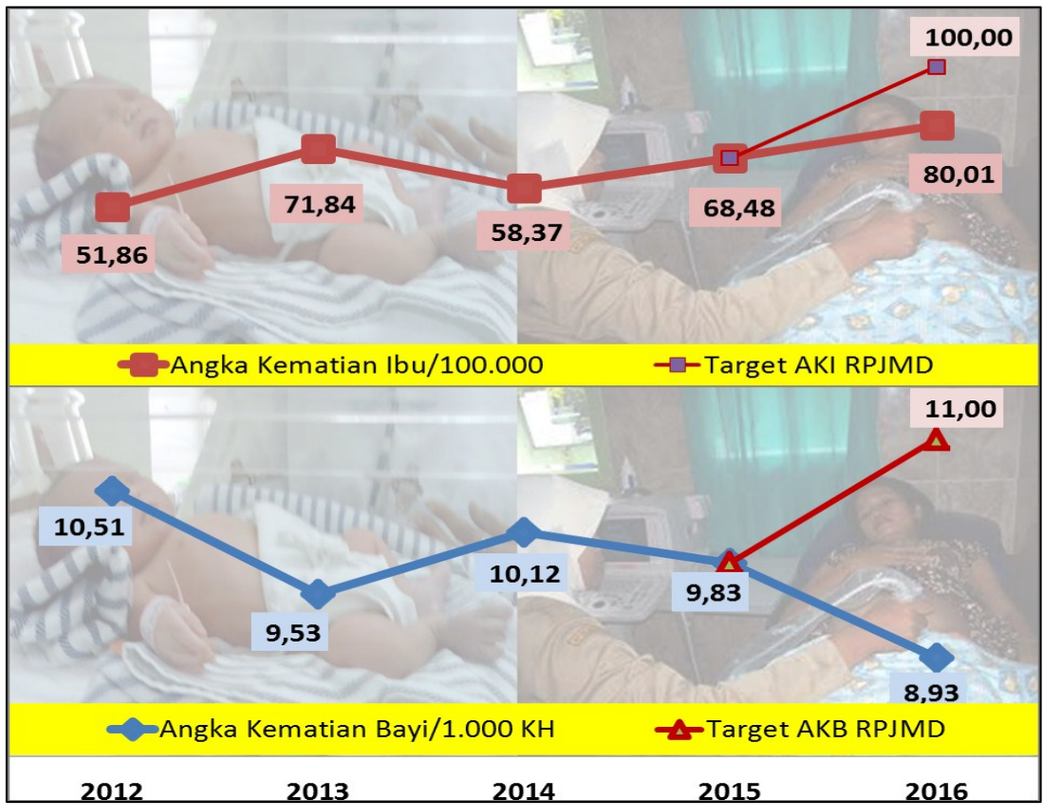

Gambar 2.25
Perkembangan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

Sumber: Dinas Kesehatan, 2017

Kontribusi bidang kesehatan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terwakili oleh indikator Angka Kematian Bayi (AKB), angka kematian balita (AKABA) dan angka kematian ibu (AKI). Capaian indikator AKI per 100.000 Kelahiran Hidup selama periode 2012-2016 cenderung meningkat dari angka 51,86 pada tahun 2012 menjadi 80,01 pada tahun 2016. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target dalam RPJMD, angka capaian AKI pada tahun 2016 jauh di bawah angka RPJMD yaitu 100. Sementara itu, AKB per 1.000 Kelahiran Hidup selama periode 2012-2016 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2012, AKB/1.000 Kelahiran Hidup mencapai 10,51, dan pada tahun 2016 angka AKB menurun menjadi 8,93. Capaian AKB ini apabila dibandingkan dengan target capaian RPJMD sebesar 11 juga terlampaui.

Kecenderungan harapan penduduk berumur panjang dan sehat diukur dengan Usia Harapan Hidup (AHH) waktu lahir. Oleh karena itu, angka harapan hidup waktu lahir (eo) memiliki korelasi yang sangat erat dengan angka kematian bayi atau *infan mortality rate* (AKB/IMR). Kemudian angka kematian bayi dipengaruhi pula oleh pemeriksaan dan perawatan kehamilan, pertolongan persalinan, perawatan neonates dan status gizi bayi (0-11 bulan).

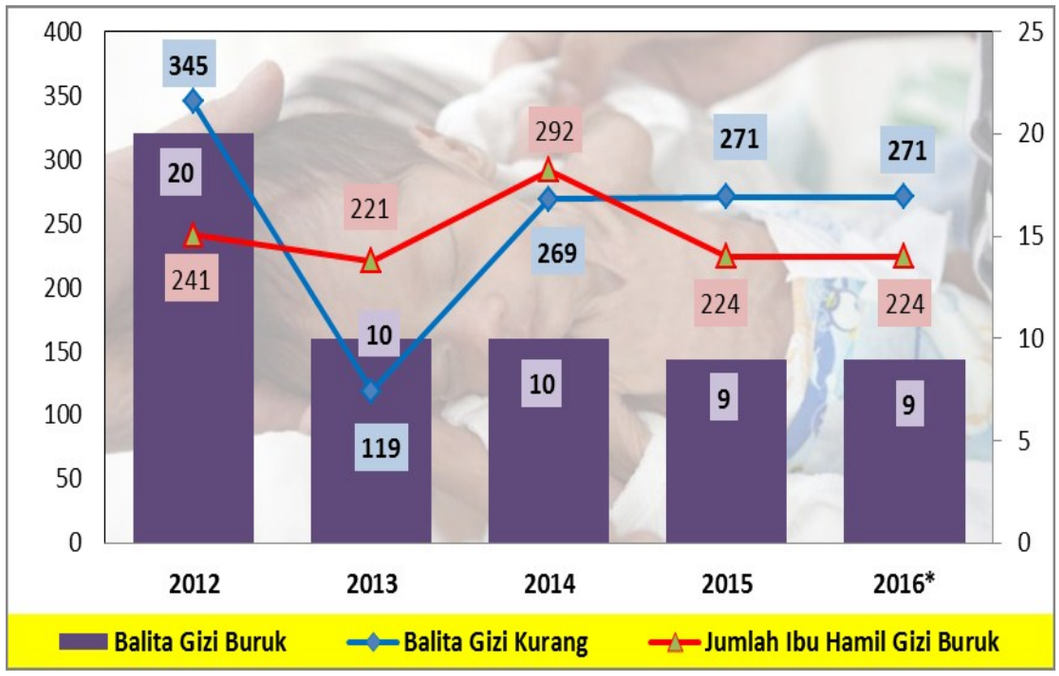

Gambar 2.26
Perkembangan Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk,
Balita Kurang Gizi dan Ibu Hamil Gizi Buruk
di Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

Sumber: Dinas Kesehatan, 2017
*Keterangan : *) Angka Sementara*

Kondisi derajat kesehatan masyarakat juga dapat dilihat dari jumlah kasus balita gizi buruk (BGB), balita kurang gizi (BKG) dan ibu hamil gizi buruk (IHGB). Pada periode 2012-2016, BGB, BKG dan IHGB cenderung mengalami penurunan, dimana BGB turun dari 20 kasus pada 2012 menjadi 9 kasus pada tahun 2016. BKG turun dari 345 kasus tahun 2012 menjadi 271 kasus pada 2016. Sementara IHGB cenderung menurun dari 241 kasus pada 2012 menjadi 224 kasus pada tahun 2016.

c. Fokus Seni, Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan salah satu faktor pendukung upaya pembangunan manusia seutuhnya. Oleh karena itu, indikator tersebut menjadi penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap benda cagar budaya serta kegiatan olahraga yang diselenggarakan merupakan indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.17
Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan dan Kegiatan Olahraga
di Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

NO.	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016*
1.	Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan	30	35	12	12	15
2.	Jumlah Grup Kesenian	204	204	311	311	375
3.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4	4	4	11	11
4.	Kegiatan Olahraga	1	1	1	7	7
5.	Jumlah Klub Olahraga	68	72	86	86	86
6.	Jumlah Gedung Olahraga	11	14	16	16	16

Sumber:Profil Daerah Tahun 2016
*Keterangan: *) Data per Juni 2016*

4. Aspek Pelayanan Umum

Gambaran umum kondisi daerah dari aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 5 (dua) fokus layanan, yaitu Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar, Fokus Layanan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Fokus Layanan Pilihan, dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

a. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pondasi atau pilar terpenting dalam upaya meningkatkan kualitas manusia. Pembangunan bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing output pendidikan serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra pendidikan. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah berusaha secara optimal untuk meningkatkan pendidikan dengan mengelola potensi yang ada pada urusan pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan kejuruan, pendidikan non formal dan informal.

a) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Badan Pusat Statistik merupakan perbandingan antara rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK digunakan untuk melihat tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Semakin tinggi angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan apapun menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, dengan mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

Selama tahun 2012-2016, kecenderungan penurunan nilai APK ditunjukkan pada jenjang SMP/MTs. Hal ini mengisyaratkan adanya penurunan pada jumlah murid yang tinggal kelas atau berada di jenjang sekolah yang tidak sesuai dengan usianya, yang mana berarti terjadi peningkatan pada kualitas murid dan sekolah pada jenjang SMP/MTs. Namun demikian, terjadi peningkatan nilai APK pada jenjang SD/Sederajat dan SMA/MA/SMK. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan pada jumlah penduduk non usia 7-12 tahun yang bersekolah pada jenjang SD/SMP dan 16-18 tahun yang bersekolah pada jenjang SMA/MA/SMK, yang dapat terjadi karena beberapa hal seperti tidak lulusnya murid kelas 6 dan 12 atau meningkatnya jumlah murid yang tidak naik kelas.

Tabel 2.18
Perkembangan APK Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

NO.	TINGKAT SEKOLAH	2012	2013	2014	2015*	2016**
1.	SD/Sederajat	102,93	101,18	103,72	103,72	103,72
2.	SMP/Sederajat	102,33	95,33	100,39	100,39	100,39
3.	SLTA/Sederajat	62,03	81,23	82,7	84,17	84,17

Sumber: Dinas Dinas Pendidikan, 2017
*Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara*

b) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah suatu persentase yang menunjukan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Apabila dibandingkan dengan Angka Pendidikan Kasar (APK), APM dianggap lebih baik karena mampu menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada di jenjang pendidikan tertentu. Perhitungan APM di suatu jenjang pendidikan diambil dari pembagian jumlah siswa dengan kelompok umur tertentu (7-12, 13-15, 16-18 tahun) di suatu jenjang pendidikan tertentu (SD/Sederajat, SMP/Sederajat, dan SMA/Sederajat) dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu dikalikan 100%.

Selama tahun 2012-2016 APM pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Kebumen menunjukkan kecenderungan adanya peningkatan.yang berarti bahwa penduduk usia sekolah 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun di Kabupaten Kebumen yang bersekolah pada jenjang SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat semakin banyak.

Tabel 2.19
Perkembangan APM Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

NO.	TINGKAT SEKOLAH	2012	2013	2014	2015*	2016**
1.	SD /Sederajat	88,01	86,66	88,74	90,82	90,82
2.	SMP/Sederajat	74,18	71,67	75,62	75,62	75,62
3.	SLTA/Sederajat	46,25	60,66	58,5	66,24	66,24

Sumber: Dinas Dinas Pendidikan, 2017
*Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara*

c) Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APS) jenjang SMP/Sederajat selama periode 2012-2016 cenderung mengalami penurunan untuk semua jenjang pendidikan. Penurunan Angka Putus Sekolah ini disebabkan karena optimalnya upaya-upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui program-program Bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten berupa BOS Pusat, BOSDA Provinsi, BBPD Kabupaten, beasiswa retievel untuk anak putus sekolah, beasiswa miskin/beasiswa transisi bagi siswa rawan putus sekolah, dan beasiswa berprestasi bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu mempunyai korelasi positif terhadap penurunan Angka Putus Sekolah.

Tabel 2.20
Perkembangan Angka Putus Sekolah
Kabupaten KebumenTahun 2012-2016

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	2012	2013	2014	2015*	2016**
1.	SD/Sederajat	0,07	0,07	0,09	0,07	0,07
2.	SMP/Sederajat	0,31	0,17	0,29	0,15	0,15
3.	SLTA/Sederajat	0,11	0,24	0,43	0,16	0,16

Sumber: Dinas Dinas Pendidikan, 2017
*Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara*

d) Rasio Ketersediaan Sekolah, Ruang Kelas dan Penduduk Usia Sekolah

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Untuk itu, pemerintah wajib mewujudkan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada seluruh masyarakat. Ketersediaan sekolah yang berkualitas dan mampu menampung penduduk usia sekolah juga menjadi faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 2.21
Perkembangan Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

NO.	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016*
1.	Jumlah Sekolah					
	SD/Sederajat	804	802	806	802	802
	SMP/Sederajat	119	118	111	112	112
2.	Jumlah Kelas					
	SD/Sederajat	5.675	5.834	5.809	5.835	5.835
	SMP/Sederajat	2.145	2.105	2.156	2.233	2.233
3.	Penduduk Usia Sekolah					
	7 - 12 Tahun	130.700	129.520	128.029	127.557	127.557
	13 - 15 Tahun	67.045	66.341	65.118	64.701	64.701
4.	Rasio Penduduk Usia Sekolah/Kelas					
	SD/Sederajat	23	22	22	22	22
	SMP/Sederajat	31	32	30	29	29
5.	Rasio Penduduk Usia Sekolah/Sekolah					
	SD/Sederajat	62	62	63	63	63
	SMP/Sederajat	18	18	17	17	17

Sumber: Dinas Pendidikan, 2017
*Keterangan: *) Angka per September 2016*

Rasio ketersediaan ruang kelas terhadap penduduk usia sekolah di Kabupaten Kebumen selama tahun 2012-2016 relatif meningkat untuk jenjang pendidikan SD/Sederajat dan SMP/Sederajat. Pada tingkat SD/Sederajat, pada tahun 2012 rasio ketersediaan ruang kelas dibanding penduduk usia sekolah sebesar 1:23 dan pada tahun 2016 berada pada angka 1:22. Sedangkan untuk tingkat SMP/Sederajat, ketersediaan ruang kelas dibanding penduduk usia sekolah pada tahun 2012 sebesar 1:31 dan menjadi 1:29 pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan jumlah ruang kelas SD/Sederajat dan SMP/Sederajat untuk menampung penduduk usia sekolah SD/Sederajat dan SMP/Sederajat semakin tercukupi.

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk usia sekolah tersebut dalam setiap 10.000 penduduk. Pada indikator ini yang digunakan adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan SD/Sederajat dan SMP/Sederajat dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah selama periode 2012-2016 untuk tingkat SD/Sederajat mengalami kenaikan sedangkan untuk tingkat SMP/Sederajat cenderung menurun.

2) Kesehatan

a) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI dihitung per 100.000 kelahiran hidup dan menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKI dapat digunakan dalam pemantauan kematian karena kehamilan dan persalinan. AKI dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

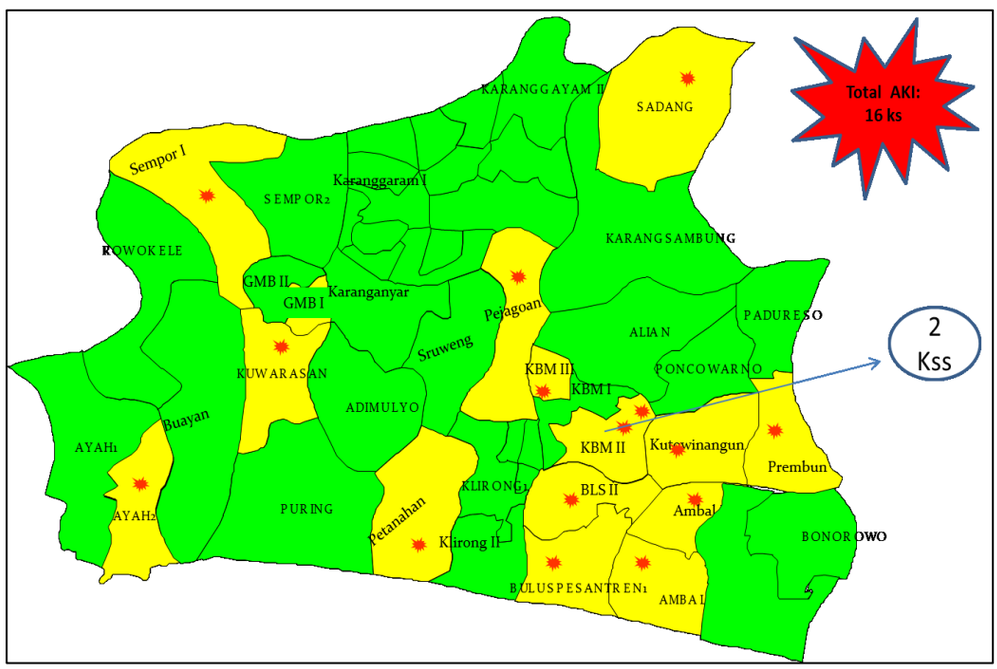

Gambar 2.27

Sebaran AKI Kabupaten Kebumen Tahun 2016

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

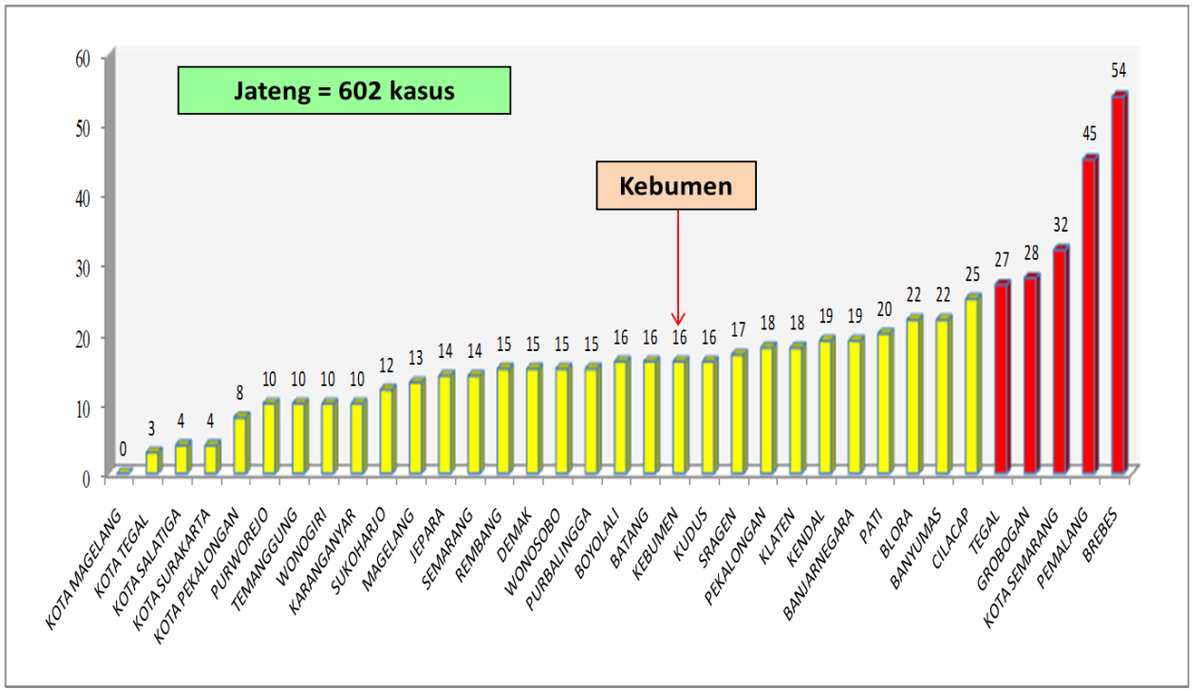

Gambar 2.28
Peringkat Angka Kematian Ibu (AKI) 35 Kabupaten/Kota
se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

Sumber: Dinas Kesehatan, 2017

Sebaran kasus AKI Tahun 2016 terjadi pada 14 wilayah kecamatan dengan Puskesmas Kebumen II menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak yaitu sebanyak 2 kasus. Sedangkan di tingkat Provinsi, pada tahun 2016 terjadi 602 kasus AKI, dengan Kabupaten Kebumen berada pada peringkat 19. Wilayah yang terbanyak terjadi kasus AKI adalah Kabupaten Brebes dengan 54 kasus dan yang terkecil adalah Kota Magelang yang pada tahun 2016 tidak terjadi kasus AKI.

b) Angka Kematian Bayi (AKB)

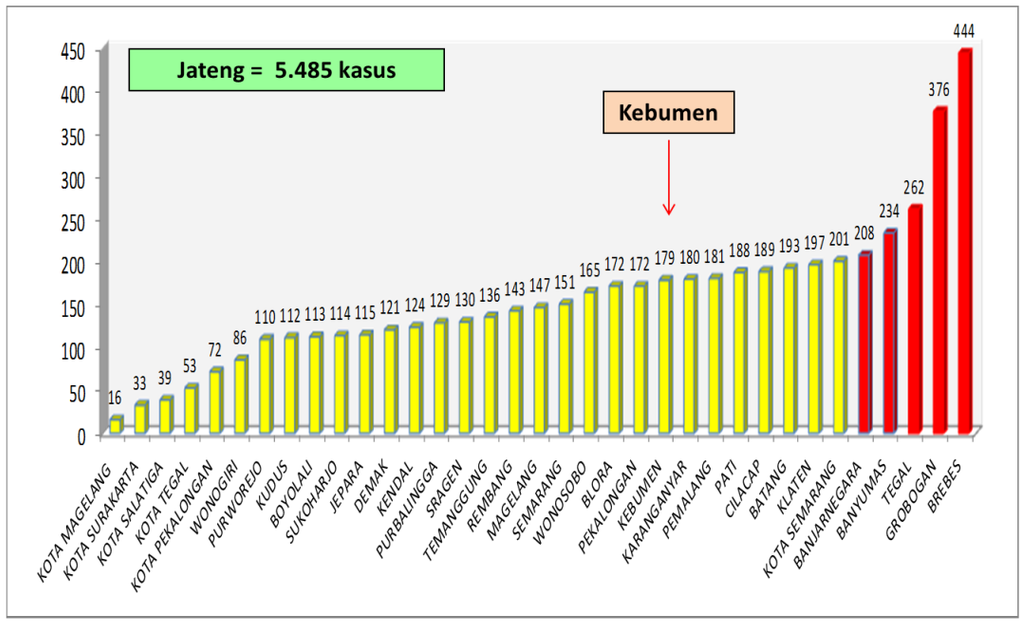

Gambar 2.29
Peringkat Angka Kematian Bayi (AKB) 35 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

Sumber: Dinas Kesehatan, 2017

Dilihat dari persebaran kasus AKB pada tahun 2016, terdapat 3 (tiga) kecamatan yaitu Petanahan, Kebumen dan Puring yang menjadi wilayah dengan kasus AKB tertinggi yaitu lebih dari 10 kasus, dimana Kecamatan Petanahan terdapat 13 kasus, Kebumen 12 kasus dan Puring 11 kasus.

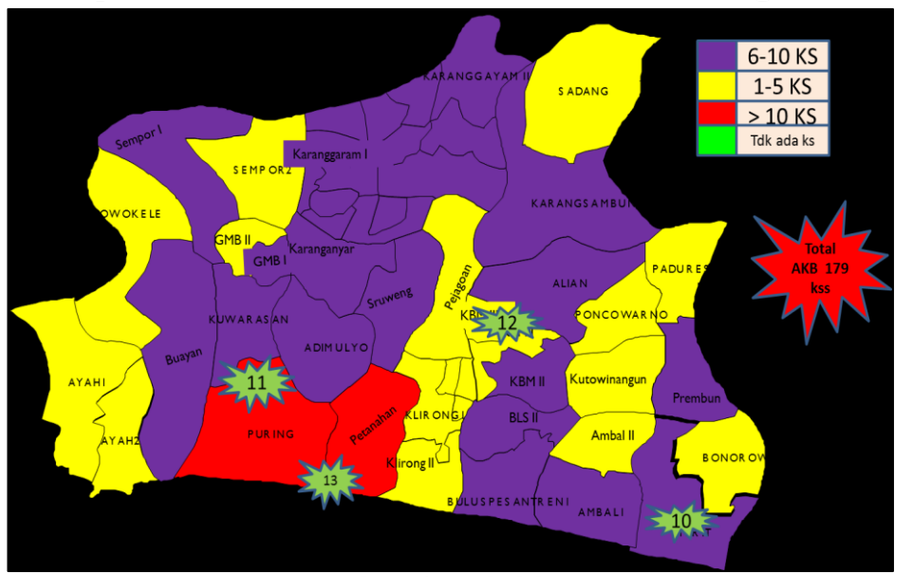

Gambar 2.30
Persebaran Kasus Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Kebumen Tahun 2017

Sumber: Dinas Kesehatan, 2017

c) Ketersediaan Sarana dan Tenaga Kesehatan

Ketersediaan sarana prasarana kesehatan yang berkualitas dan terjangkau merupakan syarat penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Agar pelayanan kesehatan yang diberikan dapat berfungsi secara optimal, pemerintah harus menyediakan sarana kesehatan dasar sampai dengan lanjutan melalui fasilitas posyandu, puskesmas, dan juga rumah sakit. Hal ini untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Ketersediaan sarana kesehatan di Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat dalam gambar berikut.

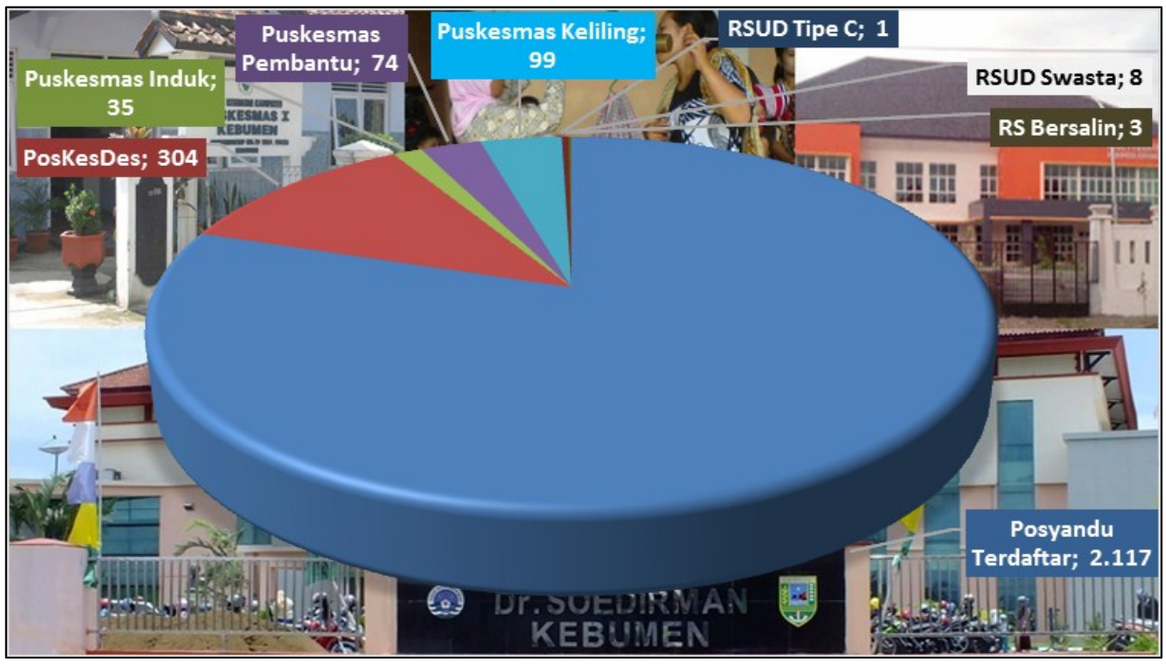

Gambar 2.31
Ketersediaan Sarana Prasarana Kesehatan
diKabupaten Kebumen Tahun 2016

Sumber: Profil Daerah 2016

Ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan juga sangat mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat. Semakin cukup dan berkualitas tenaga kesehatan yang tersedia, semakin baik pelayanan kesehatan yang diberikan, maka semakin tinggi pula harapan akan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang tersedia di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016, dapat dilihat pada gambar berikut.

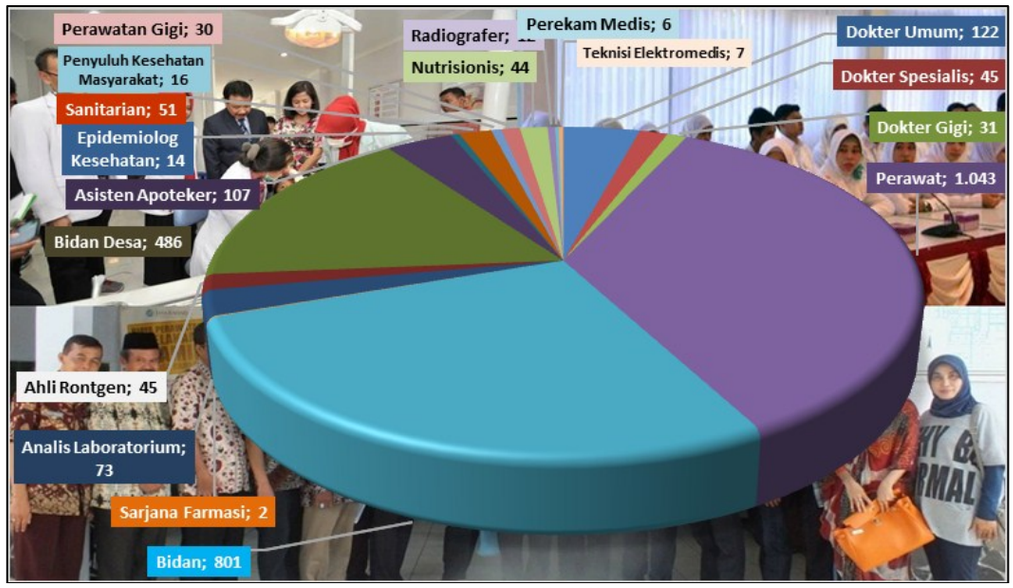

Gambar 2.32
Ketersediaan Tenaga Kesehatan
diKabupaten Kebumen Tahun 2016

Sumber: Profil Daerah 2016

d) Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, sehingga diharapkan strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Pembentukan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai.

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Berikut ini merupakan data rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Kebumen tahun 2012-2016.

Tabel 2.22
Rasio Posyandu per Satuan Balita
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Posyandu	2.101	2.103	2.112	2.116	2.117
Jumlah Balita	98.806	94.559	97.814	96.559	94.895
Rasio Posyandu per Balita	21,26	22,24	21,59	21,91	22,31

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan data di atas, rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Kebumen pada tahun 2012-2016 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, rasio posyandu per satuan balita sebesar 21,26, yang artinya setiap 1.000 balita dilayani oleh 21-22 posyandu. Angka tersebut meningkat menjadi 22,31 pada tahun 2016. Kecenderungan rasio yang meningkat menunjukkan adanya peningkatan pada layanan kesehatan bagi balita di posyandu yang tersebar di 460 Desa dan Kelurahan.

e) Rasio Puskesmas, Klinik, dan Pustu per Satuan Penduduk

Puskesmas, klinik dan puskesmas pembantu (pustu) merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Puskesmas sebagai unit pelayanan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan. Puskesmas memiliki fungsi sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer dan pusat pelayanan kesehatan perorangan primer. Indikator rasio puskesmas per 100.000 penduduk adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas.

Tabel 2.23
Rasio Puskesmas dan Klinik Per Satuan Penduduk
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Puskesmas dan Klinik	212	212	212	208	208
Jumlah Penduduk	1.183.763	1.176.662	1.181.006	1.182.290	1.188.622
Rasio	17,91	18,02	17,95	17,59	17,50

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

f) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis profesional serta sarana kedokteran yang permanen, dan asuhan keperawatan yang berkesinambungan. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, sehingga rumah sakit memiliki peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Berikut ini merupakan data rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Kebumen tahun 2012-2016.

Tabel 2.24
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Rumah Sakit	12	13	12	12	12
Jumlah Penduduk	1.183.763	1.176.662	1.181.006	1.182.290	1.188.622
Rasio	1,01	1,10	1,02	1,01	1,01

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

g) Pelayanan Kesehatan Rujukan

Kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh dalam pembangunan manusia. Derajad kesehatan masyarakat yang baik akan merefleksikan kinerja yang baik pula pada masyarakatnya. Oleh karena itu keberadaan fasilitas kesehatan juga sangat memegang peran penting dalam meningkatkan derajad kesehatan masyarakat. Semakin mudah masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia, maka diharapkan semakin berkurang pula tingkat kesakitannya.

Salah satu fasilitas kesehatan yang ada di Kebumen adalah RSUD dr. Sudirman. Pelayanan di RSUD dr. Sudirman telah memenuhi standar ISO 9001:2000/ISO 9001:2008. Pencapaian indikator pelayanan RSUD tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- Angka tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit/*Bed Occupancy Rate* (BOR) mencapai 69,94%, kondisi ini belum baik karena BOR dikatakan baik jika realisasinya 70%-85%.
- Frekuensi pemakaian (*Bed Turn Over*) tahun 2016 mencapai 73 kali.

- Pada tahun 2016 rata-rata tempat tidur dalam kondisi tidak terisi ke kondisi terisi berikutnya (*Turn Over Interval*) mencapai 1,5 hari. Hal ini memperlihatkan kondisi pelayanan kamar pada pasien sudah mencapai ideal yaitu sesuai standar Kementerian Kesehatan 6 jam sampai dengan 3 hari.
- Rata-rata lama perawatan pasien (*Length of Stay*) mencapai 3,4 %hari pada tahun 2014. Hal ini menunjukan bahwa pelayanan rumah sakit terhadap pasien cukup memadai, karena sesuai dengan standar nasional lama perawatan 3-6 hari.
- Angka kematian bersih (*Net Death Rate*) yang menunjukkan angka kematian pasien ketika dirawat di rumah sakit pada tahun 2016 mencapai 21‰ pasien, mengalami kenaikan sebesar 1‰ pasien dari tahun 2015 yang menunjuk angka 20‰ pasien. Walaupun angka kematian pasien ketika dirawat di RS mengalami kenaikan, masih merupakan angka realisasi yang aman, selama tidak melebihi 25 ‰.
- Angka kematian kasar (*Gross Death Rate*) merupakan angka kematian pasien pasca rawat inap di rumah sakit mencapai 44% pasien pada tahun 2015, mengalami penurunan tahun 2016 menjadi 39%. Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar. Nilai ideal GDR adalah < 45%.

Pencapaian Kinerja Pelayanan di RSUD dr. Sudirman tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- Angka tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit/*Bed Occupancy Rate* (BOR) mencapai 69%, menurun jika RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2016 II – 32 dibandingkan tahun 2015 sebesar 75%. Kondisi ini belum efisien karena BOR dikatakan baik jika realisasinya 70% - 85%,
- Frekuensi pemakaian (*Bed Turn Over*) tahun 2016 mencapai 73 kali per tahun, kondisi pelayanan pemakaian tempat tersebut sudah mendekati standar nasional yaitu 75 kali per tahun.
- Pada tahun 2016 rata-rata tempat tidur dalam kondisi tidak terisi ke kondisi terisi berikutnya (*Turn Over Interval*) mencapai 1,5 hari. Hal ini memperlihatkan kondisi pelayanan kamar pada pasien masih jauh dari ideal karena sesuai standar Kementerian Kesehatan 6 jam sampai dengan 3 hari.
- Rata-rata lama perawatan pasien (*Length of Stay*) mencapai 3,4 hari pada tahun 2016. Hal ini menunjukan bahwa pelayanan rumah sakit terhadap pasien masih jauh memadai, karena sesuai dengan standar nasional lama perawatan 3-6 hari.

- Angka kematian bersih (*Net Death Rate*) yang menunjukkan angka kematian pasien ketika dirawat di rumah sakit pada tahun 2014 sebesar 5,58‰, masih merupakan angka realisasi yang aman, selama tidak melebihi 25‰, Angka kematian kasar (*Gross Death Rate*) merupakan angka kematian pasien pasca rawat inap di rumah sakit pada tahun 2014 sebesar 16,81%.
- Target nasional untuk NDR maksimal 25 orang per 1.000 pasien keluar RS; sedangkan GDR 40 orang per 1.000 pasien keluar. Apabila dikomparasikan dengan target nasional, realisasi RSUD dr. Sudirman pada parameter angka kematian, sangat baik masih dibawah, jauh dari target nasional. Hal ini berarti kinerja pelayanan dilihat dari aspek angka kematian pasien masih dapat dinilai baik.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan. Jangkauan pelayanan jalan di Kabupaten Kebumen saat ini terbatas pada wilayah-wilayah yang secara alami berkembang dengan pesat. Kondisi jalan setiap tahunnya harus terus ditingkatkan baik kuantitasnya maupun kualitasnya untuk mengimbangi pertumbuhan aktivitas ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Data ketersediaan jalan di Kabupaten Kebumen selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.25.

Tabel 2.25
Ketersediaan Jalan di Kabupaten Kebumen
Tahun 2012-2016 (dalam kilometer)

NO.	STATUS JALAN	2012	2013	2014	2015	2016*
1.	Jalan Nasional	60,58	54,19	54,19	54,19	56,428
2.	Jalan Provinsi	30,09	30,09	30,09	30,09	30,09
3.	Jalan Kabupaten	615,200	958,08	958,08	975,15	975,15
4.	Jalan Desa	1.592,08	1.254,01	1.254,01	1.236,94	1.236,94

Sumber: DPUPR, 2017

*Keterangan: *) Angka Sementara*

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan perkembangan wilayah kabupaten yang mandiri secara ekonomi dan merata pelayanannya melalui pengembangan agrobisnis yang berkelanjutan yang aman, nyaman dan produktif. Kinerja urusan penataan ruang dapat dilihat salah satunya dari jumlah pengajuan IMB. Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.26, jumlah pengajuan IMB di Kabupaten Kebumen selama Tahun 2012-2016 terus mengalami peningkatan dari 524 izin pada tahun 2012 menjadi 581 izin pada tahun 2015, meskipun mengalami penurunan khususnya pada Tahun 2016.

Tabel 2.26
Perkembangan Pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016*
Pengajuan IMB per tahun	524	635	750	750	581

Sumber: DPUPR, 2017
*Keterangan: *) Angka Sementara*

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga.

Kriteria rumah layak huni adalah rumah tempat tinggal yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan konstruksi, serta aspek legalitas kepemilikan rumah, yaitu antara lain adalah: lantai tidak lembab, pencahayaan cukup (sinar matahari dapat masuk rumah), tidak bocor, tahan gempa (skala tertentu) dan mempunyai bukti pertanahan.

Pada tahun 2016, jumlah rumah layak huni mencapai 282.495 unit atau sebesar 92,05% dari jumlah rumah yang ada sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.27.

Tabel 2.27
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kabupaten KebumenTahun 2012-2016

NO.	KONDISI RUMAH*	2012	2013	2014	2015	2016
A.	Rumah Tidak Layak Huni					
1.	Jumlah Rumah	293.020	293.020	293.020	306.885	306.885
2.	Jumlah RTLH	8.012	4.774	2.505	26.860	24.390
3.	Penanganan RTLH	6.236	3.238	2.269	2.470	5.514
4.	Rasio RLH (100–rasio RTLH)	97,28 persen	98,38 persen	99,15 persen	91,25 persen	92,05 persen
B.	Permukiman Kumuh					
1.	Luas Permukiman Kumuh (Ha)	Na	Na	213,62	213,62	213,62

Sumber: Dispermades P3A, 2017

5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman secara umum dapat diartikan sebagai suasana batin dari individu dan atau masyarakat karena terpenuhinya kebutuhan dan keinginan sesuai norma-norma, sedangkan ketertiban umum sendiri lebih dekat dengan upaya penegakan hukum dan pemenuhan norma-norma. Pada perkembangannya ketentraman dan ketertiban umum telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat yang harus dipenuhi dan dilindungi. Dalam hal ini perlu kehadiran pemerintah untuk melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat.

Hal-hal yang dapat mengusik ketentraman dan ketertiban umum adalah tindak kejahatan. Berbagai tindak kejahatan dapat ditanggulangi dengan kesigapan aparat keamanan dalam mendeteksi dan mengatasi gejala awal gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Langkah pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat telah meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga keamanan di lingkungannya. Kerjasama dalam rangka Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ini meliputi:

a) Penyelenggaraan/pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban masyarakat;
b) Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c) Pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
d) Pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk mendukung penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban masyarakat;

e) Penilaian eskalasi gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban masyarakat untuk menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan.

Sementara itu upaya yang dilakukan di bidang keamanan yang berkaitan dengan tindak pidana umum melalui upaya represif dan preventif oleh pihak Kepolisian untuk membantu menciptakan rasa tenteram dan tertib di masyarakat, antara lain dengan meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pengamanan swakarsa dengan menggiatkan siskamling.

Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dapat dilihat dari semakin turunnya jumlah kriminalitas yang terjadi yaitu 359 kasus pada tahun 2012 menjadi 134 kasus pada tahun 2016. Hal ini tidak terpisah dengan adanya dukungan sarana prasarana keamanan dan ketertiban masyarakat. Secara umum capaian urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.28
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

NO.	URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016*
	Jumlah Aparat Keamanan (Polisi)	927	910	960	894	902
	Jumlah Pos Keamanan (Polisi)	13	14	14	8	8
	Jumlah Aparat Pamong Praja	123	119	119	132	132
	Jumlah Pos Siskamling	4.044	4.044	4.044	4.044	4.044
	Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam	25	30	30	20	20
	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	9.620	9.770	9.612	9.636	9.636
	Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	1.068	898	720	480	480
	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	1.065	894	720	480	480

Sumber: SIPD, 2017
*Keterangan: *) Angka Sementara*

6) Sosial

Sosial dapat berarti kemasyarakatan, dalam hal ini dapat dilihat dari kondisi kesejahteraan sosial masyarakat. Kesejahteraan sosial, menandakan keadaan sejahtera pada umumnya, meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah, dan sosial, bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu saja. Hal ini dapat diartikan sebagai suatu keadaan dan kegiatan.

Kondisi kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari jumlah KK menurut tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada gambar berikut:

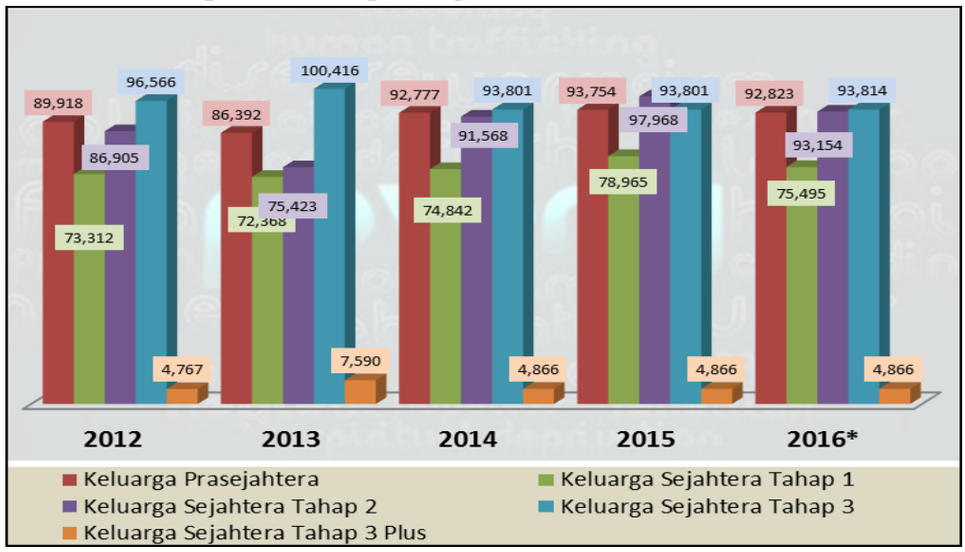

Gambar 2.33
Tingkat Kesejahteraan Menurut Kepala Keluarga
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

Sumber: Badan PP dan KB, 2016
*Keterangan: *) Angka Sementara per Juni 2016*

Jumlah keluarga miskin (keluarga prasejahtera dan sejahtera 1) selama periode 2012-2016 cenderung mengalami peningkatan dari 163.230 KK tahun 2012 menjadi 168.318 KK pada tahun 2016. Sedangkan jumlah keluarga yang berada di atas garis kemiskinan (keluarga sejahtera 2, 3 dan 3 plus) mengalami peningkatan dari 188.238 KK pada 2012 menjadi 191.834 KK tahun 2016.

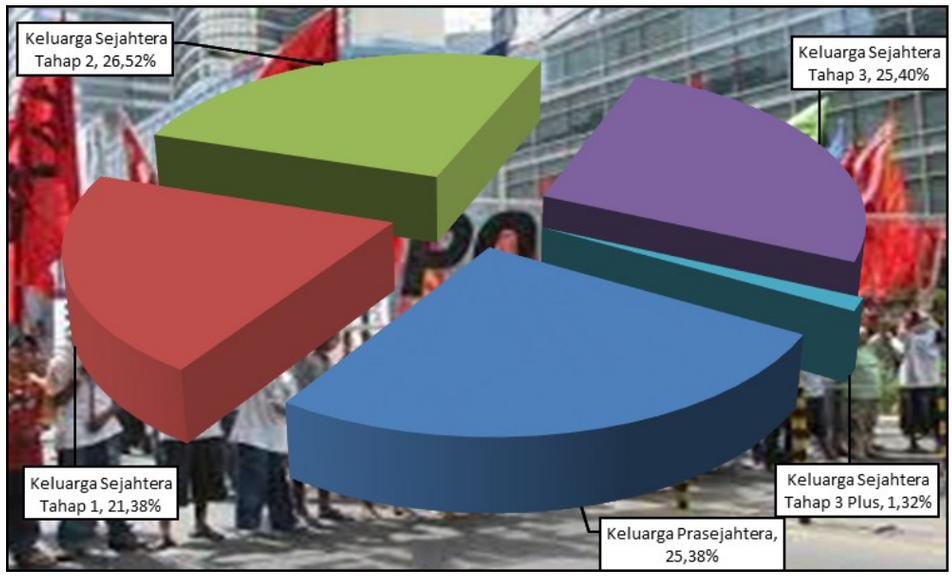

Gambar 2.34
Persentase Tingkat Kesejahteraan Menurut Kepala Keluarga
Kabupaten Kebumen Tahun 2016

Sumber: Badan PP dan KB, 2016
*Keterangan: *) Angka Sementara per Juni 2016*

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Kebumen merupakan keluarga miskin yaitu mencapai 46,76%.

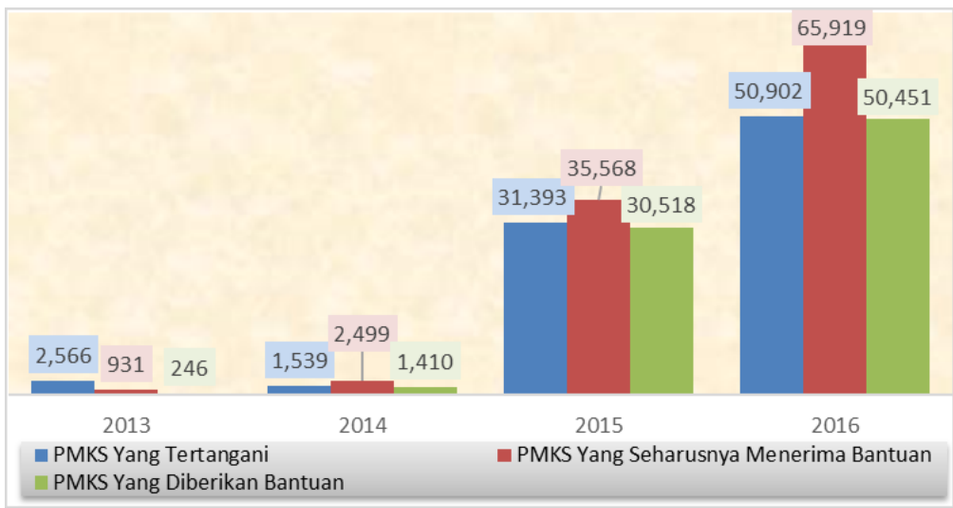

Gambar 2.35
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2016

Sumber: Badan Nakertransos, 2016
*Keterangan: *) Angka Sementara per Juni 2016*

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial selama periode 2013-2016 cenderung mengalami peningkatan dari 3.743 jiwa tahun 2013 menjadi 167.272 jiwa pada tahun 2016.

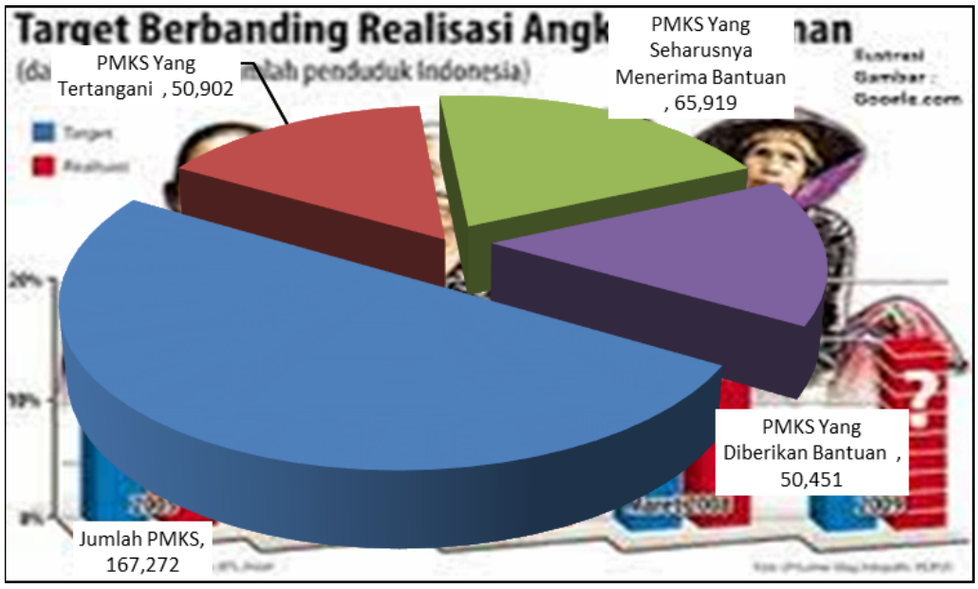

Gambar 2.36
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
di Kabupaten Kebumen Tahun 2016

Sumber: Dinas Nakertransos, 2016

Tingkat kesejahteraan sosial masyarakat juga dapat dilihat dari jumlah PMKS yang ada dan ditangani. Semakin banyak jumlah PMKS semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Pada tahun 2016, jumlah PMKS di Kabupaten sebanyak 167.272 orang dengan jumlah yang tertangani sebanyak 50.902 orang, yang diberikan bantuan sebanyak 50.451 orang dari 65.919 orang yang seharusnya menerima bantuan.

Tabel 2.29
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Sosial
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

NO.	URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016*
1.	Jumlah sarana sosial					
	a. Panti Asuhan	18	18	17	17	18
	b. Panti Bina Netra	1	1	1	1	1
	c. Panti Bina Grahita	1	1	1	1	1
	d. Panti Bina Karya	1	1	1	1	1
	e. Panti Bina Rungu Wicara	0	1	2	2	2
	f. Panti Rehabilitasi	0	0	0	0	0
2.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan sosial	Na	246	1.410	30.568	35.151
3.	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Na	2.566	1.539	31.393	29.987

Sumber: Dinas Nakertransos, 2016
*Keterangan: *) Angka Sementara per Juni 2016*

b. Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil SUSEDA tahun 2016, jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Kebumen adalah 881.010 jiwa. Dari jumlah tersebut angkatan kerja (bekerja dan mencari pekerjaan) sebesar 64,10 persen, sedangkan bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya) sebesar 35,90 persen. Indikator ketenagakerjaan hasil Suseda 2014 dan 2016 seperti tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.30
Capaian Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2014 dan 2016 dan Capaian RPJMD sampai dengan Tahun 2016

No	Indikator Ketenagakerjaan	2014	2016		Ket.
			Capaian	Target RPJMD	
1	Persentase Bekerja	66,22	62,54	-	-
2	Persentase Mencari Pekerjaan	4,65	1,56	-	-
3	Persentase Bukan Angkatan Kerja	29,12	35,90	-	-
4	Tingkat Pengangguran Angkatan Kerja (%)	70,87	64,10	-	-
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,56	2,44	2,07	

Sumber : BPS, 2017
Keterangan : = tidak tercapai

Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dapat digunakan sebagai indikator daya serap tenaga kerja sektor-sektor perekonomian yang ada di Kabupaten Kebumen. Berdasarkan hasil pengolahan Suseda 2016, sekitar 37,10 persen penduduk bekerja pada sektor pertanian meningkat dibandingkan kondisi pada tahun 2014 yang sebesar 35,22 persen. Sedangkan sektor lainnya berturut-turut sektor perdagangan, sektor industri, sektor jasa, sektor konstruksi dan sektor-sektor lainnya. Ada fenomena menarik yaitu turunnya daya serap tenaga kerja sektor industri dan sektor jasa pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2014. Sedangkan untuk sektor pertanian dan sektor perdagangan menunjukkan peningkatan daya serap tenaga kerja pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2014. Pada tahun 2016 ini sektor konstruksi dikeluarkan dari sektor lainnya karena daya serap tenaga kerjanya untuk kabupaten Kebumen cukup dominan (mendekati 10%).

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan manusia ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Upaya peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak masih terdapat permasalahan yaitu:

1) kekerasan terhadap perempuan dan anak masih cukup tinggi;
2) fasilitas umum yang belum ramah gender; dan
3) terdapat kesenjangan pendapatan antara pekerja laki-laki dan perempuan.

Potensi kualitas sumber daya perempuan dan kemampuan untuk berperan dalam masyarakat sama dengan laki-laki. Namun kenyataannya, masih banyak dijumpai status dan peran perempuan dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki. Hal itu bisa dilihat dari masih sedikitnya jumlah perempuan yang menempati posisi penting di pemerintahan, dalam bidang legislatif maupun yudikatif, dalam perannya secara umum di dunia usaha/swasta dan masyarakat. Perempuan yang menduduki posisi penting dan bekerja di sektor publik di Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31
Perkembangan Capaian Kinerja
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

NO.	URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016*
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	0,65	3,41	4,07	4,98	4,98
2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	6,40	4,20	4,31	4,4	4,4
3.	Rasio kekerasan dalam rumah tangga	86	132	118	120	122
4.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	86	132	122	120	122

Sumber: DispermadesP3A, 2016
*Keterangan: *) Angka Sementara*

Rasio kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan yaitu mencapai 86 pada tahun 2012 dan pada tahun 2016 menjadi 122. Peningkatan rasio dikarenakan semakin banyaknya pengaduan dari masyarakat. Hal ini menandakan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan KDRT dan sudah adanya jejaring dalam penanganan KDRT.

3) Pangan

Capaian kinerja urusan pangan Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2016 sesuai dengan target indikator kinerja dalam RPJMD Tahun 2016-2021 terdapat 3 indikator yaitu persentase penanganan kerawanan pangan, persentase kelompok/gapoktan yang tertangani stabilitas harga pangannya dan persentase kelompok wanita yang melaksanakan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan.

a) Capaian indikator persentase penanganan kerawanan pangan, dari target 35,88% pada tahun 2016 angka capaian pada tahun 2016 sebesar 35,88% atau sesuai dengan target;
b) Capaian indikator persentase kelompok/gapoktan yang tertangani stabilitas harga pangannya, dari target tahun 2016 sebesar 20,43%, dapat dicapai sebesar 20,43% atau juga sesuai dengan target yang dibebankan; dan
c) Capaian indikator persentase kelompok wanita yang melaksanakan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan, dari target tahun 2016 sebesar 31,74%, capainnya sebesar 31,74% atau tercapai.

Tabel 2.32
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016 dan Capaian RPJMD sampai dengan Tahun 2016

NO.	URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016		Ket.
						Capaian	Target RPJMD	
1.	Persentase penanganan kerawanan pangan	14,5	16,03	22,14	30,53	35,88	35,88	
2.	Persentase kelompok/ gapoktan yang tertangani stabilitas harga pangannya	1,09	10,00	10,22	10,65	20,43	20,43	
3.	Persentase kelompok wanita yang melaksanakan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan	10,87	16,30	20,65	25,00	31,74	31,74	
4.	Regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
5.	Ketersediaan pangan utama per penduduk (persen)	258,11	197,29	209,01	220,73	203,30		

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2017
Keterangan: = Tercapai

4) Pertanahan

Capaian kinerja urusan pertanahan dapat dilihat dari data persentase luas lahan bersertifikat. Pemilikan hak atas tanah oleh seseorang oleh seseorang atau badan hukum harus di buktikan. Pembuktian kepemilikan hak atas tanah di lakukan atau ditunjukan dengan beragai macam alat bukti, dengan pembuktian yang terkuat adalah melalui sertifikat tanah.

Sebagaimana terlihat di Tabel 2.33, pada Tahun 2012-2016 persentase lahan bersertifikat di Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 22,02% pada tahun 2012 menjadi 35,70% pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan hak milik tanah mereka.

Tabel 2.33
Perkembangan Luas Lahan Bersertifikat
di Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016*
Persentase luas lahan bersertifikat	22,02	22,15	22,83	22,91	35,70

Sumber: BPKAD, 2017
*Keterangan: *) Angka Sementara*

5) Lingkungan Hidup

Meningkatnya pertumbuhan penduduk suatu wilayah beserta aktivitas kegiatan penduduknya akan berimplikasi pada meningkatnya pertumbuhan produk sampah, baik sampah domestik maupun sampah non domestik. Upaya pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan upaya reduksi sampah di sumber penghasil sampah, yaitu di lingkungan rumah tangga. Salah satu cara melakukan reduksi sampah di lingkungan rumah tangga adalah dengan membentuk kelompok masyarakat pengolah sampah. Kabupaten Kebumen terus berupaya mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Akses terhadap air minum juga menjadi satu hal yang sangat penting dan berpengaruh langsung pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama terkait angka harapan hidup. Tabel 2.34 menunjukkan Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016.

Tabel 2.34
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

NO.	URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Persentase penanganan sampah	41,18	43,04	43,54	50,74	66,39
2.	Persentase penduduk berakses air minum	73,29	76,63	79,96	83,30	65,70

Sumber:DPUPR, 2017

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dilaksanakan melalui program administrasi kependudukan sedangkan pencatatan sipil menitikberatkan pada kegiatan Implementasi SIAK (*updating* dan pemeliharaan) pengembangan data base kependudukan, monitoring dan pelaporan kependudukan, penyusunan profil kependudukan, sosialisasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil, pengelolaan dokumen kependudukan dan catatan sipil, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dan akta kematian, pencatatan dan penerbitan akta perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, pencatatan dan penerbitan akta catatan sipil.

Pada Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Kebumen mencukupi kebutuhan sarana prasarana SIAK dan menyerahkan sebagian kewenangan pelayanan kependudukan dan catatan sipil ke 26 Kecamatan dengan Program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN). Untuk Cetak administrasi Kependudukan tidak dipusatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen saja namun didekatkan di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Kebumen, Kecamatan Prembun, dan Kecamatan Gombong.

Tabel 2.35
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten KebumenTahun 2012-2016

NO.	URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016*
1.	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga terhadap jumlah kepala keluarga	Na	100%	100%	100%	100%
2.	Cakupan penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk terhadap jumlah penduduk	Na	83%	91%	90%	90%
3.	Cakupan Akte Kelahiran	Na	85%	87%	90%	90%
4.	Cakupan Akte Kematian	Na	2%	5%	100%	100%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2016
*Keterangan: *) Angka Sementara*

Target Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Tahun 2013 adalah sebesar 85% dengan realisasi capaian sebesar 100%. Tahun 2014 target untuk Capaian penerbitan Kartu Keluarga naik sebanyak 5% menjadi 90% dengan realisasi capaian sebesar 100%. Realisasi cakupan ini bisa dipertahankan sampai dengan Tahun 2015 dan 2016 sebesar 100 %.

Target Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Tahun 2013 adalah 89% dengan realisasi capaian 83% Pelayanan dokumen administrasi kependudukan dari tahun 2013 tidak mencapai target khususnya untuk pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Hal ini disebabkan oleh implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yaitu penerapan KTP berbasis NIK secara nasional, yakni dengan adanya perekaman KTP elektronik yang mulai dilaksanakan pada akhir tahun 2011, dimana semua wajib KTP diundang ke kecamatan untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Sehingga perlu usaha

keras melalui sosialisasi dan peningkatan sarana prasarana kependudukan. Pada Tahun 2014 target tersebut dapat tercapai hingga 91 % dan Namun Tahun 2015 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk sebesar 90% dari target 90 %.

Target Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2013 adalah 84% dengan realisasi capaian sebesar 85%. Tahun 2014 meningkat 2 % dari target cakupan penerbitan Akte Kelahiran sebesar 86% dengan realisasi capaian sebesar 87%. Adapun target Tahun 2015 adalah 90% dengan realisasi capaian 90%. Untuk meningkatkan capaian Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2016, Bupati terpilih mempunyai program unggulan bayi lahir pulang bawa akte kelahiran. Dari program ini telah diterbitkan akte kelahiran sebanyak ..... . Hal ini atas kerjasama dan telah dilakukan Perjanjian Kerjasama (Mou) dengan pihak pelayanan kesehatan baik Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta sebanyak 12 unit serta 35 UPT Puskesmas di Kabupaten Kebumen.

Adapun cakupan penerbitan Akta Kematian Tahun 2013 di targetkan sebesar 64% dengan realisasi capaian hanya sebesar 2%. Selanjutnya untuk cakupan penerbitan akta kematian Target pada tahun 2014 adalah 66% dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu pada realisasi capaian sebesar 5%. Hal ini menunjukan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus akta kematian atau bahkan memang informasi yang kurang diterima oleh masyarakat. Untuk itu tugas Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan terus mendorong aparat kecamatan dan desa bahkan kelembagaan RT dan RW untuk mengurus akta kematian warganya. Target capaian untuk cakupan penerbitan Akta Kematian Tahun 2015 adalah 70% dan pada tahun 2015 realisasi capaian mencapai 100%.

Usaha untuk meningkatkan capaian cakupan dilakukan dengan mendekatkan dan mempercepat penerbitan dokumen kependudukan dan catatan sipil. Usaha yang dilakukan antara lain melalui jemput bola ke desa-desa dan sekolah-sekolah bahkan pada acara *Car Free Day* di Alun-alun Kebumen dibuka layanan kependudukan dan catatan sipil. Usaha tersebut tentunya membutuhkan petugas dan sarana prasarana yang memadai baik untuk mobilitas maupun administrasi pelayanan.

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa diupayakan melalui berbagai upaya pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan antara lain lomba desa, Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), stimulan Bantuan Semen, stimulan Lantainisasi, stimulan Dana Gotong Royong Masyarakat, dan Program Desa Berdikari.

Berbagai bantuan stimulan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat sejauh ini telah mampu meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan telah mampu menumbuhkan swadaya masyarakat yang cukup besar.

Pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa juga dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan. Melalui penguatan kelembagaan ini diharapkan akan terwujud sinergi antar lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat serta meningkatnya kualitas pengurus lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan. Upaya pembinaan terhadap lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen bekerja sama dengan *stakeholder* lainnya.

Tabel 2.36
Perkembangan Jumlah Organisasi Kemasyarakatan
dan Lembaga Swadaya Masyarakat
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

NO.	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016*
1.	Orkesmas Berdasarkan Profesi	144	144	110	80	80
2.	Orkesmas Berdasarkan Agama	50	50	50	50	50
3.	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	49	49	49	44	44

Sumber: SIPD, 2016
*Keterangan: *) Angka Sementara*

Salah satu permasalahan atau isu strategis dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah isu mengenai penanggulangan kemiskinan, yang sangat erat kaitannya dengan upaya peningkatan keberdayaan masyarakat terutama di perdesaan. Pendekatan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen, dilaksanakan menggunakan dasar pijakan kebijakan nasional yaitu pemenuhan kebutuhan dasar individu ataupun masyarakat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin, baik secara individu (jiwa penduduk miskin), maupun kelompok (rumah tangga sasaran).

Kebijakan penganggulangan kemiskinan disusun dengan dasar hukum yang pasti dan sudah ada saat ini. Secara operasional arah penanggulangan kemiskinan dikelompokkan dalam empat kebijakan dan program, yaitu perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan perlindungan sosial.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kebumen, telah dilakukan beberapa langkah dan kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat kedudukan Pemerintah Desa agar makin mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang makin luas, efektif dan efisien sesuai dengan otonomi desa dalam rangka memperkuat dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Beberapa langkah kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam upaya memperkuat pelaksanaan otonomi desa meliputi pembuatan regulasi, arahan dan pedoman, pemberian fasilitasi, pemberian bimbingan serta monitoring dan evaluasi.

Fasilitasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain yaitu:

a) Peningkatan kemampuan keuangan pemerintah desa peningkatan kesejahteraan perangkat desa, melalui pemberian bantuan keuangan kepada desa yang meliputi pemberian Dana Desa (APBN), Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten;
b) Fasilitasi terhadap penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dihadapi oleh desa;
c) Pemberian fasilitasi dalam rangka penyusunan regulasi Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa serta pemberian fasilitasi terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa;
d) Pemberian Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD), pemberian Penghasilan bagi Aparat Desa Karang Kopek dan Pemberian Uang Kehormatan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
e) Pemberian Sewa Tanah Kas Desa dan eks tanah bengkok kelurahan yang dipakai oleh pemerintah daerah dan sebagainya.

Peningkatan pendapatan desa diperlukan adanya optimalisasi sumber pendapatan desa yang berasal dari Badan Usaha Milik Desa, aset desa seperti sewa tanah kas desa, gedung pertemuan desa, pasar desa dan lain-lain. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah antara lain pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan optimalisasi pendayagunaan asset desa.

Sementara itu, beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah antara lain fasilitasi rekruitmen aparatur pemerintah desa, baik dalam pemilihan maupun pengisian aparatur pemerintah desa. Sedangkan dalam pendampingan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa seperti penyusunan produk hukum desa, pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan administrasi desa, yang perlu mendapat perhatian adalah peningkatan SDM aparatur pemerintah desa. Fasilitasi penyelesaian atas permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa diperlukan adanya peran aktif pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di pemerintahan desa.

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk menjadi suatu hal yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang. Dari sisi kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak akan memberikan dampak positif yang optimal jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan. Dari sisi sosial kesehatan, pertumbuhan penduduk yang tinggi akan berpotensi menimbulkan permasalahan seperti pemukiman, lapangan kerja, keamanan, gizi buruk hingga pendidikan.

Capaian urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat salah satunya melalui pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB). Penyelenggaraan Program KB selain ditujukan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk juga untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Progam/ kegiatan yang selama ini dilaksanakan terutama dalam pelayanan KB adalah dengan mengupayakan kemudahan dalam pelayanan kontrasepsi, kemudahan dalam pelayanan informasi, advokasi serta pendampingan dalam pemenuhan hak-hak reproduksi. Keberhasilan program KB sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program KB. Dengan kata lain, peran aktif masyarakat sangat menentukan kesuksesan program KB di lapangan.

Tabel 2.37
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

NO.	URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016*
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3,6	3,6	2,7	2,7	2,7
2.	Jumlah akseptor KB	166.719	168.824	155.892	155.134	155.134
	a. Laki-Laki	4.070	4.267	4.100	5.115	5.115
	b. Perempuan	162.649	164.557	151.792	150.019	150.019
3.	Jumlah Pasangan Usia Subur	213.523	212.291	209.517	214.553	208.841
4.	Jumlah Pasangan Usia Subur ber-KB	166.719	168.824	155.892	155.134	155.134
5.	Pra Keluarga Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	73.312	73.317	72.368	72.055	72.055

Sumber: DispermadesP3A, 2016
*Keterangan: *) Angka Sementara*

9) Perhubungan

Penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Kebumen terutama transportasi darat dilakukan dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas. Sebagai salah satu bidang pelayanan dasar, pemerintah telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Capaian kinerja urusan perhubungan selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.38
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

NO.	JENIS	2012	2013	2014	2015*	2016*
1.	Pengajuan perpanjangan ijin trayek	127	117	94	98	97
2.	Jumlah uji KIR angkutan umum (buah)	5734	6149	6336	6521	6726
3.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp)	38.000 - 48.500	38.000 - 48.500	38.000 - 48.500	38.000 - 48.500	38.000 - 48.500
4.	Angkutan bus Antar Kota Antar Provinsi	179 AKAP 13 AJAP	179 AKAP 13 AJAP	179 AKAP 19 AJAP	179 AKAP 19 AJAP	179 AKAP 19 AJAP
5.	Terminal					
	a. Tipe A	1	1	1	1	1
	b. Tipe B	1	1	1	1	1
	c. Tipe C	3	3	3	3	3
	d. Pendukung	2	2	2	2	2
6.	Trayek	59	59	59	59	59

Sumber: Dinas Perhubungan, 2017
*Keterangan: *) Angka Sementara*

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dilaksanakan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan fasilitas perhubungan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat dan pengelolaan parkir tepi jalan umum yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keselamatan, kelancaran, ketertiban lalu lintas dan angkutan serta untuk memberikan kontribusi PAD melalui pemungutan retribusi.

Pemasangan rambu-rambu untuk sistem keamanan jalan sudah berjalan dengan baik. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas serta rambu pengaman dilakukan di berbagai jalur jalan utama.Pemasangan rambu-rambu perlu dilakukan untuk memberikan informasi dini kepada pengguna jalan pada titik-titik rawan kecelakaan.

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas bertujuan mewujudkan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dengan penyediaan fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi Rambu-rambu, marka jalan, pagar pengaman, APILL dan *warning lamp*. Upaya meningkatkan jumlah fasilitas kelengkapan jalan dilakukan juga dalam rangka untuk mendukung manajemen dan rekayasa lalu lintas guna menjamin kelancaran arus lalu lintas orang dan barang secara efektif dan efisien. Namun demikian karena kondisi wilayah Kebumen yang terdiri dari dataran rendah, perbukitan bahkan pegunungan dan memiliki banyak persimpangan jalan, maka kebutuhan akan kelengkapan jalan terutama rambu jalan dan pagar pengaman (*guardraill*) masih banyak lokasi/tempat yang belum terpenuhi.

10) Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika dalam era globalisasi saat ini sangat penting dan strategis dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan adanya akses informasi yang cepat, akurat dan mudah dijangkau terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik serta tersalurnya aspirasi masyarakat. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Komunikasi dan Informatika didasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PERIM.KOMINFO/ 12/2010.

Tabel 2.39
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

NO.	URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016*
1.	Jumlah jaringan komunikasi	9	10	10	10	10
2.	Jumlah zona layanan komunikasi	55	55	55	97	97
3.	Jumlah surat kabar nasional dan lokal	8	8	8	8	8
4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	9	9	9	9	9
5.	Website milik Pemda	1	1	1	1	1
6.	Pameran/expo	1	1	1	1	1

Sumber: Dishubkominfo, 2017
*Keterangan: *) Angka Sementara*

Program yang dilaksanakan untuk meningkatkan aksesibilitas informasi dengan pengembangan jaringan informasi dan pengendalian terhadap prasarana komunikasi. Pengendalian dan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: pemberian fasilitasi perijinan berdasarkan verifikasi titik koordinat bakal calon lokasi menara telekomunikasi oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, monitoring eksisting menara telekomunikasi untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang mungkin ada di lapangan, pemungutan retribusi menara telekomunikasi. Monitoring menara telekomunikasi dilaksanakan dengan melakukan verifikasi data menara dan memberikan stiker pengawasan yang mencantumkan data menara dan informasi kepada pemilik menara terhadap tindak lanjut hasil pengawasan.

11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Capaian kinerja daerah pada urusan koperasi usaha kecil dan menengah menunjukkan progress yang relatif positif. Dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang menjadi tolak ukur capaian di antaranya:

a) Indikator persentase jumlah koperasi aktif terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat dari posisi 68,64% di tahun 2012, persentase koperasi aktif meningkat menjadi 80% pada tahun 2016. Angka capaian tahun 2016 ini sesuai dengan target dalam RPJMD tahun 2016-2021.
b) Indikator peningkatan jumlah UMKM. Pada periode 2012-2016 jumlah UMKM terus meningkat dari 42.784 UMKM pada tahun 2012 menjadi sebanyak 43.532 UMKM pada tahun 2016. Capaian ini mampu memenuhi target dalam RPJMD Tahun 2016-2021.

Tabel 2.40
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016
dan Capaian RPJMD sampai dengan Tahun 2016

NO.	URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016*		Ket.
						Capaian	Target RPJMD	
1	Persentase Koperasi Aktif	68,64	76,23	77,26	78,00	80,00	80,00	
2	Jumlah UMKM	42.784	42.990	43.134	43.132	43.532	43.532	

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM, 2017
*Keterangan: *) Angka Sementara* = *Tercapai*

12) Penanaman Modal

Kinerja di urusan penanaman modal secara umum menunjukkan perkembangan yang positif. Capaian kinerja urusan penanaman modal dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator, yaitu persentase peningkatan investasi PMA/PMDN, nilai investasi PMA/PMDN dan nilai survey kepuasan masyarakat (indeks kepuasan masyarakat) terhadap pelayanan perijinan terpadu.

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen
Tahun 2012-2016

NO.	TINGKAT INVESTASI PMDN	2012	2013	2014	2015	2016		Ket.
						Capaian	Target RPJMD	
1.	Nilai investasi PMA/PMDN (Juta Rp)	51.894	85.096	102.220	324.436	406.900	324.436	
2.	Persentase peningkatan investasi PMA/ PMDN	Na	Na	Na	0	25,42	0	
3.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perijinan Terpadu	Na	Na	Na	80,75/ B	81,00/ B	81,00/ B	

Sumber : Dinas Penanaman Modal PTSP, 2017
*Keterangan : *) data sementara* = *Tercapai*

13) Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang paling berharga yang nantinya akan memimpin negara. Pemuda yang akan tumbuh menjadi generasi emas merupakan pemuda yang memiliki jasmani dan rohani yang kuat. Hal tersebut tidak bisa lepas dari olah raga karena selain baik bagi kesehatan, juga bisa menumbuhkan jiwa yang sportif. Peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan kepemudaan sangat dibutuhkan. Organisasi pemuda di Kabupaten Kebumen antara lain KNPI, Organisasi Mahasiswa, Pramuka, organisasi kesenian dan organisasi olah raga.

Di Kabupaten Kebumen juga terdapat berbagai organisasi olahraga dari berbagai cabang olah raga yang telah ditetapkan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Organisasi olah raga ini berpartisifasi aktif dalam event-event yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, bahkan juga mampu mewakili kabupaten pada tingkat provinsi.

Tabel 2.42
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

NO.	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016*
	Kepemudaan					
1.	Jumlah Organisasi Kepemudaan	68	72	86	42	42
2.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	3	3	5	7	7
	Olahraga					
1.	Jumlah Klub Olahraga	68	72	86	86	86
2.	Lapangan Olah Raga	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	Sepakbola	140	115	115	115	115
	Bola Voli	289	166	166	166	166
	Bola Basket	60	35	35	35	35
	Bulu Tangkis	471	428	428	428	428
	Tenis	70	24	24	24	24
	Meja Tenis Meja		262	262	262	262
3.	Gedung Olah Raga	26	31	31	31	31
	Futsal	10	15	15	15	15
	Gedung Serba Guna	5	6	6	6	6
	Kolam Renang	11	9	9	9	9
	Sasana Tinju	0	1	1	1	1
4.	Jumlah Organisasi Olahraga	26	26	32	32	
5.	Kegiatan Olahraga	1	1	2	2	

Sumber: Dikpora, 2017
*Keterangan: *) Angka Sementara*

14) Statistik

Pengembangan data/informasi/statistik daerah dilaksanakan guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam kaitan ini tidak hanya terbatas pada penyediaan data namun yang lebih penting adalah validitas, kecepatan penyampaian serta keterpaduan data antar sektor/urusan sehingga memudahkan dalam analisis perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Capaian kinerja urusan statistik selama periode 2012-2016 antara lain tersusunnya Buku Daerah Dalam Angka, Buku Produk Domestik Regional Bruto, Buku Profil Daerah, Buku Studi Ketimpangan Pendapatan dan Buku Studi Nilai Tukar Petani. Selain itu telah dapat diwujudkan kemudahan untuk mengakses data statistik, melalui penyusunan berbagai sistem informasi manajemen (SIM) data pembangunan daerah yang memuat data statistik hasil pembangunan daerah, seperti SIM Pengentasan Kemiskinan, Sistem Informasi Profil Daerah, SIM Keuangan Daerah, SIM Perencanaan, SIM Pengendalian, SIMBADA, dan lain-lain.

15) Kebudayaan

Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari unsur-unsur yang rumit, termasuk di dalamnya sistem agaa dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni. Unsur-unsur tersebut menandakan bahwa kebudayaan tidak bisa lepas dengan masyarakat dan segala aktivitas yang dilakukan.

Di wilayah Kabupaten Kebumen banyak ditemukan benda peninggalan sejarah yang bernilai historis tinggi. Sebagian benda tersebut sudah berhasil dikumpulkan dan diidentifikasi. Benda peninggalan sejarah yang ada hingga tahun 2016 sebanyak 47 buah.

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan, khususnya yang merupakan kesenian dan kebudayaan asli Kebumen, adalah dengan menyelenggarakan festival seni dan budaya serta pelestarian benda, situs dan kawasan Cagar Budaya. Penyelenggaraan festival seni dan budaya selain memperkenalkan warisan budaya kepada generasi muda, juga untuk melestarikan seni dan budaya asli Kebumen.

Capaian kinerja urusan kebudayaan juga dapat dilihat dari jumlah grup kesenian daerah yang semakin meningkat dari 204 grup pada tahun 2012 menjadi 340 grup kesenian pada tahun 2016. Secara umum perkembangan capaian kinerja urusan kebudayaan ditampilkan dalam table berikut:

Tabel 2.43
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

NO.	URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016*
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4	4	4	11	11
2.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	45	45	46	46	47
3.	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	1	1	1	1	1
4.	Jumlah grup kesenian	204	204	311	311	340
	Kuda Lumping	131	131	78	125	125
	Ketoprak	34	35	38	38	38
	Wayang Kulit	42	43	129	129	129
	Campursari	n/a	n/a	4	8	8
	Angguk	n/a	n/a	1	2	2
	Rebana	n/a	n/a	27	40	40
	Karawitan	n/a	n/a	4	4	4
	Jamjaneng	n/a	n/a	16	21	21
	Calung	n/a	n/a	4	6	6
	Lengger	n/a	n/a	5	5	5
	Seni Peran	n/a	n/a	1	4	4
	Sanggar Seni	n/a	n/a	6	8	8
	Cepetan	n/a	n/a	1	4	4
	Angklung	n/a	n/a	1	3	3
	Teater	n/a	n/a	1	3	3

Sumber: SIPPD, 2016
*Keterangan: *) Angka Sementara per Juni 2016*

16) Perpustakaan

Perpustakaan dapat diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, rekreasi dan ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki manusia. Keberadaan perpustakaan berpengaruh pada tingkat pendidikan masyarakat, baik formal maupun informal. Setiap golongan masyarakat dapat mengakses informasi melalui perpustakaan yang akan meningkatkan pengetahuan masyarakat. Peningkatan pengetahuan secara tidak langsung akan mendorong masyarakat untuk lebih peka dan berperan aktif dalam setiap kegiatan maupun pembangunan di lingkungannya.

Jumlah perpustakaan di wilayah Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 466 pada tahun 2012 dan pada tahun 2016 jumlahnya mencapai 798. Hal ini diikuti dengan meningkatnya minat baca masyarakat dan pengunjung di perpustakaan. Capaian urusan perpustakaan dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 2.44
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

NO.	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016*
1.	Jumlah Perpustakaan	466	480	788	788	798
2.	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	37.433	40.148	14.870	77.751	42.098
3.	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	965.081	972.302	972.302	975.198	971.087
4.	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	14.828	15.775	14.671	18.797	19.723
5.	Jumlah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan	34.310	36.080	24.869	30.112	31.843

Sumber: Kantor Perpusarsipda, 2016
*Keterangan: *) Angka Sementara per Juni 2016*

17) Kearsipan

Arsip merupakan salah satu sumber informasi bagi pelaksanaan manajemen bagi lembaga pemerintahan. Untuk mewujudkan penerapan tata pemerintahan yang baik, pengelolaan arsip yang baik dan benar merupakan salah satu upaya untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Arsip mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena arsip merupakan sumber informasi yang akurat dan dapat digunakan sebagai alat bukti otentik kinerja pemerintah daerah.

Selama periode 2012-2016, telah dilakukan pelatihan aplikasi pengelolaan arsip secara otomasi kepada 55 SKPD dan juga telah dilakukan sosialisasi penyuluhan kearsipan kepada sekretaris desa dengan materi kearsipan dimulai dari pemilihan sampai dengan penyusutan serta materi perundangan tentang kearsipan. Dalam rangka mendukung implementasi kearsipan di Kabupaten Kebumen, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana

berupa filling kabinet, rak arsip, boks arsip, kartu kendali, map gantung, dan sekap kartu kendali. Bantuan kearsipan ini diberikan secara bertahap kepada seluruh desa yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen secara bertahap sejak tahun 2009-2015. Hal ini telah ditindak lanjuti dengan kunjungan ke setiap desa, selain untuk implementasi ilmu yang diterima, Kantor Arsipda Kebumen juga akan melakukan pembenahan kearsipan disetiap desa yang mendapatkan bantuan. Hal ini bertujuan agar arsip di desa tertata dengan baik, sehingga memudahkan perangkat desa untuk mencarinya dan membantu dalam pengambilan kebijakan nantinya.

c. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

Kinerja daerah di sektor kelautan dan perikanan relatif fluktuatif. Untuk produksi perikanan terjadi trend meningkat, namun pada tahun 2016 terjadi kecenderungan penurunan produksi perikanan. Hal ini utamanya disebabkan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Kebumen yang menurun, disebabkan perubahan iklim dimana kondisi cuaca di perairan tidak menentu dengan intensitas hujan yang cukup tinggi. Perkembangan konsumsi ikan menunjukkan kondisi yang menggembirakan, nampaknya telah terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan konsumsi ikan di Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.45
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016
dan Capaian RPJMD sampai dengan Tahun 2016

NO.	URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016*		Ket.
						Capaian	Target RPJMD	
1.	Produksi perikanan (ton)	5.796,25	3.861,52	6.887,53	9.627,0	10.092	8.518,68	
2.	Beroperasinya PPI yang bisa menampung kapal berbobot 30 GT ke atas	-	-	-	-	-	-	
2.	Konsumsi ikan	9,01	10,05	12,28	13,65	Na		
3.	Cakupan bina kelompok nelayan	24	20	25	30	Na		

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2016
*Keterangan: *) Angka Sementara* = *Tidak Tercapai* = *on progres*

Selama 3 tahun terakhir (2014-2016), terjadi peningkatan produksi ikan yang cukup menggembirakan, dari 6.887 ton pada 2014 menjadi 8.518,68 ton pada tahun 2016. Namun demikian, angka capaian produksi ikan tahun 2016 ini belum memenuhi target produksi ikan dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Sedangkan untuk indikator beroperasinya PPI yang bisa

menampung kapal berbobot 30 GT ke atas, sampai dengan tahun 2016 masih dalam proses, dimana untuk lokasi PPI Logending yang direncanakan bisa menampung kapal dengan bobot 30 GT lebih akan siap pada tahun 2018.

2) Pariwisata

Kinerja urusan pariwisata dapat dilihat dari indikator jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan. Secara umum jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Kebumen tahun 2012-2016 terus mengalami peningkatan, dari 807.500 wisatawan pada 2012 menjadi 1.304.815 wisatawan pada tahun 2016 (meningkat 62%). Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ini dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah peningkatan jumlah obyek wisata berbasis komunitas di beberapa wilayah, upaya promosi dan investasi pariwisata yang semakin masif dari berbagai elemen masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang di objek-objek wisata unggulan.

Tabel 2.46
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pariwisata
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016
dan Capaian RPJMD sampai dengan Tahun 2016

NO.	URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016*		Ket.
						Capaian	Target RPJMD	
1.	Jumlah kunjungan wisatawan	807.500	804.500	957.007	1.117.136	1.304.815	1.304.815	
2.	Lama tinggal wisatawan	-	-	-	0,10	0,20	0,20	

Sumber: Dinas Kepemudaan OR dan Pariwisata, 2017
*Keterangan: *) Angka Sementara = tercapai*

3) Pertanian

Perkembangan capaian ususan pertanian selama tahun 2012-2016, untuk komoditas padi, secara luasan areal tidak terdapat perkembangan yang signifikan, produksi dan produktivitas fluktuatif dengan kecenderungan yang menurun.

Capaian kinerja urusan pertanian tahun 2012-2016 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.47
Capaian Kinerja Urusan Pertanian
Tahun 2012-2016 dan Capaian RPJMD sampai dengan Tahun 2016

NO.	URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016*		Ket.
						Capaian	Target RPJMD	
1.	Produktivitas padi	6,17	5,30	5,59	6,53	5,59	6,54	
2.	Produktivitas jagung	7,53	7,18	5,55	7,23	5,71	7,48	
3.	Produktivitas kedelai	1,38	1,41	1,24	1,18	1,04	1,23	
4.	Produksi Kelapa	Na	Na	Na	188.450	Na	188.913	

NO.	URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016*		Ket.
						Capaian	Target RPJMD	
5.	Produksi tembakau (ton)	313,02	300,07	300,38	311,87	214,97	347,76	
6.	Produksi daging (kg)	7.844.971	8.704.375	11.086.737	11.101.920	11.102.031	11.102.031	
7.	Produksi telur (kg)	4.262.683	2.527.000	3.834.123	3.836.272	3.838.035	3.836.310	
8.	Produksi kayu bulat	27.592,54	37.233,99	35.567,87	17.149,26	15.589,34	17.320,75	

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan, 2017

*Keterangan : *) data sementara* = *tercapai* = *tidak tercapai*

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator produktivitas padi, jagung dan kedelai serta produksi tembakau dan kayu bulat Kabupaten Kebumen selama tahun 2012-2016 cenderung menurun. Penurunan produktivitas padi, jagung dan kedelai ini lebih banyak disebabkan karena cuaca ekstrim akibat iklim yang tidak menentu, yang ditandai dengan tingginya curah hujan pada akhir-akhir ini. Penurunan produktivitas ketiga komoditas tersebut juga terjadi seiring dengan penurunan hasil panen serta luasan panen. Penurunan luas lahan pertanian di daerah perkotaan pada umumnya disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan dari fungsi pertanian ke fungsi lain yang dianggap memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Sedangkan penurunan hasil panen lebih diakibatkan oleh kualitas lahan yang menurun karena pengaruh lingkungan maupun alam. Baik hasil panen maupun luasan panen menunjukkan pertumbuhan yang negatif setiap tahunnya. Meskipun begitu, penurunan hasil panen terjadi lebih cepat dibandingkan penurunan luasan panen sehingga hal tersebut menyebabkan produktivitas padi mengalami pertumbuhan negatif. Dengan kondisi tersebut, target RPJMD untuk indikator produktivitas padi, jagung, kedelai dan produksi tembakau dan kayu bulat pada tahun 2016 tidak tercapai. Namun demikian, indikator produksi daging dan produksi telur selama periode 2012-2016 meskipun cenderung fluktuatif, target dalam RPJMD untuk kedua indikator tersebut pada tahun 2016 dapat dicapai.

4) Kehutanan

Capaian kinerja daerah pada urusan kehutanan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.48
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kehutanan
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015**	2016**
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)	4.237	5.100	2.525	2.525	2.525

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2017

*Keterangan: **) Angka Sementara*

5) Energi dan Sumberdaya Mineral

Pertambangan tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pertambangan tanpa izin yang tidak mengikuti kaidah-kaidah pertam-bangan yang benar, telah mengakibatkan kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan kecelakaan tambang. Disamping itu, pertambangan tanpa izin bukan saja menyebabkan potensi penerimaan negara berkurang, tetapi juga pemerintah harus mengeluarkan dana yang sangat besar untuk memperbaiki kerusakan lingkungan.

Pengawasan terhadap pertambangan tanpa izin masih kurang optimal, hal tersebut diketahui dengan masih adanya luasan pertambangan yang tanpa ijin. Meskipun demikian, luasan pertambangan tanpa ijin pada tahun 2011-2015 mengalami penurunan dari 32 hektar pada tahun 2011 menjadi 24,20 hektar pada tahun 2015.

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada akhir tahun 2016, sektor ini berkontribusi sebesar 5,18 persen. Namun demikian, tetap harus diingat, bahwa nilai ekonomis dari sektor pertambangan ini, seringkali berbanding terbalik dengan dampak lingkungan yang diakibatkan.Kebijakan pemerintah untuk tidak menggunakan pasir Sungai Luk Ulo pada setiap kegiatan pembangunan di sektor pemerintah merupakan salah satu upaya untuk mengurangi beban eksploitasi terhadap penambangan galian C di Sungai Luk Ulo.

Tabel 2.49
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
Kabupaten KebumenTahun 2012-2016

NO.	URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016*
1.	Pertambangan tanpa izin (Ha)	32,00	32,00	24,20	24,20	24,20
2.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (persen)	4,69	4,69	5,02	5,18	5,18

Sumber: BPM-PTSP, 2017
*Keterangan: *) Angka Sementara*

6) Perdagangan

Kinerja urusan perdagangan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dapat dilihat dari beberapa indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.50
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016
dan Capaian RPJMD sampai dengan Tahun 2016

NO.	URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016*		Ket.
						Capaian	Target RPJMD	
1.	Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik	Na	Na	Na	31,11	Na	40,00	●
2.	Jumlah usaha perdagangan berizin	Na	Na	Na	9.718	Na	1.059	
3.	Terbentuknya Unit Usaha Syariah pada BUMD	-	-	-	-	-	-	▲

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2017
*Keterangan: *) Angka Sementara ● = tercapai ▲= on progres*

7) Perindustrian

Kinerja urusan perindustrian selama tahun 2012-2016 dapat dilihat dari beberapa indikator yang tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 2.51
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perindustrian
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016
dan Capaian RPJMD sampai dengan Tahun 2016

NO.	URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016*		Ket.
						Capaian	Target RPJMD	
1.	Jumlah industri kecil menengah	51.552	52.780	54.867	54.899	54.912	54.909	●
2.	Terbangunnya kawasan industri	-	-	-	-	-	-	▲

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2017
*Keterangan: *) Angka Sementara ● = tercapai ▲= on progres*

Jumlah industri kecil menengah dari tahun 2012-2016 terus mengalami peningkatan dari 51.552 unit menjadi 54.912 unit atau meningkat 6,52 persen. Apabila dibandingkan dengan target dalam RPJMD Tahun 2016-2021, realisasi jumlah IKM pada tahun 2016 sudah memenuhi atau melebihi target. Hal ini mengindikasikan perhatian pemerintah terhadap pengembangan IKM di Kabupaten Kebumen berada pada trek atau jalur yang tepat. Salah satu program unggulan yang telah dan akan dijalankan selama 5 tahun ke depan yaitu Proyek Operasi Daerah Agraria (PRODA) pada tahun 2016 berhasil merealisasikan 1.000 sertifikat untuk IKM, telah berhasil mendukung perkembangan IKM selama tahun 2016 dan diharapkan terus berkembang sampai dengan tahun 2021.

Indikator lain pada urusan Perindustrian yang menjadi tolak ukur keberhasilan RPJMD adalah terbangunnya 1 kawasan industri. Kawasan industri yang direncanakan akan dibangun di atas luasan lebih kurang 125 Hektar di daerah

selatan Kecamatan Petanahan dan Klirong ini merupakan cita-cita besar Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, dalam rangka mewujudkan Kebumen yang sejahtera berbasis agrobisnis, sekaligus menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran melalui penyerapan tenaga kerja di kawasan industri tersbeut. Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 direncanakan pada tahun 2018 kawasan industri ini akan terbangun. Sampai dengan tahun 2016, untuk mewujudkan kawasan industri tersebut telah disusun kajian atau studi mengenai pembangunan kawasan industri. Sedangkan pada tahun 2017 direncanakan akan disusun RIPIDA dan kajian mengenai pembentukan BUMD Kawasan Industri yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Bagian Perekonomian Setda.

8) Transmigrasi

Kinerja daerah pada urusan transmigrasi mengalami penurunan. Jika pada tahun 2012 daerah sudah berhasil mengirim transmigrasi umum sebanyak 25 kk, maka tahun-tahun selanjutnya kondisinya justru semakin menurun. Pada tahun 2014, 2015 dan 2016 daerah hanya mampu mengirim transmigran sebanyak 5 KK.Hal ini barangkali disebabkan semakin berkurangnya jumlah peminat transmigrasi yang memenuhi syarat serta program transmigrasi daerah yang kuotanya relatif menurun.

Tabel 2.52
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015*	2016*
Transmigrasi Umum	25 kk	10 kk	5 kk	5 kk	5 kk

Sumber: Dinas Nakertransos, 2017
*Keterangan: *) Angka Sementara*

d. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan

Pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, antara lain perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Tahun 2016 merupakan tahun yang cukup strategis dari sisi perencanaan pembangunan daerah, dimana terjadi periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati baru. RPJMD Tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah lima tahunan disusun pada tahun 2016 setelah pada tahun sebelumnya telah disusun RPJMD Teknokratis Tahun 2016-2021.

2) Keuangan

Dari sisi keuangan daerah, total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama periode 2012-2016 terus meningkat, yang menunjukkan peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tahun 2012, 2013 dan 2015 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang menunjukkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Kebumen terus meningkat. Namun demikian, pada tahun 2014 kinerja keuangan daerah menurun menjadi Wajar Dengan Pengecualian. Hal ini menjadi perhatian seluruh elemen Pemerintah Daerah untuk kembali meningkatkan kinerja keuangan daerah. Salah satu indikator utama yang menyebabkan penurunan kinerja keuangan daerah adalah penilaian terhadap pengelolaan aset daerah.Untuk itu, dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset daerah, secara periodik dilakukan evaluasi manajemen pengelolaan aset sehingga keberadaan aset Kabupaten Kebumen dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja keuangan daerah dan secara khusus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan.

3) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan aparatur pemerintah yang bertugas sebagai abdi masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.Keberadaan PNS sebagai sumber daya manusia dalam pemerintahan menjadi pilar pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu diperlukan PNS yang berkualitas agar pembanguan dapat berjalan baik.

Jumlah PNS di Pemerintah Kabupaten Kebumen selama tahun 2011-2015 cenderung menurun. Pada tahun 2015 jumlah PNS sebanyak 13.834, atau menurun 12,24% dari tahun 2011 sejumlah 15.527 orang. Dibandingkan dengan jumlah penduduk, rasio jumlah PNS di Kabupaten Kebumen tahun 2015 sebesar 1: 85,65 atau 1 PNS melayani sejumlah 86 penduduk. Perkembangan jumlah PNS Kabupaten Kebumen tahun 2011-2015 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.53
Perkembangan Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten KebumenTahun 2011-2015

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2012	8.010	6.996	15.006
2013	7.653	6.840	14.493
2014	7.438	6.800	14.238
2015	7.206	6.628	13.834
2016	Na	Na	Na

Sumber: BKD, 2016

Dilihat dari kapasitas SDM, kualitas PNS Kabupaten Kebumen selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari tingkat pendidikan PNS, dimana PNS yang berpendidikan DIV/S1 dan S2 semakin meningkat. Pada tahun 2011 PNS yang berpendidikan DIV/S1 sejumlah 4.871 orang dan meningkat 50,85% menjadi 7.348 orang pada tahun 2015. Demikian juga dengan jumlah PNS berpendidikan S2-S3 yang meningkat dari 191 orang pada tahun 2011 menjadi 539 orang tahun 2015 (meningkat 182,20%).

Tabel 2.54
Perkembangan Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Tahun	SD-SLTA	D1-D3	DIV-S1	S2-S3	Jumlah
2012	5.776	3.512	5.472	246	15.006
2013	5.278	3.429	5.529	257	14.493
2014	3.886	3.129	6.961	262	14.238
2015	3.557	2.390	7.348	539	13.834
2016	Na	Na	Na	Na	Na

Sumber: BKD, 2016

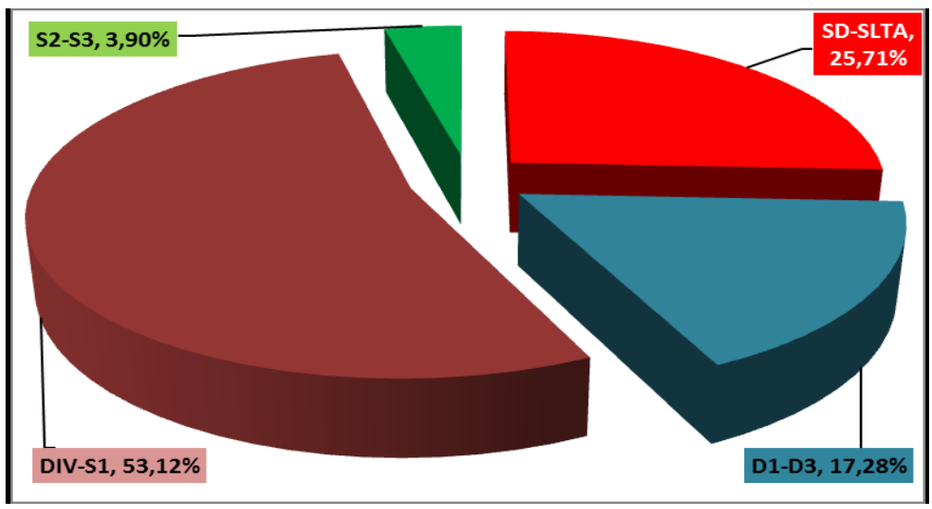

Gambar 2.37
Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Kebumen Tahun 2015

Sumber: BKD, 2016

Sementara itu, upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat tidak terlepas dari peningkatan kapasitas SDM PNS.Upaya peningkatan kapasitas SDM PNS dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.Selama tahun 2011-2015 1.152 PNS mendapatkan peningkatan kapasitas melalui diklat teknis fungsional.

Tabel 2.55
Perkembangan Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Mengikuti Diklat Teknis Fungsional
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2012	168	57	225
2013	143	137	280
2014	131	129	260
2015	167	70	237
2016	Na	Na	Na

Sumber: BKD, 2016

4) Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan dalam era persaingan global dewasa ini menjadi hal yang sangat strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Penelitian dan pengembangan menjadi fondasi untuk menemukan dan mengimplementasikan berbagai inovasi dalam pembangunan daerah di semua sektor kehidupan masyarakat. Sampai dengan tahun 2016, telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang ditujukan dalam upaya peningkatan peran aparatur dan masyarakat dalam penelitian dan pengembangan, seperti Riset Unggulan Daerah, Krenova, dan SIDA. Selain itu, pada tahun 2016 ini, atas inisiatif unsur perguruan tinggi dan masyarakat di Kabupaten Kebumen, telah dibentuk sebuah wadah bagi penelitian dan pengembangan di Kabupaten Kebumen yaitu Dewan Riset Daerah.

5) Fungsi Lainnya (Pemerintahan Umum)

Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, Kabupaten Kebumen mempunyai perangkat daerah antara lain satuan kerja perangkat daerah (Badan, Dinas, Kantor), kecamatan dan kelurahan serta penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada Tahun 2016, jumlah satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Kebumen sejumlah 31 unit. Kemudian secara administratif Kabupaten Kebumen memiliki 26 kecamatan yang terbagi ke dalam 449 desa dan 11 kelurahan, 1.934 rukun warga, 1.680 dusun, dan 7.078 rukun tetangga, dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Kebumen.

5. Aspek Daya Saing Daerah

a. Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan. Penghitungan indikator ini diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase.Semakin tinggi NTP, maka relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan dan daya beli petani.

Secara umum penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP) menghasilkan 3 (tiga) pengertian, yaitu:

a) NTP >100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga barang konsumsi dan biaya produksi. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya; dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya.
b) NTP=100, berarti petani mengalami impas/break even. Kenaikan/penurunan harga produksi sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi dan biaya produksi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan.
c) NTP<100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan harga barang konsumsi dan biaya produksi. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya.

Pada tahun 2012-2016, terjadi tren penurunan NTP dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Penurunan ini mengindikasikan semakin lemahnya daya tawar petani terhadap pasar. Kemudian dari target pencapaian NTP dalam RPJMD Tahun 2016-2021, dimana tahun 2016 ditargetkan sebesar 102,20, melihat kondisi pada tahun 2015, maka diperkirakan sulit tercapai. Kondisi ini patut menjadi prioritas dan perhatian pemerintah daerah, mengingat kontribusi sektor pertanian cukup dominan dalam perekonomian Kabupaten Kebumen. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2.56
Perkembangan Nilai Tukar Petani Kabupaten Kebumen,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2016
serta Capaian RPJMD sampai dengan Tahun 2016

No.	Wilayah	2012	2013	2014	2015	2016*		Ket.
						Capaian	Target RPJMD	
1.	Kabupaten Kebumen	105,59	102,00	Na	100,86	100,86	102,20	
2.	Jawa Tengah	106,37	101,42	100,65	102,03	102,03	-	-
3.	Indonesia	104,87	101,96	101,32	102,33	102,33	-	-

Sumber : Buku Nilai Tujar Petani, BPS, 2016 (data diolah)
*Keterangan : *) Angka perkiraan = tidak tercapai*

Peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan NTP merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan di Kabupaten Kebumen, karena hal ini terkait dengan peningkatan motivasi petani dalam berusaha di sektor pertanian. Dengan meningkatnya NTP, maka pembangunan pertanian akan berdampak dalam peningkatan partisipasi petani dan produksi pertanian dalam perekonomian pedesaan, penciptaan lapangan pekerjaan di pedesaan dan menumbuhkan permintaan produk non pertanian.

Selain itu, peningkatan NTP juga diharapkan akan mampu mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah (desa-kota), maupun antar wilayah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya di daerah.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani maka perlu dilaksanakan peningkatan kapabilitas atau kemampuan petani melalui :

a) Peningkatan sumber daya manusia. Untuk meningkatkan pendapatan para petani melalui peningkatan produktivitas maka sangat diperlukan suatu pengelolaan wilayah pertanian dengan baik dan benar. Pengelolaan pertanian yang baik sangat membutuhkan penguasaan suatu pengetahuan atau teknologi yang mencukupi dari para petani tersebut. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan para petani maka perlu adanya adopsi teknologi, yang dapat ditempuh antara lain dengan peningkatan penyuluhan dan pelatihan praktis yang sesuai dengan kondisi agroekologi. Penerapan teknologi diharapkan tidak hanya berpatokan pada harus berjalannya suatu program pemerintah di bidang pertanian, tetapi juga memperhatikan unsur petani dan kebutuhannya serta kondisi agroekologi yang berbeda antar wilayah;
b) Penguatan Sistem Usaha Perbenihan dan Pembibitan. Berdasarkan penelitian dan praktek di lapangan, penggunaan benih/bibit unggul diakui telah menjadi satu faktor kunci keberhasilan peningkatan produksi. Swasembada beras, jagung dan tebu yang telah dicapai selama ini, utamanya dikarenakan penggunaan benih unggul. Namun permasalahannya adalah sampai saat ini benih unggul seperti: padi hibrida, sayuran dan tanaman hias, serta bibit sapi banyak diimpor dari luar negeri. Disini dapat dilihat peran benih sebagai sarana utama agribisnis menjadi sangat penting. Agar usaha agribisnis dapat maju dan berkembang, maka sistem dan usaha perbenihan harus tangguh. Sistem perbenihan didukung oleh beberapa subsistem yang terdiri dari: subsistem pengembangan varietas untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan selera masyarakat; subsistem produksi dan distribusi benih; subsistem perbaikan mutu melalui sertifikasi dan pelabelan; dan subsistem kelembagaan dan peningkatan SDM. Keberhasilan dalam menggerakkan seluruh komponen tersebut sangat dipengaruhi oleh komponen pendukung antara lain adalah adanya lembaga perbenihan;
c) Peningkatan ketersediaan pupuk dan alternatifnya. Dalam konteks pupuk bersubsidi berbagai upaya perlu dilakukan agar supaya efektifitas pupuk bersubsidi dapat ditingkatkan. Pembenahan jalur dan mekanisme distribusi, mekanisme penentuan harga dan hal lainnya perlu segera dilakukan sehingga pemberian pupuk bersubsidi dapat lebih tepat waktu, tepat guna dan akhirnya tepat sasaran. Sementara itu untuk dapat meningkatkan produktivitas tanaman dan lahan sekaligus

mengurangi konsumsi pupuk N, maka tantangan ke depan adalah pencanangan gerakan nasional penggunaan pupuk majemuk secara berimbang serta menurunkan proporsi penggunaan pupuk kimia dengan meningkatkan penggunaan pupuk organik untuk memperbaiki kesuburan fisik tanah. Dengan demikian usaha tani yang ramah lingkungan dan lebih berkelanjutan dapat lebih dikembangkan. Hal ini perlu didorong pula oleh upaya penerapan teknologi pertanian organik, penggunaan pupuk organik yang diproduksi sendiri oleh petani serta penerapan sistem pengendalian hama terpadu;

d) Penguatan Kelembagaan Petani, Pertanian dan Pedesaan. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Perhimpunan Petani Pemakai Air dan Subak dihadapkan pada tantangan ke depan untuk merevitalisasi diri dari kelembagaan yang saat ini lebih dominan hanya sebagai wadah pembinaan teknis dan sosial menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di perdesaan. Pembangunan suatu sektor tidak bisa berdiri sendiri, melainkan melibatkan banyak sektor terkait guna mencapai keberhasilan. Pertemuan koordinasi antar sektor yang sudah dilakukan perlu ditingkatkan dengan mengintegrasikan secara fisik kegiatan antar sektor, meskipun hal itu sulit dilaksanakan karena membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga untuk menelaah kegiatan antar sektor, wilayah, komoditas, dan waktu supaya tidak tumpang tindih;

e) Peningkatan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan komponen yang sangat penting baik dalam pembangunan perdesaan secara umum maupun dalam usaha tani secara khusus. Dengan kata lain, sarana dan prasarana memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap upaya peningkatan kesejahteraan petani. Infrastruktur yang krusial bagi peningkatan produktifitas usaha tani adalah prasarana jalan dan transportasi. Akses masyarakat perdesaan terhadap jalan yang menghubungkan perdesaan dengan pusat distribusi dan pemasaran produk pertanian ternyata masih belum memadai, demikian pula dengan prasarana pendukung lainnya seperti pelabuhan. Hal ini tentunya berdampak pada peningkatan biaya dan efisiensi usaha tani. Begitu pula dengan akses masyarakat terhadap salah satu sarana dan prasarana yang secara langsung berdampak terhadap usaha tani yaitu sarana irigasi juga belum optimal. Kurangnya pembangunan jaringan irigasi yang baru serta adanya kerusakan jaringan irigasi yang sudah ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. Kerusakan ini terutama diakibatkan adanya banjir dan erosi, kerusakan sumberdaya alam di daerah aliran sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi oleh usaha tani. Di sisi lain, penggunaan air irigasi oleh usaha

tani juga cenderung kurang efisiensi (boros). Oleh karena itu dalam hal pengelolaan prasarana pengairan tantangan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan daerah aliran sungai; pemeliharaan jaringan irigasi perdesaan; pengembangan sumber air alternatif berskala kecil antara lain melalui pemanfaatan teknologi pengambilan air permukaan dan bawah tanah; pembangunan dan pemeliharaan embung dan bendungan serta pemanfaatan sumber air tanah dan air hujan;

f) Peningkatan akses pasar. Ada beberapa permasalahan dalam tata niaga pertanian yang turut berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan petani, yaitu salah satunya adalah rantai niaga produk pertanian. Hampir seluruh produk pertanian primer memiliki rantai niaga yang relatif panjang dan dikuasai oleh pedagang baik pedagang perantara, pedagang pengumpul maupun pedagang besar. Hal ini menyebabkan margin harga produk di tingkat usaha tani dengan di tingkat konsumen relatif tinggi. Selain itu petani seringkali menjadi pihak yang paling menderita apabila terjadi resiko kegagalan pasar (*market failure*). Masalah pengaturan harga dalam banyak hal juga kurang berpihak pada petani. Kebijakan harga (*pricing policies*) seringkali kurang disesuaikan dengan kenaikan harga sarana produksi sehingga menyebabkan makin minimnya margin usaha tani. Selain itu, harga produk pertanian yang fluktuatif juga menjadi permasalahan tersendiri bagi peningkatan kesejahteraan petani. Hal lainnya seperti akses informasi niaga produk pertanian, pasar produk pertanian nasional dan internasional, serta aspek lainnya dalam tata niaga produk pertanian juga turut berpengaruh dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani;
g) Peningkatan mutu atau kualitas hasil produksi pertanian. Dengan peningkatan mutu maupun kualitas hasil pertanian, maka akan menaikkan harga-harga hasil produksi pertanian dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani, misalnya dengan memproduksi beras organik;
h) Pengoptimalan resi gudang maupun sistem tunda jual. Resi gudang maupun sistem tunda jual ini bisa diharapkan untuk dapat mengantisipasi turunnya harga-harga produksi pertanian secara drastis;
i) Menekan biaya produksi pertanian. Untuk dapat mengurangi atau menekan biaya pertanian, pemerintah dapat melakukan kebijakan melalui pupuk bersubsidi, bantuan bibit maupun benih unggul dan kebijakan-kebijakan lain yang bisa menekan biaya produksi pertanian; dan
j) Melakukan pendampingan atau penyuluhan terhadap petani. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendampingi petani agar petani disiplin dalam setiap proses kegiatan pertanian, misalnya ketepatan waktu menanam, ketepatan

penggunaan benih dan ketepatan penggunaan banyaknya pupuk.

b. Infrastruktur Wilayah

Kabupaten Kebumen merupakan daerah agraris di mana sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar PDRB. Terkait dengan hal tersebut maka diperlukan sarana irigasi yang baik untuk menunjang sektor pertanian tersebut. Sampai dengan Tahun 2016, jaringan irigasi kewenangan Kabupaten Kebumen dengan kondisi baik mencapai 60% dari total daerah irigasi kewenangan Kabupaten sejumlah 7520,4 Ha. Angka ini menurun dari kondisi Tahun 2015 dikarenakan luasan irigasi yang meningkat pada Tahun 2016.



Gambar 2.38
Perkembangan Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten
Dalam Kondisi Baik
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2016
Sumber: DPUPR Bidang SDA Tahun 2017

Pada sisi yang lain, infrastruktur jalan merupakan faktor utama pendukung kelancaran lalu lintas di darat. Pembangunan transportasi jalan merupakan bagian penting dalam kegiatan pembangunan yang memiliki nilai ekonomi, sosial dan strategis dan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Jaringan jalan merupakan bagian dari sarana terpenting dalam sistem transportasi.Jangkauan pelayanan jalan di Kabupaten Kebumen saat ini terbatas pada wilayah-wilayah yang secara alami berkembang dengan pesat.

Kondisi jalan setiap tahun harus terus ditingkatkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas untuk mengimbangi berkembangnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Jaringan jalan yang ada di Kabupaten Kebumen pada Tahun 2016 terdiri dari jalan nasional sepanjang 56,428 Km, jalan provinsi sepanjang 30,090 Km, jalan kabupaten sepanjang 975,15 Km dan panjang jalan desa 1.236,94 Km. Dari 975,15 Km jalan kewenangan

kabupaten, saat ini 590,56 Km (60,56%) dalam kondisi baik, sedangkan sisanya sejumlah 89,72 Km (9,20%) dalam kondisi sedang, rusak ringan 126,57 Km (12,98%) dan rusak berat 168,31 Km (17,26%).

B. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021

Dari hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Kebumen 2016–2021 tahun kedua (2017), bahwa dari 26 (dua puluh enam) indikator yang ada di dalam RPJMD dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat sebanyak 20 (dua puluh) indikator atau 76,92% (tujuh puluh enam koma sembilan puluh dua persen) dengan status TERCAPAI;
2. Sebanyak 5 (lima) indikator atau sebesar 19,23% (sembilan belas koma dua puluh tiga persen) dengan status TIDAK TERCAPAI.
3. Sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) indikator atau sebesar 3,85 % (tiga koma delapan puluh lima persen) dengan status capaian BELUM TERSEDIA DATA.
4. Indikator-indikator dengan Status TERCAPAI diantaranya adalah indikator Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Pertumbuhan Ekonomi, Terbangunnya Kawasan Pembangunan Ekonomi, Persentase peningkatan kunjungan wisata, Angka Kemiskinan, Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik dan Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan.
5. Untuk Indikator dengan Status TERCAPAI, Indikator Angka Harapan Hidup ditargetkan pada tahun 2016 sebesar 72,81 dan capaiannya sebesar 72,81, Angka Kematian Ibu target tahun 2016 sebesar 100 namun capaian tahun 2016 sebesar 80,01. Angka Kematian Bayi target tahun 2016 sebesar 11 kasus sedangkan capaiannya sebesar 8,95. Indikator Terbangunnya Kawasan Pembangunan Ekonomi target 2016 sebesar 1 kawasan dan realisasi tahun 2016 adalah 1 kawasan yaitu Kawasan Pedesaan. Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata target 2016 sebesar 16,8% namun capaian 2016 mencapai 27,97%. Untuk Indikator Persentase Tingkat Pelayanan Infrastruktur Wilayah target 2016 sebesar 52,68% sedangkan capaian sebesar 70,52%. Untuk indikator Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan, target tahun 2016 sebesar 94% namun capaian sudah mencapai 100%.
6. Indikator dengan Status TIDAK TERCAPAI sebanyak 5 (lima) indikator yaitu Pendapatan Perkapita Penduduk (ADHK), Indek Rasio GINI, Angka Pengangguran, Nilai Akuntabilitas Kinerja, serta Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ. Pendapatan Perkapita Penduduk (ADHK) target 2016 sebesar 18.349,63 baru tercapai sebesar 17.367,4 untuk Rasio Indek GINI target 2016 sebesar 0,23% namun capaiannya sebesar 0,24%. Angka Pengangguran target 2016 sebesar 2,07% baru tercapai sebesar 2,15%. Sedangkan untuk indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan target 2016 adalah B namun capaian 2016 masih CC sama seperti tahun sebelumnya.

7. Terdapat 1 (satu) indikator dengan Status BELUM TERSEDIA DATA yaitu indikator Opini BPK atas LKPD. Untuk indikator ini masih berstatus bintang dikarenakan belum tersedia datanya. Sedangkan Target untuk tahun 2016 adalah WTP, namun hasil pemeriksaan BPK belum selesai sehingga belum bisa diketahui statusnya apakah dapat predikat WTP atau tidak.

C. Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018 merupakan pelaksanaan visi dan misi Bupati tahun 2016-2021, yang menjabarkan strategi kebijakan program dan kegiatan untuk menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan uraian evaluasi pelaksanaan pembangunan sampai dengan tahun 2016, maka isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah di bidang ekonomi yang mendesak dan harus dihadapi Kabupaten Kebumen pada tahun 2018, antara lain:

1. Isu Strategis
   a. Meningkatnya ketimpangan dan angka pengangguran;
   b. Menurunnya produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan;
   c. Belum optimalnya pengelolaan pariwisata;
   d. Masih tingginya angka kemiskinan;
   e. Angka Partisipasi Murni menurun;
   f. Angka kematian ibu dan bayi masih cukup tinggi;
   g. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas;
   h. Belum optimalnya perencanaan pembangunan berbasiskan potensi wilayah dan kawasan; dan
   i. Penurunan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup serta potensi bencana yang tinggi.
2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

   Mempertimbangan potensi sumber daya, kondisi aktual, prioritas program/kegiatan unggulan Kepala Daerah dan kemampuan keuangan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, maka arah pembangunan selama satu tahun diupayakan untuk dapat memecahkan isu dan masalah mendesak sesuai kewenangan urusan pemerintah daerah yang diperkirakan akan dihadapi pada tahun 2018.

   a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
      1) Pendidikan
         a) Belum optimalnya kemampuan akademik dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan;
         b) Belum optimalnya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan;
         c) Terbatasnya sarana dan prasarana PAUD dan pendidikan dasar; dan
         d) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan belum optimal;
      2) Kesehatan
         a) Angka kematian ibu dan bayi masih cukup tinggi;

b) Masih terjadinya kasus penyakit menular seperti DBD, HIV dan malaria;
c) Masih adanya balita dan ibu hamil dengan status gizi buruk/kurang gizi;
d) Pelaksanaan kebijakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum optimal menjangkau seluruh masyarakat dan aturannya yang masih sering berubah;
e) Belum optimalnya ketersediaan pelayanan kesehatan rujukan dan kurangnya SDM teknis yang berakibat pada menurunnya mutu pelayanan RS; dan
f) Kurang optimalnya peran lintas sektoral dalam upaya penanganan masalah kesehatan.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas prasarana jalan dan jembatan kabupaten maupun desa;
b) Belum optimalnya penyediaan prasarana gedung perkantoran dan penyediaan prasarana publik;
c) Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan drainase serta masih adanya wilayah yang beresiko terkena bahaya banjir;
d) Kurangnya pemberdayaan petani pemakai air;
e) Kurangnya usaha-usaha konservasi sumberdaya air;
f) Terbatasnya ketersediaan air baku perdesaan dan daerah perbukitan;
g) Masih rendahnya fasilitasi penataan dan rehabilitasi lingkungan permukiman perdesaan;
h) Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum, air limbah, drainase dan persampahan;
i) Pertambahan perumahan dan permukiman memerlukan pengembangan prasarana dan sarana dasar yang terpadu;
j) Dukungan infrastruktur pada lokasi potensial investasi belum maksimal;dan
k) Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
a) Masih banyaknya rumah dalam kondisi tidak layak huni;
b) *Backlag* (jarak antara ketersediaan dan kebutuhan) perumahan masih tinggi;
c) Masih adanya kawasan permukiman kumuh; dan
d) Belum optimalnya penyediaan fasilitas dasar bagi masyarakat miskin termasuk air bersih dan sanitasi.

5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
a) Masih perlunya peningkatan kewaspadaan aparatur pemerintah dan masyarakat akan kemungkinan Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) dalam NKRI;
b) Menurunnya kesadaran masyarakat tentang persatuan dan kesatuan, solidaritas, hormat menghormati meskipun dalam perbedaan;

c) Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik;
d) Belum optimalnya kesadaran aparatur pemerintah dan masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan;
e) Menurunnya kesadaran berbangsa dan bermasyarakat serta partisipasi dalam pembangunan bagi organisasi kemasyarakatan dan LSM;
f) Perlunya peningkatan kewaspadaan dan upaya pencegahan dini terhadap bencana;
g) Belum optimalnya penegakan peraturaan perundangan-undangan di daerah; dan
h) Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap permasalahan hukum masihrendah.

6) Sosial
a) Tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya fakir miskin, penyandang disabilitas dan rumah tidak layak huni;
b) Terbatasnya akses jaminan sosial, perlindungan sosial bagi PMKS dan Pemberdayaan sosial bagi PMKS;
c) Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial, termasuk Panti Pelayanan Sosial yang memadai;
d) Belum optimalnya kapasitas kesiapsiagaan terhadap bencana alam/sosial sementara frekuensi/ variasi bencana sangat kompleks.
e) Terbatasnya kapasitas (kualitas dan kuantitas) sumber daya manusia, termasuk pekerja sosial masyarakat dan potensi kesejahteraan masyarakat lainnya; dan
f) Terbatasnya akses informasi dan jejaring kerjasama bagi pelayanan penanganan PMKS.

b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
1) Tenaga kerja
a) Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja dan terbatasnya penyediaan lapangan kerja yang menyebabkan pengangguran;
b) Masih rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat/ tenaga kerja.
c) Terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan ketenagakerjaan yang sesuai standar kebutuhan peralatan berbasis kompetensi dan perkembangan teknologi;
d) Rendahnya keterampilan dan produktifitas tenaga kerja dan calon tenaga kerja;
e) Masih terbatasnya sistem informasi ketenagakerjaan dan belum tersedianya data base yang akurat tentang kondisi ketenagakerjaan;
f) Belum adanya keterpaduan program penanganan pengangguran dan kemiskinan antar berbagai sektor;

g) Masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan norma ketenagakerjaan secara konsekuen;
h) Masih rendahnya keikutsertaan tenaga kerja/karyawan pada Jamsostek; dan
i) Belum optimalnya peran dan fungsi organisasi/lembaga ketenagakerjaan.

2) Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak
a) Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam berbagai aspek pembangunan;
b) Masih adanya nilai norma budaya yang kurang kondusif terhadap pemberdayaan perempuan;
c) Belum optimalnya penyediaan database pilah gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
d) Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
e) Terbatasnya SDM yang menangani pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

3) Pangan
a) Masih kurang beragamnya konsumsi pangan masyarakat yang bergizi, berimbang dan belum memenuhi kaidah-kaidah kesehatan;
b) Belum optimalnya akses sebagian masyarakat terhadap bahan pangan karenarendahnya kemampuan daya beli/kemiskinan;
c) Harga bahan pangan pokok masih belum stabil terutama pada saat musim panen raya, musim paceklik dan menjelang hari besar nasional;
d) Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap keamanan pangan;
e) Belum terpenuhinya kebutuhan satu desa satu penyuluh dan masih kurang optimalnya sinergi lintas sektor pelaku penyuluhan;
f) Belum optimalnya peran masyarakat dan kelembagaannya dalam pembangunan pertanian,perikanan dan kehutanan.

4) Pertanahan
a) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan ijin pembangunan di atas tanah (IMB);
b) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan kepemilikan tanahnya;
c) Rumitnya proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum; dan
d) Tingginya permintaan harga tanah oleh masyarakat (selalu berada di atas harga pasaran).

5) Lingkungan Hidup
a) Belum optimalnya pengelolaan persampahan;
b) Masih kurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau;
c) Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup;

d) Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup;
e) Penurunan kualitas air permukaan dan terbatasnya ketersediaan cadangan air;
f) Masih adanya lahan kritis yang belum tertangani; dan
g) Adanya indikasi rendahnya kualitas lingkungan terbukti dalam beberapa parameter kualitas lingkungan yang tidak memenuhi baku mutu lingkungan (meningkatnya pencemaran air dan udara).

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
a) Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran sebagian warga masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan catatan sipil;
b) Belum optimalnya kualitas implementasi SAK;
c) Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM yang mampu mengoperasionalkan piranti Teknologi Informasi SAK;
d) Sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan kurang memadai; dan
e) Belum optimalnya pengelolaan dokumen dan sinergitas/sinkronisasi program kependudukan dan catatan sipil antar pemangku kepentingan.

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a) Belum optimalnya tertib administrasi keuangan dan kekayaan Pemerintah Desa;
b) Belum optimalnya peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kurang berkembangnya sebagian Lembaga Ekonomi Pedesaan (BUMDes);
c) Terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah desa;
d) Semakin menurunnya semangat gotong royong masyarakat;
e) Masih perlunya peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan data base desa/kelurahan;
f) Jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi.
g) Belum optimalnya pengelolaan aset-aset PNPM–MP khususnya aset ekonomi produktif.

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
a) Adanya kecenderungan menurunnya kualitas peran kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
b) Kurangnya pemahaman dan kesadaran remaja akan kesehatan reproduksi;
c) Kecenderungan PUS untuk memakai alat kontrasepsi hormonal;
d) Meningkatnya perilaku negatif anak dan remaja (minuman keras, seks bebas dan narkoba) serta makin meningkatnya pernikahan dini; dan
e) Keterbatasan kemampuan dan konsistensi pengelola UPPKS dalam pengembangan usaha karena kurangnya bimbingan/motivasi, permodalan, keterampilan dan pemasaran produk.

9) Perhubungan
   a) Terbatasnya penyediaan sarana pengaman lalu lintas;
   b) Masih banyak masyarakat yang belum disiplin dalam berlalu lintas;
   c) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaataan jalan sesuai tonase;
   d) Kondisi jalur trayek yang rusak dan diperlukan kebutuhan angkutan di daerah perbukitan atau daerah terpelosok;dan
   e) Perlunya kesiapan dan kualitas dari alat pengujian kendaraan bermotor serta perlunya peremajaan alat pengujian kendaraan bermotor.
10) Komunikasi dan Informatika
   a) Belum optimalnya penyediaan jaringan komunikasi/ internet di seluruh wilayah (masih terdapatnya *blank spot area*) dan di seluruh area pelayanan publik;
   b) Masih kurangnya ketersediaan peralatan dan sarana prasarana untuk pengendalian dan penataan pembangunan menara telekomunikasi; dan
   c) Terbatasnya kemampuan SDM aparatur bidang Komunikasi dan Informatika.
11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
   a) Adanya keterbatasan SDM, terutama dari segi kualitas berpengaruh besar pada tingkat profesionalisme manajemen koperasi;
   b) Distribusi produk atau komoditi unggulan daerah seperti bidang perkebunan, kehutanan dan pertanian (bidang agrobisnis) yang dikelola oleh koperasi masih sangat terbatas;
   c) Masih kurangnya wawasan kewirausahaan yang dimiliki masyarakat khususnya terkait dengan jiwa kewirausahaan; dan
   d) Masih kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses, pangsa pasar, menjalin kemitraan, mengembangkan jaringan usaha, penguasaan dan pemanfaatan teknologi serta pengembangan manajemen.
12) Penanaman Modal
   a) Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi;
   b) Belum optimal dan kurang inovatifnya promosi potensi investasi daerah;
   c) Masih adanya resistensi masyarakat terhadap masuknya investasi di Kabupaten Kebumen;
   d) Biaya investasi semakin masih tinggi dimana lahan yang akan digunakan untuk investasi dengan status lahan milik masyarakat harganya tinggi (permintaan harga lahan masyarakat di atas harga pasar);
   e) Kurangnya daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur, sarana dan prasarana pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten.

13) Kepemudaan dan Olah Raga
    a) Masih terbatasnya sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
    b) Kurangnya peran serta generasi muda dalam pembangunan;
    c) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan olah raga di daerah; dan
    d) Belum adanya aktualisasi pemetaan olahraga unggulan.
14) Statistik
    a) Belum optimalnya penyajian data statistik dalam rangka pengambilan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaran perencanaan pembangunan;
    b) Belum adanya tenaga fungsional statistik dalam setiap SKPD;
    c) Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyediaan data statistik; dan
    d) Adanya tuntutan akuntabilitas dan keterbukaan (transparansi) data dan statistik daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
15) Persandian
    a) Belum optimalnya pemanfaatan persandian sebagai sarana pengamanan informasi pembangunan daerah; dan
    b) Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM yang menguasai persandian.
16) Kebudayaan
    a) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa;
    b) Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan kebudayaan daerah;
    c) Belum optimalnya pengelolaan benda-benda cagar budaya;
    d) Belum adanya fasilitas/bangunan sebagai pusat pentas/aktivitas dan apresiasi seni dan budaya di tingkat kabupaten yang representatif (Taman Budaya); dan
    e) Perlunya aktualisasi seni budaya unggulan daerah.
17) Perpustakaan
    a) Kurangnya minat dan budaya baca di kalangan siswa, guru dan masyarakat;
    b) Kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan daerah yang representatif; dan
    c) Masih kurangnya Bahan Pustaka baik dari kuantitas maupun kualitas di Perpustakaan Daerah.
18) Kearsipan
    a) Masih terbatasnya aplikasi teknologi dan sistem pengamanan dan pemeliharaan arsip daerah;
    b) Masih rendahnya apresiasi terhadap arsip daerah; dan
    c) Terbatasnya sarana dan prasarana kearsipan daerah.

c. Urusan Pilihan
1) Kelautan dan Perikanan
    a) Keterbatasan penguasaan dan penerapan teknologi pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan;

b) Keterbatasan permodalan usaha di bidang kelautan dan perikanan;
c) Belum berkembangnya pengelolaan pasca panen dan pengolahan produk;
d) Jiwa kebaharian masyarakat masih relatif kurang; dan
e) Masih kurangnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

2) Pariwisata
a) Belum optimalnya penggalian dan pemanfaatan potensi wisata daerah khususnya yang berbasis komunitas;
b) Masih rendahnya rata-rata lama tinggal dan angka kunjungan wisatawan ke obyek daerah tujuan wisata;
c) Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana, fasilitas dan infrastruktur di obyek daerah tujuan wisata; dan
d) Masih rendahnya kesadaran, keterlibatan, dan peran serta masyarakat di sekitar obyek daerah tujuan wisata dalam pengembangan obyek wisata.

3) Pertanian
a) Menurunnya produksi dan produktivitas komoditas pertanian;
b) Belum optimalnya daya dukung, prasarana sarana dan penguasaan teknologi pertanian;
c) Akses terhadap permodalan pertanian lemah, bahkan terhadap permodalan yang disediakan pemerintah;
d) Masih tingginya peredaran bibit pertanian yang belum sesuai standar kualitas dan kecenderungan penurunan kualitas bibit ternak;
e) Belum berkembangnya pengelolaan pasca panen dan pengolahan produk;
f) Serangan Tanaman Pengusir Organisme (OPT), penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis belum sepenuhnya dapat dikendalikan;
g) Masih adanya peredaran produk peternakan yang tidak memenuhi standar kualitas;
h) Lambatnya adopsi teknologi dan masih bertumpu pada teknik usaha tani sederhana; dan
i) Dampak Perubahan Iklim

4) Kehutanan
a) Belum berkembangnya usaha hasil hutan bukan kayu;
b) Masih adanya lahan kritis yang belum tertangani; dan
c) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam penatausahaan peredaran hasil hutan kayu.

5) Energi dan Sumber Daya Mineral
a) Belum optimalnya penerapan tata kelola pertambangan yang baik dan benar oleh pelaku usaha pertambangan;
b) Terbatasnya sarana prasarana operasional dalam rangka pengendalian dan pengawasan, survei, analisis data, waktu dan personil;

c) Tingginya biaya investasi dalam pemanfaatan energi terbarukan untuk setiap kapasitas listrik yang dihasilkan; dan
d) Belum tercukupinya kebutuhan energi bagi masyarakat

6) Perdagangan
a) Masih lemahnya kesadaran pelaku usaha untuk mengajukan perizinan usaha perdagangan;
b) Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam aktivitasnya untuk berorientasi pada kepuasan pelanggan/konsumen;
c) Rendahnya daya saing produk daerah dalam menembus pasar; dan
d) Rendahnya daya saing pengusaha dalam era persaingan bebas.

7) Perindustrian
a) Kurangnya pemahaman perajin Industri yang masih berorientasi pada produksi, bukan pada pasar (kebutuhan pasar, peluang pasar);
b) Terbatasnya penguasaan teknologi dan informasi;
c) Belum adanya kawasan industri;
d) Rendahnya kesadaran regenerasi usaha/penerus usaha sehingga beberapa unit usaha industri kecil mengalami tutup usaha; dan
e) Adanya keterbatasan sarana produksi/peralatan serta keterbatasan aksespemasaran.

8) Transmigrasi
a) Belum optimalnya kerjasama antar daerah dan Pusat dalam penyelenggaraan transmigrasi;
b) Daya dukung pemerintah daerah pengirim maupun lokasi transmigrasi yang masih rendah;
c) Terbatasnya daerah tujuan transmigrasi yang sesuai dengan minat calon transmigran;
d) Minimnya sarana pelatihan bagi calon transmigran, khususnya di tingkat Kabupaten; dan
e) Belum optimalnya fasilitasi dan pemberdayaan di lokasi transmigrasi.

d. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan
a) Dinamisnya regulasi yang melandasi perencanan dan pembangunan;
b) Terbatasnya kemampuan SDM aparatur dan masyarakat dalam penyusunan perencanaan;
c) Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pendukung penyusunan perencanaan pembangunan;
d) Kurang optimalnya pengendalian program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
e) Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung perencanaan pembangunan;

f) Kurang optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan antar sektor dan antar tingkatan pemerintahan dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan; dan
g) Tingkat partisipasi *stakeholder* dalam proses perencanaan pembangunan masih rendah.

2) Keuangan
   a) Belum optimalnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
   b) pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat; dan
   c) sumber pendapatan daerah dari BUMD masih terbatas.
3) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
   a) masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur; dan
   b) belum optimalnya pemanfaatan dan penyusunan database kepegawaian daerah.
4) Penelitian dan Pengembangan
   a) terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur yang kompeten dalam penelitian dan pengembangan (fungsional peneliti);
   b) belum adanya kelembagaan/jaringan penelitian dan pengembangan sebagai mitra pemerintah dalam inovasi pembangunan (jarlitbang);
   c) belum optimalnya partisipasi masyarakat dan perguruan tinggi dalam penelitian dan pengembangan.
5) Fungsi Lainnya (Pemerintahan Umum)
   a) Belum optimalnya implementasi Clean and *Good Governance*;
   b) Belum optimalnya penerapan dan pengembangan kapasitas pelayanan pemerintah daerah berbasis elektronik dan internet (*electronic Governmennt, e-Gov*);
   c) Belum optimalnya kerjasama, kemitraan dan jejaring kerjasama antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan pembangunan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan; dan
   d) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas jejaring kerjasama dengan daerah dan atau lembaga swasta/ perorangan.

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan uraian dan analisis ekonomi makro serta tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2018 serta arahan kebijakan yang akan ditempuh berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang akan direncanakan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah tahun 2018. Perekonomian atau pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Perekonomian suatu daerah merupakan bagian integral dari sistem perekonomian nasional dan regional, yang saling berpengaruh antara satu dan lainnya. Perubahan perekonomian nasional akan berdampak pada perubahan perekonomian regional dan daerah atau sebaliknya.

Perekonomian Kabupaten Kebumen merupakan sub atau bagian dari perekonomian Jawa Tengah secara regional dan Indonesia secara nasional, dengan perkembangan yang dinamis menyesuaikan kondisi perekonomian regional, nasional bahkan internasional di beberapa sektor tertentu.

A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rancangan kerangka ekonomi daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik perekonomian daerah, sebagai gambaran situasi perekonomian Kabupaten Kebumen tahun 2015 berikut karakteristiknya serta prospek perekonomian daerah tahun 2016-2017. Kemudian dibahas juga mengenai tantangan perekonomian yang diperkirakan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah pada tahun 2018.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kebumen sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi perekonomian nasional dan global. Ekspansi dan kontraksi yang terjadi pada perekonomian nasional berimbas terhadap perekonomian Jawa Tengah, khususnya perekonomian Kabupaten Kebumen. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan ekonomi sangat berhubungan dan memiliki indikasi saling mempengaruhi dalam situasi perekonomian dunia yang sangat terbuka.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 antara lain berisi misi pembangunan Indonesia tahun 2015-2019 khususnya misi yang pertama yaitu mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2017 diharapkan dapat mencapai 7,1 persen. Untuk mendukung stabilitas ekonomi yang kokoh maka laju inflasi ditekan pada tingkat inflasi yang cukup rendah dan stabil dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada besaran inflasi 4,0 persen dan bertambah atau berkurang 1 persen. Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga mendorong sektor riil

bergerak dan berkembang dengan sehat. Tingkat kemiskinan nasional dapat ditekan pada angka 8,5-9,5 persen sedangkan tingkat pengangguran terbuka di kisaran angka 5–5,3 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan. Prospek ekonomi tersebut dapat tercapai dengan asumsi : (1) perekonomian dunia terus mengalami pemulihan, (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi, (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 masih ditopang dari kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan sumbangan pada tahun 2015 sebesar 43,48 persen. Kemudian kategori Industri Pengolahan sebesar 18,59 persen, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor sebesar 13,93 persen, kategori Jasa Pendidikan sebesar 9,10 persen, kategori Konstruksi sebesar 6,67 persen, kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 5,18 persen. Sementara peranan kategori lainnya di bawah 5 persen.

Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dapat digunakan sebagai indikator daya serap tenaga kerja sektor-sektor perekonomian yang ada di Kabupaten Kebumen. Berdasarkan hasil pengolahan Suseda 2016 memperlihatkan bahwa sekitar 37,10 persen penduduk bekerja pada sektor pertanian meningkat dibandingkan kondisi pada tahun 2014 yang sebesar 35,22 persen. Sedangkan sektor lainnya berturut-turut sektor perdagangan, sektor industri, sektor jasa, sektor konstruksi dan sektor-sektor lainnya. Ada fenomena menarik yaitu turunnya daya serap tenaga kerja sektor industri dan sektor jasa pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2014. Sedangkan untuk sektor pertanian dan sektor perdagangan menunjukkan peningkatan daya serap tenaga kerja pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2014.

1. Kondisi Perekonomian Daerah Tahun 2012-2016
   a. Pertumbuhan Ekonomi

      Laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Kebumen tahun 2012-2016 menunjukkan kecenderungan yang meningkat, dari 4,88% pada tahun 2012 meningkat menjadi 6,29% pada tahun 2015 dan diperkirakan berada pada kisaran 6,75% pada tahun 2016. Hal ini kontradiktif atau berkebalikan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional yang justru cenderung mengalami pelambatan pada periode 2012-2016, sedangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah cenderung stagnan pada kisaran angka 5,3%-5,5%.

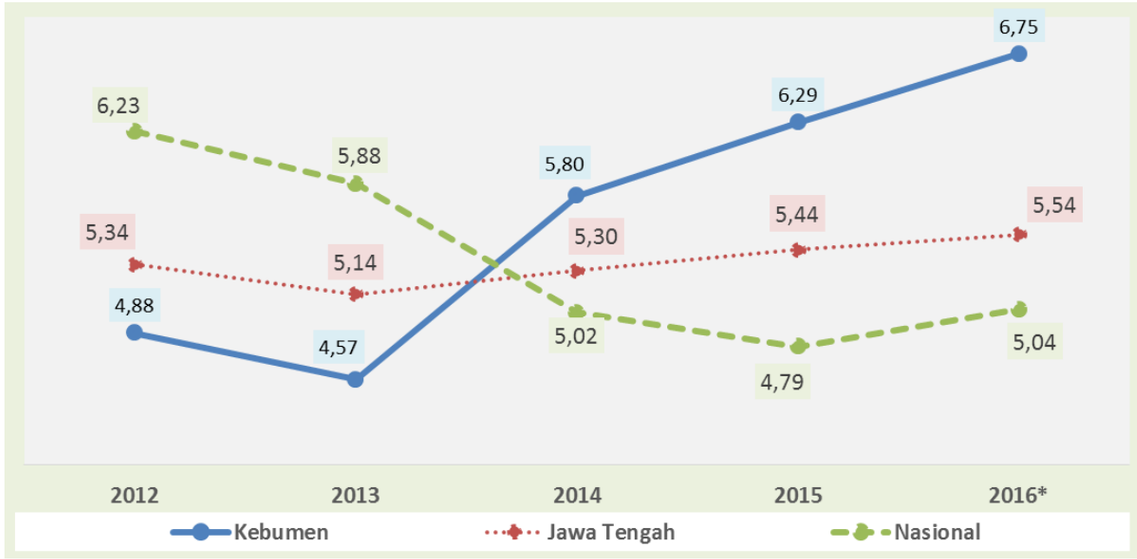

Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2016

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017
*Keterangan : *) Angka proyeksi*

Perkembangan ekonomi global di tahun 2017 diproyeksikan oleh Pemerintah akan mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2016 meski masih diwarnai ketidakpastian. Permintaan global yang ditunjukkan oleh kenaikan volume perdagangan dunia dan peningkatan harga komoditas diperkirakan akan menjadi penopang utama pertumbuhan global di tahun 2017. Kondisi perekonomian negara maju akan terdorong oleh ekspansi perekonomian Amerika Serikat namun terkendala oleh pelemahan ekonomi kawasan Eropa yang menghadapi dampak dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Meskipun demikian, perbaikan kinerja negara-negara berkembang diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi global. Upaya moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan masih akan berlanjut, namun akan diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi India yang meningkat pesat. Inisiasi kerjasama regional, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), juga akan mulai memberikan dampak positif bagi aktivitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara.

Pertumbuhan ekonomi di negara berkembang Asia Timur termasuk Indonesia dan Pasifik diprediksi Bank Dunia akan tetap bertahan untuk jangka waktu tiga tahun ke depan. Meskipun demikian, kawasan ini dinilai masih menghadapi berbagai risiko besar untuk tumbuh. Sejumlah negara dipandang perlu mengambil langkah guna mengurangi kerentanan finansial dan fiskal. Untuk 2017 sampai 2018, ekonomi Asia Timur diprediksi mencapai 5,7 persen.

Dalam jangka menengah, perekonomian Indonesia diprediksi akan tumbuh lebih tinggi. Hal ini ditopang oleh struktur perekonomian yang lebih kuat dan berkualitas. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sampai 2021 akan berada pada kisaran 5,9 hingga 6,3 persen. Ini ditopang oleh inflasi yang rendah. Defisit

transaksi berjalan juga akan berada pada lintasan yang menurun. Bank sentral memprediksi defisit transaksi berjalan akan berada di bawah 3 persen dari PDB.

Asumsi-asumsi makro Jawa Tengah untuk tahun 2017 yang termuat dalam APBD Jawa Tengah tahun 2017 antara lain sebagai berikut : pertumbuhan ekonomi 5,4 % -5,9 % dengan laju inflasi 4,5 % plus minus satu.

b. Produk Domestik Regional Bruto

Selama Tahun 2012-2016, nilai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kebumen Atas Dasar Harga Konstan 2010 mengalami peningkatan dari Rp.13.707.057.200.000,- pada tahun 2012 menjadi Rp.16.118.153.200.000,- pada tahun 2015 dan diproyeksikan naik menjadi Rp.17.206.128.540.000,- pada tahun 2016.

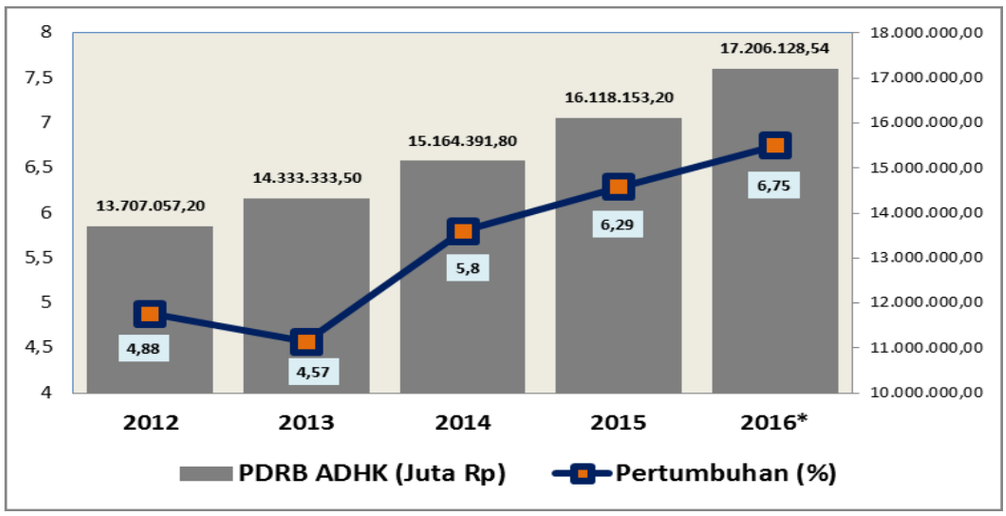

Gambar 3.2
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kebumen
Tahun 2012-2016

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017
*Keterangan : *) Angka proyeksi*

c. Laju Inflasi

Selama periode 2012-2016, laju inflasi Kabupaten Kebumen cenderung mengalami penurunan. Pola penurunan laju inflasi yang serupa juga terjadi dalam skala Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

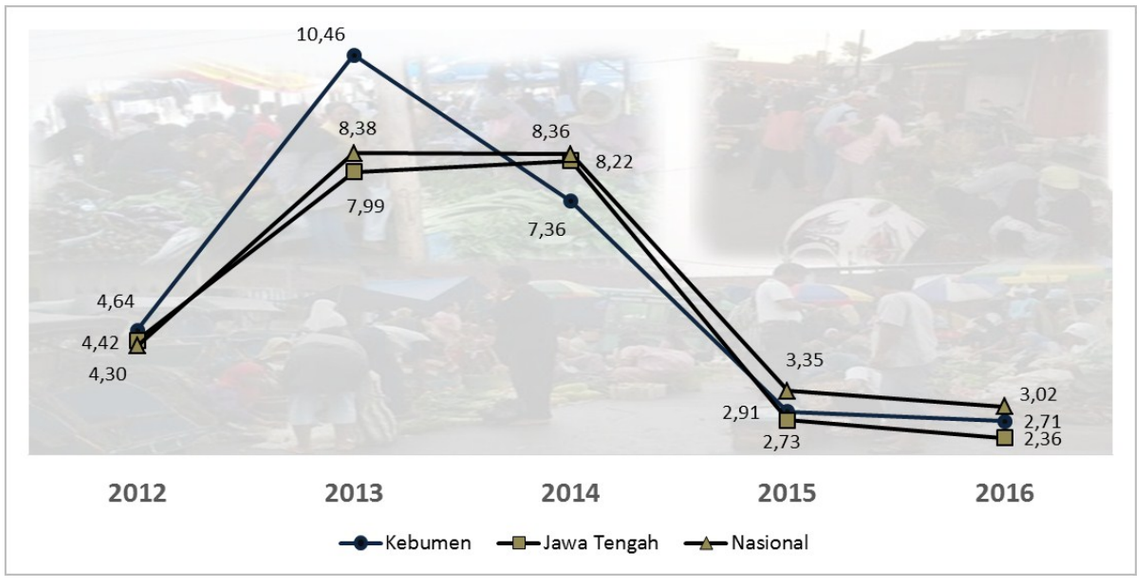

Gambar 3.3
Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Kebumen,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2016
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Inflasi yang cukup rendah dipertahankan pada tahun 2016, yakni sebesar 2,71 persen. Inflasi tertinggi selama tahun 2016 terjadi pada bulan Juli yakni sebesar 0,89 persen sementara deflasi tertinggi terjadi pada bulan April yakni 0,22 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi selama tahun 2016 yaitu kelompok bahan makanan sebesar 2,61 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 3,82 persen; kelompok perumahan, air, gas, listrik dan bahan bakar rumahtangga sebesar 1,36 persen; kelompok sandang sebesar 4,77 persen; kelompok kesehatan sebesar 6,66 persen; dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 5,70 persen. Sementara kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 2,08 persen.

2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan 2018
   a. Ekonomi Makro
      1) Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Dibandingkan dengan kondisi tahun 2014 terjadi penurunan pemerataan pendapatan penduduk Kabupaten Kebumen yang terlihat dari naiknya angka Gini Ratio dari 0,2352 tahun 2014 menjadi 0,2412 pada tahun 2016. Sedangkan untuk Kriteria Bank Dunia, kue yang diterima penduduk berpendapatan rendah pada tahun 2016 sebesar 25,78 persen, lebih tinggi jika dibandingkan penduduk berpendapatan rendah pada tahun 2014 yang sebesar 25,75 persen. Dengan memperhatikan bahwa angka Gini Ratio dan Kriteria Bank Dunia saling melengkapi, maka strategi kebijakan yang berpihak pada masyarakat berpendapatan rendah terutama yang terkait dengan penanganan penduduk miskin perlu dipertajam. Artinya, seluruh upaya pembangunan ekonomi harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat tidak

terbatas pada sebagian kecil masyarakat mengingat ketimpangan pendapatan berdampak pada banyak aspek, diantaranya aspek politis, keamanan dan bertambahnya penduduk miskin.

Berdasarkan pengamatan pada tingkat kecamatan, maka seluruh kecamatan di kabupaten Kebumen pada tahun 2016 masuk kategori ketimpangan rendah menurut angka Gini (G≤35%) dan menurut Kriteria Bank Dunia (40%rendah≥ 17%). Namun untuk Kecamatan Kebumen (0,3206) masih cukup tinggi meskipun turun dari sebelumnya yang 0,33.

Berdasarkan kriteria Bank Dunia, di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016, 40% penduduk berpendapatan rendah menerima 25,78% pendapatan dari total pendapatan lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2014 yang sebesar 25,75 persen. Namun, pencapaian tahun 2016 ini masih di bawah pencapaian tahun 2008, dimana 40% penduduk berpendapatan rendah menerima 25,99 persen pendapatan. Menurut Hypothesis Williamson (1965): “pada permulaan proses pembangunan, akan terjadi peningkatan kesenjangan antar wilayah, namun demikian kemudian tingkat kenaikan kesenjangan tersebut terus menurun dan bahkan akhirnya secara absolute kesenjangan akan menurun (Hypothesis U-terbalik)”. Berdasarkan hypothesis tersebut, jika tingkat kesenjangan terus saja berlangsung maka masih terjadi proses pembangunan.

Rata-rata pengeluaran perkapita per bulan tahun 2016 tercatat sebesar 658.203,98 rupiah atau naik sebesar 35,37 persen dibandingkan kondisi tahun 2014 yang sebesar 486.232 rupiah. Dari total pengeluaran per kapita sebesar 658.203,98 rupiah tersebut 57,52 persen digunakan untuk pengeluaran makanan 378.591,98 rupiah atau turun dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 60,30 persen. Sedangkan untuk pengeluaran non makanan meningkat dari 39,70 persen pada tahun 2014 menjadi 42,48 persen pada tahun 2016. Persentase pengeluaran yang digunakan penduduk untuk makanan bervariasi antar kecamatan. Pengeluaran untuk makanan yang terkecil terdapat di Kecamatan Kebumen 43,88 persen, sedangkan tertinggi di Kecamatan Adimulyo 67,35 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tidak cukup tetapi harus diikuti oleh pemerataan pendapatan yang tinggi pula. Pembangunan ekonomi yang hanya mengejar pertumbuhan yang tinggi harus terus dievaluasi, sehingga perencanaan harus terus berpihak pada golongan masyarakat bawah, tanpa meninggalkan golongan menengah keatas. Penciptaan lapangan kerja baru yang beorientasi padat karya dengan menampung penduduk-penduduk wilayah setempat sebagai tenaga kerjanya, secara kontinyu perlu terus dilakukan.

Sektor industri sangat rentan terhadap masalah ketimpangan pendapatan. Hal itu disebabkan sektor tersebut

merupakan sektor padat modal dengan memberikan upah rendah terhadap buruh/tenaga kerjanya. Oleh karena itu untuk mengurangi risiko semakin memburuknya kondisi ketimpangan pendapatan perlu diupayakan terciptanya suatu mekanisme redistribusi pendapatan yang efektif, seperti masalah upah minimum regional yang mendasarkan pada KHL (Kebutuhan Hidup Layak) dan selalu diperbaharui dengan memperhatikan gejolak harga yang terjadi (inflasi), jaminan sosial kehidupan tenaga kerja dan keluarganya, sistem perpajakan yang progresif dan lain-lain.

Langkah terobosan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Gerakan Anti Merokok merupakan langkah cerdas untuk mengatasi tingginya biaya rokok dan tembakau di Kabupaten Kebumen. Akan tetapi langkah cerdas ini akan semakin efektif dan nyata mengurangi angka kemiskinan melalui sosialisasi mengalihkan biaya rokok dan tembakau dengan makanan yang mengandung kalori (karena inilah dasar penghitungan angka kemiskinan).

Strategi yang dituangkan dari RPJMD misi yang keempat merupakan tahapan yang tepat untuk peningkatan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan. Dimulai dari sinergi dalam upaya penanggulangan kemiskinan, kemudian meningkatkan ketrampilan masyarakat dan diikuti penyediaan lapangan kerja dan wirausaha. Langkah yang paling baik adalah mendidik masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dihasilkan sebelum dipasarkan (karena komoditas hasil pertanian selalu dinilai dengan harga yang rendah).

2) Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu indikator makro yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Kemiskinan di Kabupaten Kebumen, meskipun kecenderungannya menurun, masih menunjukkan angka yang relatif lebih tinggi dibandingkan nasional dan provinsi. Selama kurun 2013-2016, tingkat kemiskinan Kabupaten Kebumen menurun dari 21,32% menjadi 20,20%. Pada tahun 2013-2016, persentase penduduk miskin di Kabupaten Kebumen selalu berada di atas nasional dan provinsi. Secara umum, pencapaian angka kemiskinan tahun 2016 masih di bawah target RPJMD Kabupaten Kebumen. Artinya realisasi tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan dengan yang menjadi target RPJMD.

Kemiskinan yang terjadi dipengaruhi oleh kepemilikan aset, tingkat pendidikan, mata pencaharian yang dimiliki, kondisi lingkungan dan perilaku (sikap mental) keluarga miskin. Meskipun secara umum, jumlah dan persentase keluarga penerima jaminan sosial mengalami penurunan, namun tingkat kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Kebumen

harus menjadi fokus perhatian. Oleh karena itu, diperlukan program-program pemberdayaan untuk mengubah sikap warga masyarakat miskin agar mampu berkarya dan memperoleh penghasilan sehingga tidak menciptakan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah, kecuali pada warga yang benar-benar tidak berdaya dan benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan.

b. Pertanian

Sektor pertanian selama 5 tahun terakhir masih menjadi sektor yang dominan dalam struktur perekonomian Kabupaten Kebumen. Pada tahun 2015 peranan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih memberikan kontribusi yang paling besar (28,52 %), diikuti sektor industri pengolahan (18,59 %), dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (13,93 %). Ada 4 sektor yang kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kebumen meningkat dan yang paling tinggi adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang sebesar 1,37 persen. Industri pengolahan kontribusinya turun pada tahun 2014 sebagai dampak meredupnya industri batu akik.

Dalam beberapa analisis, kegiatan ekonomi sering dikelompokkan berdasarkan output maupun input dari asal terjadinya proses produksi yang meliputi 3 kelompok sektor, yaitu:

1) Sektor primer, yang mencakup sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian. Kelompok sektor ini inputnya dari alam.
2) Sektor Sekunder, mencakup sektor Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi. Input sektor ini berasal dari sektor primer.
3) Sektor Tersier, mencakup sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya. Umumnya sektor ini inputnya berasal dari sektor sekunder dan outputnya berupa service (jasa).

Tabel 3.1
Distribusi Persentase Kelompok Sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Kelompok Sektor	2011	2012	2013	2014	2015
Primer	33,55	33,8	31,92	32,17	33,7
Sekunder	25,37	24,37	25,28	26,03	25,36
Tersier	41,07	41,81	42,8	41,78	40,95

Sumber : BPS, Buku PDRB Kabupaten Kebumen Tahun 2015

Berdasarkan harga berlaku sektor tersier masih sebagai penopang paling besar pembentukan PDRB Kabupaten Kebumen tahun 2015 yaitu sebesar 40,95 persen, diikuti oleh sektor primer 33,70 persen, dan sektor sekunder paling rendah kontribusinya yaitu hanya sebesar 25,36 persen. Peranan sektor tersier terus menunjukkan penurunan sejak tahun 2014, pada tahun 2015 turun sebesar 0,83 persen, demikian juga untuk sektor sekunder yang turun pada tahun 2015 sebesar 0,67 persen. Sebaliknya sektor primer menunjukkan peningkatan peranan yang cukup signifikan sebesar 1,53 persen. Hal ini menunjukkan adanya perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah terhadap sektor primer. Di sisi yang lain, sektor sekunder dengan industri pengolahan sebagai basis agrobisnis yang menjadi tujuan pembangunan jangka panjang daerah, masih memerlukan pemikiran dan perhatian yang lebih intens dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah.

c. Pariwisata

1) Kurangnya Pemahaman Sapta Pesona oleh Beberapa Pelaku Wisata

Kunjungan wisata ke suatu daerah dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain ketersediaan obyek wisata yang menarik serta kenyamanan dan keamanan wisatawan. Kenyamanan dan keamanan wisatawan menjadi hal yang penting karena berkorelasi dengan kepuasan berwisata. Wisatawan yang merasa puas berpeluang untuk kembali dan merekomendasikannya ke orang lain. Potensi pariwisata Kabupaten Kebumen sudah mulai dikenal secara luas oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Namun di sisi lain, masih ada pelaku usaha wisata yang berperilaku kurang baik terhadap wisatawan. Salah satu contohnya adalah pelaku usaha di bidang pariwisata yang rela menggunakan cara curang demi meningkatkan keuntungannya, misalnya penawaran harga yang tidak wajar, serta ketidaksesuaian harga barang dengan kualitas. Pelaku wisata perlu memberikan nilai-nilai positif terhadap wisatawan. Kesadaran akan sikap dan perilaku positif terhadap wisatawan inilah yang perlu dibangun.

Selain hal tersebut, pemahaman sapta pesona wisata tidak hanya perlu dilakukan oleh pelaku usaha di bidang pariwisata saja, melainkan oleh penduduk Kabupaten Kebumen dan wisatawan yang berkunjung. Sikap sadar wisata perlu dimiliki oleh setiap warga Kabupaten Kebumen khususnya masyarakat di sekitar objek wisata. Partisipasi masyarakat diperlukan karena manusia tidak mungkin lepas dari keadaan sekelilingnya. Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar masyarakat terlibat dan tidak merasa terpinggirkan oleh majunya kegiatan pariwisata. Fungsi sosial masyarakat dalam memberikan kemanan, ketertiban,

kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, dan kenangan harus berfungsi dengan baik untuk mencapai tujuan pariwisata berdaya saing tinggi. Sedangkan pemahaman sapta pesona oleh wisatawan perlu dilakukan, terutama terkait dengan kebersihan di area wisata. Kebanyakan kegiatan wisata bersifat rombongan dan ketika mereka meninggalkan lokasi wisata cenderung menimbulkan lingkungan kotor karena dipenuhi oleh sampah makanan. Oleh karenanya, pemahaman sapta pesona wisata ini perlu dilakukan oleh semua orang yang terlibat dalam pariwisata.

2) Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata

Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata ditandai dengan (1) masih minimnya kualitas dan kuantitas akses transportasi (jalan dan angkutan umum) menuju objek wisata; dan (2) kurangnya keterpaduan moda transportasi pendukung menuju objek wisata.

Objek-objek wisata unggulan dan potensial yang dikembangkan oleh komunitas atau masyarakat lokal maupun dunia swasta, dewasa ini mulai bermunculan di Kabupaten Kebumen dengan berbagai ciri khas dan keunggulan pemasaran berbasis teknologi informasi. Pantai Menganti, Kawasan Hutan Mangrove, Pantai Rawa, Pentulu Indah dan berbagai objek wisata lain muncul bersanding dengan objek-objek wisata yang dikelola Pemerintah Daerah. Keberadaan objek-objek wisata tersebut nyatanya belum begitu didukung dengan sarana prasarana yang memadai, khususnya akses transportasi menuju objek wisata. Ketersediaan jalan yang memadai untuk mendukung mulai bergairahnya pariwisata, mutlak diperlukan sehingga pariwisata dapat semakin maju dan memberikan efek pengganda yang memicu sektor ekonomi lain untuk semakin meningkat.

Pada tahun 2018, dengan selesainya pembangunan jaringan jalan lintas selatan Jawa, jalur kereta api *double-track* dan pembangunan Bandara Udara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo, semestinya menjadi peluang untuk Kabupaten Kebumen meningkatkan askes dan mendekatkan objek-objek wisata yang ada kepada wisatawan.

d. Perdagangan

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen, prasarana perdagangan juga mengalami perkembangan, terutama pusat perbelanjaan dan pasar modern. Keberadaan pusat perbelanjaan dan pasar modern ini untuk menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat kota yang cepat, mudah, lengkap, dan selalu tersedia. Keberadaan pasar modern ini dirasa menguntungkan konsumen serta mampu menyerap tenaga kerja. Namun di sisi lain, dapat menjadi ancaman bagi pedagang kecil terutama pedagang pasar tradisional. Saat ini, di Kabupaten

Kebumen, pendirian pasar modern belum diatur. Peraturan daerah ini sangat penting untuk mengatur baik jumlah pasar/toko modern maupun jarak antar pasar modern dan jarak dengan pasar tradisional. Pembatasan jumlah dan jarak ini diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang sehat antar pedagang.

Selain pengaturan jarak dan jumlah, hal lain yang perlu diperhatikan adalah pemilik modal. Untuk memulai usaha pasar/toko modern membutuhkan modal yang tidak sedikit sehingga perlu dicermati apakah pemodal ini merupakan warga Kabupaten Kebumen atau dari luar Kabupaten Kebumen. Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan adanya pasar/toko modern ini mampu menyerap tenaga kerja lokal/masyarakat sekitarnya. Keberadaan pasar tradisional juga diharapkan mampu menyerap pengusaha dan tenaga kerja lokal sebagai penggerak perekonomian kota. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat mendukung tumbuhnya pasar tradisonal maupun pasar/toko modern agar keduanya bertumbuh bersama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Secara makro, perekonomian Kabupaten Kebumen masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian regional, nasional dan global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir yang perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud di antaranya:

1. Meningkatkan dan memperluas pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, unggulan dan strategis;
2. Menurunkan tingkat kemiskinan;
3. Menyediakan infrastruktur yang memadai dan berkualitas;
4. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka;
5. Menurunkan ketimpangan dan meningkatkan pemerataan pembangnan ekonomi antar wilayah;
6. Meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif dan konstruktif;
7. Meningkatkan daya saing produk dan sumber daya manusia agar dapat bersaing di pasar regional, nasional dan global; serta
8. Meningkatkan peran pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi

Memperhatikan perkembangan ekonomi daerah, regional, nasional dan global termasuk kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) serta tantangan yang masih akan dihadapi maka arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2018 adalah percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan menitikberatkan pada pertumbuhan sektor primer untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkecil ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua stakeholder dan lingkungan. Kebijakan pengembangan perekonomian daerah tetap diarahkan dan diupayakan

dengan cara-cara: (1) mempercepat dan memperluas pertumbuhan ekonomi, (2) memperlambat/menekan laju inflasi agar tidak melebihi satu digit, (3) meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah dan pemerataan pendapatan antar penduduk, (4) memperluas akses warga miskin untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Penerapan kebijakan ekonomi daerah tersebut, dalam konsep yang implementatif diterapkan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktivitas masyarakat
   a. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata, perindustrian, dan perdagangan;
   b. Pengembangan industri, perdagangan, koperasi dan UMKM;
   c. Peningkatan investasi yang memperhatikan aspek lingkungan dan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat;
   d. Penyediaan lapangan dan kesempatan kerja yang berkualitas melalui regulasi, dan fasilitasi pengembangan kewirausahaan
   e. Peningkatan inovasi dan pemanfaatan teknologi.
2. Meningkatkan daya saing
   a. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana ekonomi;
   b. Peningkatan daya saing produk dan tenaga kerja;
   c. Akselerasi pertumbuhan ekonomi.
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal potensial unggulan dan strategis
   a. Pengembangan sektor ekonomi potensi lokal unggulan, potensial dan strategis melalui peningkatan implementasi OVOP (*one village one product*);
   b. Peningkatan akses dan fungsi intermediasi bagi pengembangan ekonomi lokal unggulan, potensial dan strategis;
   c. Mewujudkan kemandirian pangan.

Berdasarkan kondisi riil dan dinamika perekonomian regional, nasional dan global beberapa tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah tahun 2018, maka prospek indikator makro ekonomi Kabupaten Kebumen tahun 2018 diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Proyeksi Kondisi Makro Perekonomian Kabupaten Kebumen
Tahun 2017 dan Target Tahun 2018

NO.	INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2010 (persen)	5,80	6,29	6,75*	6 ± 1**	6 ± 1**
2.	Laju Inflasi (persen)	7,36	2,91	2,71	2 ± 1**	2 ± 1**
3.	Tingkat Kemiskinan (persen)	20,50	20,44	19,26*	18,50***	17,74***
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	6,56	2,09	2,44	2,05***	2,03***

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017 (data diolah)
*Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Proyeksi/Target ***) Angka Target RPJMD*

B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah. Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik uang maupun barang yang dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hak daerah adalah mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah atau sumber penerimaan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan kewajiban daerah adalah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan urusan. Terkait dengan pendapatan daerah kebijakan pendapatan daerah adalah meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan dengan jumlah biaya administrasi tertentu. Peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan cara optimalisasi pajak dan retribusi daerah dengan memperhatikan efek optimalisasi tersebut tidak memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan memperhatikan aspek keadilan. Dalam melaksanakan keuangan daerah perlu dibuatkan suatu perencanaan agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat dikelola dengan baik.

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2018 sebagai pelaksanaan tahun keempat belas RPJPD Tahun 2005-2025 dan tahun ketiga pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2016-2021, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Kebutuhan belanja pembangunan daerah harus selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, dana swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Resposibility* (CSR).

Keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menganut azas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah, dijabarkan sebagai berikut:

1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangandaerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pemahaman yang baik terhadap hasil analisis kondisi ekonomi daerah, sangat penting digunakan sebagai salah satu input utama untuk membuat analisis keuangan daerah. Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun rencana dapat diketahui.

Menurut ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan kewenangan yang diberikan/diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah menjadi unsur penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah karena besaran pendapatan pada suatu daerah menentukan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Arah kebijakan Pendapatan Daerah adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang menjadi sumber dari Pendapatan Asli Daerah serta tetap berupaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dalam wilayah Kabupaten Kebumen.

Pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2)

Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Alokasi Dana Desa dari APBN; 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya dan Dana insentif daerah. Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan data realisasi APBD tahun 2013-2016 dan APBD 2017, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen secara rata-rata menyumbangkan sebesar 10,64 persen dari total realisasi pendapatan daerah. Sementara porsi terbesar berasal dari Dana Perimbangan dengan rata-rata proporsi sebesar 74,57 persen dari total pendapatan daerah, sedangkan sisanya merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah rata-rata sebesar 14,79 persen.

Proporsi Dana Perimbangan cenderung menurun dari 83,31 persen tahun 2013 menjadi 65,67 persen pada tahun 2017. Penurunan proporsi dana perimbangan ini belum menunjukkan kemandirian daerah karena tidak diikuti peningkatan proporsi PAD yang sebanding. Proporsi PAD pada tahun 2013 sebesar 8,08 persen dan hanya meningkat menjadi 11,10 persen pada tahun 2017. Pergeseran proporsi Lain-lain Pendapatan Yang Sah pada tahun 2013 sebesar 8,61 persen dan meningkat menjadi 23,23 persen pada tahun 2017. Secara umum Pendapatan Daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 13,01 persen selama periode 2013-2017. Pertumbuhan yang tertinggi adalah Lain-lain Pendapatan Yang Sah meningkat sebesar rata-rata 40,76 persen, sementara itu PAD meningkat rata-rata sebesar 26,64%, dan Dana Perimbangan meningkat rata-rata sebesar 7,62 persen.

Mendasarkan pada analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah serta pencapaian target pada sumber-sumber pendapatan daerah, perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2018 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

a. Proyeksi pendapatan diasumsikan naik sebesar 5,60% dari tahun 2017;
b. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;
c. Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak. DAU dan Dana Desa dari APBN diasumsikan naik dengan mempertimbangkan kebutuhan gaji pegawai dan pemenuhan prosentase Dana Desa. Dana Alokasi Khusus diasumsikan sama dengan tahun 2017.
d. Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

Adapun realisasi pendapatan 2013-2016, APBD 2017 dan proyeksi pendapatan daerah tahun 2018 dapat dilihat dalam gambar-gambar dan tabel berikut.

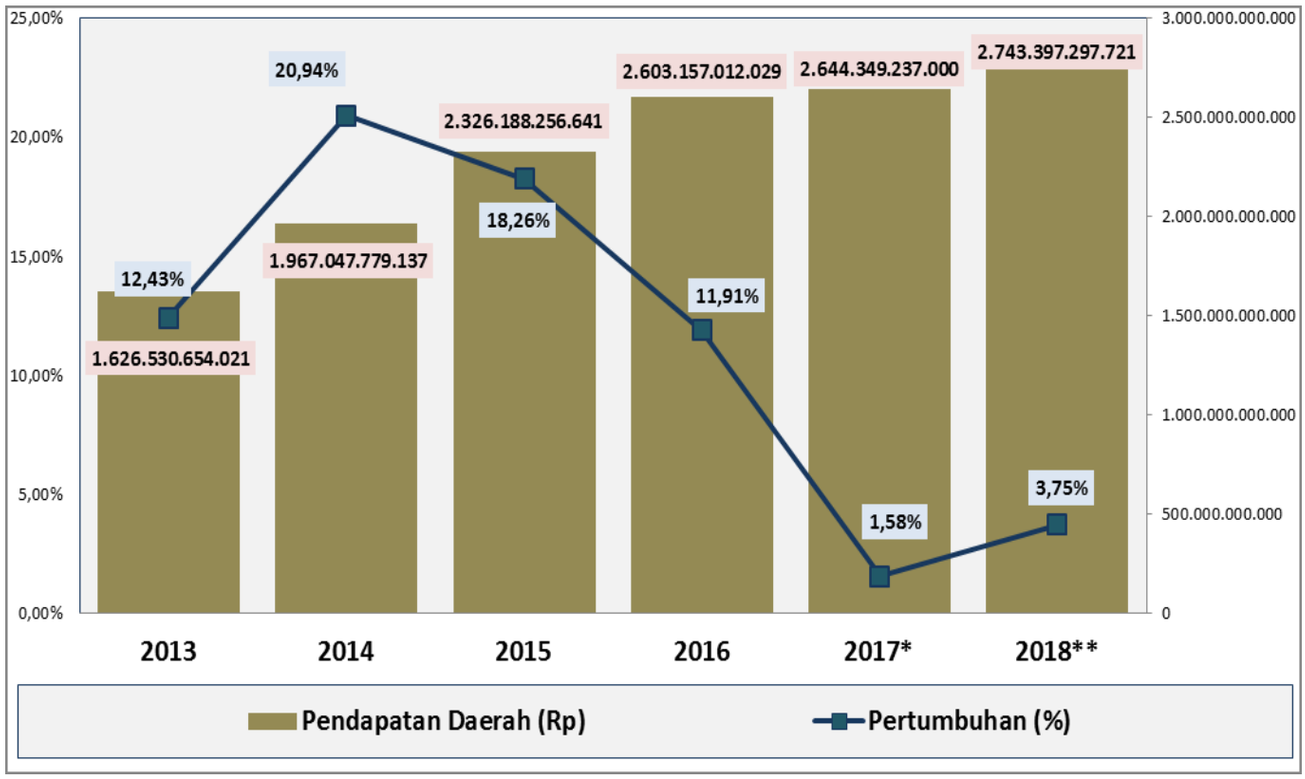

Gambar 3.4
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013-2016, APBD 2017
serta Proyeksi Tahun 2018

Sumber : BPKAD, 2017

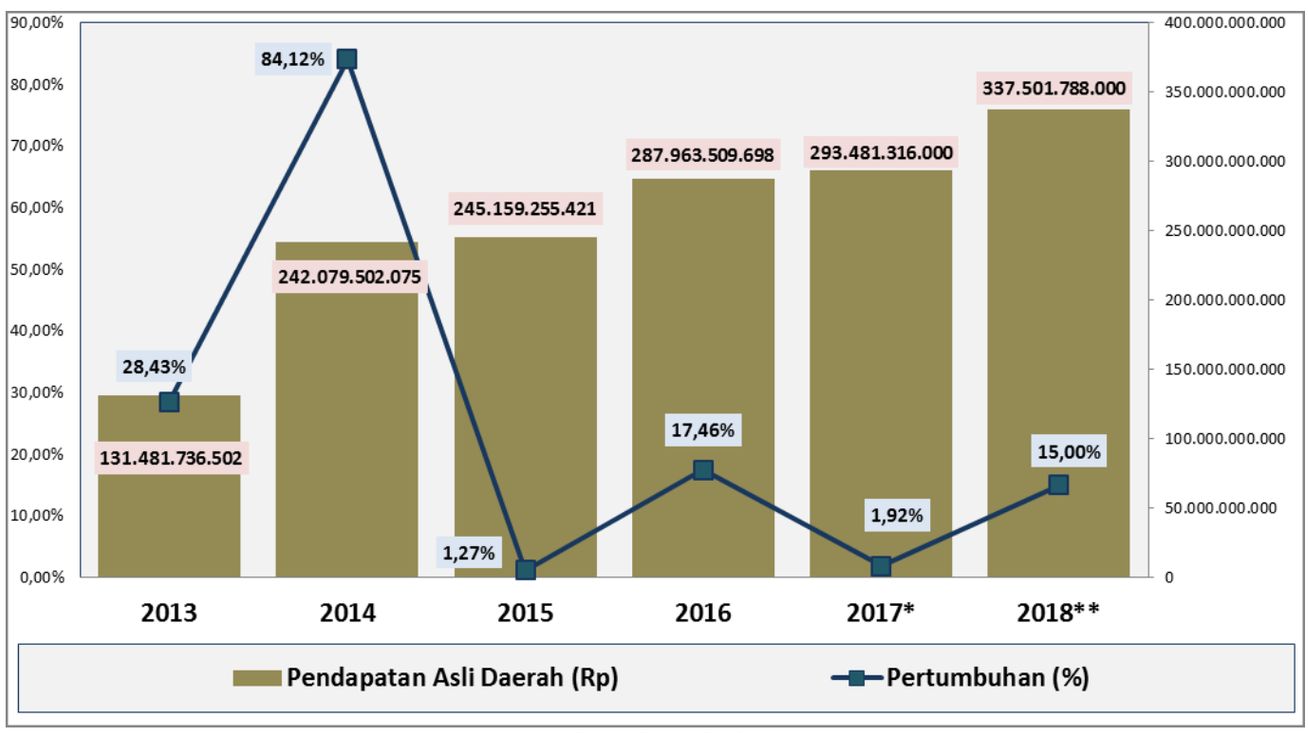

Gambar 3.5
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013-2016, APBD 2017
serta Proyeksi Tahun 2018

Sumber : BPKAD, 2017

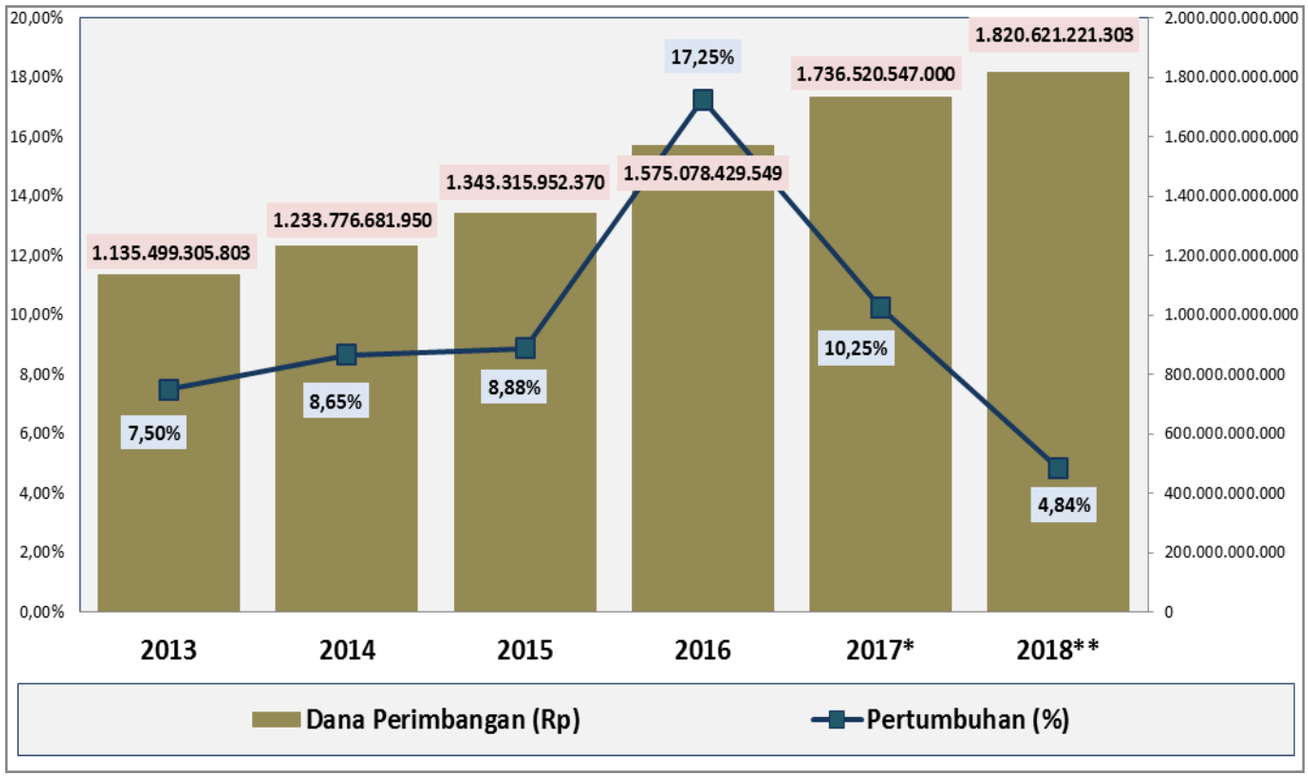

Gambar 3.6
Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2013-2016, APBD 2017
serta Proyeksi Tahun 2018

Sumber : BPKAD, 2017

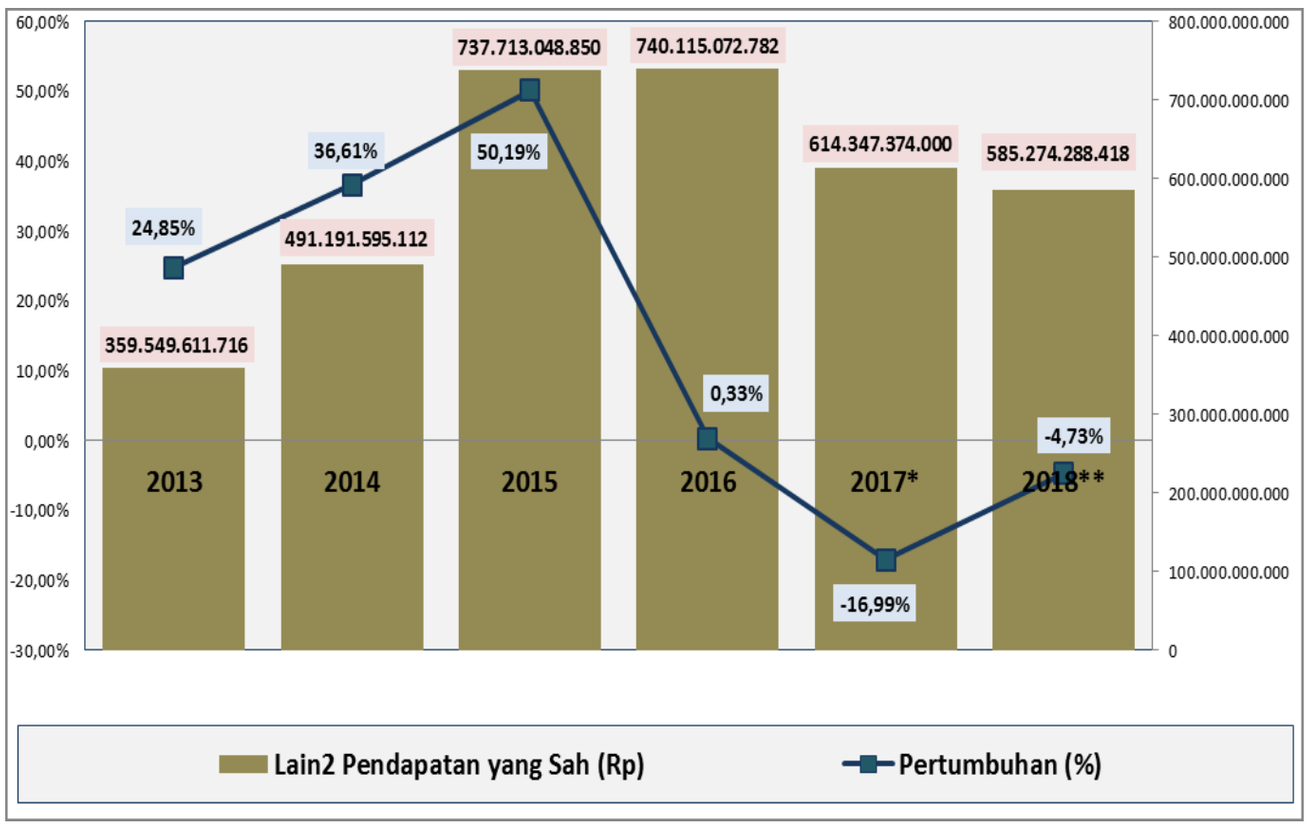

Gambar 3.7
Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2013-2016, APBD 2017
serta Proyeksi Tahun 2018

Sumber : BPKAD, 2017

Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah Tahun 2018, di antaranya:

a. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan, penerimaan dan pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan prosedur/mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan kamajuan teknologi informasi terkini;
b. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan, penerimaan dan pengelolaan Pendapatan Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki;
c. Melakukan penyempurnaan dan peninjauan kembali (*annual-review*) terhadap Peraturan Daerah-Peraturan Daerah yang mengatur pendapatan daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada dan tidak memberatkan bagi masyarakat dan dunia usaha;
d. Mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pemanfaatan aset-aset daerah yang bernilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha;
e. Memberikan penghargaan (*reward*) terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan dan sanksi (*punishment*) terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar aturan;
f. Memberikan penghargaan (*reward*) terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi (*punishment*) apabila terjadi pelanggaran.

Tabel 3.3
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013-2016, APBD 2017 serta Proyeksi Tahun 2018

NO.	REKENING	Realisasi APBD				APBD	Proyeksi
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
A	Pendapatan (a.1+a.2+a.3)	1.626.530.654.021	1.967.047.779.137	2.305.748.432.641	2.603.157.012.029	2.644.349.237.000	2.743.397.297.721
a.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	131.481.736.502	242.079.502.075	245.159.255.421	287.963.509.698	293.481.316.000	337.501.788.000
a.1.1	Pajak daerah	42.012.443.873	46.312.651.913	52.015.233.621	61.270.830.775	57.732.000.000	66.390.075.000
a.1.2	Retribusi daerah	24.542.086.173	43.343.968.696	26.897.280.470	25.323.615.219	30.921.373.000	35.559.500.000
a.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.506.191.030	8.008.929.340	8.561.009.403	6.895.862.950	9.620.000.000	11.063.000.000
a.1.4	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	59.421.015.426	144.413.952.126	157.685.731.927	194.473.200.754	195.207.943.000	224.489.213.000
a.2	Dana Perimbangan (Transfer)	1.355.075.846.803	1.525.029.335.950	1.795.296.014.370	1.782.990.218.786	1.736.520.547.000	1.820.621.221.303
a.2.1	Dana Bagi Hasil	34.564.265.803	27.498.627.950	30.994.004.370	43.287.944.721	44.054.830.000	46.511.068.118
a.2.2	Dana Alokasi Umum	1.021.871.180.000	1.125.568.884.000	1.125.568.884.000	1.256.068.249.000	1.256.068.249.000	1.337.712.685.185
a.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)				483.634.025.065	436.397.468.000	436.397.468.000
	DAK Fisik	79.063.860.000	80.709.170.000	166.312.470.000	160.931.590.000	160.931.590.000	160.931.590.000
	DAK IPD	-	-	-	35.738.260.000	35.738.260.000	35.738.260.000
	DAK Non Fisik	-					
	- Tunjangan Profesi Guru PNSD	219.576.541.000	291.252.654.000	472.419.886.000	359.807.880.000	359.807.880.000	359.807.880.000
	- Dana Tambahan Penghasilan Guru				2.230.700.000	2.230.700.000	2.230.700.000
	- DAK Non Fisik Lainnya				31.322.755.000	31.322.755.000	31.322.755.000
a.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	139.973.070.716	199.938.941.112	265.293.162.850	532.203.283.545	614.347.374.000	585.274.288.418
a.3.1	Hibah	-	1.038.000.000	21.148.531.000	1.530.221.000	1.500.000.000	1.500.000.000

NO.	REKENING	Realisasi APBD				APBD	Proyeksi
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
a.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kab./kota	66.179.825.253	69.778.066.149	114.070.000.131	110.771.445.545	99.365.806.000	119.862.495.698
a.3.4	Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus				-	-	-
	a. Tunjangan Profesi PNSD				-	-	-
	b. Dana Insentif Daerah				35.858.316.000	51.141.752.000	51.141.752.000
a.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainnya	73.793.245.463	129.122.874.963	130.074.631.719	101.641.755.000	102.341.755.000	40.000.000.000
a.3.6	Bagi hasil retribusi dari provinsi	-	-	-	-	-	-
a.3.7	Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBN	-	-	-	282.401.546.000	359.998.061.000	372.770.040.720

Sumber : BPKAD, 2017 (data diolah)

3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan serta disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai (*performance-based budgeting*). Struktur belanja dalam APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga;
b. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja pegawai, (b) Belanja barang dan jasa, dan (c) Belanja modal.

Komposisi belanja daerah selama periode 2013-2017 menunjukkan masih belum seimbangnya belanja langsung dan belanja tidak langsung. Proporsi Belanja Tidak Langsung rata-rata sebesar 63,69 persen, sedangkan proporsi Belanja Langsung rata-rata hanya sebesar 36,04 persen. Dari pos Belanja Tidak Langsung, pengeluaran Belanja Pegawai merupakan yang terbesar jumlahnya, dimana proporsinya terhadap total belanja rata-rata mencapai 50,47 persen dan proporsinya terhadap Belanja Tidak Langsung rata-rata mencapai 78,76 persen. Tingginya alokasi belanja pegawai perlu diperhatikan imbal-baliknya kepada masyarakat berupa pelayanan publik yang baik. Alokasi belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan untuk kepentingan publik.

Perencanaan belanja daerah tahun 2018 diperhitungkan dengan beberapa asumsi dasar sebagai berikut:

a. Belanja daerah diproyeksikan naik sebesar 6,58% dari belanj daerah tahun 2017;
b. Perhitungan gaji menggunakan basis data tahun 2017 dengan acrres sebesar 2,5%

Realisasi belanja daerah selama tahun 2013-2016, APBD Tahun 2017 dan proyeksi tahun 2018 dapat dilihat dalam gambar-gambar dan tabel sebagai berikut:

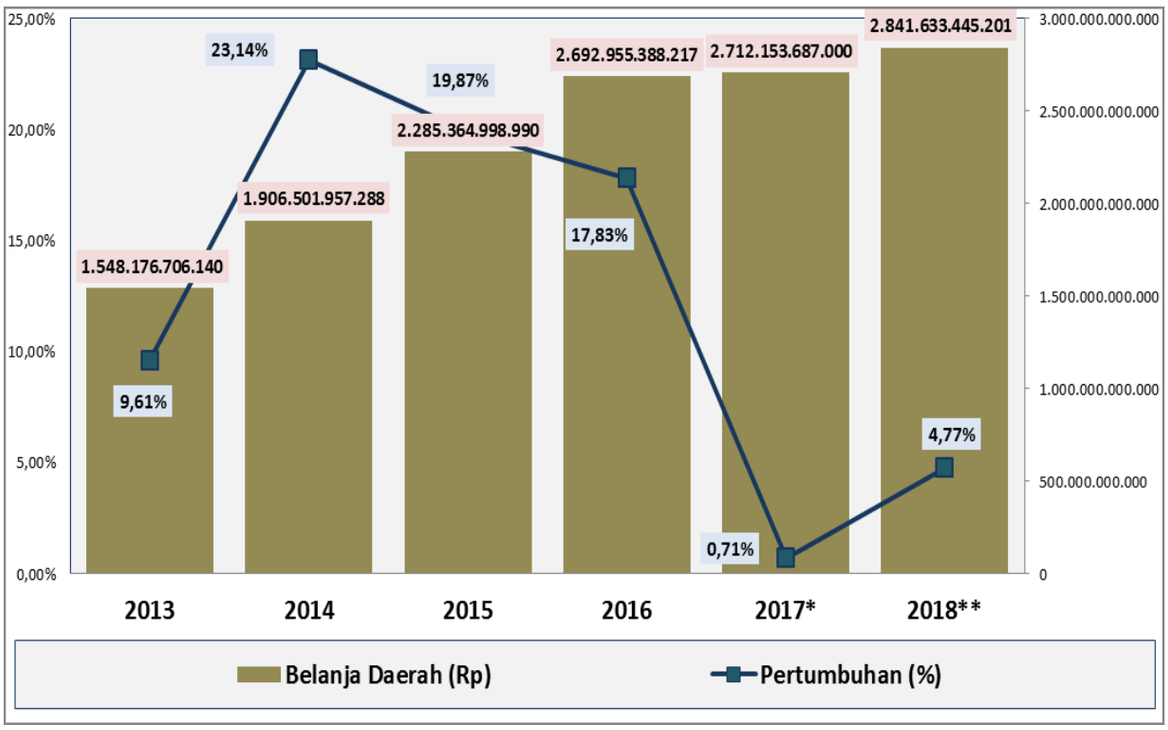

Gambar 3.8
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2013-2016,
APBD 2017 serta Proyeksi Tahun 2018

Sumber : BPKAD, 2017

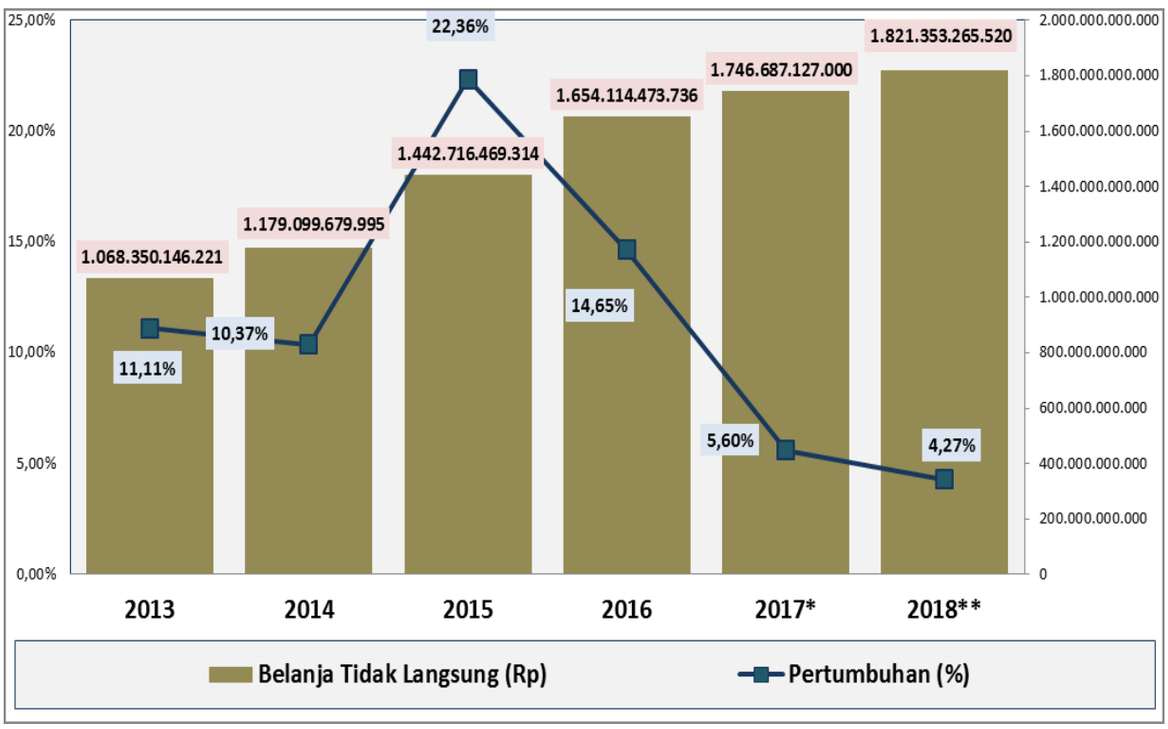

Gambar 3.9
Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2013-2016,
APBD 2017 serta Proyeksi Tahun 2018

Sumber : BPKAD, 2017

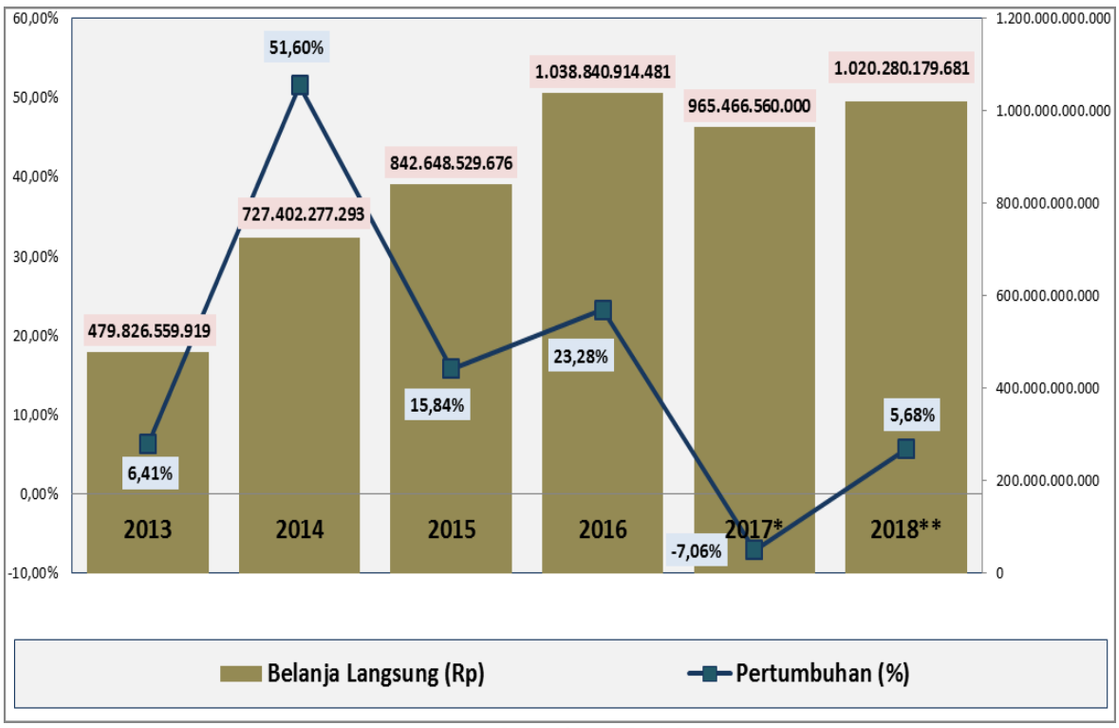

Gambar 3.10
Realisasi Belanja Langsung Tahun 2013-2016,
APBD 2017 serta Proyeksi Tahun 2018

Sumber : BPKAD, 2017

Tabel 3.4
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2013-2016, APBD 2017 serta Proyeksi Tahun 2018

NO.	REKENING BELANJA	REALISASI APBD (Rp)				APBD 2017	PROYEKSI 2018
		2013	2014	2015	2016		
A.	Belanja Tidak Langsung	1,068,350,146,221	1,179,099,679,995	1.442.716.469.314	1.654.114.473.736	1.746.687.127.000	1.821.353.265.520
1.	Belanja Pegawai	956.479.531.443	1.059.118.686.274	1.124.760.537.291	1.169.096.639.579	1.149.032.612.000	1.203.335.203.470
2.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
3.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
4.	Belanja Hibah	3.786.267.430	12.272.363.746	46.004.343.524	21.262.696.023	37.704.000.000	38.204.000.000
5.	Belanja Bantuan Sosial	37.685.262.098	26.485.322.598	19.675.317.418	39.154.052.260	48.871.280.000	47.552.780.000
6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.400.303.758	4.422.146.578	7.496.219.539	8.659.246.150	7.949.969.000	7.949.969.000
7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	67.955.879.792	76.771.160.799	244.762.669.246	414.868.804.350	501.129.266.000	522.311.313.050
8.	Belanja Tidak Terduga	42.901.700	30.000.000	17.382.296	1.073.035.374	2.000.000.000	2.000.000.000
B.	Belanja Langsung	479,826,559,919	727.402.277.293	842.648.529.676	1.038.840.914.481	965.466.560.000	1.020.280.179.681
1.	Belanja Pegawai	46,791,859,108	52.757.998.608	37.888.624.685	45.855.599.689	51.086.192.000	53.115.778.250
2.	Belanja Barang dan Jasa	146,075,786,609	208.865.920.877	336.606.454.575	345.283.089.631	437.988.701.000	455.389.407.734
3.	Belanja Modal	286,958,914,202	465.778.357.808	468.153.450.416	647.702.225.161	476.391.667.000	495.318.072.336
	Total Belanja (A + B)	*1,548,176,706,140*	*1.906.501.957.288*	*2.285.364.998.990*	*2.692.955.388.217*	*2.712.153.687.000*	*2.841.633.445.201*

Sumber : BPKAD, 2017 (data diolah)

4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga komponen Pembiayaan Daerah, yaitu setiap penerimaan/ pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Perencanaan pembiayaan daerah Tahun 2018 diperhitungkan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut :

a. Proyeksi pembiayaan daerah tahun 2018 diasumsikan naik sebesar 44,88% dari tahun 2017;
b. Proyeksi penyertaan modal (investasi) daerah diasumsikan naik dikarenakan penyertaan modal ke Bank Jateng dan PD Bank Kebumen.

Secara lengkap realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah pada tahun 2013-2016, APBD 2017 dan proyeksi 2018 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.5
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2013-2016, APBD Tahun 2017 dan Proyeksi 2018

NO.	URAIAN PEMBIAYAAN	REALISASI APBD(Rp)				APBD 2017	PROYEKSI 2018
		2013	2014	2015	2016		
A.	Penerimaan Pembiayaan	114.981.978.751	187.531.783.632	239.107.170.935	102.698.376.188	77.304.450.000	110.986.147.480
1.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-	-	-
2.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	112.297.925.751	185.976.018.632	236.977.605.481	100.198.376.188	75.804.450.000	108.486.147.480
3.	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-	-
4.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	2.684.053.000	1.555.765.000	2.129.565.454	2.500.000.000	1.500.000.000	2.500.000.000
5.	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-	-
6.	Sisa Belanja Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-	-	-
B.	Pengeluaran pembiayaan	7.350.000.000	11.100.000.000	7.750.000.000	12.900.000.000	9.500.000.000	12.750.000.000
1.	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-	-
2.	Penyertaan modal (investasi) daerah	7.350.000.000	9.600.000.000	7.750.000.000	10.400.000.000	8.000.000.000	10.250.000.000
3.	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-	-
4.	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	2.500.000.000	1.500.000.000	2.500.000.000
5.	Kelompok Usaha Masyarakat	-	-	-	-	-	-
6.	Penyediaan Dana Talangan Pangan	-	1.500.000.000	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto/Defisit (A-B)	107.631.978.751	176.431.783.632	231.227.605.000	89.798.376.188	67.804.450.000	98.236.147.480

Sumber : BPKAD, 2017 (data diolah)

Berdasarkan realisasi pencapaian 5 (lima) tahun terakhir dan arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maka kerangka pendanaan pembangunan daerah yang diasumsikan merupakan kemampuan keuangan daerah tahun 2018 dapat disusun dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 3.6
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1.	PENDAPATAN DAERAH	2.792.360.426.393
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	327.680.749.407
1.1.1	Pajak Daerah	66.085.000.000
1.1.2	Retribusi daerah	31.738.182.093
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.620.000.000
1.1.4	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	220.237.567.314
1.2	DANA PERIMBANGAN (TRANSFER)	1.801.780.197.568
1.2.1	Dana Bagi Hasil	46.511.068.118
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.318.871.661.450
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	436.397.468.000
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	662.899.479.418
1.3.1	Hibah	1.500.000.000
1.3.2	Dana Darurat	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kab./kota	119.862.495.698
1.3.4	Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus	66.425.188.000
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainnya	102.341.755.000
1.3.6	Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBN	372.770.040.720
2	BELANJA DAERAH	*2.890.596.573.873*
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.825.246.307.588
2.1.1	Belanja Pegawai	1.216.368.788.911
2.1.2	Belanja Hibah	37.704.000.000
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	48.871.280.000
2.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	7.949.969.000
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	512.352.269.677
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.065.350.266.286
2.2.1	Belanja Pegawai	56.371.386.131
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	483.301.440.539
2.2.3	Belanja Modal	525.677.439.615

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
	SURPLUS / (DEFISIT) ((1)-(2))	*(98.236.147.480)*
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	110.986.147.480
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	108.486.147.480
3.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	2.500.000.000
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.750.000.000
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	10.250.000.000
3.2.2	Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	*98.236.147.480*
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0

Sumber : Bap3da, 2017 (data diolah)

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dan difokuskan pada capaian sasaran pembangunan daerah, serta mempunyai tingkat kemendesakan dan daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan melalui evaluasi permasalahan pembangunan daerah yang dihubungkan dengan program pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun rencana. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program program unggulan OPD yang paling tinggi realisasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dancakupan pembangunannya.

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Kabumen tahun 2018 merupakan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 yang diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditopang oleh optimalisasi potensi unggulan daerah.

A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 harus memperhatikan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Skenario pembangunan dan pengembangan wilayah Kabupaten Kebumen didasarkan pada asumsi bahwa pengembangan agrobisnis dan agroindustri di bidang kegiatan pertanian pada umumnya di dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah memerlukan peningkatan pelayanan jasa dan potensi jaringan kerja lintas wilayah yang selama ini belum secara optimal dimanfaatkan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 juga harus memperhatikan tujuan dan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031, yang teruang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011–2031. Perda tersebut mengamanatkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah mewujudkan perkembangan wilayah Kabupaten yang mandiri secara ekonomi dan merata pelayanannya melalui pengembangan agrobisnis yang berkelanjutan yang aman, nyaman dan produktif. Untuk

mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kebumen tersebut, disusun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi:

1. pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan untuk mengembangkan potensi jasa agrobisnis dan potensi lokal lainnya di Kabupaten;
2. pengembangan kawasan perdesaan sebagai lahan dan penggeraksektor agrobisnis dan pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa;
3. pengembangan dan pemantapan fungsi transportasi yang memadai dan terintegrasi dalam mendukung kegiatan pengembangan agrobisnis dan potensi lainnya di Kabupaten;
4. pemerataan fungsi prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan agrobisnis dan kegiatan pendukung lainnya;
5. pemantapan fungsi dan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan, sumber daya alam dan sumber daya buatan;
6. pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga system keseimbangan fungsi ruang dan keberlanjutan dalam jangka panjang;
7. pengembangan kawasan strategis untuk mendukung kesejahteraan wilayah serta keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan dalam penataan ruang; dan
8. mitigasi bencana dan adaptasi untuk penanganan bencana.

Untuk menjamin keseimbangan pembangunan daerah antar wilayah, maka perlu disusun suatu kebijakan serta strategi pembangunan kewilayahan dalam rangka menciptakan suatu rentang kendali yang proporsional dan mencapai hasil yang optimal. Maka berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 ditetapkan Kawasan Strategis Kabupaten Kabupaten Kebumen, yaitu sebagai berikut:

1. Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis Ekonomi yang Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
   a. rencana Kawasan Strategis Kota Kebumen dan Kota Gombong;
   b. rencana Kawasan Strategis Kota Prembun dan Kota Petanahan;
   c. rencana Kawasan Strategis Perkotaan Karanganyar dan Perkotaan Sruweng; dan
   d. rencana Kawasan Strategis Perkotaan Karangsambung dan Perkotaan Kutowinangun.
2. Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya
   a. masterplan dan pembangunan fisik perlindungan dan pengembangan Kawasan Benteng Van Der Wijck; dan
   b. masterplan dan pembangunan fisik perlindungan dan pengembangan Kawasan Masjid Soko Tunggal.
3. Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
   a. masterplan fisik dan pengelolaan kawasan pesisir;

b. pengembangan dan penghijauan kawasan hutan bakau di kawasan pesisir;
c. rehabilitasi kawasan hutan lindung Kawasan Sempor dengan penanaman tanaman lindung yang dapat mengikat tanah dan menyerap air dengan baik;
d. pengembangan dan penghijauan kawasan lindung Kawasan Sempor;
e. penataan Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung;
f. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Sub Daerah Aliran Sungai Serayu-Bogowonto;
g. pemulihan kerusakan lingkungan kawasan bentang alam karst; dan
h. penyusunan rencana zonasi kawasan bentang alam karst.

4. Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi
   a. penataan dan pembangunan fisik/teknologi kawasan waduk dan bendung Sempor; dan
   b. penataan dan pembangunan fisik/teknologi kawasan Bendung Wadaslintang.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 merupakan merupakan bagian perencanaan tahapan lima tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2015 Tahap III dan IV dimana pembangunan pada tahap ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan di segala bidang dengan menekankan upaya penguatan daya saing dan pertumbuhan perekonomian melalui pengembangan ekonomi wilayah agar masyarakat dan wilayah dapat berproduksi dengan bertumpu pada pengembangan potensi wilayah dan desa.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka ditetapkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021 yaitu

"Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan"

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Bersama : bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bergerak bersama-sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis;
2. Menuju : bermakna bahwa dalam melaksanakan pembangunan senantiasa memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur;
3. Sejahtera : bermakna bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan

dan sosial sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab;

4. Unggul : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan dan menciptakan potensi daerah menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi;
5. Berdaya : Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;
6. Agamis : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan mengedepankan potensi intelektual dan rohaniah yang dicirikan dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kegigihan dalam kebaikan, kebenaran, dan persaudaraan;
7. Berkelanjutan : bermakna bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat, berdaya guna bagi masyarakat dan berwawasan lingkungan.

Untuk mencapai visi tersebut maka dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan yang dijabarkan ke dalam 11 (sebelas) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 4.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

MISI	TUJUAN	SASARAN
MISI I		
Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
		2. Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan
		3. Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga
		4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

MISI	TUJUAN	SASARAN
MISI II		
Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat	2. Menciptakan masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	5. Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia
	3. Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum	6. Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum
MISI III		
Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat	4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan	7. Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat
	5. Meningkatkan Daya Saing Investasi dan Pariwisata Daerah	8. Meningkatnya daya saing investasi daerah
		9. Meningkatnya kunjungan wisatawan
	6. Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	10. Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah
	7. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari	11. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam
MISI IV		
Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan	8. Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera	12. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat
	9. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan ketenagakerjaan, perluasan kesem-patan kerja dan penurunan angka pengangguran	13. Meningkatnya keterserapan tenaga kerja

MISI	TUJUAN	SASARAN
MISI V		
Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	10. Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	14. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan
		15. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan
MISI VI		
Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketata-laksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, trans-paran dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama	11. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	16. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
		17. Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah

Sumber : RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

B. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018

Pembangunan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018 ini merupakan pelaksanaan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Prioritas pembangunan daerah tahun 2018 juga merupakan jawaban atas isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya. Adapun gambaran posisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

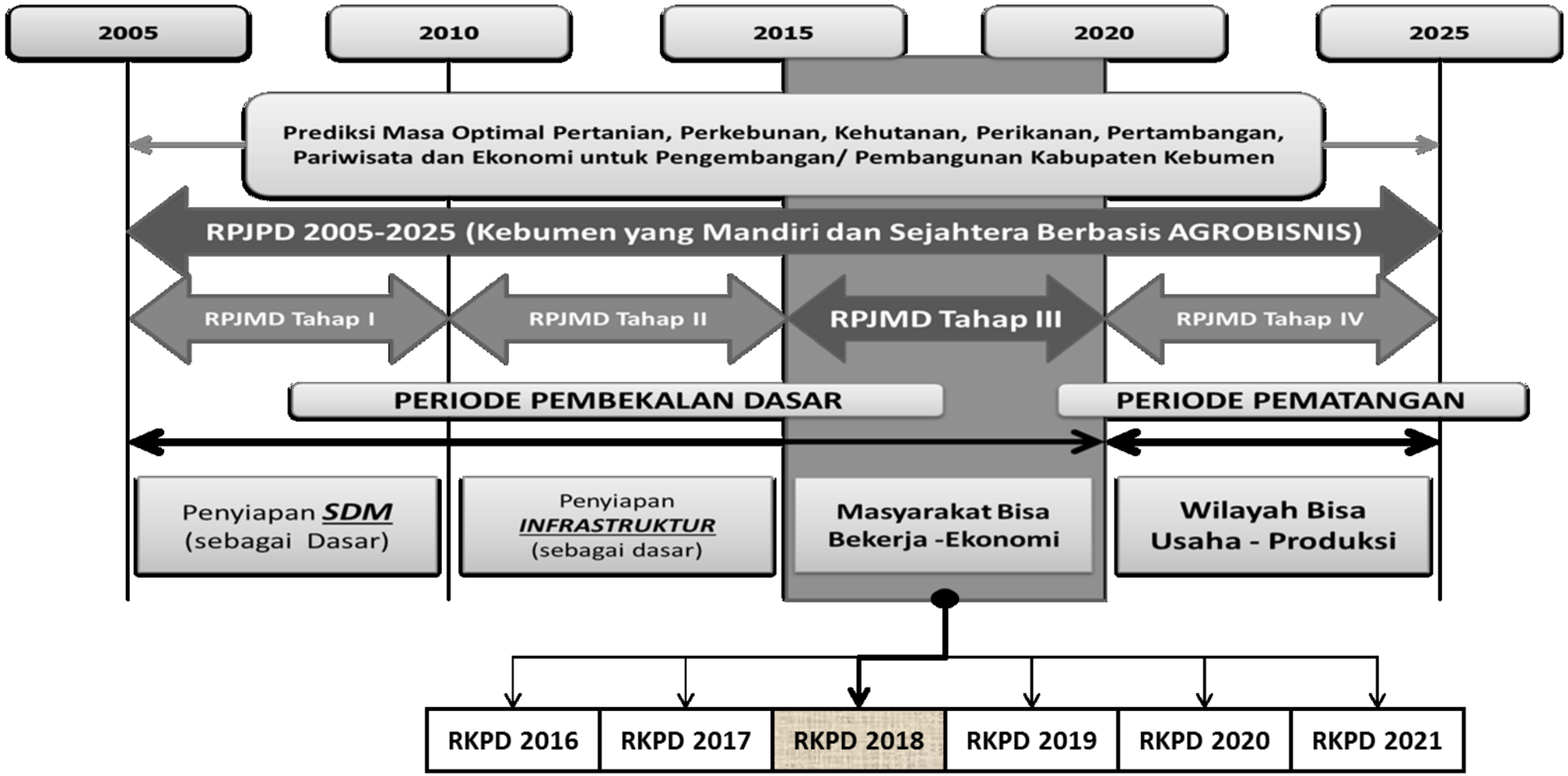

Gambar 4.1
Posisi Pembangunan Tahun 2018
dalam Skenario Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah

Prioritas pembangunan daerah tahun 2018 didapatkan dengan mendasari kebijakan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Dalam bab VII RPJMD Tahun 2016-2021 disebutkan bahwa Arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan program sesuai dengan fungsi dan tugas pokok masing-masing. Arah kebijakan umum ini merupakan penjabaran lebih detail dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, di antaranya sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang semakin unggul dan berkarakter, berlandaskan pada pengamalan dan penghayatan nilai-nilai luhur agama dan budaya, serta ditopang dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang makin baik;
2. membangun perekonomian daerah berbasis kepada ekonomi kerakyatan, optimalisasi pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah dengan fokus pada agrobisnis (pertanian, perkebunan dan peternakan), pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing, ditopang dengan penyediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas;
3. mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin melalui penciptaan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa, agama dan budaya; dan
4. meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik melalui profesionalisme, peningkatan tatakelola dan perluasan partisipasi publik melalui kebijakan penyelenggaraan *good governance* yang bermutu, akuntabel, toleran dan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain kebijakan umum pembangunan daerah, ditetapkan juga beberapa kebijakan teknis pembangunan yang disusun dengan melihat urgensi dan permasalahan pembangunan daerah.

1. Kebijakan umum percepatan penanggulangan kemiskinan

   Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun, antara lain:

   a. Penyusunan Satu Data Kemiskinan Kabupaten Kebumen melalui kegiatan pendataan dan verifikasi lapangan terhadap data kemiskinan, dengan indikator yang mengkombinasikan indikator kemiskinan Nasional dan indikator kearifan lokal. Pendataan dan verifikasi dilakukan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa, Kelurahan dan Kecamatan, dikoordinasikan oleh Bappeda dan Unit

Pelayanan Terpadu Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, bersama Perangkat Daerah terkait;

b. Menyusun model penanggulangan kemiskinan terpadu berbasis kawasan pada daerah-daerah/wilayah-wilayah tertentu yang menjadi kantong kemiskinan dan memiliki karakteristik seperti:
   1) kawasan pertanian dan perkebunan (model pengembangan desa-desa miskin di kawasan utara seperti Kecamatan Karanggayam, Karangsambung, Sadang dan Alian);
   2) kawasan pariwisata (model pengembangan desa-desa di Kawasan Pesisir Ayah);
   3) kawasan pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan (model pengembangan desa-desa di Kawasan Pesisir Puring, Petanahan, Klirong, Buluspesantren, Ambal dan Mirit); dan
   4) kawasan industri kecil (model pengembangan desa-desa di wilayah tengah Kabupaten Kebumen).
c. Menjadikan program percepatan penanggulangan kemiskinan sebagai suatu Gerakan Daerah dan Gerakan Bersama yang dibangun dengan komitmen bersama para pemangku kepentingan sebagai pilar-pilar utama pembangunan serta dilaksanakan melalui fondasi nilai-nilai agama dan budaya masyarakat.
d. Penyusunan Masterplan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen (MP3KG) beserta *roadmap* dan Rencana Aksinya.
e. Optimalisasi dan dinamisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah melalui:
   1) rapat koordinasi yang terjadwal (minimal dilakukan setiap triwulan);
   2) menggunakan sistim Ban Berjalan, melalui instrumen-instrumen monitoring dan evaluasi; dan
   3) penyediaan anggaran yang memadai.

2. Kebijakan umum pengembangan agrobisnis

Secara spasial, berdasarkan kawasan strategis, peruntukan dan potensi wilayah, pengembangan agrobisnis di Kabupaten Kebumen selama 5 (lima) tahun ke depan, diarahkan antara lain pada wilayah:

a. Kawasan EMAS (Eko-Mina-Agro-wiSata), dengan cakupan wilayah meliputi Kecamatan Ayah, Puring, Buayan, Kuwarasan, Petanahan, Klirong, Buluspesantren, dan Ambal. Sektor-sektor yang dikembangkan di daerah ini antara lain pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan serta pariwisata;
b. Kawasan Agrowisata Tanaman Buah-Buahan, di wilayah Kecamatan Karangsambung dan Sadang; dan
c. Kawasan penunjang, yang terdiri atas:

1) kawasan pusat-pusat jasa di wilayah Kecamatan Kebumen, Karanganyar, Gombong, Prembun dan Kutowinangun;
2) kawasan industri di wilayah Kecamatan Petanahan dan Klirong; dan
3) pengembangan infrastruktur penunjang di antaranya jalan selatan-selatan di wilayah pesisir (Mirit-Ayah), jalan lintas utara di wilayah (Rowokele-Padureso) dan pembangunan embung-embung mini di kawasan pertanian (Karangsambung, Sadang, Karanggayam dan Ayah).

Kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2016-2021 di atas menjadi dasar dalam penentuan strategi pembangunan daerah tahun 2018, dengan mempertimbangkan potensi unggulan setiap wilayah dan permasalahan kemiskinan yang saat ini dirasa masih cukup memprihatinkan.

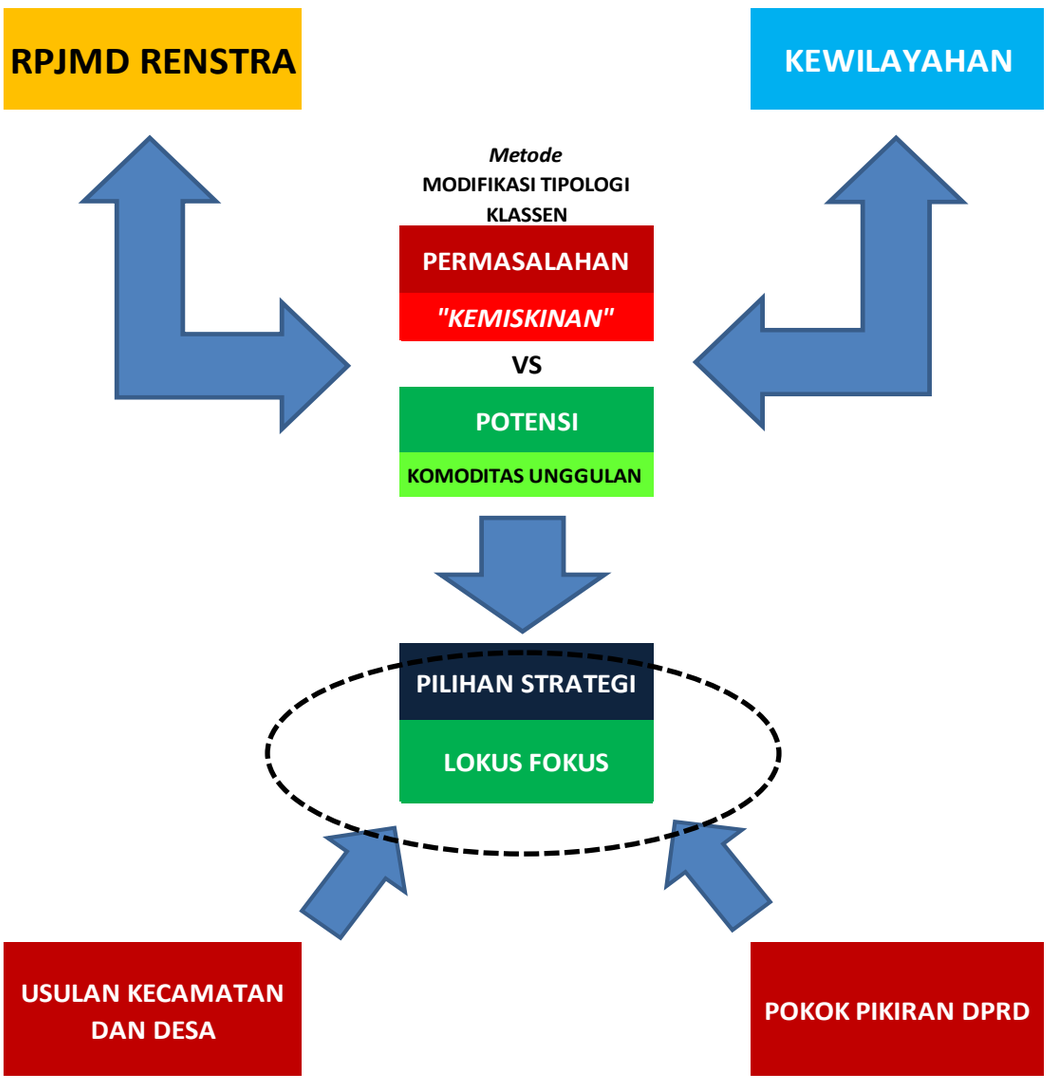

Gambar 4.2
Kerangka Pikir Penentuan Strategi dan Prioritas Pembangunan Tahun 2018

Sumber : Bap3da, 2017

Adapun target utama pembangunan daerah pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Target Utama Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Tahun 2018

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	TARGET 2018
1. Mewujudkan sumber-daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,21	12,71
		2. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,93	7,07
	Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	3. Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	%	53,30	58,04
	Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	4. Capaian prestasi pemuda dan olahraga	%	38,78	53,53
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5. Angka Harapan Hidup	Tahun	72,77	72,89
		6. Angka Kematian Ibu	Angka	68,48	90
		7. Angka Kematian Bayi	Angka	10,50	10,90
2. Mencipta-kan masyara-kat yang agamis dan berahlak mulia	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	8. Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah	%	100	100
		9. Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan	%	23,66	30,09
3. Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	10. Penurunan kasus pelanggaran hukum	Kasus	867	700
4. Meningkatkan partumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	11. Pertumbuhan ekonomi	%	5,83	5,91
		12 Pendapatan perkapita penduduk	Ribu Rp	16.983,67	21.081,57
		13. Rasio/Indeks Gini	Point	0,24	0,22
		14. Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi	Unit	-	4

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	TARGET 2018
5. Meningkatkan Daya Saing Investasi dan Pariwisata Daerah	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15. Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN	%	0	6,0
	Meningkatnya kunjungan wisatawan	16. Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	16,73	17,46
6. Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	17. Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	%	49,09	57,00
7. Terwujudnya pengelolaan sumber daya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point/ Indeks	59,92	69,00
8. Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	19. Angka Kemiskinan	%	20,02	17,74
9. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja dan penurunan angka pengangguran	Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	20. Angka Pengangguran	%	2,09	2,03
10. Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	21. Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik	%	76,64	80,03
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	22. Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	%	93,33	98,00

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	TARGET 2018
11. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	23. Nilai Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai	B	B
		24. Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	CC	B
		25. Opini BPK atas LKPD	Nilai	WTP	WTP
	Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	26. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ	%	30,00	60,00

Sumber : RPJMD Tahun 2016-2021

Dengan mendasarkan pada poin-poin di atas dan mendasarkan hasil evaluasi pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sampai tahun 2016 serta permasalahan yang ada maka dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan tema pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2018 adalah “Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pertanian untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Tema tersebut mengandung makna bahwa setiap wilayah dan produk unggulan Kabupaten Kebumen harus mempunyai keunggulan dan daya saing dibanding daerah lain sehingga mempunyai daya tawar dan daya jual tinggi di tingkat regional, nasional maupun internasional. Kondisi ini diharapkan mampu mempercepat dan memperluas pertumbuhan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kebumen secara keseluruhan.

Peningkatan daya saing daerah dilakukan melalui upaya peningkatan kesiapan masyarakat menghadapi dinamika pembangunan dan percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian peningkatan pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengurangan kemiskinan guna meningkatkan pendapatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Langkah-langkah pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan tersebut diperkuat dengan upaya penegasan dan peningkatan kembali nilai-nilai keagamaan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, ditetapkan 5 (tujuh) prioritas pembangunan tahun 2018 antara lain:

1. Peningkatan perekonomian berbasis pertanian dan pariwisata
2. Penanggulangan kemiskinan berbasis potensi unggulan wilayah
3. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
4. Peningkatan kehidupan sosial dan keagamaan
5. Peningkatan penerapan *good and clear government*

Tabel 4.3
Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Kebumen Tahun 2018

NO.	PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
Prioritas 1 : Peningkatan Perekonomian Berbasis Pertanian dan Pariwisata Prioritas ini mendukung Misi 3 Bupati Tahun 2016-2021, yaitu Misi 3 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat		
1.	Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan	Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil tanaman pangan hortikultura dan peternakan
		Pengembangan sarana prasarana pendukung pertanian
2.	Peningkatan daya saing dan pemasaran produk pertanian, perkebunan, tanaman pangan hortikultura, dan peternakan	Peningkatan akses petani terhadap iptek, pasar, dan permodalan bunga rendah
		Peningkatan peran dan kemampuan usaha petani tanaman pangan dan perkebunan
3.	Peningkatan peran dan kemampuan usaha petani	Fasilitasi, pemberdayaan usaha petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan
		Bantuan subsidi pupuk dan benih bagi petani kecil
4.	Peningkatan penangkapan, budidaya dan nilai tambah perikanan melalui perbaikan mutu dan pengembangan produk	Pembangunan pelabuhan pendaratan ikan
		Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
		Peningkatan produksi hasil laut melalui pengembangan sarana dan prasarana penangkapan dan areal tangkap
5.	Peningkatan profesionalisme petani dan nelayan serta kelembagaannya	Pengembangan kawasan minapolitan serta pembinaan dan penataan kelembagaan usaha serta penguatan aspek pasar
6.	Peningkatan sistem ketahanan pangan	Penanganan daerah rawan pangan dan pengembangan lumbung pangan
		Pengembangan desa mandiri pangan
8.	Peningkatan keunggulan, daya tarik dan promosi wisata	Penataan dan Pengembangan objek wisata unggulan
		Peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata
9.	Penguatan kelembagaan usaha, kapasitas sumber daya manusia, sistem pembiayaan dan peluang pasar Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah	Peningkatan daya saing produk dan peran Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dalam perekonomian daerah

NO.	PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
10.	Fasilitasi kemitraan Usaha dan optimalisasi fungsi	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah
		Bantuan perkuatan Koperasi
11.	Peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat berbasis industri potensi lokal dan perdagangan	Peningkatan produksi, nilai tambah hasil Industri Kecil Menengah dan pengembangan industri kreatif
		Pengembangan sentra, kluster industri dan produk ekspor
		Penyediaan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan
		Optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah
12.	Peningkatan sarana prasarana dan sistem jaringan distribusi barang dan jasa	Revitalisasi pasar tradisional dan distribusi barang/jasa
13.	Promosi investasi secara intensif	Penyelenggaraan pameran dan temu investor
14.	Pemberian jaminan kepastian hukum pelaksanaan penanaman modal, dan peningkatan pengendalian investasi	Penataan regulasi penanaman modal daerah dan peningkatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal
15.	Peningkatan kualitas dan daya dukung jalan dan jembatan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
16.	Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan berdasarkan koridor pusat pertumbuhan dan wilayah strategis	Peningkatan akses jalan penghubung antar Kecamatan, antar pusat pertumbuhan dan wilayah strategis
		Peningkatan infrastruktur jalan desa
17.	Peningkatan penataan perkotaan/perdesaan, bangunan gedung dan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan
		Penanganan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
		Penataan kawasan perkotaan dan perdesaan
		Peningkatan kualitas konstruksi bangunan gedung dan penanggulangan kebakaran
		Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan
18.	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pengembangan sistem penyediaan dan pengelolaan air bersih diantaranya melalui pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum Ibu Kota Kecamatan perkotaan dan perdesaan
19.	Perencanaan Tata Ruang untuk Kawasan Strategis	Perencanaan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru (kawasan industri, kawasan wisata/UMKM)
20.	Penyediaan Data dan Informasi Spasial Daerah Yang Terintegrasi	Peningkatan peran dan fungsi lembaga koordinasi perencanaan tata ruang daerah
21.	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Air	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

NO.	PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
		Rehabilitasi drainase perkotaan
		Konservasi kawasan hulu Daerah Aliran Sungai dan sub Daerah Aliran Sungai
		Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sumber daya air
		Pengendalian banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai
		Penyediaan dan pengelolaan air baku
		Perlindungan dan konservasi sumber daya alam, mineral dan air tanah
22.	Peningkatan, Pemeliharaan Sumber Air	Pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan embung
23.	Peningkatan Jaringan dan Kapasitas Energi Listrik	Pembinaan, pengembangan ketenagalistrikan pemanfaatan energi baru dan terbarukan
		Peningkatan penanganan pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan listrik
24.	Peningkatan kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Perhubungan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pergerakan Orang, Barang dan Jasa	Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan
		Bantuan sarana/fasilitas perhubungan bagi desa tertinggal
		Evaluasi dan pengendalian trayek
25.	Peningkatan Ketersediaan, Kesiapan Infrastruktur Penanggulangan Bencana dan Resiko Bencana	Sosialisasi Penanggulangan bencana dan resiko bencana
		Peningkatan partisipasi, lembaga masyarakat dalam penanggulangan bencana dan resiko bencana
26.	Penurunan Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Peningkatan layanan, pengendalian pencemaran, pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan
		Perlindungan mata air
27.	Peningkatan, Pengembangan Sarana Prasarana Lingkungan, Pencemaran dan Persampahan	Revitalisasi dan Optimalisasi pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (Semali dan Kaligending)
		Pengadaan alat angkut dan alat berat persampahan
Prioritas 2 : Penanggulangan kemiskinan berbasis potensi unggulan wilayah Prioritas ini mendukung Misi 4 Bupati Tahun 2016-2021, yaitu Misi 4 : Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan		
1.	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Bantuan sosial bagi masyarakat miskin (Beasiswa Siswa Miskin Berprestasi, Jamkesda, Bantuan Ekonomi Produktif, Raskin, PKH)
		Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (P2MKM)
2.	Peningkatan perluasan kesempatan kerja	Peningkatan efektivitas informasi pasar kerja dan bursa kerja *online*.
		Peningkatan program padat karya produktif

NO.	PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
3.	Peningkatan fungsi dan peran Balai Latihan Kerja dan Lembaga Pelatihan Keterampilan swasta sebagai pusat pendidikan dan pelatihan pencari kerja	Peningkatan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja antar lokal (AKAL), antar kerja antar daerah (AKAD) dan antar kerja antar negara (AKAN)
4.	Peningkatan jejaring kerjasama antar daerah	Peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja serta optimalisasi pembinaan dan pengawasan perusahaan
Prioritas 3 : Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Prioritas ini mendukung Misi 1 dan 5 Bupati Tahun 2016-2021, yaitu Misi 1: Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas Misi 5: Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat		
1.	Peningkatan angka partisipasi pada semua jenjang dan jalur pendidikan	Beasiswa bagi siswa miskin seluruh jenjang
		Peningkatan kualitas dan mutu sarana prasarana pendidikan
		Pemerataan dan perluasan akses pendidikan
2.	Peningkatan profesionalisme, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan	Pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
		Peningkatan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah
		Pemberian insentif bagi Guru Honorer
3.	Penataan program studi pendidikan formal dan non formal	Peningkatan partisipasi lembaga pendidikan formal dan non formal
		Peningkatan partisipasi program Kejar Paket (A/B/C)
4.	Peningkatan, pengembangan budaya baca	Peningkatan akses perpustakaan dan minat baca masyarakat
		Peningkatan prasarana dan sarana Perpustakaan Daerah
5.	Peningkatan pembinaan kepemudaan, prestasi olahraga, serta apresiasi seni budaya secara tepadu dan terarah	Pembangunan Sarana Olah Raga
		Pemberdayaan pemuda dan peningkatan prestasi olah raga
		Pelestarian nilai-nilai budaya daerah
6.	Peningkatan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan	Lanjutan Pembangunan dan operasional Rumah Sakit Tipe C Pembun
		Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan
		Peningkatan Puskesmas Tanpa Tempat Perawatan menjadi Puskesmas Dengan Tempat Perawatan, Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas dan Puskesmas Dengan Tempat Perawatan menjadi Puskesmas Pratama
7.	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Pembebasan retribusi pelayanan kesehatan dasar
		Standarisasi pelayanan kesehatan masyarakat
		Optimalisasi sistem jaminan kesehatan

NO.	PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan kesehatan ibu dan anak
		Pemberdayaan masyarakat dalam penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu akibat melahirkan melalui pembangunan Rumah Gizi
		Pembangunan kesehatan partisipatif berbasis masyarakat
		Peningkatan upaya penanggulangan penyakit menular seperti *HIV/AIDs*, DBD, Malaria
		Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
		Ambulance on Call dan pengobatan gratis bagi keluarga miskin
Prioritas 4 : Peningkatan kehidupan sosial dan keagamaan Prioritas ini mendukung Misi 2 Bupati Tahun 2016-2021, yaitu Misi 2: Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat		
1.	Peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial.
2.	Peningkatan peran dan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan pembangunan kesejahteraan sosial
3.	Peningkatan pendidikan keagamaan pada semua tingkat pendidikan dan kelembagaan lainnya	Dukungan pada perbaikan kualitas pendidikan keagamaan, termasuk madrasah, pesantren dan diniyah
		Bantuan operasional masjid, Taman Pendidikan Al-Quran dan Madrasah Diniyah
		Pemberian insentif bagi guru mengaji
		Pengembangan dan pemberdayaan *Islamic Centre*
		Membudayakan membaca Al-Quran bagi pegawai Pemda dan pelajar yang beragama Islam
4.	Peningkatan pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam trantibmas

NO.	PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
5.	Peningkatan koordinasi pencegahan, penanganan konflik	Peningkatan pemahaman ketahanan bangsa, pencegahan, penanganan konflik antar wilayah
6.	Peningkatan Keadilan dan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan	Optimalisasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
		Bantuan modal dan prasarana sarana bagi usaha dan kelompok usaha perempuan
7.	Pengendalian kehamilan dan peningkatan cakupan peserta Keluarga Berencana	Peningkatan ketersediaan alat kontrasepsi, pelayanan Keluarga Berencana dengan standar mutu yang berkualitas bagi masyarakat
		Intensifikasi penyuluhan/Komunikasi Informasi Edukasi
		Optimalisasi peran kader/Institusi Masyarakat
8.	Optimalisasi fungsi keluarga dalam peningkatan kesejahteraan keluarga	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program transmigrasi
Prioritas 5: *Peningkatan Penerapan Good and Clear Government* Prioritas ini mendukung Misi 6 Bupati Tahun 2016-2021, yaitu Misi 6 : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.		
1.	Peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Peningkatan manajeman dan informasi pengelolaan keuangan yang akuntabel
		Optimalisasi penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
2.	Peningkatan Pengawasan, Pembinaan Kinerja Organisasi Pemerintah	Peningkatan pengawasan reguler, implementasi aksi daerah pencegahan korupsi; evaluasi dan penyelesaian temuan
		Fasilitasi peningkatan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan pendampingan dalam penyelesaian tindak lanjut
		Peningkatan penyelesaian pengaduan masyarakat
3.	Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi pemerintahan daerah	Peningkatan efektivitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah
		Penataan Struktur Organisasi Tata Kerja kelembagaan pemerintah daerah
		Peningkatan, penguatan pengelolaan arsip daerah

NO.	PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
4.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Peningkatan koordinasi dan sistem penyelenggaraan pemerintahan
		Penguatan, sosialisasi kebijakan pemda
		Optimalisasi kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5.	Peningkatan Pelayanan Prima dan Kepuasan Masyarakat	Peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan melalui pengukuran tingkat kepuasan atas pelayanan publik
		Peningkatan pelayanan publik melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
		Peningkatan penerapan Standar Pelayanan Minimum, Standar Operasional Prosedur dan persiapan penetapan *International Standard Organization*
		Optimalisasi fungsi Sistem Informasi Publik
		Fasilitasi penyelesaian permasalahan konflik pertanahan
		Pengendalian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
		Penataan administrasi kependudukan melalui Pelayanan dokumen kependudukan, akte pencatatan sipil dan gratis pembuatan akte kelahiran serta laminasi
6.	Peningkatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Peningkatan perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif, berkelanjutan dan berkualitas
		Peningkatan pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah
		Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
		Peningkatan koordinasi dan kerjasama perencanaan pembangunan daerah
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
		Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah dan Desa bagi Aparatur Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa
7.	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur yang Profesional dan Berintegritas	Penetapan standar pendidikan dan pelatihan aparatur untuk setiap jenis pekerjaan dan jenjang jabatan
		Penetapan standar kompetensi pekerjaan dan jabatan pegawai negeri
		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah dalam rangka penerapan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara
8.	Peningkatan kesejahteraan pegawai dalam rangka mewujudkan pelayanan prima	Optimalisasi sistem kepegawaian daerah

NO.	PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
9.	Peningkatan pembinaan disiplin dan etos kerja pegawai	Penetapan sasaran kinerja pegawai
10.	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Penetapan, pelaksanaan kebijakan umum anggaran daerah
		Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah
11.	Peningkatan pengelolaan aset daerah	Pengadaan tanah, sertifikasi dan penataan aset daerah
12.	Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban politik sebagai warga Negara	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik
13.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa	Peningkatan partisipasi dan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa
		Bantuan, insentif dalam rangka peningkatan peran dan fungsi kelembagaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga
		Revitalisasi posyandu dan bantuan operasional kader posyandu
		Peningkatan Penataan Sistem Administrasi Pemerintahan, kapasitas kelembagaan, dan tanah kas Desa
		Optimalisasi pengelolaan aset Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan
14.	Peningkatan sarana dan prasarana perdesaan	Peningkatan koordinasi dan fasilitasi program pembangunan daerah
		Peningkatan infrastruktur Desa dan antar wilayah desa
		Pembangunan dan rehabilitasi prasarana wilayah desa/kelurahan

Sumber: Data diolah

Penetapan prioritas program pembangunan daerah dan indikator kinerja yang ingin dicapai tahun 2018 sebagaimana disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Prioritas Program Pembangunan Daerah dan Target Indikator Kinerja Pemerintah
Kabupaten Kebumen Tahun 2018

PRIORITAS PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN / INDIKATOR	TARGET 2018		
1. Peningkatan Perekonomian Berbasis Pertanian dan Pariwisata	Pertanian			
	Produktivitas Padi	6,55	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Dinas Pertanian dan Pangan
	Produktivitas Jagung	7,48	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Dinas Pertanian dan Pangan
	Produktivitas Kedelai	1,23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian dan Pangan
	Produksi Kelapa	189.433,55	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian dan Pangan
	Produksi Tembakau	382,47	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian dan Pangan
	Produksi Daging	11.102.250	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Dinas Pertanian dan Pangan
	Produksi Telur	3.836.390	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Dinas Pertanian dan Pangan
	Angka Nilai Tukar Petani (NTP)	102,60	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Dinas Pertanian dan Pangan
	Produksi Kayu Bulat	17.668,89		
	Persentase penanganan kerawanan pangan	49,62		
	Persentase kelompok/gapoktan yang tertangani stabilitas harga pangannya	40,00		

PRIORITAS PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN / INDIKATOR	TARGET 2018		
	Persentase kelompok wanita yang melaksanakan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan	43,04		
	Kelautan dan Perikanan			
	Produksi ikan	11.099	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Beroperiasinya PPI yang Bisa Menampung Kapal Berbobot 30 Gt Ke Atas	1	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program pengembangan budidaya perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Koperasi dan UMKM			
	Persentase Koperasi Aktif	85	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Dinas Perindag/ Dinas Naker KUMKM
	Peningkatan Jumlah UMKM	44.407	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Dinas Perindag/ Dinas Naker KUMKM
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Dinas Perindag/ Dinas Naker KUMKM
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Dinas Naker KUMKM

PRIORITAS PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN / INDIKATOR	TARGET 2018		
	Perindustrian			
	Jumlah industri kecil menengah	54.929	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Dinas Perindag
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Dinas Perindag/ Dinas Naker KUMKM
			Program Penataan Struktur Industri	Dinas Perindag
	Perdagangan			
	Persentase Pasar Tradisional Dalam Kondisi Baik	60,00	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Dinas Perindag
	Jumlah usaha perdagangan berizin	2.088	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Dinas Perindag
			Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Dinas Perindag
			Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Dinas Perindag
	Penanaman Modal			
	Nilai investasi PMA/PMDN	340.658	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Dinas Penanaman Modal PTSP
	Presentase BUMD dengan predikat sehat	80,00		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perijinan Terpadu	81,75/ A		
	Pariwisata			
	Jumlah kunjungan wisatawan	1.793.337	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Kepemudaan OR dan Pariwisata
	Lama tinggal wisatawan	0,40	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Kepemudaan OR dan Pariwisata

PRIORITAS PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN / INDIKATOR	TARGET 2018		
			Program Pengembangan Kemitraan	Dinas Kepemudaan OR dan Pariwisata
			Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pariwisata)	Dinas Kepemudaan OR dan Pariwisata
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Capaian Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	54,37	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
	Capaian jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	71,00	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
	Cakupan Pelayanan Air Bersih	14,62	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	58,00	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
	Capaian luas RTH Perkotaan	16,93	Program Rehabilitasi/Pemelihara-an Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
	Cakupan Pelayanan Sampah	42,74	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/Bronjong	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
			Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan PR

PRIORITAS PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN / INDIKATOR	TARGET 2018		
			Program tanggap darurat jalan dan jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
			Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
			Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
			Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
			Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
			Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Cipta Karya	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
			Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
			Program Pengendalian Banjir	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan PR

PRIORITAS PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN / INDIKATOR	TARGET 2018		
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas Perumahan, KP dan LH
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
	Capaian Presentase Berkurangnya Kawasan Kumuh Perkotaan	50,00	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Dinas Perumahan, KP dan LH
			Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan, KP dan LH
			Program pengelolaan areal pemakaman	Dinas Perumahan, KP dan LH
			Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Satpol PP
	Perhubungan			
	Cakupan Kualitas Layanan Transportasi	54,33	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dinas Perhubungan
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Dinas Perhubungan
			Program peningkatan pelayanan angkutan	Dinas Perhubungan
			Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Dinas Perhubungan
	Pertanahan			
	Cakupan Lahan Bersertifikat	23,53	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Bagian Pemerintahan Setda

PRIORITAS PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN / INDIKATOR	TARGET 2018		
	Lingkungan Hidup			
	Angka Indeks Kualitas Udara	77,00	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Dinas Perumahan, KP dan LH
	Angka Indeks Kualitas Air	61,00	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Dinas Perumahan, KP dan LH
	Penanganan Lahan Kritis	375	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, KP dan LH
			Program peningkatan pengendalian polusi	Dinas Perumahan, KP dan LH
	Komunikasi dan Informatika			
	Capaian Layanan komunikasi	71,15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesempatan Kerja	Sosial			
	Cakupan penanganan PMKS	16,13	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya;	Dinas Sosial dan PPKB

PRIORITAS PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN / INDIKATOR	TARGET 2018		
			Bantuan Sosial PMKS	Dinas Sosial dan PPKB /PPKD
			Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin (DAK)	DPU/PPKD
			Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)	Dispermades P3A/ PPKD
			Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Desa Adat Yang Bersumber Dari APBN	Dispermades P3A/ PPKD
			Bantuan Sosial Desa Berdikari	Dispermades P3A/PPKD
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
	Cakupan rumah layak huni	97,66	Program pengembangan perumahan;	Dispermades P3A /DPUPR/PPKD
			Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu (P2MKM)	Dispermades P3A/ PPKD
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	Cakupan Pembinaan Keluarga Sejahtera	32,15	Program Keluarga Berencana	Dinas Sosial dan PPKB
	Cakupan Peserta KB Aktif	84,80	Program pelayanan kontrasepsi	Dinas Sosial dan PPKB
			Program pembinaan peran serta	Dinas Sosial dan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN / INDIKATOR	TARGET 2018		
			masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	PPKB
			Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	Dinas Sosial dan PPKB
	Tenaga Kerja			
	Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja	20,55	Program Peningkatan Kesempatan kerja;	Dinas Naker KUMKM
			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.	Dinas Naker KUMKM
			Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Dinas Naker KUMKM
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Pendidikan			
	Angka Harapan Lama Sekolah	12,71	Program Pendidikan Anak Usia Dini;	Dinas Pendidikan
	Rata-Rata Lama Sekolah	7,07	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;	Dinas Pendidikan
	Angka Kelulusan	99,89	Program Pendidikan Menengah;	Dinas Pendidikan
	Persentae Penduduk Berpendidikan S1	2,01	Program Pendidikan Non Formal;	Dinas Pendidikan
	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pendidikan	B	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN / INDIKATOR	TARGET 2018		
			Kependidikan;	
	Angka Partisipasi Sekolah	91,86	Bantuan beasiswa/penghargaan peserta didik dan pendidik berprestasi	Dinas Pendidikan
	Persentase Sekolah Terakreditasi A	24,23	Bantuan Penguatan Organisasi Mitra PAUD	Dinas Pendidikan
			Belanja Bantuan Sosial Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik)	Dinas Pendidikan
	Persentase Gedung PAUD/sederajat dalam kondisi baik	79,92		
	Persentase Gedung SD/sederajat dalam kondisi baik	66,22		
	Persentase Gedung SMP/ sederajat dalam kondisi baik	84,46		
	Persentase Gedung SMA/ sederajat dalam kondisi baik	89,51		
	Perpustakaan			
	Capaian kunjungan perpustakaan	12,70	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Kesehatan			
	Persentase Penduduk yang menjadi Peserta Jaminan Kesehatan	77,23	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Indeks Survey Kepuasan	81/B	Program Upaya Kesehatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN / INDIKATOR	TARGET 2018		
	Masyarakat terhadap layanan kesehatan		Masyarakat	
	Cakupan penanganan ibu hamil resiko tinggi	100	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Dinas Kesehatan
	Persentase Kasus Gizi Buruk	0,04	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	83. Tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan dasar kesehatan	88	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
	84. Tingkat pelayanan kegawatdaruratan	100	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinas Kesehatan
	85. Tingkat mutu pelayanan sarana kesehatan	97	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dinas Kesehatan
	86. Nilai kinerja kesehatan BLUD	A	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
	87. Peningkatan Persentase Akses Sanitasi	75	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Dinas Kesehatan
			Belanja bantuan Sosial Kesehatan	Dinas Kesehatan/ PPKD
	Kebudayaan			
	Capaian peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan nilai budaya	64,00	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pemuda dan Olahraga			
	Capaian prestasi cabang olahraga	48,72	Program Peningkatan Upaya	Dinas Kepemudaan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN / INDIKATOR	TARGET 2018		
			Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda	OR dan Pariwisata
	Capaian keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional	58,33	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Dinas Kepemudaan OR dan Pariwisata
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Dinas Kepemudaan OR dan Pariwisata
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Dinas Kepemudaan OR dan Pariwisata
			Hibah kepada KONI	Dinas Kepemudaan OR dan Pariwisata
			Hibah kepada Atlet Berprestasi	Dinas Kepemudaan OR dan Pariwisata
4. Peningkatan Kehidupan Sosial dan Keagamaan	Sosial			
	Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah SD	100	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Dinas Sosial PPKB
	Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah SMP	100	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial PPKB
	Cakupan rehabilitasi kasus narkoba	10,26	Program Pembinaan Para Penyandang Penyakit dan Trauma	Dinas Sosial PPKB
	Cakupan Penemuan Kasus Baru HIV	80	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial PPKB
	Cakupan Penanganan Kasus Pertikaian Antar Agama	100	Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	Dinas Sosial PPKB

PRIORITAS PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN / INDIKATOR	TARGET 2018		
	Persentase masjid dan mushola dalam kondisi baik	75	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Dinas Sosial PPKB
	Persentase Ponpes dan TPQ dalam kondisi baik	77,5	Belanja Hibah kepada Lembaga Keagamaan	Bagian Kesra/PPKD
	Persentase gereja dalam kondisi baik	95	Belanja Hibah kepada Sekolah Swasta	Dinas Pendidikan PPKD
	Persentase wihara dalam kondisi baik	95	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	Bagian Kesra/PPKD
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
	Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	560	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Satpol PP/Kantor Kesbangpol
	Presentase cakupan penerbitan Akta Kelahiran	88,25	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Satpol PP/Kantor Kesbangpol
	Prosentase cakupan penerbitan akta kematian	46,00	Program Kemitraan Pengem-bangan Wawasan Kebangsaan	Satpol PP/Kantor Kesbangpol
	Persentase desa Siaga/ Tangguh Bencana	24,29	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Satpol PP/Kantor Kesbangpol
	Capaian peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	76,40	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Satpol PP/Kantor Kesbangpol
	Capaian partisipasi	70,00	Program Pendidikan Politik	Satpol PP/Kantor

PRIORITAS PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN / INDIKATOR	TARGET 2018		
	masyarakat/penduduk dalam proses pemilihan umum		Masyarakat	Kesbangpol
			Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tidak Kriminal	Satpol PP/Kantor Kesbangpol
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	Presentase cakupan penerbitan Akta Kelahiran	88,25	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Presentase cakupan perbitan akta kematian	46,00		
5. Peningkatan Penerapan *Good and* Clear *Government*	Capaian peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	92,48	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	Inspektorat
	Capaian peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	45,00	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD, Dispermades P3A, Bagian Hukum Setda
	Capaian peningkatan pelayanan kecamatan	100	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Bagian Organisasi Setda
	Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	B	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Bagian Organisasi Setda
	Capaian peningkatan pelayanan kelurahan	100	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD

PRIORITAS PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN / INDIKATOR	TARGET 2018		
	Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Kelurahan	B	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Bagian Pemerintahan Setda
	Capaian peningkatan pelayanan pemerintah desa	45,79	Program Peningkatan Profesi-onalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan	Inspektorat
	Persentase jumlah Perangkat Daerah menerapkan arsip baku	29,31	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Seluruh OPD
	Capaian kinerja program	90,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Seluruh OPD
	Capaian akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	67,88	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Seluruh OPD
	Persentase LAKIP yang nilainya meningkat	7,00		
	Persentase Perangkat Daerah yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan dalam audit LKPD oleh BPK	92,00		
	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu	92,00		
	Nilai Leveling APIP Kabupaten	3,00		
	Capaian peningkatan pengelolaan keuangan dan aset	92,30		
	Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ	60,00		

Sumber : RPJMD Tahun 2016-202

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2018 disusun berdasarkan tahapan dan mekanisme yang tertuang dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penentuan program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mulai dijaring dan digodok secara berjenjang pada saat pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan, melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Forum Perangkat Daerah Kabupaten dan terakhir melalui Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. Hasil (*outcome*) dari pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen tersebut salah satunya berupa kesepakatan prioritas pembangunan daerah serta kesepakatan program dan kegiatan prioritas daerah yang dituangkan dalam buku dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 ini.

Sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2018 diarahkan dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sasaran pembangunan daerah tahun 2018 juga diarahkan untuk pencapaian agenda pembangunan jangka menengah daerah yang dilaksanakan/ diimplementasikan melalui program prioritas/unggulan. Sinkronisasi agenda pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021, program prioritas/unggulan dan indikasi kegiatan tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1
Sinkronisasi Misi/Agenda, Program Unggulan/Prioritas Bupati Tahun 2016-2021
dan Indikasi Program/Kegiatan Kabupaten Kebumen Tahun 2018

NO.	AGENDA	PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN	KEGIATAN TAHUN 2018	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	SKPD
1.	**Sumber Daya Manusia**	**Pendidikan**				
		a. Beasiswa Pendidikan bagi masyarakat miskin berpretasi	Bantuan Beasiswa Mahasiswa S1 Kurang Mampu	100 Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi	2.500.000.000	Disdik/PPKD
			Bantuan Beasiswa Siswa Kurang Mampu SMP/MTs	2.977 Siswa	1.488.500.000	Disdik/PPKD
			Bantuan Beasiswa Siswa Kurang Mampu SD/MI	4.754 Siswa	1.711.440.000	Disdik/PPKD
		b. Bantuan insentif bagi tenaga pendidik dan kependidikan sekolah/madrasah	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Peningkatan Kesejahteraan tenaga pendidik PAUD)	TunjanganKesra 2.156 Guru PAUD, Fasilitasi Akreditasi 75 Lembaga PAUD, BOP DAK PAUD Non Fisik	4.452.300.000	Disdik
		c. Bantuan insentif bagi guru TPQ dan Madrasah Diniyah	Hibah Operasional TPQ	449 TPQ di Kabupaten Kebumen	2.245.000.000	Bagian Kesra Setda/PPKD
		Kesehatan				
		a. Peningkatan cakupan layanan kesehatan melalui jamkesda	Jamkesda	100.000 masyarakat miskin sharing dengan APBDes (***buy one get one***)	14.200.000.000	Dinkes
			Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Fasilitasi JKN	835.065.000	Dinkes

NO.	AGENDA	PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN	KEGIATAN TAHUN 2018	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	SKPD
		b. Pendampingan tenaga kesehatan dalam rangka pengurangan angka kematian ibu melahirkan (AKI) dan kematian bayi (AKB)	Penyediaan operasional Rumah Tunggu Kelahiran	35 Paket	3.603.152.000	Dinkes
			Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	1.285 Orang	350.000.000	Dinkes
			Pemberian tambahan makanan dan vitamin	2 Paket	2.200.000.000	Dinkes
2.	**Sosial dan Keagamaan**	**Keagamaan**				
		a. Peningkatan sarana ibadah dan pendidikan keagamaan guna mendorong peningkatan kualitas keberagamaan	Hibah kepada Panitia/Yayasan Pembangunan/Rehab Masjid	40 Unit Masjid @ 25 juta	1.000.000.000	Bagian Kesra/ PPKD
			Hibah kepada Panitia/Yayasan Pembangunan/Rehab Masjid Jami di Sepanjang Jalur Tengah/Utama Kabupaten Kebumen	1 Unit Masjid di Jalur Utama	2.500.000.000	Bagian Kesra/ PPKD
			Hibah kepada Panitia/Yayasan Pembangunan/Rehab Musholla	50 Unit Musholla @ 15 juta	750.000.000	Bagian Kesra/ PPKD
			Hibah Pembangunan/ Rehab TPQ	12 Unit TPQ @ 15 juta	180.000.000	Bagian Kesra/ PPKD
			Hibah Pembangunan/ Rehab Madrasah Diniah	20 Unit Madin @ 15 juta	300.000.000	Bagian Kesra/ PPKD
			Hibah Pembangunan/ Rehab Pondok Pesantren	20 Unit Ponpes @ 25 juta	500.000.000	Bagian Kesra/ PPKD
			Hibah kepada Panitia/Yayasan Pembangunan/Rehab Gereja	5 Unit @ 15 Juta	75.000.000	Bagian Kesra/ PPKD
			Hibah kepada Panitia/Yayasan Pembangunan Wihara	2 Unit @ 15 juta	30.000.000	Bagian Kesra/ PPKD
			Hibah Pembangunan RKB dan Rehab MI/MTs/MA	62 Paket/Unit	3.910.000.000	Bagian Kesra/ PPKD
			Hibah Peningkatan Mutu Sarana Prasarana MI/MTs/MA	70 Paket/Unit	2.000.000.000	Bagian Kesra/ PPKD

NO.	AGENDA	PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN	KEGIATAN TAHUN 2018	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	SKPD
			Fasilitasi penyelenggaraan haji daerah	1 paket, 7 orang, 6 kali rakor	800.000.000	Bagian Kesra
			Fasilitasi penyelenggaraan MTQ, STQ dan MHQ	Terlaksananya MTQ dan lomba Pildacil tingkat Kabupaten, MTQ Tingkat Provinsi, pelatihan qori tingkat Kecamatan, sosialisasi LPTQ, sosialisasi kurikulum TPQ, TOT qori/qori'ah, pelatihan qiro'ah + Tuan Rumah MTQ Jateng	750.000.000	Bagian Kesra
		b. Peningkatan forum silaturahmi antar umat beragama	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Terlaksananya kegiatan PHBI Tingkat Kabupaten, Program Jemari, Yasin, Tahlil dan Amaliah Ramadhan	985.000.000	Bagian Kesra Setda
3.	**Perekonomian**	**Pengembangan Zona Industri dan UMKM**			**176.338.910.000**	**16,9%**
		a. Membangun kawasan industri	Revisi rencana tata ruang	1 Dokumen Perda RTRW	300.000.000	Bappeda

NO.	AGENDA	PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN	KEGIATAN TAHUN 2018	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	SKPD
			Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Tersusunnya 1 dokumen Studi Potensi Ekonomi Kreatif	100.000.000	Bappeda
		b. Mengoptimal-kan fungsi dekranasda dan PLUT sebagai ujung tombak pemasaran hasil produksi UMKM	Rehabilitasi Pasar Tumenggungan	1 Unit Pasar Tumenggungan	10.000.000.000	Dinas Perindag
		c. Pengembangan desa wisata berbasis potensi keunggulan desa	Pengembangan desa wisata berbasis potensi unggulan	3 Desa Wisata	2.250.000.000	Dinas Kepemudaan OR dan Pariwisata
			Pembinaan dan Penyuluhan Desa Wisata	5 Desa Wisata	1.190.000.000	
			Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Pembinaan/ sosialisasi Pokdarwis, pelaku wisata, desa wisata, saka panduwisata, studi komparasi, Pengembangan wisata Kampung Arab, Pengembangan Kampung Inggris	2.500.000.000	Dinas Kepemudaan OR dan Pariwisata
		Pertanian				

NO.	AGENDA	PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN	KEGIATAN TAHUN 2018	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	SKPD
		a. pengembangan teknologi tepat guna untuk peningkatan produk pertanian	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Tercukupinya alat mesin pertanian berupa a.Pengadaan traktor Roda Dua (8,5 PK);	4.795.130.000	Dinas Pertanian dan Pangan
				b. Pengadaan Traktor Roda Dua (6,5 Pk);		
				c. Pengadaan Pompa Air 6 inch; d. Pengadaan Pompa Air 4 inch;		
				e. Pengadaan Pompa Air 3 inch		
			Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna	Terlatihnya 200 petani dalam hal SLPHT dan SLI	192.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		b. Pengembangan agrobisnis berbasis potensi wilayah dan melalui corporate farming	Peningkatan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)	Pembuatan 15 demplot, 1.600 m jalan produksi, 2 bak penampung air; 2.000 rigen, 1 UPPO, 5.000 pupuk NPK, 2.500 pupuk KNO3 dan pembinaan 17 kelompok (***Karanggayam***)	979.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan

NO.	AGENDA	PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN	KEGIATAN TAHUN 2018	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	SKPD
			Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan	Sosialisasi / Pembinaan Hortikultura dan tanaman pangan 400 orang petani; pengadaan 2 paket saprodi budidaya tanaman pangan dan hortikultura dan pengembangan agrowisata desa Tambakmulyo	495.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
			Pembibitan dan perawatan ternak	a.Tersedianya 1 paket Sarana dan Prasarana Kawin Suntik (IB); b.1 kali kontes sapi; c.Pengamanan 25 ekor bibit unggul Sapi PO; d.Pengembangan kelembagaan 1 kelompok; e.Pembinaan 10 Kelompok tani	1.980.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
			Pengembangan agribisnis peternakan	Pengembangan Agrowisata Peternakan Desa Sitiadi Kecamatan Puring dan Karanggayam	3.300.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Infrastruktur				

NO.	AGENDA	PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN	KEGIATAN TAHUN 2018	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	SKPD
		Peningkatan kualitas infrastruktur dalam mendukung pengembangan agrobisnis dan pariwisata	Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi	Pembangunan/ rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usahatani (JITUT) 18 Paket dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) 7 Paket dengan sasaran manfaat 4.000 Ha	5.500.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
			Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)	14 Paket dam parit; 6 Paket JIAT	4.362.000.000	DPUPR
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Kabupaten Kebumen	5.069.700.000	DPUPR
			Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)	28 DI (DI Banioro, DI Kali Kayan Kanan,	16.390.000.000	DPUPR
				DI Kaligombong II,		
				DI Rembang,		
				DI Pohkumbang II,		
				DI Pohkumbang IV,		
				DI Sidobunder,		
				DI Wadasmalang II,		
				DI Somagede III,		
				DI Tilampok,		
				DI Wonokromo II,		
				DI Gentan, DI Kalikemit, DI Kalipoh, DI Tratas,		

NO.	AGENDA	PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN	KEGIATAN TAHUN 2018	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	SKPD
				DI Jambreng,		
				DI Pengempon, DI Kali Kudu, DI Wagirpandan II, DI Sempor, DI Glontor, DI Kali Trenggulun,		
				DI Kedungwringin II,		
				DI Kaligedang,		
				DI bangkong I,		
				DI Bendung Karet,		
				DI Caruban,		
				DI Blangkunang)		
			Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya	6 desa dengan anggaran @1,5juta (Kalirejo dan Karangmojo Karanggayam, Ds Langse Karangsambung, Ds. Banjarharjo Ayah, Ds. Kalisana)	9.000.000.000	DPUPR
			Peningkatan Jalan	35 Paket	35.000.000.000	DPUPR
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan (DAK)	20 km	24.345.080.000	DPUPR
			Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	15 Paket	18.150.000.000	DPUPR
			Pengadaan PC	30.000 Sak	3.500.000.000	DPUPR

NO.	AGENDA	PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN	KEGIATAN TAHUN 2018	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	SKPD
			Bantuan Sosial PAMSIMAS	Pendampingan/ Replikasi PAMSIMAS	1.077.500.000	PPKD (BTL)
			Pembangunan Hidrant untuk Penanggulangan Kekeringan	20 Hidrant umum untuk penanggulangan kekeringan	8.000.000.000	DPUPR
			Pembangunan tempat pelelangan ikan (DAK)	Pembangunan alur pelayaran PPI Logending dan fasilitasi PPI Kab. Kebumen (2 paket)	1.934.400.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Operasi ketertiban dan pengendalian arus lalu lintas	Honor Penjaga Perlintasan KA sebidang yang rawan kecelakaan (6 orang x 5 titik x 1,324jt x 12 bulan)	1.033.600.000	Dinas Perhubungan
			Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Maintenance jaringan yang ada dan pembangunan jaringan FO wilayah kecamatan Karangsambung dan Sadang sepanjang 40 km dan repeater satpol PP (dan penanganan blankspot area)	5.785.000.000	Dinas Kominfo

NO.	AGENDA	PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN	KEGIATAN TAHUN 2018	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	SKPD
4.	**Penanggulangan Kemiskinan**	**Pengentasan Kemiskinan**			**533.510.114.000**	
		a. pengurangan kemiskinan terpadu melalui agribisnis, agama, budaya dan pendidikan	Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu (P2MKM)	2.700 RTLH	33.000.000.000	Dinas Perkim LH
		b. peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengentasan kemiskinan	Transformasi Pemahaman Keagamaan untuk Gulkin	Penyusunan materi/teks Khutbah Jumat terkait GULKIN untuk seluruh Masjid di Kabupaten Kebumen	75.000.000	Bagian Kesra
				Pembekalan kepada Pengurus ta'mir Masjid/Khotib terkait Gulkin	550.000.000	Bagian Kesra
			Bantuan Sosial Desa Berdikari	13 Desa	1.300.000.000	Dispermades P3A/PPKD

NO.	AGENDA	PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN	KEGIATAN TAHUN 2018	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	SKPD
			Fasilitasi Alokasi Dana Desa	Terfasilitasinya alokasi dana-dana ke desa (dana desa APBN, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan provinsi dan bantuan keuangan ke desa lainnya) di 449 Desa	650.000.000	Dispermades P3A
			Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)	449 Desa	138.422.375.330	Dispermades/ PPKD
			Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Desa Adat Yang Bersumber Dari APBN	449 Desa	372.770.040.720	Dispermades/ PPKD
			Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	Terlaksananya padat karya pangan dan pasar murah di 32 Desa	1.154.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan
			Koordinasi kebijakan perberasan	Pembinaan dan pendampingan kelompok dana talangan pengadaan pangan dan pemberdayaan lembaga distribusi pangan masyarakat (45 kelompok)	793.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan

NO.	AGENDA	PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN	KEGIATAN TAHUN 2018	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	SKPD
			Peningkatan dan pengembangan diversifikasi pangan	Pembinaan dan pemberian stimulan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)	973.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
			Pembinaan dan pengembangan perikanan	Terbentuknya kawasan agrobisnis perikanan dan kelautan melalui pendampingan budidaya sidat, lele, gurami dan pengolahan dan pemasarannya	3.324.245.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi dan Pemasaran Benih Bibit Unggul	poklahsar, podakkan, KUB nelayan, rencana cold storage di nelayan dulu(di TPI) ke depannya di pasar2 diperbanyak, kemungkinan ada restribusi bisa meningkatkan PAD rumah produksi 150, mini cold storage 400jt	1.000.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO.	AGENDA	PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN	KEGIATAN TAHUN 2018	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	SKPD
			Fasilitasi Kegiatan Unit Pelayanan Terpadu Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (UPT P2K) “Rumah Harapan”	1 Unit UPT P2K; 12 Bulan	260.000.000	Bap3da dan Perangkat Daerah terkait
			Penyusunan data kemiskinan	Update data kemiskinan daerah	200.000.000	Bap3da
			Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	1 Dokumen sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan	220.000.000	Bap3da
5.	**Pendidikan dan Kesehatan**	Pembangunan/ peningkatan sarana dan prasarana serta aksesbilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau	**Pendidikan**			
			Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Ruang Kelas PAUD	900.000.000	Dinas Pendidikan
			Pembangunan gedung sekolah	Terbangunnya Gedung SD Tambakmulyo Puring dan SDN Prembun	1.000.000.000	Dinas Pendidikan
			Penambahan ruang kelas sekolah	3 SD	500.000.000	Dinas Pendidikan
			Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	10 ruang	625.000.000	Dinas Pendidikan

NO.	AGENDA	PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN	KEGIATAN TAHUN 2018	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	SKPD
			Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD (DAK)	32 Rehab sedang, 16 rehab berat, 5 RKB, 10 Perpustakaan, 15 Sanitasi, 10 Alper, 4 paket buku Perpustakaan	6.016.090.500	Dinas Pendidikan
			Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SMP	3 RKB, 2 Lab IPA, 2 Perpus, 7 Rehab Ruang Kantor SMP, 5 Sanitasi, 20 paket Buku Perpus, 5 Rehab Ruang Ibadah, 7 Rehab Ruang Perpustakaan,7 Rehab ruang laborat, 7 Alat Peraga Kesenian	3.500.000.000	Dinas Pendidikan
			Pembangunan perpustakaan (BANPROP)	3 Perpustakaan SD	360.000.000	Dinas Pendidikan
			Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	4 Alat Bengkel, 4 Alat Mutlimedia, 2 Alat Lab IPA, 5 Komputer (SMK)	605.000.000	Dinas Pendidikan
			Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (Dikmen)	4 Paket SMK	594.000.000	Dinas Pendidikan
			Kesehatan			

NO.	AGENDA	PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN	KEGIATAN TAHUN 2018	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	SKPD
			Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan (5 paket)	7.089.500.000	Dinas Kesehatan
			Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1 Paket sarana penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan	5.314.378.000	Dinas Kesehatan
			Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	35 Lokasi	9.310.000.000	Dinas Kesehatan
			Pengembangan pelayanan kesehatan rujukan	Penyediaan operasional dan pemeliharaan RSUD Prembun (12 bulan)	18.000.000.000	RSUD Prembun

NO.	AGENDA	PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN	KEGIATAN TAHUN 2018	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	SKPD
			Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Pengadaan peralatan PONED Puskesmas Rawat Inap (Puskesmas Padureso); Pengadaan sarptas unggulan jiwa (Puskesmas Pejagoan); Peralatan PKD set dan Pustu; Pengadaan IPAL (Puskesmas: Karanganyar, Ambal II, KebumenI, Kebumen III, Buayan, Gombong I)	6.500.000.000	Dinas Kesehatan
			Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap		14.500.000.000	Dinas Kesehatan
			Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Pengadaan sarpras RSU Tipe C Prembun	15.000.000.000	Dinas Kesehatan
			Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	RSUD Soedirman	23.225.000.000	RSUD Soedirman
			Kegiatan BLUD RSUD Kebumen	- Cakupan Pelayanan Kunjungan Rawat Jalan (Kunjungan/ Kali) 106.275	110.193.000.000	RSUD Soedirman

NO.	AGENDA	PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN	KEGIATAN TAHUN 2018	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	SKPD
				- Cakupan Lama Hari Perawatan Rawat Inap (Hari) : 58.969		
6.	***Good Government***	**Pemerintahan**				
		a. menyelengga-rakan pemerin-tahan yang bersih (no korupsi) dan melayani (no upeti)	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa	Pengamanan PILGUB	1.300.000.000	
			Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Evaluasi SOP SKPD; Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE); Penyusunan Perbup SAKIP/ Manajemen Kinerja (6 SKPD)	200.000.000	Bagian Organisasi Setda
			Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Jumlah unit pelayanan publik yang melakukan inovasi,; jumlah SKPD/UPP yang dievaluasi ; Jumlah peserta bimtek pelayanan publik	220.000.000	Bagian Organisasi Setda

NO.	AGENDA	PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN	KEGIATAN TAHUN 2018	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	SKPD
			Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara di Daerah	Penilaian pegawai teladan; Pelaksanaan gelar budaya; Jumlah SKPD yang mengembangkan budaya kerja; Jumlah SKPD yang mengembangkan budaya kerja (6 Orang; 1 Kali; 55 SKPD; 20 SKPD)	175.000.000	Bagian Organisasi Setda
			Penyusunan Tupoksi Organisasi Pemerintah Kabupaten Kebumen	Penyusunan perbup uraian tugas; Penyusunan profil kelembagaan perangkat daerah (15 Perbup ; 1 Dokumen)	410.000.000	Bagian Organisasi Setda
			Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	26 Kecamatan	1.326.000.000	Seluruh Kecamatan
		b. Peningkatan kinerja pegawai sesuai kompetensinya dengan didukung peningkatan kesejahteraan	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	Seluruh PNSD Non Guru	102.000.000.000	Seluruh Perangkat Daerah
			Pendidikan dan pelatihan teknis	Terlaksananya diklat teknis bagi 240 PNS	440.000.000	BKD
			Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	2 angkatan diklat purna tugas, bendaharaan pusk	800.000.000	BKD

NO.	AGENDA	PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN	KEGIATAN TAHUN 2018	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	SKPD
			Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	60 orang (Diklat-pim II 2 orang, Diklatpim III 13 orang, Diklatpim 45 orang)	2.000.000.000	BKD
			Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	436 Orang CPNS	1.000.000.000	BKD
			Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	25 Orang	125.000.000	BKD
			Penataan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Assesment 2 orang Eselon 2 orang, 40 orang eselon III, 425 eselon IV	800.000.000	BKD
		c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemerintahan	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	80 Lokasi	538.000.000	Inspektorat
			Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Penyelenggaraan siaran radio 19 jam siar/hari dan tv 9 jam siar/ hari	2.759.800.000	Bagian Humas Setda/Ratih TV

NO.	AGENDA	PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN	KEGIATAN TAHUN 2018	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	SKPD
			Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kegiatan kemitraan dengan pers, publikasi dokumen daerah melalui media, terbitnya majalah pemkab, pembuatan baliho, terselenggaranya pameran, pembuatan spanduk, Pembuatan cetakan, Pembuatan profil Kabupaten, Pencetakan kalender, pencetakan leaflet, Pencetakan directmail, dokumentasi foto, iklan layanan masyarakat, spot iklan layanan masyarakat Cetak kaos kebumen keren, Branding Kebumen Promosi di lokasi strategis.	1.194.000.000	Bagian Humas Setda

Sumber: Draft Renja SKPD Tahun 2018 Hasil Entry SIMPER

Rencana program prioritas pembangunan daerah tahun 2018 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan dan program pendukung operasional.

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

   Rencana program yang akan dilaksanakan adalahsebagai berikut:

   a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
   b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
   c. Program Peningkatan Pendidikan Non Formal
   d. Program Pendidikan Khusus
   e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
   f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

2. Kesehatan

   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

   a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
   b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
   c. Program Pengawasan Obat dan Makanan
   d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
   e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
   f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
   g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
   h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
   i. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
   j. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
   k. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
   l. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
   m. Program BLUD

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

   a. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
   b. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
   c. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
   d. Program pembangunan turap/talud/bronjong
   e. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
   f. Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
   g. Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan
   h. Program tanggap darurat jalan dan jembatan
   i. Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
   j. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
   k. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

l. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
m. Program pembangunan infrastruktur perdesaan
n. Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Cipta Karya
o. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya
p. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
q. Program Pengendalian Banjir
r. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
   a. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
   b. Program Pengembangan Perumahan
   c. Program pengelolaan areal pemakaman
   d. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
   a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
   b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
   c. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
   d. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
   e. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
   f. Program Pendidikan Politik Masyarakat
   g. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tidak Kriminal
6. Sosial
   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
   a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
   b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
   c. Program Pembinaan Para Penyandang Penyakit dan Trauma
   d. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
   e. Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
   f. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
1. Tenaga Kerja
   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
   a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
   b. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
   c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
   a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
   b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
   c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
   d. Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
3. Pangan
   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)
4. Pertanahan
   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
5. Lingkungan Hidup
   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
   a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
   b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
   c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
   d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
   e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
   f. Program peningkatan pengendalian polusi
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
   a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
   b. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
   c. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
   d. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
   e. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
   a. Program Keluarga Berencana
   b. Program pelayanan kontrasepsi
   c. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
   d. Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
9. Perhubungan
   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
c. Program peningkatan pelayanan angkutan
d. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
b. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
c. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
d. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif
b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

12. Penanaman Modal

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
b. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
c. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
d. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

14. Statistik

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

15. Persandian

Tidak ada program yang mendukung

16. Kebudayaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

17. Perpustakaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

18. Kearsipan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
b. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

   a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
   b. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
   c. Program pengembangan budidaya perikanan
   d. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
   e. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan

2. Pariwisata

   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

   a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
   b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
   c. Program Pengembangan Kemitraan

3. Pertanian

   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

   a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
   b. Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
   c. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
   d. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
   e. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
   f. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
   g. Program peningkatan produksi hasil peternakan
   h. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

4. Kehutanan

   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

   a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
   b. Program rehabilitasi hutan dan lahan
   c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

5. Energi dan Sumberdaya Mineral

   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

6. Perdagangan

   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

   a. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
   b. Program peningkatan dan pengembangan ekspor
   c. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
   d. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

7. Perindustrian

   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

   a. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi

b. Program pengembangan industri kecil dan menengah
c. Program penataan struktur industri

8. Transmigrasi
   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
1. Perencanaan
   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
   a. Program pengembangan data/informasi
   b. Program Kerjasama Pembangunan
   c. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
   d. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
   e. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
   f. Program perencanaan pembangunan daerah
   g. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
   h. Program Perencanaan Sosial Budaya
   i. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
2. Keuangan
   Rencana program yang akan dilaksanakan antara lain:
   a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
   b. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
   Rencana program yang akan dilaksanakan antara lain:
   a. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
   b. Program Pendidikan Kedinasan
   c. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
   d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
4. Penelitian dan Pengembangan
5. Fungsi Lainnya
   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
   a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
   b. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
   c. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
   d. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
   e. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
   f. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
   g. Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah

h. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan

Selain program yang tercakup dalam klasifikasi urusan kewenangan pemerintah daerah di atas, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan SKPD, direncanakan juga program yang bersifat pendukung operasional SKPD sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   Kegiatan yang dilaksanakan difokuskan pada: penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu tercapainya pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, rapat koordinasi dan konsultasi.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   Kegiatan yang dilaksanakan difokuskan pada: pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, serta peningkatan sarana dan prasarana kantor. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu terlaksananya pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, peralatan kantor dan rumah tangga.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
   Kegiatan yang dilaksanakan difokuskan pada: laporan kinerja SKPD. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu tersedianya Capaian Laporan Kinerja SKPD.

Rencana program prioritas daerah tahun 2018 yang dituangkan dalam bab ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Sesuai edaran Pemerintah Pusat yang menyatakan bahwa urusan dan kewenangan Pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mulai berlaku pada bulan Oktober 2016, maka rencana program prioritas daerah tahun 2018 disusun berdasarkan Bidang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, baik Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

Uraian rencana program yang disajikan dalam dokumen ini adalah bersifat menyeluruh, yaitu memuat rencana program yang akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen. Rencana program yang diusulkan pendanaannya melalui sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten telah dilaksanakan melalui serangkaian mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan, berdasarkan hasil verifikasi dan kesepakatan atas berbagai usulan prioritas program tahun 2018, dan melalui pendekatan perencanaan yang komprehensif meliputi pendekatan partisipatif, teknokratis, politik, atas bawah (*top down*) dan bawah atas (*bottom up*).

Status kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan Pagu Indikatif ini masih bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan proses perencanaan, kondisi pembangunan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Matriks rencana program pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 disajikan secara terperinci dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini, sedangkan rekapitulasi asumsi anggaran belanja langsung tahun 2018 menurut urusan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.2
Rekapitulasi Asumsi Belanja Langsung Tahun 2018
Menurut Urusan Pemerintah Daerah

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
	1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar	**81**	**239**	**693.899.834.981**	**68,01%**
1	Kesehatan	18	46	324.522.272.000	31,81%
2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22	52	292.008.710.181	28,62%
3	Pendidikan	9	53	49.971.374.800	4,90%
4	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14	52	12.756.792.000	1,25%
5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8	12	8.564.808.000	0,84%
6	Sosial	10	25	6.075.878.000	0,60%
	2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	**71**	**225**	**111.575.136.000**	**10,94%**
1	Lingkungan Hidup	9	26	29.154.000.000	2,86%
2	Perhubungan	5	26	26.695.900.000	2,62%
3	Komunikasi dan Informatika	4	12	12.003.600.000	1,18%
4	Tenaga Kerja	3	17	9.725.000.000	0,95%
5	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12	37	7.819.334.000	0,77%
6	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6	10	5.017.510.000	0,49%

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
7	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1	11	4.784.271.000	0,47%
8	Pangan	1	13	4.375.285.000	0,43%
9	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5	20	3.775.119.000	0,37%
10	Kepemudaan dan Olah Raga	8	17	3.222.178.000	0,32%
11	Kebudayaan	2	3	1.415.000.000	0,14%
12	Statistik	3	8	1.380.439.000	0,14%
13	Penanaman Modal	1	7	910.500.000	0,09%
14	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	10	731.500.000	0,07%
15	Kearsipan	5	8	565.500.000	0,06%
	3. Urusan Pilihan	**27**	**83**	**72.434.011.000**	**7,10%**
1	Perdagangan	4	17	23.232.720.000	2,28%
2	Pertanian	8	28	20.705.350.000	2,03%
3	Pariwisata	3	13	14.922.000.000	1,46%
4	Kelautan dan Perikanan	5	13	11.028.191.000	1,08%
5	Perindustrian	5	10	2.225.750.000	0,22%
6	Transmigrasi	1	1	250.000.000	0,02%
7	Energi dan Sumberdaya Mineral	1	1	70.000.000	0,01%
	4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	**35**	**122**	**44.110.143.000**	**4,32%**
1	Fungsi Lainnya	9	31	14.481.456.000	1,42%
2	Keuangan	6	27	12.092.714.000	1,19%
3	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	4	28	9.675.500.000	0,95%
4	Perencanaan Pembangunan	14	34	7.695.473.000	0,75%
5	Penelitian dan Pengembangan	2	2	165.000.000	0,02%
	5. Program Pendukung Operasional SKPD	**12**	**90**	**98.261.054.700**	**9,63%**
1	Program Pendukung Operasional SKPD	12	90	98.261.054.700	9,63%
	JUMLAH TOTAL	**226**	**759**	**1.020.280.179.681**	**100,00%**

Sumber : Simper (data diolah)

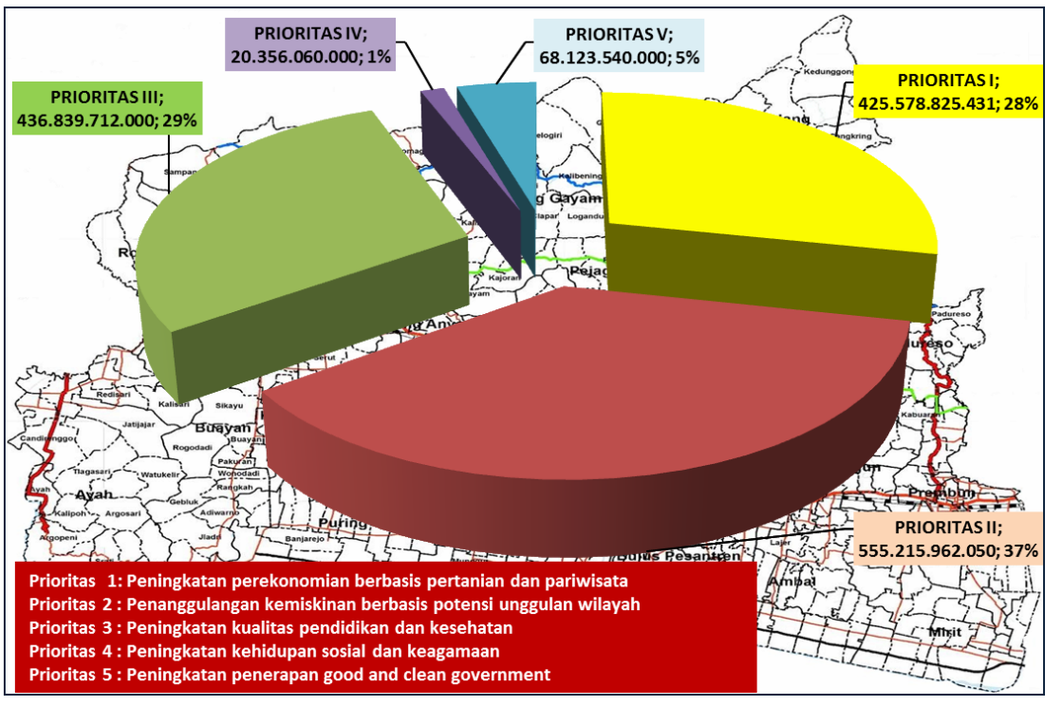

Gambar 5.1
Rekapitulasi Belanja Menurut Prioritas Pembangunan

Sumber : Simper (data diolah)

BAB VI
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 difokuskan pada upaya pencapaian arah, tujuan, dan sasaran tahapan tahunan ketiga dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018. Rencana Kerja Pemerintah Daerah harus dipakai sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah khususnya Perangkat Daerah maupun masyarakat dan dunia usaha, dalam pelaksanaan pembangunan daerah sehingga sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat dijaga.

A. Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pembangunan daerah tahun 2018 mempunyai posisi yang strategis dalam pencapaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Pembangunan Tahun 2018, merupakan tahun ketiga pelaksanaan tahapan lima tahunan ke-3 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025;
2. Seluruh Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan Pembangunan di Kabupaten Kebumen berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian target dan sasaran program-program yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 secara sinergis dan terintegrasi;
3. Pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2018 diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yaitu "*Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pertanian bagi Kesejahteraan Masyarakat*". Program dan kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah diarahkan pada pencapaian tema tersebut. Untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 merupakan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2018, hasil kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;

5. Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2018. Hal ini dalam rangka sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Kabupaten dan Provinsi), Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, serta sumber-sumber lainnya yang sah. Proses ini mengedepankan penyaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha melalui forum-forum Perangkat Daerah, konsultasi publik, dengar pendapat publik (*public hearing*) atau forum lintas pelaku sesuai kebutuhan Perangkat Daerah masing-masing;
6. Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga merupakan bahan masukan yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif);
7. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan perencanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pada akhir Tahun Anggaran 2018, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan peraturan-peraturan lainnya.
9. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam hal:
    a. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah difasilitasi melalui Forum Perangkat Daerah serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan melalui beberapa tahap, yakni dari di tingkat Desa dan Kecamatan, sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas dapat terakomodasi secara baik;
    b. Pelaksanaan program-program berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan.

B. Penutup

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018, seluruh jajaran pemerintah daerah hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua program, baik dalam "kerangka regulasi" maupun dalam "kerangka anggaran" (*budget intervention*), harus memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, antar satu instansi maupun antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/ tanggungjawab/ tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari seluruh elemen pemerintah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan daerah sangat diperlukan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

BUPATI KEBUMEN,

MOHAMMAD YAHYA FUAD